

DRAFT

LAPORAN HASIL PEMETAAN INDEKS DAYA SAING DAERAH (IDSD) SE-INDONESIA



2019



**DIREKTORAT SISTEM INOVASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

PRAKATA

Kemenristekdikti melalui Direktorat Sistem Inovasi, Ditjen Penguatan Inovasi telah menginisiasi penyusunan model pengukuran indeks daya saing daerah (IDSD) yang diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional. Pengukuran IDSD diharapkan menjadi salah satu dasar utama penyusunan dan penetapan kebijakan nasional maupun daerah yang mendorong sinergi program antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan daerah yang inovatif.

Kegiatan Pemetaan IDSD di Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia ini ditahun 2019, dimulai dari penyusunan panduan, workshop sosialisasi, pengisian instrument, verifikasi isian, masa sanggah, dan penilaian. IDSD yang disusun melalui aplikasi ini akan selalu berubah menyesuaikan data terbaru. Tentu saja basis data ini masih banyak kekurangannya, sehingga kami berharap adanya masukan demi perbaikan kedepannya.

Memperhatikan betapa pentingnya daya saing, maka daya saing tersebut menjadi tiga prioritas penting dari sembilan visi, misi, dan program aksi Presiden Joko Widodo yang dikenal dengan sebutan Nawacita. Tiga prioritas yang terkait dengan daya saing adalah (1) meningkatkan kualitas hidup manusia; (2) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan (3) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam kajian ini, terutama kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota yang telah melakukan pemetaan IDSD sehingga kajian ini bisa terlaksana. Kami berharap agar kajian ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan pihak-pihak yang terkait dalam upaya peningkatan daya saing dan penerapan inovasi dalam pembangunan daerah.

Jakarta, Desember 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Prakata

Daftar Gambar

Daftar Tabel

Bab 1. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Identifikasi Masalah
- 1.3. Tujuan, Sasaran Dan Kegunaan
- 1.4. Metode Pendekatan

Bab 2. Tinjauan Pustaka

- 2.1. Landasan Teori
 - 2.1.1. Penelitian Yang Telah Dilakukan
 - 2.1.2. Pengertian Dan Konsep
 - 2.1.3. Faktor Pembentuk Daya Saing Daerah
 - 2.1.4. Faktor Penguat Daya Saing Daerah
- 2.2. Landasan Hukum
- 2.3. Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis
 - 2.3.1. Landasan Filosofis
 - 2.3.2. Landasan Sosiologis
 - 2.3.4. Landasan Yuridis

Bab 3. Metodologi

- 3.1. Pelaksanaan Idsd
 - 3.1.1. Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah
 - 3.1.2. Identifikasi Dan Klasifikasi Variabel
 - 3.1.3. Sumber Dan Metode Pemetaan Data
 - 3.1.4. Kepesertaan
 - 3.1.5. Pelaksanaan
- 3.2. Metode Analisis

Bab 4. Pembahasan Dan Hasil

- 4.1. Sebaran Geografis
- 4.2. Sebaran Geografis Terhadap Empat Kondisi (Aspek, Pilar, Dimensi, Indikator)
- 4.3. Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Daya Saing Daerah
- 4.4. Strategi Kebijakan Peningkatan Daya Saing

Bab 5. Penutup

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Saran Dan Rekomendasi

Daftar Bacaan

Lampiran

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Alur Proses Penghitungan Indeks Daya Saing Daerah

Gambar 3.2. Kerangka penyusunan komponen Indeks Daya Saing Daerah/IDSD

Gambar 4.1. Sebaran Wilayah Pemetaan Indeks Daya Saing Daerah di Indonesia. : (a) untuk wilayah Provinsi (b) untuk wilayah Kabupaten dan Kota

Gambar 4.2. Pemetaan Indeks Daya Saing Daerah di Indonesia berdasarkan kategori : (a) Pemerintah Provinsi (b) Pemerintah Kabupaten dan (c) Pemerintah Kota

Gambar 4.3. Skor Indeks dari 25 pemerintah provinsi

Gambar 4.4. Perbandingan Indeks dari 4 (empat) Aspek dari 25 pemerintah provinsi

Gambar 4.5. Skor Indeks dilihat dari 30 nilai SKOR/INDEKS IDSD tertinggi DARI PEMETAAN IDSD TINGKAT kabupaten

Gambar 4.6. Perbandingan Indeks dari 4 (empat) Aspek dilihat dari 30 nilai SKOR/INDEKS IDSD tertinggi DARI PEMETAAN IDSD TINGKAT kabupaten

Gambar 4.7. Skor Indeks dari 34 pemerintah kota

Gambar 4.8. Perbandingan Indeks dari 4 (empat) Aspek dari 34 pemerintah kota

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peringkat Indonesia dalam Global Competitiveness Index (GCI)

Tabel 2.2. Peringkat Indonesia dalam The World Competitiveness Yearbook

Tabel 3.1. Rekapitulasi Komponen IDSD

Tabel 3.2. Pembobotan Indikator

Tabel 4.1. Indeks dari 4 (empat) Aspek dan Indeks Daya dari 25 pemerintah provinsi

Tabel 4.2. Indeks dari 4 (empat) Aspek dan Indeks Daya dari 127 pemerintah kabupaten

Tabel 4.3. Indeks dari 4 (empat) Aspek dan Indeks Daya dari 34 pemerintah kota

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pengembangan wilayah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan suatu pembangunan yang berkelanjutan. Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep kota berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu kota, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Suatu daerah akan memiliki reaksi yang berbeda dalam menyikapi dampak dari adanya fenomena globalisasi ini, hal tersebut akan sangat menentukan posisi tawar masing-masing daerah dalam kancah persaingan global yang semakin ketat. Keadaan tersebut selanjutnya harus diartikan sebagai tuntutan bagi setiap daerah di Indonesia untuk meningkatkan daya saing masing-masing daerah, dimana tingginya daya saing antar daerah di Indonesia secara keseluruhan merupakan penentu bagi peningkatan daya saing nasional ditengah tingginya tuntutan untuk dapat bersaing secara global.

Posisi daya saing global Indonesia yang terus menurun menjadi tantangan besar bagi Indonesia di masa mendatang untuk bangkit dan mampu berperan strategis dipercaturan ekonomi internasional. Persoalan lain, di level domestik, masih cukup besar kesenjangan daya saing dan inovasi antardaerah kabupaten/kota yang satu dengan lainnya. Untuk itu, perlu langkah strategis mendorong produktivitas, reformasi birokrasi dan penguatan inovasi yang berawal dari daerah (*supply push*). Dengan demikian kita berharap dapat meningkatkan daya saing kita secara nasional.

Selain itu, Indonesia juga masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan besar di era informasi dan globalisasi saat ini. Berbagai indikator menunjukkan bahwa daya saing Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain dalam percaturan ekonomi dunia yang sudah mengarah ke era informasi dan globalisasi. Hal ini bisa dilihat dari indikator *Global Competitiveness Index*, *ICT Development Index*, *E-Readiness*, *Network Readiness Index*, dan *Human Development Index* yang merupakan indikator yang sering digunakan untuk mengukur sejauh mana posisi sebuah negara dalam persaingan global.

Menurut Laporan GCI Tahun 2019 yang dirilis World Economic Forum (WEF) menempatkan Indonesia berada pada **peringkat 50**, turun 5 peringkat dari tahun 2018 Peringkat ini juga masih dibawah negara-negara kawasan seperti Singapura, Malaysia dan Thailand

Sesungguhnya, berbagai upaya perbaikan dan reformasi yang telah dilakukan Indonesia untuk memperbaiki iklim berusaha dan menata sistem ekonom dan industrinya, namun berbagai upaya tersebut belum cukup menaikkan peringkat daya saing Indonesia di dunia.

Dari **Laporan Indeks Daya Saing Global** yang dirilis tahun 2019, Indonesia menempati **urutan 85**, Masih terendah diantara negara-negara kawasan seperti Singapura (8), Malaysia (35), Thailand (43), Vietnam (63), Phillipines (54)

Beberapa faktor yang membuat daya saing Indonesia terkoreksi tajam antara lain korupsi, inefisiensi birokrasi pemerintah, infrastruktur terbatas, akses ke pendanaan, inflasi, ketidakstabilan kebijakan, buruknya etos kerja buruh, tingkat pajak, tenaga kerja pintar terbatas, kebijakan pajak, regulasi valas, buruknya kesehatan publik, kejahatan dan pencurian, inovasi terbatas dan peraturan buruh yang ketat.

Analogi pentingnya pengukuran indeks ini dengan pengukuran suhu tubuh saat manusia sakit. "Kita harus tahu dulu berapa derajat celcius suhu tubuh kita untuk tahu treatment apa yang akan dilakukan terhadap tubuh kita yang sakit ini." (Tri Widodo, 2016). Oleh karenanya, pentingnya validitas dan reliabilitas pengukuran indeks agar hasilnya benar-benar menggambarkan kondisi yang akan diukur

sehingga memberikan informasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam membangun inovasi di daerahnya. Hal yang tak kalah penting adalah tentang keberlanjutannya, bahwa indeks ini harus secara berkelanjutan terus diperbaiki dan dilaksanakan dari tahun ke tahun. Untuk itu, Indeks tetap penting karena tanpa adanya indeks, kita tidak tahu bagaimana merespon suatu peristiwa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, banyaknya pengukuran indeks di berbagai aspek dapat menjadi early warning system yang berfungsi sebagai pemberi sinyal-sinyal tentang kondisi objektif yang sedang dihadapi dan hasilnya akan menjadi input untuk memperbaiki kondisi tersebut.

Kemenristekdikti mencoba menginisiasi penyusunan model indeks daya saing daerah yang lebih holistik sebagai hasil penyesuaian dan pengembangan model indeks yang dikeluarkan oleh kementerian dan lembaga yang berkompeten, misalnya: Indeks Inovasi Daerah dari Lembaga Administrasi Negara (LAN); Indeks Inovasi Daerah berdasarkan Perber Menristek dan Mendagri; Indeks Government Award dari Kementerian Dalam Negeri; dan Indeks Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyusunan komponen utama atau pilarnya juga mengadopsi sebagian dari konsep Global Competitiveness Index - World Economic Forum (GCI-WEF) dan Global Innovation Index (GII - Johnson Cornell University, WIPO dan Insead), yang telah disesuaikan dengan kondisi lokal (local content) daerah di Indonesia. Tujuan penyatuan dan penyesuaian komponen utama (pilar), indikator dan atribut dalam satu indeks daya saing daerah agar terjadi penyamaan visi dan persepsi antar-kementerian dan lembaga dalam menyusun kebijakan nasional yang komprehensif dan saling bersinergi. Disisi lain, indeks daya saing daerah diharapkan nantinya dapat sebagai perangkat untuk mengevaluasi indeks daya saing nasional yang dikeluarkan GCI-WEF dan penajaman strategi inovasi peningkatan sumber daya manusia dan teknologi secara berkelanjutan.

Mekanisme pembahasan pilar, indikator dan atribut indeks akan melibatkan semua stakeholders agar tercipta sinergitas antar kementerian dan lembaga dalam melakukan penyusunan materi, pengukuran, pembinaan, evaluasi dan pengendalian. Untuk itu, diperlukan dasar kebijakan yang mengatur berbagai aspek berkenaan dengan penyusunan indeks daya saing di daerah yang lebih holistik dan didukung oleh program aplikasi sistem informasi serta database berbasis online.

Inisiatif penyusunan regulasi tentang model pengukuran indeks daya saing daerah tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2016 dengan menghasilkan Naskah Urgensi dan Draft Rancangan Perpres tentang Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah. Komponen dan model perhitungan telah tersusun melalui serangkaian studiliteratur, diskusi dan observasi namun dirasa belum optimal karena memerlukan konfirmasi dan uji pada tataran lebih luas.

Mengingat betapa pentingnya daya saing, maka daya saing tersebut menjadi tiga prioritas penting dari sembilan visi, misi, dan program aksi Presiden Joko Widodo yang dikenal dengan sebutan Nawacita. Tiga prioritas yang terkait dengan daya saing adalah (1) meningkatkan kualitas hidup manusia; (2) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan (3) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Berkenaan dengan uraian diatas maka penting untuk melakukan kegiatan lanjutan kajian tentang model pengukuran indeks daya saing daerah ini sebagaimana rekomendasi dari kegiatan tahun yang lalu.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Diperlukan pengukuran indeks daya saing di daerah sebagai alat ukur (komposit) dalam melakukan *assesment* dan *benchmarking* kemajuan daerah. Alat ukur ini merupakan komponen agregat dalam menyusun indeks daya saing nasional;
2. Kementerian dan Lembaga belum satu visi dan persepsi dalam merumuskan pilar, indikator dan atribut penyusunan dan pengukuran indeks daya saing di daerah; dan

3. Belum tersedianya *database* yang berfungsi sebagai bank data untuk mendukung kepentingan penyusunan berbagai indeks yang dibutuhkan oleh kementerian dan lembaga terkait.

1.3. TUJUAN, SASARAN DAN KEGUNAAN

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) memiliki asas: kebebasan akademik, partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, manfaat serta keberlanjutan. Dengan tujuan dari pengukuran Indeks Daya Saing daerah, antara lain adalah :

1. Mengukur pencapaian seluruh aktivitas di daerah dalam memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dengan mengoptimalkan ekosisten, potensi dan berbagai hasil iptek dan inovasi untuk menciptakan daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan
2. Menjadi pendorong kepada seluruh stakeholder terutama para pelaku inovasi (seluruh lembaga, daerah, dunia usaha dan masyarakat) agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur inovasi dalam rangka meningkatkan tingkat daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.
3. Sebagai upaya untuk mendukung kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia;
4. Menjadikan dasar dalam perumusan, penetapan, evaluasi dan monitoring kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.
5. Menjadi alat dalam proses harmonisasi berbagai kebijakan dan program pembangunan baik pada level nasional dan daerah

1.4. METODE PENDEKATAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan model pengukuran indeks daya saing di daerah adalah studi literatur, public hearing, Focussed Group Discussion, expert judgment, statistical analysis dan benchmarking terhadap model-model pengukuran indeks beserta komponen dan indikatornya. Disamping itu, agar model yang dihasilkan memiliki tingkat validitas yang tinggi, maka dilakukan validasi dan uji terap di beberapa daerah terpilih.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. LANDASAN TEORI

1. Penelitian yang Telah Dilakukan

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh institusi baik nasional maupun internasional untuk mengetahui daya saing daerah atau negara, di antaranya:

- a) Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia bekerja sama dengan Laboratorium Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pengkajian Ekonomi (LP3E) Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran (2007). Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran profil dan pemetaan daya saing ekonomi daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2005. Potret profil daya saing daerah menunjukkan posisi relatif suatu daerah terhadap daerah lainnya dengan memperhatikan semua faktor-faktor pembentuk daya saing yang dimilikinya serta seberapa jauh daerah tersebut dapat merealisasikan potensi dari faktor-faktor tersebut. Sedangkan pemetaan daya saing daerah dibagi ke dalam tiga pemetaan utama, yaitu:
- Pemetaan daya saing daerah secara keseluruhan,
 - Pemetaan daya saing daerah berdasarkan indikator input, dan
 - Pemetaan daya saing daerah berdasarkan output.

Semua hasil pemetaan disajikan dalam bentuk persentile peringkat daya saing daerah. Hasil utama dari penelitian tersebut adalah peringkat daya saing daerah dan neraca daya saing daerah untuk setiap kabupaten/kota di Indonesia. Hasil pemetaan daya saing daerah secara keseluruhan menempatkan 5 peringkat teratas daya saing daerah, yaitu Kota Bontang (Kalimantan Timur), Kab. Mimika (Papua), Kab. Kutai Timur (Kalimantan Timur), Kota Kediri (Jawa Timur) dan Kab. Siak (Riau).

- b) World Economic Forum (WEF) setiap tahunnya mempublikasikan Global Competitiveness Report yang menggambarkan secara menyeluruh kinerja ekonomi negara-negara di dunia. Selain itu WEF juga menyusun Global Competitiveness Index (GCI) sebagai tolok ukur kinerja makroekonomi dan mikroekonomi daya saing suatu negara. Global Competitiveness Index memberikan penjelasan secara menyeluruh tentang faktor-faktor yang dianggap penting dalam mendorong produktivitas dan daya saing negara. Faktor-faktor tersebut tidak dapat berdiri sendiri membentuk daya saing negara tetapi memiliki keterkaitan dan memperkuat satu dengan yang lainnya. Kelemahan satu faktor akan berdampak negatif terhadap faktor lainnya. Misalnya kekuatan kemampuan berinovasi akan sulit dicapai tanpa adanya faktor kesehatan dan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang baik akan menyerap teknologi yang mutakhir. Meskipun faktor-faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang membentuk indeks daya saing negara, namun GCI tetap memberikan penilaian secara detail masing-masing faktor tersebut agar negara dapat mengetahui faktor mana yang masih perlu dikembangkan.
- c) Institute for Management Development (IMD) setiap tahunnya juga menerbitkan The World Competitiveness Yearbook yang menyajikan hasil pemeringkatan dan analisa atas kemampuan negara dalam menciptakan dan menjaga kemampuan daya saingnya. Penyusunan ranking dimulai dengan penghitungan standar nilai untuk setiap masing-masing kriteria seluruh negara. dengan menggunakan data-data yang tersedia baik data kuantitatif maupun data kualitatif. Kemudian dibuat ranking negara berdasarkan agregasi kriteria yang terpilih. Kriteria yang tidak digunakan sebagai dasar penyusunan ranking, dijadikan sebagai informasi yang dapat menguatkan penilaian ranking. Pemeringkatan tidak hanya dibuat untuk peringkat negara, tetapi juga peringkat masing-

masing kriteria. Misalnya, kriteria Produk Domestik Bruto, negara yang memiliki standar nilai tertinggi akan berada pada ranking pertama, sedangkan yang memiliki standar rendah berada pada ranking terbawah.

- d) European Commission mempublikasikan European Competitiveness Index (2013) tentang pemeringkatan daya saing yang mengukur, membandingkan dan meneliti daya saing bukan saja hanya antar negara, tetapi juga antar daerah di negara-negara Uni Eropa. Pemeringkatan didasarkan pada sebelas pilar yang menggambarkan faktor input dan output dari daya saing teritorial yang diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok utama pembentuk daya saing, yaitu: (1) Dasar; (2) Efisiensi; dan (3) Inovasi. Indikator-indikator yang digunakan untuk menyusun RCI dipilih dari Eurostat yang bersumber dari World Economic Forum, OECD-PISA and Regpat, the European Cluster Observatory, the World Bank Ease and Doing Business Index and Governance Indicator. Terdapat 73 indikator dari 80 indikator yang terpilih dari hasil uji statistik dengan menggunakan analisis multivariat. Kemudian skor dihitung dari masing-masing pilar berdasarkan rata-rata sederhana dari z-score standar dan atau/ indikator yang ditransformasi. Sedangkan subindeks (3 kelompok utama, yaitu dasar, efisiensi dan inovasi) dihitung berdasarkan rata-rata aritmatika dari skor pilarnya. Keseluruhan skor RCI dihitung dari agregasi tertimbang ketiga sub indeks tersebut berdasarkan pendekatan WEF-GCI.
- e) Analisis Daya Saing dan Strategi Pembangunan untuk 33 Provinsi Indonesia (Asia Competitiveness Institute), Pengukuran Indeks Daya Saing dan Strategi Pembangunan untuk 33 Provinsi Indonesia ini, dilakukan oleh Asia Competitiveness Institute di Lee Kuan Yee School of Public Policy, National University of Singapore. Kegiatan ini dilakukan selama 2 tahun dan dipublikasi pada tahun 2013 pada World Scientific Publishing. Metodologi yang digunakan ACI (Asia Competitiveness Index) untuk menyusun kerangka dan indikator penyusunan daya saing provinsi-provinsi di Indonesia tidak hanya sekedar membuat peringkat, tetapi juga melakukan simulasi kebijakan tentang bagaimana setiap provinsi dapat meningkatkan daya saingnya. Peringkat daya saing provinsi juga dipetakan pada peta Indonesia untuk mengidentifikasi beberapa tren secara geografis dan kesimpulan-kesimpulan regional. Berbagai indikator dan sublingkup kunci juga ditinjau lebih detail karena peran pentingnya dalam menentukan daya saing provinsi-provinsi di Indonesia. Pada dasarnya, cakupan daya saing ACI yang multidimensi ini memungkinkan hasil penelitian digunakan oleh pihak lain untuk menganalisis sektor-sektor yang lebih spesifik. Lebih lanjut, pendekatan pembangunan ekonomi regional seperti analisis provinsi-provinsi yang terletak dalam satu klaster juga disarankan untuk menghasilkan usulan-usulan kebijakan yang lebih strategis. Dari perspektif metodologi, ACI mendefinisikan daya saing sebagai dengan pendekatan yang komprehensif, memperhitungkan berbagai faktor yang besamasama membentuk kemampuan dari provinsi untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi dan inklusif, dalam periode waktu yang panjang.

2. Pengertian dan Konsep

Desentralisasi yang dilaksanakan di Indonesia merupakan upaya untuk meningkatkan geliat pertumbuhan ekonomi di daerah. Kondisi ini membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakatnya melalui inovasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta menciptakan tata kelola ekonomi ke arah yang lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi. Pembentukan daya saing tentu tidak hanya mencakup upaya untuk memperkuat sinergi berbagai sektor pembangunan daerah, tetapi juga mencakup penyempurnaan secara struktural dalam

sistem pembangunan daerah agar pembangunan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara lebih efektif dan efisien.

Daya saing daerah menurut Bank Indonesia didefinisikan sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Konsep dan definisi daya saing daerah yang dikembangkan dalam penelitian tersebut didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu: perkembangan perekonomian daerah ditinjau dari aspek ekonomi regional dan perkembangan konsep dan definisi daya saing daerah dari penelitian-penelitian terdahulu.

World Economic Forum (WEF) mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Institute for Management Development (IMD) mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan nasional dengan cara mengelola aset dan proses, daya tarik dan agresivitas, globality dan proximity, serta model ekonomi dan sosial.

European Commission mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar internasional, diiringi dengan kemampuan mempertahankan pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, lebih umumnya adalah kemampuan (regions) untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi sementara terekspos pada daya saing eksternal.

Konsep daya saing umumnya dikaitkan dengan konsep comparative advantage, yakni dimilikinya unsur-unsur penunjang proses produksi yang memungkinkan satu negara menarik investor untuk melakukan investasi ke negaranya, tidak ke negara yang lain. Konotasi advantage di sini adalah situasi yang memungkinkan pemodal menuai keuntungan semaksimal mungkin. Misalnya dengan menyediakan lahan murah, upah buruh murah, dan suplai bahan mentah produksi yang terjamin kontinuitasnya dengan harga yang lebih murah daripada harga yang ditawarkan oleh negara lain. Artinya, kekuatan modal dan keunggulan teknologi menjadi kunci penentu peningkatan daya saing (penjualan produk) satu negara.

Martin dan Tyler (2003)¹ menyebutkan argumen mengapa daerah maupun negara saling berkompetisi:

- untuk investasi, melalui kemampuan daerah untuk menarik masuknya modal asing, swasta dan modal publik;
- untuk tenaga kerja, dengan kemampuan untuk menarik masuknya tenaga kerja yang terampil, entrepreneur dan tenaga kerja yang kreatif, dengan cara menyediakan lingkungan yang kondusif dan pasar tenaga kerja domestik;
- untuk teknologi, melalui kemampuan daerah untuk menarik aktivitas inovasi dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari konsep dan definisi mengenai daya saing di atas, dapat dimaknai bahwa daya saing daerah dihasilkan oleh interaksi yang kompleks antara faktor input, output dan outcome yang ada di daerah masing-masing, dengan faktor input sebagai faktor utama pembentuk daya saing daerah yaitu kemampuan daerah, yang selanjutnya akan menentukan kinerja output yang merupakan inti dari kinerja perekonomian. Inti dari kinerja perekonomian adalah upaya meningkatkan daya saing dari suatu perekonomian yaitu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang berada di dalam perekonomian

¹ Martin, R., Kitson, M., & Tyler, P. (Eds.). (2003). Regional competitiveness. Routledge.

tersebut. Ukuran kesejahteraan memiliki makna yang sangat luas, indikatornya dapat berupa produktivitas tenaga kerja, PDRB per kapita atau tingkat kesempatan kerja.

DAYA SAING DAERAH

Sebuah negara atau sebuah region (Kabupaten/Provinsi) disebut kompetitif jika mengembangkan perusahaan beroperasi untuk berkompetisi dengan penuh keberhasilan dalam perekonomian global dan pada sisi lain mendukung peningkatan upah dan standar kehidupan pada penduduk secara umum. Daya saing tergantung pada produktivitas jangka panjang dimana bangsa atau region memberdayakan sumber daya manusia, modal dan sumber daya alamnya. Produktivitas diukur dari peningkatan upah berkesinambungan (*sustainable wages*), pertumbuhan kesempatan kerja (*job growth*), dan standar hidup (*standar of living*). Daya saing mengandung makna seberapa produktifnya industri sebuah region berkompetisi dalam industri sejenis. Region berkompetisi dalam hal menawarkan sebuah lingkungan yang lebih produktif untuk dunia usaha.

Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu negara dalam peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Daya saing diidentifikasi dengan masalah produktivitas, yakni dengan melihat tingkat output yang dihasilkan untuk setiap input yang digunakan. Meningkatnya produktivitas ini disebabkan oleh peningkatan jumlah input fisik modal dan tenaga kerja, peningkatan kualitas input yang digunakan dan peningkatan teknologi (Porter, 1990 dalam Abdullah, 2002)².

Pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur daya saing dilihat dari beberapa indikator yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, ada juga keunggulan absolut. Menurut Tarigan (2005:75)³. Keunggulan komparatif adalah suatu kegiatan ekonomi yang menurut perbandingan lebih menguntungkan bagi pengembangan daerah. Lebih lanjut menurut Tarigan (2005:75) istilah *comparative advantage* (keunggulan komparatif) mula-mula dikemukakan oleh David Ricardo (1917). Dalam teori tersebut, Ricardo membuktikan bahwa apabila ada dua negara saling berdagang dan masing-masing negara mengkonsentrasikan diri untuk mengekspor barang yang bagi negara tersebut memiliki keunggulan yang komparatif maka kedua negara tersebut akan beruntung. Ternyata ide tersebut bukan saja bermanfaat dalam perdagangan internasional tetapi juga sangat penting di perhatikan dalam ekonomi regional.

Keunggulan kompetitif adalah suatu keunggulan yang dapat diciptakan dan dikembangkan. Ini merupakan ukuran daya saing suatu aktifitas kemampuan suatu negara atau suatu daerah untuk memasarkan produknya di luar daerah atau luar negeri. Maka dari itu, menurut Tarigan (2005:75) seorang perencana wilayah harus memiliki kemampuan untuk menganalisa potensi ekonomi wilayahnya. Dalam hal ini kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan/kelemahan di wilayahnya menjadi semakin penting. Sektor ini memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang.

Pengertian daya saing mulai berkembang setelah Porter (1990) mendefinisikan daya saing nasional: "luaran dari kemampuan suatu Negara untuk berinovasi dalam rangka mencapai, atau mempertahankan posisi yang menguntungkan dibandingkan dengan Negara lain dalam sejumlah sector-sektor kuncinya.". Secara eksplisit, Porter (1990) menyatakan bahwa konsep daya saing yang diterapkan pada level nasional tak lain adalah "produktivitas" yang didefinisikannya sebagai nilai output yang dihasilkan oleh tenaga kerja.

² Abdullah, Petter. *Daya Saing Daerah Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE, 2002

³ Tarigan, S. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Bumi Aksara.

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI (PPSK BI) menggunakan definisi "daya saing daerah dalam penelitiannya sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan Internasional".

Daya saing daerah menurut Bank Indonesia didefinisikan sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Konsep dan definisi daya saing daerah yang dikembangkan dalam penelitian tersebut didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu: perkembangan perekonomian daerah ditinjau dari aspek ekonomi regional dan perkembangan konsep dan definisi daya saing daerah dari penelitian-penelitian terdahulu.

World Economic Forum (WEF) mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Institute for Management Development (IMD) mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan nasional dengan cara mengelola aset dan proses, daya tarik dan agresivitas, globality dan proximity, serta model ekonomi dan sosial.

European Commission mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar internasional, diiringi dengan kemampuan mempertahankan pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, lebih umumnya adalah kemampuan (regions) untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi sementara terekspos pada daya saing eksternal.

Konsep daya saing daerah berkembang dari konsep daya saing yang digunakan untuk perusahaan dan negara. Selanjutnya konsep tersebut di kembangkan untuk tingkat negara sebagai daya saing global, khususnya melalui lembaga World Economic Forum (Global Competitiveness Report) dan International Institute for Management Development (World Competitiveness Yearbook). Daya saing ekonomi suatu negara seringkali merupakan cerminan dari daya saing ekonomi daerah secara keseluruhan. Disamping itu, dengan adanya tren desentralisasi, maka makin kuat kebutuhan untuk mengetahui daya saing pada tingkat daerah (PPSK BI, 2008).

Sedangkan untuk tingkat wilayah (region) konsep daya saing ekonomi dapat didefinisikan oleh Departemen Perdagangan dan Industri Inggris (UKDTI) yang menerbitkan "Regional Competitiveness Indicators", serta Centre for Urban and Regional Studies (CURDS), Inggris, dengan publikasi "The Competitiveness Project: 1998 Regional Bench-marking Report". Daya saing daerah menurut definisi yang dibuat UK-DTI ialah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Sedangkan pengertian konsep daya saing wilayah menurut CURDS ialah sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya.

Terdapat dua karakteristik yang umumnya dimiliki oleh daerah-daerah yang mempunyai daya saing tinggi. Pertama, daerah-daerah tersebut memiliki kondisi perekonomian yang baik. Kedua, adalah daerah-daerah dengan kondisi keamanan, politik, sosial dan budaya yang kondusif. Kondisi perekonomian daerah yang baik dan ditunjang oleh kondisi keamanan, politik, sosial budaya dan birokrasi yang ramah terhadap kegiatan usaha, akan menciptakan daya saing investasi daerah. Kondisi yang baik pada faktor-faktor tersebut akan semakin mempengaruhi daya saing investasi daerah jika didukung oleh ketersediaan tenaga kerja yang cukup dengan kualitas yang baik dan infrastruktur fisik pendukung kegiatan usaha yang memadai.

The European Commission mendefinisikan daya saing sebagai *"kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar internasional, diiringi dengan kemampuan mempertahankan pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, lebih umumnya adalah kemampuan (regions) untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi sementara terekspos pada daya saing eksternal"* (European Commission, 1999 p.4. dalam PPSK-BI 2008).

Abdullah (2002) dalam penelitiannya mendefinisikan daya saing daerah "Kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional." Konsep daya saing umumnya dikaitkan dengan konsep comparative advantage, yakni dimilikinya unsur-unsur penunjang proses produksi yang memungkinkan satu negara menarik investor untuk melakukan investasi ke negaranya, tidak ke negara yang lain. Konotasi advantage di sini adalah situasi yang memungkinkan pemodal menuai keuntungan semaksimal mungkin. Misalnya dengan menyediakan lahan murah, upah buruh murah, dan suplai bahan mentah produksi yang terjamin kontinuitasnya dengan harga yang lebih murah daripada harga yang ditawarkan oleh negara lain. Artinya, kekuatan modal dan keunggulan teknologi menjadi kunci penentu peningkatan daya saing (penjualan produk) satu negara.

Konsep mengenai daya saing terdapat kesamaan esensi yang cukup jelas antara daya saing daerah dan daya saing nasional. Kesamaan pandangan tersebut adalah bahwa tujuan akhir dari upaya untuk meningkatkan daya saing dari suatu perekonomian adalah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan (standart of living) dari masyarakat yang ada di dalam perekonomian tersebut. Sementara itu, konsep dan tujuan kesejahteraan memiliki makna yang sangat luas yang tidak hanya dapat diwakili oleh kinerja pertumbuhan ekonomi saja, tetapi oleh banyak indikator-indikator ekonomi dan non ekonomi yang mempengaruhinya. Sedangkan perbedaannya adalah terpusat pada wilayah, dimana daya saing daerah mencakup daerah (bagian dari suatu negara), sedangkan daya saing nasional mencakup negara. Dalam berbagai pembahasan tentang daya saing nasional pun, baik secara eksplisit maupun implisit, terangkum relevansi pengadopsian konsep daya saing nasional ke dalam konsep daya saing daerah.

Dari konsep dan definisi mengenai daya saing di atas, dapat dimaknai bahwa daya saing daerah dihasilkan oleh interaksi yang kompleks antara faktor input, output dan outcome yang ada di daerah masing-masing, dengan faktor input sebagai faktor utama pembentuk daya saing daerah yaitu kemampuan daerah, yang selanjutnya akan menentukan kinerja output yang merupakan inti dari kinerja perekonomian. Inti dari kinerja perekonomian adalah upaya meningkatkan daya saing dari suatu perekonomian yaitu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang berada di dalam perekonomian tersebut.

3. Faktor Pembentuk Daya Saing Daerah

Bank Indonesia dan Universitas Padjadjaran⁴ dalam penelitiannya menetapkan factor-faktor pembentuk daya saing daerah yaitu:

1. Perekonomian daerah
2. Keterbukaan
3. Sistem Keuangan
4. Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
5. Ilmu pengetahuan dan teknologi
6. Sumber Daya Manusia
7. Institusi, tata pemerintahan dan kebijakan pemerintah

⁴ Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia dan Laboratorium Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pengkajian Ekonomi (LP3E) Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran. (2008). Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten Kota di Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

8. Manajemen ekonomi mikro.

Sedangkan WEF menyebutkan ada beberapa faktor penting yang membentuk daya saing nasional antara lain: (1) institusi; (2) Infrastruktur; (3) Kondisi Makroekonomi; (4) Pendidikan dasar dan kesehatan; (5) Pendidikan tinggi dan pelatihan; (6) Efisiensi pasar barang; (7) Efisiensi pasar tenaga kerja; (8) Pembangunan pasar keuangan; (9) Ketersediaan teknologi; (10) Luas pasar; (11) Kemudahan berusaha; (12) Inovasi.

Sementara itu, Institute for Management Development menilai kemampuan daya saing negara didasarkan pada 4 faktor utama, yaitu: (1) Kinerja perekonomian, terdiri dari 83 kriteria yang mencakup ekonomi domestik, perdagangan internasional, investasi internasional, tenaga kerja dan harga.; (2) Efisiensi pemerintah, terdiri dari 70 kriteria yang mencakup keuangan publik, kebijakan fiskal, kerangka kerja institusional, peraturan perundangan dunia usaha dan kerangka kerja masyarakat. ; (3) Efisiensi dunia usaha, terdiri dari 71 kriteria yang mencakup produktivitas dan efisiensi, pasar tenaga kerja, keuangan, praktek manajemen, perilaku dan nilai-nilai. ; dan (4) Infrastruktur, terdiri dari 114 kriteria yang mencakup infrastruktur dasar, infrastruktur teknologi, infrastruktur ilmu pengetahuan, kesehatan, lingkungan dan pendidikan. Dan European Commission memberikan penilaian daya saing daerah yang dirangkum dalam Regional Competitiveness Index (RCI) didasarkan pada 11 pilar, yaitu: (1) Institusi; (2) Stabilitas makroekonomi; (3) Infrastruktur; (4) Kesehatan; (5) Pendidikan dasar; (6) Pendidikan tinggi dan pendidikan seumur hidup; (7) Efisiensi pasar tenaga kerja; (8) Luas pasar; (9) Ketersediaan teknologi; (10) Kemudahan usaha; dan (11) Inovasi.

4. Faktor Penguat Daya Saing Daerah

Tingginya daya saing daerah di Indonesia secara keseluruhan menjadi ujung tombak daya saing nasional, yang akan menjadi faktor terpenting untuk Indonesia dalam bersaing di tingkat global. Berdasarkan penilaian World Economic Forum (WEF), selama periode 2012 – 2019, peringkat Indonesia dalam Global Competitiveness Index (GCI) terus mengalami peningkatan, meskipun posisi Indonesia masih berada di bawah posisi negara tetangga, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Peringkat Indonesia dalam Global Competitiveness Index (GCI)

No	Negara	Peringkat Dunia			
		2012 (144 negara)	2013 (148 negara)	2014 (144 negara)	2018 (140 negara)*
1	Singapura	2	2	2	2
2	Malaysia	25	24	20	25
3	Brunei Darussalam	28	26	Tidak dilakukan penilaian	62
4	Thailand	38	37	31	38
5	Indonesia	50	38	34	45
6	Vietnam	75	70	68	77

* <http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/competitiveness-rankings/>

Menurut World Economic Index, terpuruknya daya saing disebabkan oleh beberapa faktor penting yang menonjol di antaranya:

- Tidak kondusifnya kondisi ekonomi makro.
- Buruknya kualitas kelembagaan publik dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan pusat pelayanan.
- Lemahnya kebijakan pengembangan teknologi dalam memfasilitasi kebutuhan peningkatan produktivitas.

- d) Rendahnya efisiensi usaha pada tingkat operasional perusahaan.
- e) Lemahnya iklim persaingan usaha. Sementara itu, Institute for Management Development (IMD) juga menempatkan Indonesia jauh di bawah Singapura dan Malaysia dalam The World Competitiveness Yearbook yang diterbitkannya, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Peringkat Indonesia dalam The World Competitiveness Yearbook

No	Negara	Peringkat Dunia				
		2012 (59 negara)	2013 (60 negara)	2014 (60 negara)	2018 (63 negara)*	2019 (63 negara)**
1	Singapura	4	5	3	3	2
2	Malaysia	14	15	12	24	22
5	Indonesia	42	39	37	42	32

*<https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-competitiveness-ranking-2018/>
 **<https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2019/>

Menurut catatan Institute for Management Development (IMD) bahwa rendahnya kondisi daya saing Indonesia, disebabkan oleh buruknya kinerja perekonomian nasional dalam 4 (empat) hal pokok, yaitu:

- a) Buruknya kinerja perekonomian nasional yang tercermin dalam kinerjanya di perdagangan internasional, investasi, ketenagakerjaan dan stabilitas harga.
- b) Buruknya efisiensi kelembagaan pemerintahan dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal, pengembangan berbagai peraturan dan perundangan untuk iklim usaha kondusif, lemahnya kordinasi akibat kerangka institusi publik yang masih banyak tumpang tindih dan kompleksitas struktur sosialnya.
- c) Lemahnya efisiensi usaha dalam mendorong peningkatan produksi dan inovasi secara bertanggungjawab yang tercermin dari tingkat produktivitas yang rendah, pasar tenaga kerja yang belum optimal, akses ke sumberdaya keuangan yang masih rendah serta praktik dan nilai manajerial yang relatif belum profesional.
- d) Keterbatasan di dalam infrastruktur, baik infrastruktur fisik, teknologi dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan kesehatan.

Peningkatan daya saing daerah merupakan salah satu komponen penting di dalam penguatan ekonomi domestik. Peningkatan perekonomian domestik, baik oleh daerah dan nasional akan menjadi modal utama untuk menjaga momentum pembangunan dan melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi untuk menuju ke arah transformasi ekonomi menjadi negara maju dan berdaya saing. Oleh sebab itu, peran daerah untuk meningkatkan daya saing daerahnya akan sangat bergantung kepada kemampuan daerah untuk melakukan identifikasi faktor penentu daya saing dan strategi untuk meningkatkan daya saingnya.

2.2. LANDASAN HUKUM

Peningkatan daya saing berbasis kinerja dan kreatifitas dalam berinovasi dalam lingkup nasional sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang- undangan maupun kebijakan di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah yang terkait. Oleh karena itu diperlukan evaluasi dan analisis kebijakan berkenaan dengan peningkatan daya saing dan penguatan inovasi dalam peraturan perundangundangan terkait. Peraturan ini terutama terkait dengan peraturan perundangundangan di bidang ekonomi, perdagangan dan industri, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang pendidikan, bidang ketenagakerjaan, serta peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan infrastruktur sosial dan budaya.

Telaah dan evaluasi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan produktivitas dan daya saing nasional merupakan perspektif masukan yang mendasari kebutuhan

hukum dalam penyusunan kebijakan pengukuran indeks daya saing di daerah. Untuk itu, beberapa peraturan perundang-undangan yang terseleksi antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

pasal 34-38 tentang invensi dan inovasi, Kewajiban Pemerintah mengembangkan invensi dan inovasi, Pelindungan atas Kekayaan Intelektual dan pemanfaatannya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menggunakan hasil Invensi dan Inovasi nasional, Pemerintah Pusat wajib menjamin pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan dalam bentuk Invensi dan Inovasi untuk pembangunan nasional. Badan Usaha yang menghasilkan Invensi dan Inovasi nasional dari pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberi insentif.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Pasal 4 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional.

3. UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 31 bagian Penataan Daerah ayat 2 menjelaskan Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah.

4. PP 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah

Pasal 2 menjelaskan sasaran Inovasi Daerah dilaksanakan dengan tujuan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun sasaran inovatif untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) peningkatan Pelayanan Publik;
- b) pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c) peningkatan daya saing Daerah.

Dalam pelaksanaannya, sasaran inovatif didasarkan pada beberapa prinsip sebagai berikut:

- a) peningkatan efisiensi; Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.
- b) perbaikan efektivitas; sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.
- c) perbaikan kualitas pelayanan; Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.
- d) tidak menimbulkan konflik kepentingan; inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.
- e) berorientasi kepada kepentingan umum; Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
- f) dilakukan secara terbuka; Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.

- g) memenuhi nilai kepatutan; Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat.
- h) dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri; hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019

Peraturan tersebut disusun berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan 20 tahunan mendatang, memperhitungkan modal dasar bangsa Indonesia, dan amanat pembangunan dalam Pembukaan UUD 1945, visi pembangunan nasional 2005–2025 adalah: Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Visi pembangunan nasional tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:

- a. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
- b. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
- c. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
- d. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
- e. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap

- berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
- f. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
 - g. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
 - h. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang.

4.3. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

1. Landasan Filosofis

Landasan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia terdiri atas landasan ideal yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yaitu UUD 1945 yang telah mengalami 4 (empat) tahap amandemen. Sedangkan landasan operasional tidak dikenal lagi sejak GBHN dihapuskan dalam amandemen UUD 1945 akan tetapi untuk operasionalisasi dalam mencapai tujuan Negara mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sesuai dengan isi UU RI No 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang tercantum dalam bab 2 pasal 3 adalah: RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.

Visi RPJPN 2005-2025 adalah Indonesia yang maju, mandiri, adil dan makmur. Selanjutnya Misi RPJPN 2005-2025 adalah: (1) Mewujudkan masyarakat berahlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (2) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; (3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; (4) Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu; (5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan; (6) Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari; (7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan

kepentingan nasional; dan (8) Mewujudkan Indonesia yang berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.⁵

Pokok-pokok sistem pemerintahan negara yang terdapat dalam bagian penjelasan UUD 1945 (pra amandemen), kini tidak diatur lagi secara spesifik (khusus). Untuk memahami pokok-pokok system pemerintahan Indonesia dapat dilihat dari pengalaman empiris dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pelaksanaan pembangunan mencakup berbagai aspek kehidupan dalam berbangsa, yaitu seperti aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan keamanan secara berencana, terarah, menyeluruh, terpadu serta berkelanjutan agar dapat memacu peningkatan untuk kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sederajat dengan bangsa lainnya yang lebih maju. Maka itu, sesungguhnya pembangunan nasional ialah pencerminan kehendak agar terus menerus meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat Indonesia.

Munculnya globalisasi tentunya membawa dampak bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Dampak globalisasi tersebut meliputi dampak positif dan dampak negatif di berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya dan lain- lainnya. Proses globalisasi yang bergulir, diiringi dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) memungkinkan terjadinya perubahan lingkungan strategi yang berdampak luas terhadap eksistensi dan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari aspek eksternal, globalisasi menimbulkan pertemuan antar budaya bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Dengan kata lain, globalisasi berdampak pada terjadinya perubahan sosial besar-besaran yang belum tentu semua perubahan itu kongruen dengan kemajuan sosial (sosial progress). Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi, yakni pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh globalisasi juga merasuk dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya dan lain sebagainya. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lainlain. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan faktor pendukung utama dalam globalisasi. Dewasa ini, perkembangan teknologi begitu cepat sehingga segala informasi dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu globalisasi tidak dapat kita hindari kehadirannya. Selanjutnya yang harus di siapkan untuk menghadapi globalisasi adalah dengan memperkuat posisi Indonesia dari berbagai bidang, salah satu aspek yang harus diperkuat adalah daya saing nasional dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional..

2. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis Kita mempunyai sumber daya alam yang berlimpah, sumberdaya manusia yang tangguh, yang terus dapat ditingkatkan keunggulan dan daya saingnya, serta hubungan yang baik dengan semua pihak baik dunia Barat, dunia Islam, negaranegara berkembang, emerging economies, dan lain-lain yang semuanya dapat menjadi mitra pembangunan Indonesia. Dengan demikian, ke depan, Indonesia mempunyai peluang emas untuk memajukan kehidupan bangsa kita. Strategi yang kita tempuh untuk menjadi negara maju, developed country, adalah dengan memadukan pendekatan sumberdaya alam, iptek dan budaya, atau knowledgebased, resourcebased and culture-based development.

⁵ Undang Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Indonesia dengan penduduknya yang lebih dari 250 juta jiwa dengan daya beli yang relatif baik merupakan pasar domestik yang sangat potensial bagi investor asing. Pasar domestik Indonesia akan menjadi sasaran empuk bagi investor asing jika Indonesia tidak mampu membangun daya saing yang kuat untuk menopang pembangunan ekonomi nasional. Makro ekonomi yang terpelihara stabilitasnya dan kapasitas pasar domestik yang terus membesar merupakan ekosistem yang positif untuk tumbuh-kembang inovasi dan daya saing. Peningkatan kapasitas pasar bermakna peningkatan permintaan masyarakat akan barang dan jasa, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Peningkatan permintaan barang dan jasa yang lebih banyak dan/atau lebih bermutu akan meningkatkan kebutuhan industri akan teknologi yang lebih sesuai. Dinamika ini membuka peluang dan tantangan bagi lembaga pengembang teknologi untuk melakukan riset yang relevan dengan kebutuhan industri.

Dalam perspektif global, tantangan Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan baik eksternal maupun internal. Tantangan eksternal yang dihadapi antara lain adalah tingkat persaingan perdagangan yang semakin ketat, semakin besarnya defisit neraca perdagangan Indonesia dengan negara ASEAN lainnya, dan bagaimana Indonesia dapat meningkatkan daya tarik investasi. Sementara itu, tantangan internal Indonesia antara lain adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ASEAN Economy Community (AEC), ketidaksiapan daerah menghadapi AEC, tingkat pembangunan daerah yang masih sangat bervariasi dan kondisi SDM dan ketenagakerjaan Indonesia.

Disamping tantangan yang ada, Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk dapat mengambil manfaat dari implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sampai saat ini, Indonesia masih menjadi tujuan investasi pemodal dalam negeri ataupun luar negeri. Tingginya investasi tersebut telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Jumlah penduduk Indonesia yang besar ini (bonus demografi) dapat menjadi kunci sukses bagi peningkatan daya saing Indonesia. Dengan dukungan peningkatan pendidikan dan ketrampilan, maka produktivitas tenaga kerja akan meningkat. Peningkatan produktivitas tenaga kerja ini pada akhirnya mendorong peningkatan daya saing nasional.

Faktor produktivitas akan menjadi kunci bagaimana Indonesia dapat menghadapi MEA. Secara logika sederhana, produktivitas adalah kunci utama dalam persaingan. Dengan produktivitas yang tinggi diharapkan produksi menjadi lebih efisien dan dapat memberikan harga yang lebih kompetitif. Hanya saja, David Ricardo dapat mematahkan argumentasi ini (yang dibangun oleh Adam Smith) dengan konsep comparative advantage. Menurut Ricardo, keunggulan produktivitas bukanlah satu-satunya faktor sebuah negara dapat memenangkan persaingan tetapi faktor-faktor lain dapat pula menyebabkan sebuah negara dapat bersaing. Dengan kata lain, yang dapat menurunkan biaya produksi rata-rata tidak hanya produktivitas tetapi juga faktor biaya-biaya input yang rendah. Rendahnya biaya tenaga kerja merupakan faktor yang paling sering diandalkan oleh sebuah negara agar memiliki keunggulan komparatif. Di samping itu, faktor kepemilikan sumber daya alam maupun pasar finansial yang efisien juga merupakan faktor lain yang membawa pada keunggulan komparatif.

Untuk memenangkan persaingan, sebuah negara dapat mengandalkan keunggulan komparatif ataupun keunggulan kompetitif. Singapore dan Malaysia menjadi unggul daya saingnya karena keunggulan kompetitif, sedangkan Brunei Darussalam maupun Thailand menjadi unggul daya saingnya karena keunggulan komparatif. Untuk kasus Thailand, negara ini sudah mengarahkan strateginya menuju keunggulan kompetitif. Untuk negara Philipina, Vietnam, dan Kamboja masih mengandalkan keunggulan komparatif dalam strategi perdagangannya.

Untuk meningkatkan daya saing, industrialisasi harus dilakukan dalam segala bidang, hanya dengan industrialisasi, penerapan teknologi produksi yang lebih baik dapat dilakukan. Teknologi produksi adalah syarat utama untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Umumnya industrialisasi dilakukan oleh pemodal besar dengan kekuatan pendanaan dan kemampuan entrepreneurship yang mumpuni.

Namun, menarik para pemodal besar untuk berinvestasi di Indonesia jelas tidak mudah. Banyak faktor eksternal dan internal yang harus dibenahi. Stabilitas politik, pungutan liar, penegakan hukum, infrastruktur, dan lain-lain. Mengundang investor asing harus terus dilakukan untuk menggali potensi ekonomi yang belum tersentuh dan membuka lapangan pekerjaan. Harus diakui, pemodal besar bisa mengubah warna ekonomi suatu daerah secara cepat dan instan. Namun, penguatan ekonomi kerakyatan juga wajib dilakukan. Meskipun tidak bisa membawa perubahan secara drastis, tapi penguatan perekonomian bawah bisa meningkatkan ketahanan dan kemandirian ekonomi Indonesia. Ekonomi rakyat umumnya bersifat padat karya. Dengan gelontoran dana yang sama, lapangan kerja yang tercipta lebih besar daripada industri padat modal. Penguatan dunia usaha rakyat juga akan meningkatkan daya beli yang akan meningkatkan permintaan barang dan jasa. Permintaan ini jelas akan menjadi pasar potensial bagi investor. Investor akan lebih bergairah untuk menanam modal dan akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang lebih lanjut. Namun, meningkatkan daya saing pada ekonomi rakyat jelas tidak mudah, masalah terbesar dalam upaya peningkatan daya saing pada level rakyat adalah minimnya akumulasi modal dan kurangnya pengetahuan. Berbeda dengan para pemodal besar yang cukup dengan satu kibasan maka teknologi terbaru pun siap digunakan, rakyat kecil dengan modal minim tentu kesulitan bersaing. Kurangnya pemahaman tentang konsep-konsep manajerial usaha juga bisa menghambat pembentukan bisnis yang sehat. Dan yang tidak kalah penting, pengetahuan mengenai penjualan dan pemasaran produk juga menjadi kendala.

Strategi terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan koperasi. Keberadaan koperasi dapat mempermudah koordinasi para pemilik usaha dengan karakteristik yang homogen. Mereka bisa menggabungkan modal untuk membeli peralatan yang diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah barang yang diproduksi, sesuatu yang sulit dilakukan bila mereka bergerak sendiri-sendiri. Salah satu bentuk kongkrit upaya Pemerintah RI dalam meningkatkan komitmennya dalam mendukung optimalisasi daya saing guna memacu produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dengan terbitnya Inpres No. 6 Tahun 2014 pada 1 September 2014. Melalui Inpres tersebut, Presiden RI menginstruksikan kepada jajaran pemerintah di seluruh Indonesia, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan daya saing nasional dan melakukan persiapan pelaksanaan MEA yang akan dimulai pada 2015. Diharapkan melalui Inpres tersebut peningkatan daya saing dapat terus ditingkatkan, utamanya dengan mengedepankan beberapa strategi dasar di antaranya:

- Pengembangan industri nasional yang berfokus pada pengembangan industri prioritas dalam rangka memenuhi pasar ASEAN; pengembangan industri dalam rangka mengamankan pasar dalam negeri. Selanjutnya, pengembangan industri kecil menengah; pengembangan SDM dan penelitian; dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- Pengembangan pertanian, dengan fokus pada peningkatan investasi langsung di sektor pertanian, dan peningkatan akses pasar.
- Pengembangan kelautan dan perikanan, dengan fokus pada penguatan kelembagaan dan posisi kelautan dan perikanan; penguatan daya saing kelautan dan perikanan; penguatan pasar dalam negeri; dan penguatan dan peningkatan pasar ekspor.
- Pengembangan energi, yang fokus pada pengembangan sub sektor ketenagalistrikan dan pengurangan penggunaan energi fosil (Bahan Bakar Minyak); sub sektor energi baru, terbarukan dan konservasi energi; dan peningkatan pasokan energi dan listrik agar dapat bersaing dengan negara yang memiliki infrastruktur lebih baik.

Selain itu masih ada sepuluh sektor pengembangan lainnya, yang meliputi pengembangan infrastruktur; pengembangan sistem logistik nasional; pengembangan perbankan; investasi; usaha

mikro, kecil, dan menengah; tenaga kerja; kesehatan; perdagangan; kepariwisataan; dan kewirausahaan. Kita patut bersyukur upaya untuk terus meningkatkan daya saing secara bertahap di Indonesia telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, meskipun harus diakui masih terdapat berbagai kekurangan yang menjadi tugas bersama untuk terus memperbaikinya.

3. Landasan Yuridis

Menurut Kelsen, efektivitas dari peraturan perundang-undangan harus dibedakan dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, karena efektivitas hukum merupakan fakta. Sedangkan Zevenbergen menyatakan, hukum berlaku secara yuridis, apabila kaidah hukum terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan. Logemann berpendapat, kaidah hukum mengikat, apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya. Syarat kedua adalah syarat sosiologis, yang menekankan pada efektivitas hukum yang akan dibuat. Menurut teori kekuasaan, hukum berlaku secara sosiologis karena adanya pemaksaan berlakunya oleh penguasa; terlepas apakah masyarakat menerima atau menolaknya. Hal itu diperkuat dengan teori pengakuan yang menyatakan bahwa berlakunya hukum ataupun peraturan perundang-undangan didasarkan atas penerimaan atau pengakuan atas peraturan tersebut. Syarat filosofis apabila peraturan perundang-undangan yang diterapkan sesuai dengan cita-cita hukum, atau sesuai dengan nilai positif yang tertinggi, misal cita-cita hukum bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, maka penyusunan peraturan perundang-undangan harus memenuhi ketiga syarat tersebut. Jika peraturan perundang-undangan hanya memenuhi syarat yuridis saja, maka kemungkinan regulasi yang dikeluarkan hanya merupakan kumpulan norma yang absurd. Sama halnya apabila peraturan perundang-undangan hanya memenuhi aspek sosiologis saja, artinya lebih menonjolkan teori kekuasaan, maka peraturan perundang-undangan yang dibuat cenderung menjadi klausul aturan-aturan pemaksa dan tidak efektif. Kemudian apabila peraturan tersebut hanya berlaku secara filosofis, maka peraturan tersebut hanya merupakan kumpulan cita-cita saja. Untuk itu, ketiga syarat tersebut mesti menjadi roh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Penyusunan peraturan perundang-undangan memperhatikan dua faktor, yang pertama adalah kondisi politik dan pengaturan hukum yang imperatif. Dimana kebijakan pemerintah berkaitan dengan arah dan jangkauan pengaturan hukum yang jelas dan mengikat. Kedua, adalah timbulnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, dimana konsepsi hukum dapat teraktualisasikan dalam diri manusia berkenaan dengan keselarasan, ketertiban dan ketenteraman atau kondisi yang sepantasnya diinginkan. Implementasi hukum yang tertib apabila terdapat keserasian antara politik hukum yang dibuat oleh pemerintah dengan kesadaran hukum masyarakat.

UU No. 18 Tahun 2002 merupakan tonggak penting, landasan hukum yang diharapkan dapat memperkuat landasan pembangunan dan mempercepat perkembangan iptek, mendorong pertumbuhan dan pendayagunaan sumberdaya iptek. UU No. 18 Tahun 2002 diharapkan dapat memperkuat jaringan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemajuan iptek.

Menurut Tatang (2005) meskipun tidak secara eksplisit disebutkan sistem inovasi, namun sistem nasional litbangrap iptek merupakan keterkaitan yang tidak terpisahkan dan saling memperkuat antara unsur-unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan iptek dalam satu keseluruhan yang utuh. Selanjutnya Tatang (2005) menyebutkan, esensi keterkaitan ini sama dengan atau setidaknya berangkat dari konsep sistem inovasi nasional, dan karenanya merupakan langkah penting bagi perkembangan sistem inovasi di Indonesia. Sistem nasional litbangrap iptek ini diperlukan untuk mencapai tujuan: a) memperkuat daya dukung iptek bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan

negara, serta b) meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional.

Oleh karena itu perkembangan sistem inovasi ini akan ditentukan oleh pelaksanaan lebih lanjut (secara legal) dan implementasinya. Salah satu pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2002 adalah penguatan fungsi kelembagaan iptek dalam sistem nasional litbangrap iptek. Upaya ini dilakukan melalui: a) mengorganisasikan pembentukan sumber daya manusia, penelitian, pengembangan, perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi; b) pembentukan iklim dan memberikan dukungan kebijakan yang diperlukan bagi penyelenggaraan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan iptek.

Pemajuan ataupun penguatan sistem inovasi pada tataran daerah menurut Tatang (2005) adalah sesuatu yang penting bagi perkembangan sistem inovasi nasional dan peningkatan daya saing secara nasional. Penguatan sistem inovasi di tataran daerah merupakan bagian integral atau sub sistem dari pilar sistem inovasi nasional. Upaya-upaya terpadu dalam penguatan kelembagaan, interaksi dan proses pembelajaran akan menjadi semakin penting pada tataran daerah. Dalam peraturan perundang-undangan yang ada, tanggung jawab daerah dalam pembangunan iptek dan sistem inovasi cukup besar. Hal ini juga ditegaskan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain: a) tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah (Pasal 2 ayat (3)); b) kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban antara lain: memajukan dan mengembangkan daya saing daerah (Pasal 27 ayat (1) butir g.) Keberadaan UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa proses rekonstruksi peraturan perundang-undangan setidaknya memenuhi tiga syarat dasar, yaitu syarat dasar yuridis, dasar sosiologis, dan dasar filosofis. Sedangkan menurut Teori Sistem Hukum Stufenbau yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (grundnorm) bentuknya tidak kongkrit (abstrak). Contoh norma hukum paling dasar abstrak adalah Pancasila.⁶

Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu, diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum. Pada dasarnya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat.⁷

Dasar hukum (legal baseline) pembangunan dan penataan daerah telah diamanatkan di dalam UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah. Secara eksplisit disebutkan pada Bab VI Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), yaitu :

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Stufenbau

⁷ Bagian Penjelasan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- 1) Dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan Daerah.
- 2) Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: a) mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b) mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; c) mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d) meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; e) meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan f) memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.

Selanjutnya esensi pembangunan Daerah diamanatkan dalam Pasal 258 ayat (1), bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Informasi berkenaan dengan aspek daya saing daerah juga disebutkan dalam Pasal 392, bahwa Informasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) huruf a memuat informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup: (a) kondisi geografis daerah; (b) demografi; (c) potensi sumber daya daerah; (d) ekonomi dan keuangan daerah; (e) aspek kesejahteraan masyarakat; (f) aspek pelayanan umum; dan (g) aspek daya saing Daerah.

Untuk efektifitas dan inovasi pelayanan publik dimuat dalam Pasal 349 ayat (1), bahwa Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah.

BAB 3 METODOLOGI

3.1. PELAKSANAAN IDSD

1. Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah

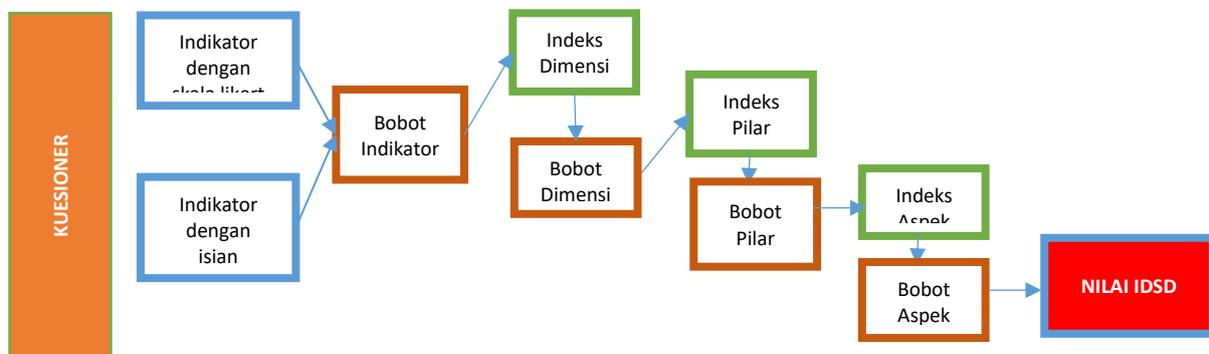
Penyusunan indikator dalam IDSD dikembangkan dalam bentuk data primer dan data sekunder dengan komposisi data sekunder yang lebih banyak dibandingkan data primer. Indikator tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang akan direspon oleh responden di Kabupaten/kota yang melibatkan beberapa stakeholders dalam suatu forum yang terdiri atas perangkat daerah, asosiasi pengusaha, litbang, LPPM, dan Perguruan Tinggi.

Data primer dan data sekunder dikategorikan berdasarkan tingkat kepentingannya dan kemudahan memperoleh sumber data. Karena indikator yang ada sangat banyak maka salah satu cara untuk mereduksi indikator adalah dengan membuat matriks reduksi yaitu melihat sumber data dari masing-masing indikator. Matriks dibuat dengan memberi kuadaran pada indikator yang diukur. Hasil reduksi instrumen dilakukan perhitungan secara kuantitatif untuk penilaian. Setelah dilakukan reduksi instrumen, maka tahap selanjutnya adalah verifikasi instrumen, lalu pembuatan kuesioner online dan membuat database untuk seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Metodologi dan pendekatan teori yang digunakan dalam penyusunan model pengukuran indeks daya saing di daerah dilakukan melalui: (1) Studi Literatur (desk study), (2) Diskusi Publik (Public Hearing), (3) Diskusi Kelompok Terfokus (Focussed Group Discussion), (4) Pendapat Ahli (Expert Judgment), dan (5) Penyesuaian dan Perbandingan (benchmarking) terhadap model-model pengukuran indeks beserta komponen dan indikatornya yang telah disusun dan dirilis oleh berbagai stakeholders yang kompeten. Disamping itu, agar model yang dihasilkan memiliki tingkat validitas yang tinggi, dilakukan validasi dan uji terap di beberapa daerah diwilayah Indonesia

2. Identifikasi dan Klasifikasi Variabel

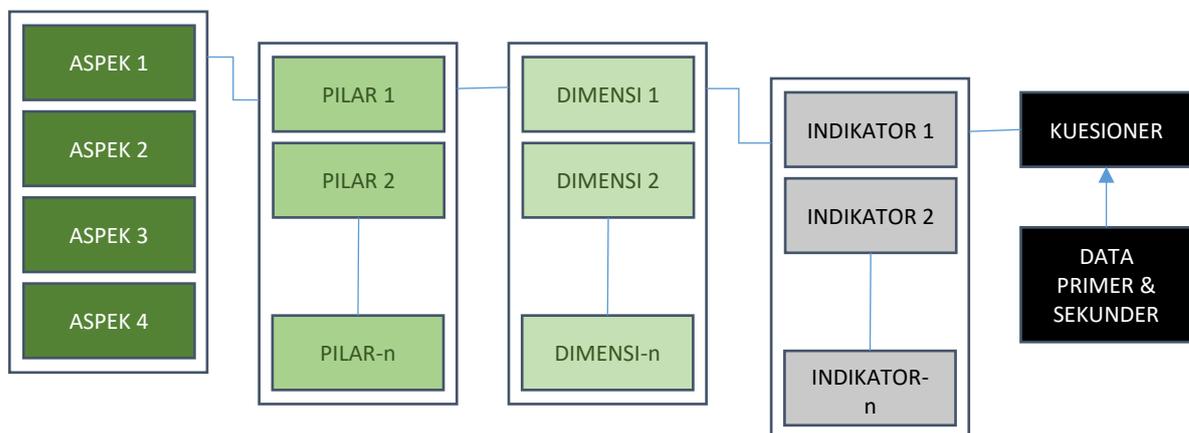
Variabel dalam Indeks Daya Saing Daerah dipetakan berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam membangun daya saing daerah. Selanjutnya diklasifikasikan dalam bentuk model logika input-output, yaitu faktor input dan faktor output pembentuk daya saing daerah. Dengan demikian, kedua faktor tersebut merupakan refleksi dari sasaran strategis yang ingin dicapai dalam membangun daya saing daerah, atau dikatakan sebagai indikator kinerja daya saing daerah. Indikator kinerja didefinisikan secara rinci dan dinyatakan dalam data kontinyu dan data diskrit yang ditransformasikan menjadi data kontinyu. Kumpulan beberapa indikator kinerja menurut masing-masing sasaran strategis kemudian dirumuskan dan disusun secara komposit dengan bobot tertentu yang diperoleh berdasarkan persepsi responden pemerintah daerah atas prioritas sasaran strategis. Hasil pengukuran daya saing daerah tersebut berupa indeks daya saing daerah sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.:



Gambar 3.1 Alur Proses Penghitungan Indeks Daya Saing Daerah

a. Komponen Indeks Daya Saing Daerah (Aspek, Pilar, Dimensi, Indikator)

Penyusunan daya saing daerah disusun atas Empat Aspek. Tiap Aspek memuat beberapa Pilar. Selanjutnya setiap Pilar membuat beberapa Dimensi. Kemudian Dimensi dipecah ke dalam Indikator. Setiap Indikator diterjemahkan ke dalam sebuah pertanyaan dalam kuesioner. **Untuk Tahun 2019 Kuesioner dirancang dengan jawaban tertutup (5 Level) sebanyak 31 pertanyaan dan Jawaban Dibuka sebanyak 47 pertanyaan.**



Gambar 3.2 Kerangka penyusunan komponen Indeks Daya Saing Daerah/IDSD

Komponen IDSD terdiri dari 4 Aspek, 12 Pilar, dan 23 Dimensi, 78 indikator. Komponen terbanyak terletak pada aspek ekosistem inovasi. Komposisi ini dihasilkan berdasarkan berbagai studi literatur dan masukan para pakar (expert judgement). Ini juga menunjukkan bahwa aspek ekosistem inovasi diyakini menjadi aspek yang akan sangat berpengaruh kepada tingkat daya saing suatu wilayah

Pengisian kuesioner Indeks Daya Saing Daerah melalui aplikasi database Indeks Daya Saing Daerah, terdiri dari 78 pertanyaan terdiri dari pertanyaan dengan jawaban berbentuk data primer.

Tabel 3.1. Rekapitulasi Komponen IDSD

NO	ASPEK/FAKTOR	PILAR	DIMENSI	INDIKATOR
I	Aspek Faktor Penguat/Enabling Environment	Pilar Kelembagaan	Tata Kelola Pemerintahan	4
			Keamanan dan Ketertiban	1
		Pilar Infrastruktur	Infrastruktur Transportasi	2
			Infrastruktur Air Bersih dan Kelistrikan	2
		Pilar Perekonomian Daerah	Keuangan Daerah	5
	Stabilitas Ekonomi	4		
II	Aspek Sumber Daya Manusia/Human Capital	Pilar Kesehatan	Kesehatan	1
		Pilar Pendidikan dan Keterampilan	Pendidikan	6
			Keterampilan	3
III	Aspek Pasar/Market	Pilar Efisiensi Pasar Produk	Kompetisi Dalam Negeri	2
			Pajak dan Retribusi	3
			Stabilitas Pasar	1
		Pilar Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	2
			Kapasitas tenaga kerja	3
		Pilar Akses Keuangan	Akses Keuangan	6
		Pilar Ukuran Pasar	Ukuran Pasar	3
IV	Aspek Ekosistem Inovasi	Pilar Dinamika Bisnis	Regulasi	4
			Kewirausahaan	5
		Pilar Kapasitas Inovasi	Interaksi dan Keberagaman	6
			Penelitian dan Pengembangan (R & D)	9
		Pilar Kesiapan Teknologi	Komersialisasi	3
			Telematika	2
	Teknologi	1		

b. Pembobotan Indikator

Dalam kajian lanjutan penyusunan **Indeks Daya Saing Daerah** perlu mempertimbangkan beberapa aspek dalam pemilihan metoda penentuan penimbang. Obyektifitas tentu merupakan syarat pertama yang harus dipertimbangkan. Syarat lain adalah aspek kemudahan dan kesederhanaan dalam arti metode yang digunakan mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai kalangan dan mudah dikerjakan dengan cara yang sederhana. **Dengan memperhatikan kriteria tersebut, dari sejumlah metode pembobotan yang telah dijelaskan di atas, matriks korelasi dipilih sebagai metode pembobotan untuk penyusunan Indeks Daya Saing Daerah kajian lanjutan ini.** Penimbang yang ditentukan berdasarkan pada matriks korelasi diasumsikan proporsional (sebanding) dengan jumlah nilai absolut koefisien korelasi pada masing-masing baris atau kolom. Penimbang untuk setiap indikator ditentukan dengan menghitung proporsi dari jumlah tiap-tiap baris/kolom terhadap jumlah keseluruhan. Nilai proporsi tersebut mengindikasikan kontribusi dari setiap indikator dalam memberikan informasi yang ada dalam dimensi yang tersusun dari sejumlah indikator yang ada. Adapun rincian bobot setiap indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Pembobotan Indikator

ASPEK	Bobot Aspek	PILAR	Bobot Pilar	DIMENSI	Bobot Dimensi	INDIKATOR	Bobot		
Faktor Penguat/ Enabling Environment	0,15	Kelembagaan	0,25	Tata Kelola Pemerintahan	0,60	skor/nilai kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional Kemendagri	0,30		
						Tingkat partisipasi masyarakat, pelaku usaha dalam pengelolaan pembangunan daerah	0,20		
						Skor/nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	0,30		
						Hasil Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	0,20		
		Keamanan dan Ketertiban	0,40	1,00	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	1,00			
					Infrastruktur	0,50	0,60	rasio panjang jalan dibanding luas wilayah	0,40
		rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	0,30						
		rasio panjang jalan kondisi baik dibanding total panjang jalan (tidak termasuk jalan tol)	0,30						
		Infrastruktur Air Bersih dan Kelistrikan	0,40	0,60	Penduduk berakses air minum	0,60			
					Rasio elektrifikasi	0,40			
		Perekonomian Daerah	0,25	Keuangan Daerah	0,60	Pertumbuhan PDRB	0,30		
						Indeks Kapasitas Fiskal daerah	0,20		
						Nilai PAD terhadap total pendapatan daerah	0,30		
						Anggaran pemerintah daerah (APBD) terhadap nilai investasi pemerintah daerah dibagi PDRB atas harga berlaku (ADHB)	0,20		
						Stabilitas Ekonomi	0,40	Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB)	0,20
								Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	0,30
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	0,30								
Persentase UMKM	0,20								
Sumber Daya Manusia/Human Capital	0,40	Kesehatan	0,20	Kesehatan	1,0	Persentase balita gizi buruk	1,00		
		Pendidikan dan Keterampilan	0,80	Pendidikan	0,70	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	0,20		
						Angka Partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi	0,20		
						Penduduk berpendidikan Diploma I/II/III	0,20		
Penduduk berpendidikan D4/S1	0,20								

ASPEK	Bobot Aspek	PILAR	Bobot Pilar	DIMENSI	Bobot Dimensi	INDIKATOR	Bobot				
Faktor Pasar/Market	0,20	Efisiensi Pasar Produk Efisiensi	0,20	Keterampilan	0,30	Penduduk berpendidikan S2	0,10				
						Penduduk berpendidikan S3	0,10				
						Angka Partisipasi Kasar siswa SMK/SMU	0,45				
						Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	0,45				
						Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Literasi Digital Penduduk	0,10				
		Efisiensi Pasar Produk Efisiensi	0,20	Keterampilan	0,20	Kompetisi Dalam Negeri	0,35	Pola dan karakteristik pola kemitraan diantara perusahaan (industri kecil, menengah dan besar)	0,40		
								Keberadaan sektor usaha kontribusi pada PDRB	0,60		
								Pajak dan Retribusi	0,40	Kontribusi Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,40
										Kontribusi Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,20
										Pola dan karakteristik pola kemitraan diantara perusahaan (industri kecil, menengah dan besar)	0,40
		Stabilitas Pasar	0,25	Indeks Gini	1,00						
		Ketenagakerjaan	0,25	Ketenagakerjaan	0,25	Ketenagakerjaan	0,40	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	0,30		
								Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	0,30		
								Indeks Pembangunan Gender (IPG)	0,40		
								Kapasitas tenaga kerja	0,60	Jumlah tenaga kerja terdidik terhadap total angkatan kerja	0,50
										Pemanfaatan Balai Latihan Kerja untuk profesionalisme angkatan kerja	0,30
										Peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan tenaga kerja terampil?	0,20
Akses Keuangan	0,35	Akses Keuangan	0,35	Akses Keuangan	1,0	Bank di Daerah yang Memberi Layanan Pinjaman Kepada Dunia Usaha	0,15				
						Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang Memberi Layanan Pinjaman kepada Dunia Usaha	0,15				
						Pertumbuhan Kredit Perbankan kepada UMKM untuk Pengembangan Usaha	0,15				
						Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) kepada UMKM untuk Pengembangan Usaha	0,15				
						Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kepada Petani dan/atau Nelayan	0,20				

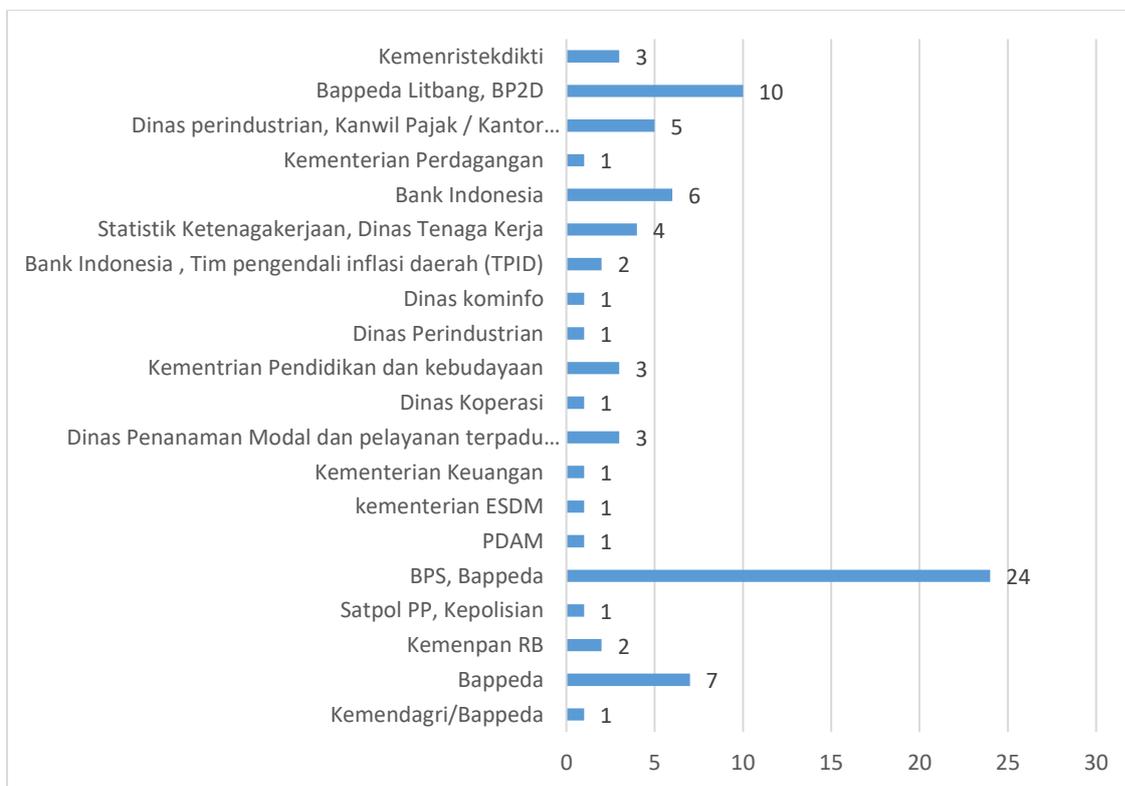
ASPEK	Bobot Aspek	PILAR	Bobot Pilar	DIMENSI	Bobot Dimensi	INDIKATOR	Bobot		
Ekosistem Inovasi	0,25	Ukuran Pasar	0,20	Ukuran Pasar	1,0	Ketersediaan modal ventura bagi struktur permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	0,20		
						Rasio Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun keatas	0,20		
						Pertumbuhan nilai ekspor	0,30		
						Persentase ekspor terhadap impor	0,50		
	0,25	Dinamika Bisnis	0,40	Regulasi	0,60	Rata-rata biaya administrasi perijinan memulai Bisnis/industri kecil, menengah dan besar	0,30		
						Rata-rata durasi waktu pengurusan administrasi perijinan usaha (Domisili, SIUP, TDP, dll) untuk memulai bisnis	0,30		
						Jumlah perizinan usaha	0,20		
						Persentase industri yang memanfaatkan kebijakan/regulasi insentif pajak untuk proses bisnis	0,20		
						Kewirausahaan	0,40	Pertumbuhan usaha industri kecil dan menengah	0,25
								Pertumbuhan usaha industri besar	0,10
		Sistem manajemen produk hasil industri kecil dan menengah? (Bisa dalam bentuk SOP, sertifikat ISO, dll)	0,25						
		Sistem manajemen produksi hasil industri besar? (bisa dalam bentuk SOP, sertifikat ISO, dan lain-lain yang relevan)	0,10						
		Perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT) / Startup yang terdaftar di inkubator bisnis perguruan tinggi / yang mendaftar kompetisi PPBT Kemenristekdikti	0,30						
		Kapasitas Inovasi	0,40	Interaksi dan Keberagaman	0,30	Implementasi Program sistem Inovasi Daerah	0,30		
Keberadaan dan pengembangan kluster inovasi berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD) sebagai bentuk interaksi dan kolaborasi antara Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan atau Lembaga Litbang dan Masyarakat	0,20								
Kolaborasi antara perguruan tinggi, Lembaga dan atau litbang dengan pemerintah daerah dalam program	0,20								

ASPEK	Bobot Aspek	PILAR	Bobot Pilar	DIMENSI	Bobot Dimensi	INDIKATOR	Bobot
						pengembangan teknologi dan inovasi dalam 3 tahun terakhir	
						Perjanjian kerja sama antara industri/dunia usaha dengan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi	0,20
						Kolaborasi antara perguruan tinggi dan atau Lembaga litbang, industri/dunia usaha dan pemerintah daerah (triple helix) dalam program pengembangan teknologi dan inovasi	0,10
				Penelitian dan Pengembangan (R & D)	0,30	Jumlah artikel ilmiah jurnal yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi dan atau lembaga litbang setempat yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi / internasional selama 3 tahun terakhir	0,10
						Jumlah penelitian yang dihasilkan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan atau lembaga lainnya yang masuk Kekayaan Intelektual (paten, merek, cipta, dan design Industri) secara keseluruhan yang dihasilkan dalam 3 tahun terakhir	0,10
						Jumlah paten yang telah dimanfaatkan di industri	0,15
						Anggaran penelitian dan pengembangan terhadap total APBD	0,10
						Kegiatan penelitian dan pengembangan berbasis produk unggulan daerah terhadap jumlah penelitian	0,10
						Jumlah peneliti di perguruan tinggi dan perangkat daerah kelitbangan dibanding hasil penelitian yang dipublikasikan	0,15
						Peringkat perguruan tinggi di daerah secara nasional	0,10
						Jumlah dunia usaha dan Industri yang memiliki unit penelitian dan pengembangan	0,10
						Jumlah Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kelitbangan	0,10
						Keberadaan Perguruan tinggi dan institusi kelitbangan di daerah yang melakukan komersialisasi inovasi	0,30
		Kesiapan Teknologi	0,20			Komersialisasi	0,40

ASPEK	Bobot Aspek	PILAR	Bobot Pilar	DIMENSI	Bobot Dimensi	INDIKATOR	Bobot
						Jumlah sistem hak merk dagang di daerah yang teregistrasi	0,50
						Kondisi Techno Park dan Pusat Unggulan Iptek (PUI)	0,20
				Telematika	0.40	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	0,60
						Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0,40
				Teknologi	0,60	Ketersediaan jumlah inovasi teknologi di daerah	1,00

3. Sumber dan Metode Pemetaan Data

Kuisisioner dalam bentuk Database Aplikasi Indeks Daya Saing Daerah terbagi atas 2 (dua) jenis data yakni data primer dan data sekunder. Dari 78 indikator, dapat diidentifikasi sumber datanya. Sebagian besar data sekunder terdapat atau berasal dari BPS, Bappeda, Litbang dan Perguruan Tinggi, sementara sisanya tersebar di beberapa kementerian Lembaga dan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Namun demikian pemetaan sebaran data tersebut tidaklah mutlak demikian, karena berdasarkan hasil uji terapan terdapat beberapa data yang terdapat di berbagai OPD yang berbeda di setiap daerah. Hal ini terkait dengan berbagai bentuk OPD dengan Tupoksi yang berbeda-beda.



Gambar 3.3. Grafik Sebaran Sumber Data

4. **Kepesertaan**

Bersifat terbuka bagi seluruh pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi beserta stakeholdernya (Bappeda, Balitbangda, Dinas/Instansi yang mengurus bidang perindustrian dan perdagangan, Dinas/Instansi yang menangani perizinan dan investasi, Dinas/Instansi yang menangani Infrastruktur, Dinas/Instansi yang menangani masalah pengelolaan keuangan dan aset daerah, Dinas/Instansi yang menangani bidang koperasi, Dinas/Instansi yang menangani bidang pendidikan, BPS Daerah, Kadin dan asosiasi usaha di Daerah, Rektor/Ketua LPPM Perguruan Tinggi dan Lembaga litbang Setempat dan lainnya yang relevan dengan komponen IDSD).

5. **Pelaksanaan**

Kegiatan Pemetaan Data dibentuk melalui Tim terpadu yang terdiri dari Direktorat Sistem Inovasi, Ditjen Penguatan Inovasi, Kemristekdikti dengan Badan Penelitian Pengembangan, Kemendagri. Dalam pelaksanaannya,

Metode Pengisian Data Pemetaan bersifat partisipatif dan terbuka bagi seluruh pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi beserta stakeholdernya (Bappeda, Balitbangda, Dinas/Instansi yang mengurus bidang perindustrian dan perdagangan, Dinas/Instansi yang menangani perizinan dan investasi, Dinas/Instansi yang menangani Infrastruktur, Dinas/Instansi yang menangani masalah pengelolaan keuangan dan aset daerah, Dinas/Instansi yang menangani bidang koperasi, Dinas/Instansi yang menangani bidang pendidikan, BPS Daerah, Kadin dan asosiasi usaha di Daerah, Rektor/Ketua LPPM Perguruan Tinggi dan Lembaga litbang Setempat dan lainnya yang relevan dengan komponen IDSD). Tim Terpadu bekerja dalam hal proses administrasi, verifikasi, pengawalan substansi dan penyusunan laporan tingkat daya saing Kabupaten dan Kota. Sebanyak 78 pertanyaan kuesioner Indeks Daya Saing Daerah diisi melalui aplikasi database Indeks Daya Saing Daerah, kemudian dilakukan perhitungan indeks secara otomatis oleh sistem aplikasi,

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daerah dengan skor IDSD tertinggi diartikan sebagai daerah yang berhasil secara optimal memanfaatkan segala potensi yang dimiliki sebagai upaya menciptakan daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

3.2. **METODE ANALISIS**

Metode Analisis Dalam menganalisis kemampuan daya saing daerah Provinsi/kabupaten/kota di Indonesia, dilakukan melalui tiga tahapan analisis. Berikut tahapan analisis yang dilakukan:

1. **Menganalisis Kemampuan Daya Saing Daerah**

Dalam menganalisis kemampuan daya saing daerah kabupaten/kota, dilakukan dengan menghitung jumlah tertimbang dari semua variabel, yang sudah ditransformasikan kedalam angka semi-standardized dengan menggunakan bobot yang diperoleh dari hasil jawaban dari kuisisioner AHP yang sudah di transformasikan kedalam expert choice. Jumlah tertimbang angka semi-standardized yang tinggi mengindikasikan tingkat daya saing yang lebih tinggi pula.

2. **Melakukan Pemetaan Daya Saing Daerah**

Gambaran daya saing daerah, merupakan representasi dari kinerja indikator-indikator pembentuk daya saing tersebut, semakin baik kinerja indikator-indikator tersebut maka semakin tinggi pula daya saing daerah suatu kabupaten/kota, dan adapun juga sebaliknya. Untuk melakukan pemetaan daya saing daerah, dilakukan dahulu pemetaan daerah berdasarkan 4 Aspek. Pemetaan daya saing

daerah disini berfungsi untuk mengetahui dimana posisi daya saing tiap Provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Setelah itu, mengklasifikasikan daerah kedalam peta berdasarkan skor daya saing.

Metode Kuadran adalah salah satu cara memetakan kemampuan Daya Saing Daerah, Masing – masing kuadran ditentukan oleh besaran nilai indeks dan aspek-aspeknya Dengan Nilai Indeks dan aspek – aspeknya maka dapat diketahui pada kuadran berapa posisi masing –masing provinsi tersebut

<p>KUADRAN II</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi belum ideal, tapi daerah punya kemampuan untuk mengembangkannya sehingga aspek-aspek daya saing berpeluang untuk meningkatkan nilai indeksnya. • Kontribusi dari aspek-aspek daya saingnya masih rendah, namun nilai indeksnya tinggi 	<p>KUADRAN I</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi paling ideal, aspek – aspek Daya Saing mengambil peran besar dalam pencapaian Nilai Indeks dan daerah punya kemampuan untuk mengembangkannya. • Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai dari aspek – aspek daya saing disertai dengan nilai indeks yang tinggi
<p>KUADRAN III</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi ini jauh dari ideal • Aspek – aspek daya saing belum memberikan kontribusi yang besar dalam pencapain nilai indeks. Dan daerah belum memiliki kemampuan untuk mengembangkannya • Kontribusi dari aspek –aspek daya saingnya rendah dan nilai indeksnya rendah 	<p>KUADRAN IV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi ini juga belum ideal, capaian nilai indeksnya tinggi memiliki peluang mengalami penurunan dikarenakan nilai aspek –aspek daya saingnya yang rendah. • Capaian nilai indeksnya tinggi, namun kontribusi dari aspek-aspek daya saingnya rendah

3. Merumuskan Daya Saing Pengembangan berdasarkan Potensi Daya Saing

Dari hasil pemetaan daya saing daerah, dilakukan penyusunan upaya pengembangan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Tujuan dari analisis ini adalah mengetahui faktor apa saja yang bisa meningkatkan daya saing daerah berdasarkan prioritas faktor penentu daya saing daerah terhadap kondisi empiris di lapangan. Analisis tersebut akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota. Hasil yang diharapkan adalah dapat memberikan petunjuk untuk menentukan upaya pengembangan yang cocok untuk kabupaten/kota berdasarkan pada prioritas faktor penyebab yang didukung dengan hasil analisis skor daya saing dan peringkat perekonomian daerah serta analisis perkembangan daya saing perekonomian daerah serta hasil neraca daya saing yang menentukan faktor-faktor keuntungan dan keterbatasan.

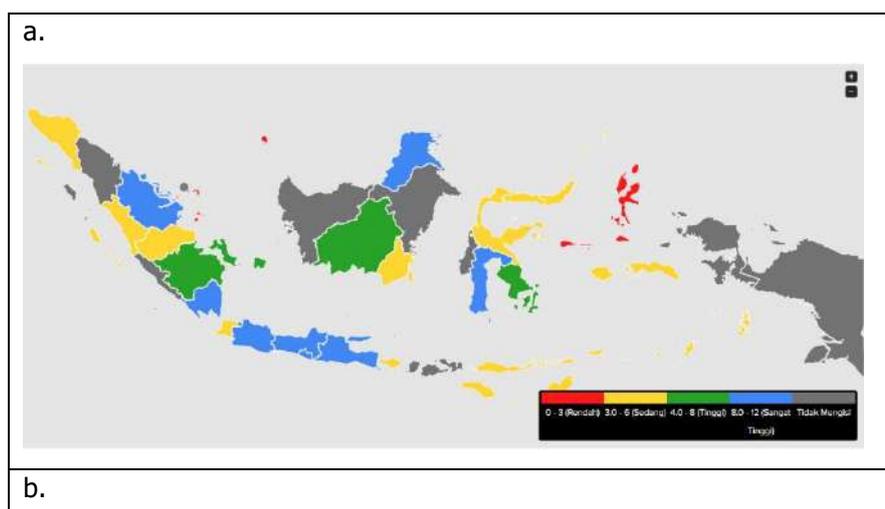
BAB 4 PEMBAHASAN DAN HASIL

Pemetaan indeks daya saing daerah (IDSD) yang diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah.

Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional. Pengukuran IDSD diharapkan menjadi salah satu dasar utama penyusunan dan penetapan kebijakan nasional maupun daerah yang mendorong sinergi program antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan daerah yang inovatif.

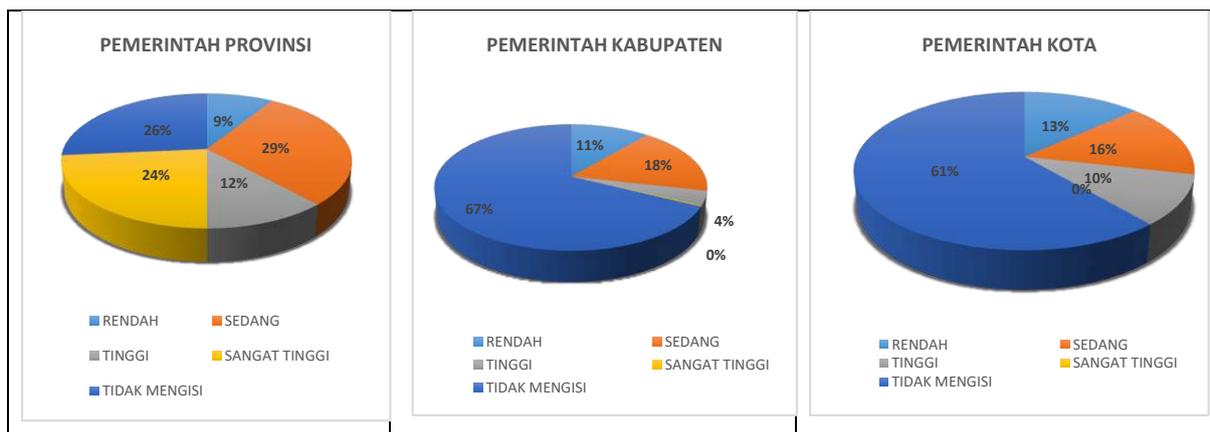
4.1. Sebaran Geografis

Tahun 2019 Sebanyak **199** Pemerintah Daerah yang melakukan pemetaan indeks daya saing daerah (IDSD) yang terdiri dari **25** Provinsi, **136** Kabupaten dan **38** Kota (Gambar 4.1). Sebanyak 173 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dari Total **514** Pemerintah Daerah yang melakukan Pemetaan. Itu artinya baru **34%** yang melakukan Pemetaan indeks Daya Saing, hal ini disebabkan kurang menyeluruhnya sosialisasi mengenai Pemetaan indeks daya saing, Masih kurang kesadaran dari Pemerintah Daerah untuk Memetakan tingkat daya saing daerah sebagai bagian dari upaya untuk mendukung kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia; Belum menjadikan Indeks daya saing daerah sebagai bahan dalam perumusan, penetapan, evaluasi dan monitoring kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.





Gambar 4.1. Sebaran Wilayah Pemetaan Indeks Daya Saing Daerah di Indonesia. : (a) untuk wilayah Provinsi (b) untuk wilayah Kabupaten dan Kota



Gambar 4.2. Pemetaan Indeks Daya Saing Daerah di Indonesia berdasarkan katagori : (a) Pemerintah Provinsi (b) Pemerintah Kabupaten dan (c) Pemerintah Kota

Untuk Pemerintah Daerah tingkat Provinsi 24% memiliki skor dengan katagori "Sangat Tinggi" , 12% memiliki skor dengan Katagori "Tinggi", 26% memiliki skor dengan Katagori "Sedang" dan 29% Katagori "Rendah", Terdapat 9 Propinsi yang belum melakukan pemetaan Indeks Daya Saing Daerah yaitu Sumatera Utara, Bengkulu, DKI Jakarta Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Papua dan Papua Barat. (Gambar 2a). Kemudian Untuk Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten 4% memiliki skor dengan Katagori "Tinggi", 18% memiliki skor dengan Katagori "Sedang", 11% memiliki skor dengan "Katagori Rendah" dan tidak ada yang memiliki skor dengan Katagori "Sangat Tinggi". Sebanyak 67% atau 281 Kabupaten di Indonesia yang belum melakukan pemetaan Indeks Daya Saing Daerah. (Gambar 2b). Serta Untuk Pemerintah Daerah tingkat Kota 10% memiliki skor dengan Katagori "Tinggi", 16% memiliki skor dengan Katagori "Sedang" dan 13% memiliki Katagori "Rendah" dan tidak ada yang memiliki skor dengan Katagori "Sangat Tinggi". Sejumlah 61% atau 65 Kota di Indonesia yang belum melakukan pemetaan Indeks Daya Saing Daerah. (Gambar 2c)

Di Wilayah Sumatera dan Jawa, yang melakukan pemetaan indeks Daya saing Daerah sebanyak 14 Provinsi dari 16 Provinsi , 96 Kabupaten dari 205 Kabupaten dan 28 Kota dari 66 Kota di Wilayah Sumatera dan Jawa. **Di Wilayah Kalimantan**, yang melakukan pemetaan indeks Daya saing Daerah sebanyak 3 Provinsi dari 5 Provinsi , 6 Kabupaten dari 47 Kabupaten dan 3 Kota dari 9 Kota di Wilayah Kalimantan. **Di Wilayah Sulawesi**, yang melakukan pemetaan indeks Daya saing Daerah sebanyak 5 Provinsi dari 6 Provinsi , 20 Kabupaten dari 70 Kabupaten dan 4 Kota dari 11 Kota di Wilayah

Sulawesi. Di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, yang melakukan pemetaan indeks Daya saing Daerah sebanyak 2 Provinsi dari 3 Provinsi , 10 Kabupaten dari 37 Kabupaten dan 1 Kota dari 4 Kota di **Bali dan Nusa Tenggara. Di Wilayah Maluku Dan Papua**, yang melakukan pemetaan indeks Daya saing Daerah sebanyak 2 Provinsi dari 4 Provinsi , 3 Kabupaten dari 57 Kabupaten dan 3 Kota dari 6 Kota di Wilayah **Maluku Dan Papua**.

4.2. Sebaran Geografis Terhadap Empat Kondisi (Aspek, Pilar, Dimensi, Indikator)

Indeks Daya Saing Daerah merupakan kuantifikasi dari kekuatan atau kondisi yang dimiliki daerah, dalam kajian ini diwakili dengan 4 (empat) Aspek yaitu Aspek Penguat/Enabling Environment, Sumber Daya , Aspek Manusia/Human Capital, Aspek Pasar/Market, Aspek Ekosistem Inovasi. Indeks Daya Saing Daerah terdiri dari indikator yang mewakilinya dengan jenis data yaitu primer dan sekunder.

Setelah melakukan analisa deskriptif diatas, dilanjutkan dengan analisa dari 4 (empat) Aspek. Analisa ini bertujuan : (1) Mengetahui keunggulan kompetitif dari masing-masing pemerintah provinsi sehingga dapat memberikan profiling faktor mana yang memberikan kontribusi dominan atau signifikan dalam membentuk daya saing daerah bersangkutan. (2) Melakukan penggalian mendalam terhadap kelemahan keseluruhan daya saing pemerintah daerah yang tergambar dari 4 (empat) Aspek.

Indeks dari 4 (empat) Aspek dan Indeks Daya dari 25 pemerintah provinsi disajikan pada **Tabel 4.1 , Gambar 4.3 dan 4.4**. Skor Indeks yang paling tinggi adalah Provinsi Jawa Barat sebesar 11,75600 dan paling rendah adalah Provinsi Kep. Kep.Riau sebesar 2,26170.. Sedangkan Indeks Aspek Penguat/Enabling Environment tertinggi dimiliki oleh Jawa Tengah dengan 1,40310 dan terendah adalah Maluku dengan 0,40310, Indeks Sumber Daya Manusia/Human Capital tertinggi dimiliki oleh Jawa Barat dengan 6,05330 dan terendah adalah Kep.Riau dengan 0,25330, Sedangkan Indeks Pasar/Market tertinggi dimiliki oleh Jawa Barat dengan 1,57390 dan terendah adalah Prop. Maluku dengan 0,11670 Dan Indeks Ekosistem Inovasi tertinggi dimiliki oleh Jawa Barat dengan 2,81940 dan terendah adalah Prop. Maluku dengan 0. Sekilas menunjukkan bahwa indeks daya saing dipengaruhi dominan terutama oleh Indeks Sumber Daya Manusia/Human Capital.

Tabel 4.1. Indeks dari 4 (empat) Aspek dan Indeks Daya dari 25 pemerintah provinsi

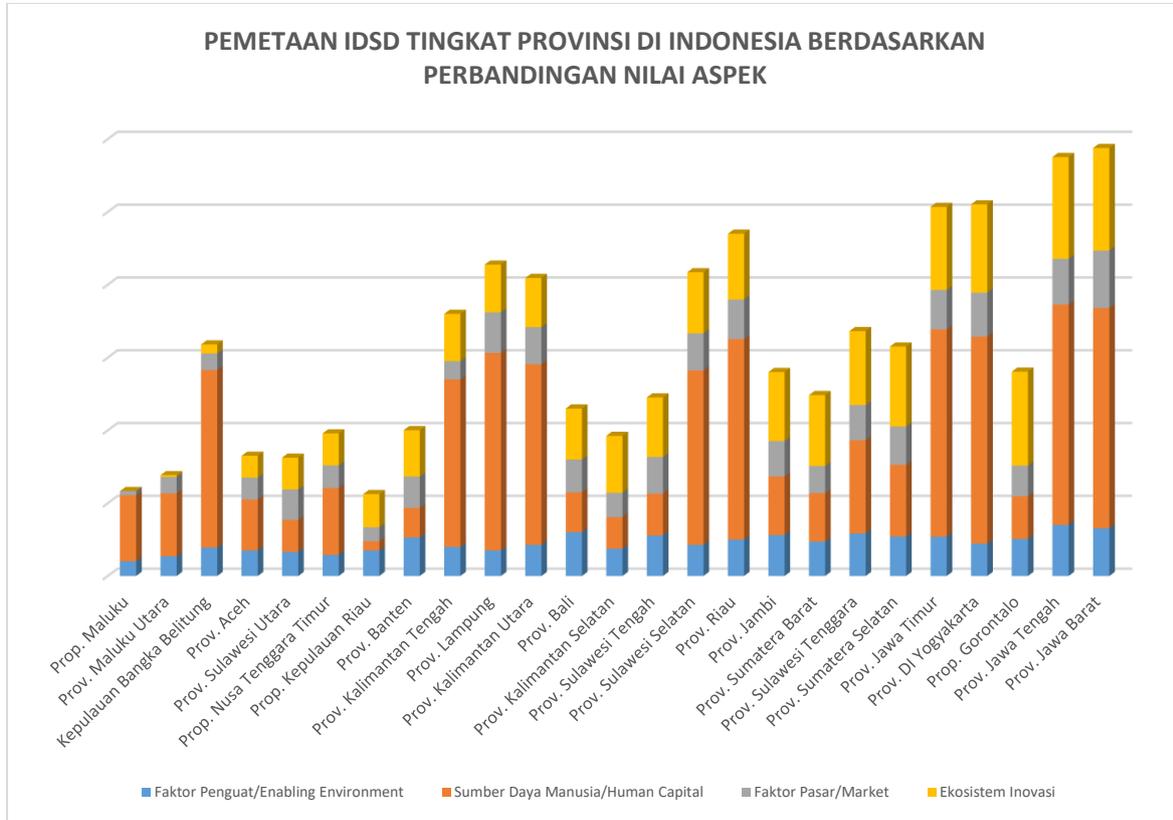
Nama Daerah	ASPEK				Nilai Indeks
	Faktor Penguat/Enabling Environment	Sumber Daya Manusia/Human Capital	Faktor Pasar/Market	Ekosistem Inovasi	
Prov. Aceh	0,70000	1,40000	0,60000	0,60000	3,34920
Prov. Sumatera Barat	0,94380	1,33330	0,74250	1,94800	4,96750
Prov. Riau	1,00000	5,50670	1,08670	1,80740	9,42260
Prov. Jambi	1,12190	1,61330	0,97220	1,89315	5,60060
Prov. Sumatera Selatan	1,08130	1,97330	1,05140	2,19590	6,30190
Prov. Lampung	0,70000	5,42670	1,11460	1,31130	8,55255
Prov. Prop.Bangka Belitung	0,77813	4,88000	0,45250	0,24815	6,35877
Prop. Kepulauan Riau	0,70000	0,25330	0,38470	0,91110	2,26170
Prov. Jawa Barat	1,30940	6,05330	1,57390	2,81940	11,75600
Prov. Jawa Tengah	1,40310	6,05330	1,25560	2,79540	11,50740
Prov. DI Yogyakarta	0,88440	5,69330	1,20290	2,42700	10,20770
Prov. Jawa Timur	1,07810	5,69330	1,08360	2,28280	10,13780
Prov. Banten	1,05625	0,81333	0,86194	1,27167	4,00319
Prov. Bali	1,20000	1,10000	0,90000	1,40000	4,68600
Prop. Nusa Tenggara Timur	0,57813	1,84000	0,61972	0,87778	3,91563
Prov. Kalimantan Tengah	0,80000	4,60000	0,50000	1,30000	7,20270

Prov. Kalimantan Selatan	0,75000	0,86670	0,66990	1,56220	3,84875
Prov. Kalimantan Utara	0,85630	4,96000	1,01630	1,35170	8,18420
Prov. Sulawesi Utara	0,65940	0,88000	0,83830	0,87130	3,24900
Prov. Sulawesi Tengah	1,11250	1,14667	1,00764	1,63611	4,90292
Prov. Sulawesi Selatan	0,85625	4,78667	1,02361	1,67574	8,34227
Prov. Sulawesi Tenggara	1,16880	2,56000	0,96490	2,03260	6,72620
Prop. Gorontalo	1,01560	1,17330	0,84030	2,58260	5,61180
Prop. Maluku	0,40310	1,81330	0,11670	0,00000	2,33310
Prov. Maluku Utara	0,53750	1,73330	0,44690	0,05110	2,76890
Maksimum	1,40310 (Jawa Tengah)	6,05330 (Jawa Barat)	1,57390 (Jawa Barat)	2,81940 (Jawa Barat)	11,75600 (Jawa Barat)
Minimum	0,40310 (Prop. Maluku)	0,25330 (Kep.Riau)	0,11670 (Prop. Maluku)	0,00000 (Prop. Maluku)	2,26170 (Kep.Riau)



Gambar 4.3. Skor Indeks dari 25 pemerintah provinsi

PEMETAAN IDSD TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA BERDASARKAN PERBANDINGAN NILAI ASPEK



Gambar 4.4. Perbandingan Indeks dari 4 (empat) Aspek dari 25 pemerintah provinsi

Indeks dari 4 (empat) Aspek dan Indeks Daya dari 136 pemerintah kabupaten disajikan pada **Tabel 4.2**, **Gambar 4.5** dan **4.6**. Skor Indeks yang paling tinggi adalah Kabupaten Bogor sebesar 8,52350 dan paling rendah adalah Kabupaten Dairi sebesar 0,34240. Sedangkan Indeks Aspek Penguat/Enabling Environment tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Bantul dengan 1,50940 dan terendah adalah Kabupaten Dairi dengan 0,09380, , Indeks Sumber Daya Manusia/Human Capital tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Bantul dengan 7,28000 dan terendah adalah Kabupaten Dairi dengan 0 Sedangkan Indeks Pasar/Market tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Belitung dengan 3,43750 dan terendah adalah Kab. Parigi Moutong dengan 0 Dan Indeks Ekosistem Inovasi tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Bantul dengan 3,31110 dan terendah adalah Kab.Lima Puluh Kota dengan 0. Sekilas menunjukkan bahwa indeks daya saing dipengaruhi dominan terutama oleh Indeks Sumber Daya Manusia/Human Capital.

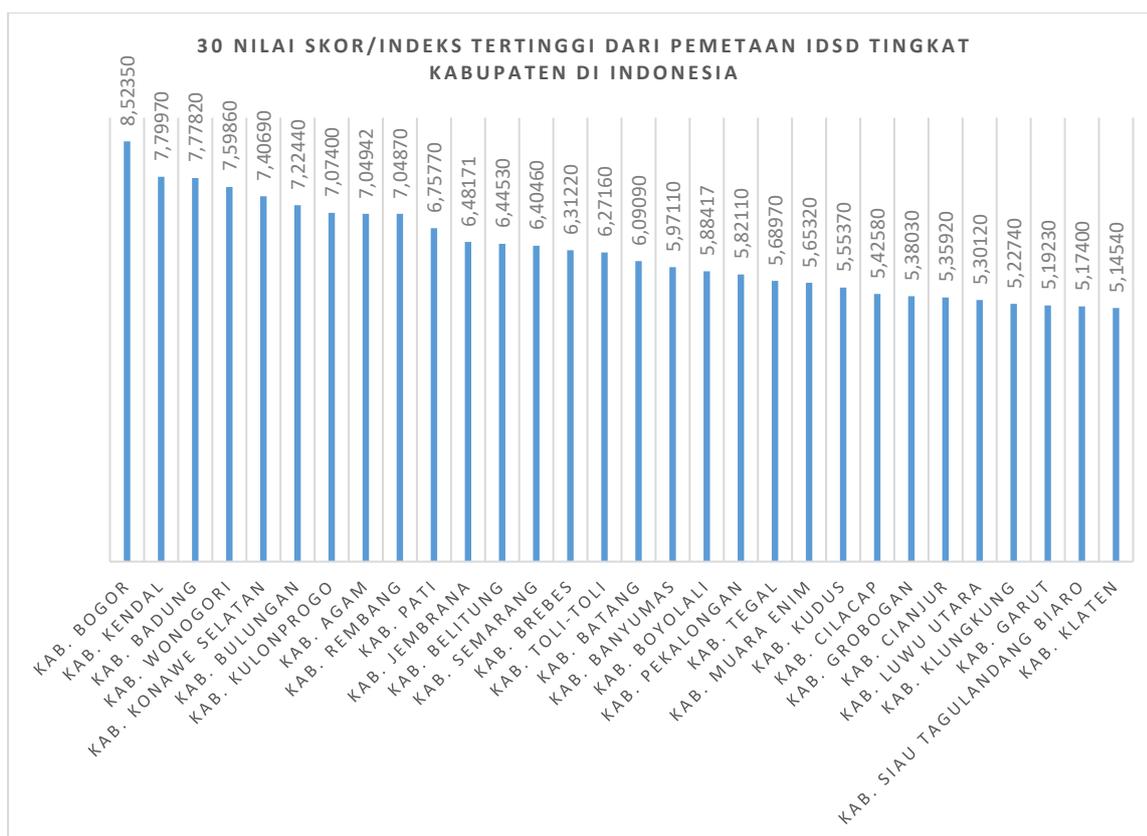
Tabel 4.2. Indeks dari 4 (empat) Aspek dan Indeks Daya dari 127 pemerintah kabupaten

Nama Daerah	Faktor Penguat/Enabling Environment	Sumber Daya Manusia/Human Capital	Faktor Pasar/Market	Ekosistem Inovasi	Nilai Indeks
Kab. Aceh Timur	0,35000	0,28000	0,29960	0,24870	1,17830
Kab. Pidie	0,20630	1,86670	0,15210	0,33330	2,55830
Kab. Gayo Lues	0,21560	0,06670	0,09380	0,29333	0,66940
Kab. Aceh Jaya	0,31563	0,45333	0,66833	0,46407	1,90137
Kab. Pidie Jaya	0,57500	0,12000	0,54510	0,74090	1,98110
Kab. Mandailing Natal	0,30000	1,80000	0,20000	0,40000	2,66850

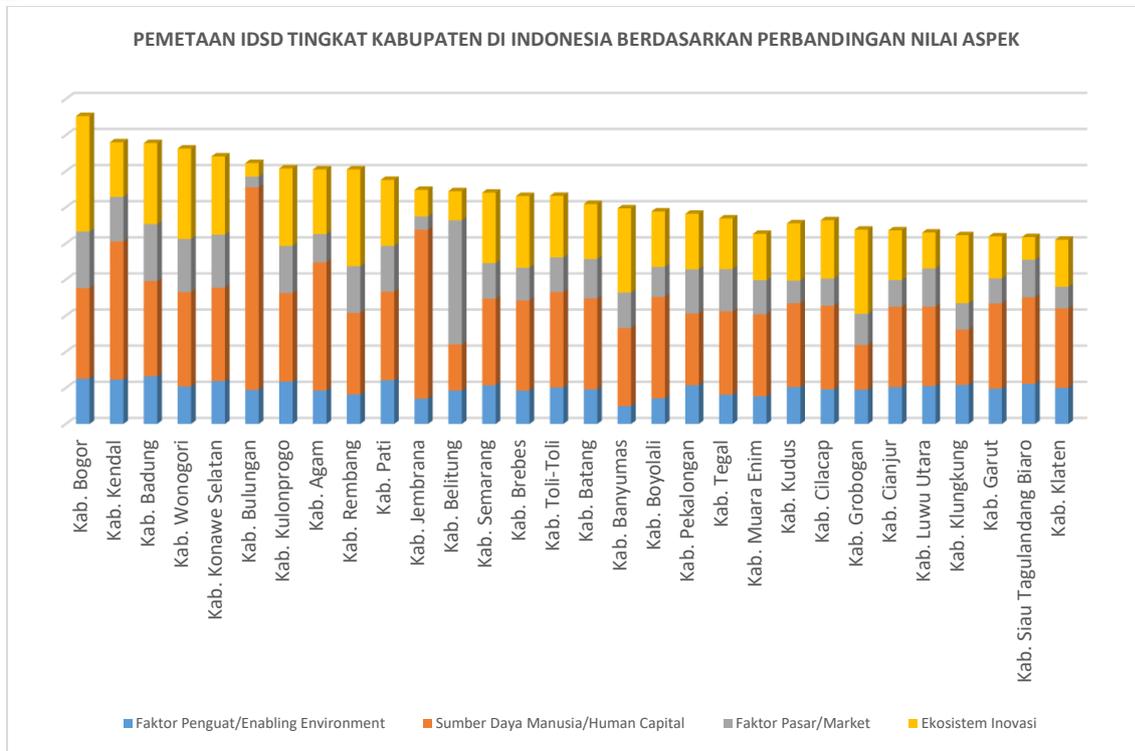
Kab. Tapanuli Selatan	0,47190	0,30670	0,39710	0,54430	1,71990
Kab. Tapanuli Tengah	0,59690	0,37330	0,65900	1,33190	2,96110
Kab. Toba Samosir	0,36880	0,20000	0,48040	0,94500	1,99420
Kab. Labuhan Batu	0,77810	0,36000	0,63630	1,26830	3,04270
Kab. Dairi	0,09380	0,00000	0,08750	0,16111	0,34240
Kab. Karo	0,93750	0,50670	0,67670	0,95370	3,07450
Kab. Langkat	0,26560	4,64000	0,26500	0,46300	2,84900
Kab. Nias Selatan	0,52190	1,78670	0,21940	0,88800	3,41590
Kab. Pakpak Barat	0,64380	1,84000	0,46290	1,01833	3,96500
Kab. Samosir	0,85630	0,60000	0,81070	1,77440	4,04140
Kab. Batu Bara	0,39380	0,18670	0,09540	0,36500	1,04080
Kab. Pesisir Selatan	0,86250	1,90670	0,55510	0,79240	4,11670
Kab. Sijunjung	0,54690	1,93330	0,54880	0,49410	3,52300
Kab. Padang Pariaman	0,52500	1,68000	0,15210	1,00800	3,36500
Kab. Agam	0,92813	3,54667	0,78167	1,79296	7,04942
Kab. Lima Puluh Kota	0,56880	0,00000	0,08750	0,00000	0,65630
Kab. Pasaman	1,04690	2,45330	0,73310	0,76070	4,99400
Kab. Solok Selatan	0,48440	1,93330	0,29040	0,54130	3,24940
Kab. Pasaman Barat	0,29060	0,06670	0,26380	0,44540	1,06640
Kab. Merangin	1,16880	0,98670	1,17140	1,42190	4,74870
Kab. Sarolangun	0,49690	2,01330	0,69040	0,67740	3,87800
Kab. Batang Hari	0,19690	0,42670	0,52040	0,09960	1,66090
Kab. Tanjung Jabung Timur	0,69060	1,72000	0,48690	0,82800	3,72550
Kab. Bungo	0,50630	0,20000	0,51720	0,32241	1,54590
Kab. Ogan Komering Ilir	0,62813	0,73333	0,68028	0,00000	2,04174
Kab. Muara Enim	0,76560	2,26670	0,94680	1,28430	5,65320
Kab. Musi Rawas	0,64380	1,89330	0,60570	1,30240	4,44520
Kab. Banyu Asin	0,91880	0,57330	0,44900	0,00000	1,94110
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	0,66880	1,14670	0,91860	0,67574	3,40980
Kab. Bengkulu Utara	0,29060	0,20000	0,04380	0,22500	0,75940
Kab. Lampung Barat	0,37810	0,09330	0,14280	0,41690	1,03110
Kab. Lampung Tengah	0,78750	2,42670	0,42460	1,21130	4,85000
Kab. Pringsewu	0,54380	0,42670	0,38320	0,66040	2,01400
Kab. Belitung	0,92188	1,28000	3,43750	0,80593	6,44530
Kab. Bangka Barat	0,70313	1,06667	0,64417	0,89630	3,31025
Kab. Bangka Tengah	0,80940	0,24000	0,53860	0,71480	2,30280
Kab. Bangka Selatan	0,38125	0,56000	0,45167	0,05185	1,44477
Kab. Belitung Timur	0,75938	1,06667	0,78417	1,91852	4,52873
Kab. Bintan	1,02813	2,04000	0,68500	1,07833	4,83146
Kab. Bogor	1,25310	2,50670	1,56500	3,19870	8,52350
Kab. Cianjur	1,01880	2,22670	0,73690	1,37685	5,35920
Kab. Garut	0,97500	2,36000	0,69030	1,16704	5,19230
Kab. Ciamis	0,55310	0,13330	0,04280	0,73330	1,46260
Kab. Kuningan	0,26250	0,26670	0,27040	0,25890	1,05850
Kab. Sumedang	0,78130	1,14670	0,60030	1,28980	3,81800
Kab. Purwakarta	0,54380	1,73330	0,21880	0,23330	2,72920
Kab. Bandung Barat	0,49690	0,54670	0,70130	0,54430	2,28910
Kab. Pangandaran	0,75310	1,86670	0,43130	0,49960	3,55070
Kab. Cilacap	0,95630	2,32000	0,74750	1,61870	5,42580
Kab. Banyumas	0,49690	2,16000	0,97960	2,33460	5,97110
Kab. Purbalingga	1,02190	0,42670	0,59040	1,26310	3,30210
Kab. Banjarnegara	0,94690	0,60000	0,91380	1,57090	4,03160
Kab. Kebumen	1,03130	1,22670	0,99470	1,30460	4,55730
Kab. Purworejo	0,85310	1,94670	0,88080	1,33930	5,01990
Kab. Wonosobo	0,95000	0,62670	1,00240	1,74200	4,32110
Kab. Magelang	1,16880	0,89330	1,09880	1,77260	4,83340
Kab. Boyolali	0,70625	2,81333	0,82903	1,53556	5,88417
Kab. Klaten	1,00000	2,20000	0,60000	1,30000	5,14540
Kab. Sukoharjo	0,67190	0,24000	0,67040	0,63130	2,21360
Kab. Wonogori	1,03750	2,61330	1,47180	2,50260	7,59860

Kab. Karanganyar	0,95310	0,46670	0,94030	0,76944	3,12950
Kab. Sragen	1,08440	0,97330	0,79140	1,84610	4,69520
Kab. Grobogan	0,94690	1,24000	0,86360	2,32980	5,38030
Kab. Blora	0,66880	1,89330	0,56880	1,19870	4,32950
Kab. Rembang	0,81880	2,25330	1,29470	2,68190	7,04870
Kab. Pati	1,20940	2,45330	1,26390	1,83110	6,75770
Kab. Kudus	1,02190	2,32000	0,62350	1,58830	5,55370
Kab. Jepara	0,96560	1,13330	0,60880	0,86593	3,57363
Kab. Demak	0,51560	1,97330	0,62750	1,59796	4,71440
Kab. Semarang	1,06790	2,40000	0,98360	1,95310	6,40460
Kab. Temanggung	0,57500	2,10670	0,44900	0,91020	4,04090
Kab. Kendal	1,22813	3,82667	1,22972	1,51519	7,79970
Kab. Batang	0,95630	2,52000	1,08880	1,52590	6,09090
Kab. Pekalongan	1,07190	1,98670	1,22130	1,54130	5,82110
Kab. Pemasang	1,09690	0,49330	0,84310	2,20870	4,64200
Kab. Tegal	0,80940	2,30670	1,16920	1,40440	5,68970
Kab. Brebes	0,92500	2,49330	0,90560	1,98833	6,31220
Kab. Kulonprogo	1,17190	2,45330	1,30310	2,14570	7,07400
Kab. Bantul	1,50940	7,28000	2,01170	3,31110	1,94110
Kab. Gunung Kidul	0,95630	0,46670	0,93390	1,83130	4,18810
Kab. Sleman	0,67190	0,69330	0,24810	1,04870	2,66200
Kab. Trenggalek	0,90940	0,32000	0,60290	1,07560	2,90780
Kab. Blitar	0,70940	2,01330	0,65610	1,24060	4,61940
Kab. Malang	1,02500	0,53330	0,96960	2,04330	4,57130
Kab. Pasuruan	0,43440	1,86670	0,46600	0,34590	3,11290
Kab. Jombang	0,67500	2,04000	0,58210	0,82833	4,12540
Kab. Madiun	0,42810	1,73330	0,38030	0,73330	3,27510
Kab. Magetan	0,55938	0,61333	0,27667	1,25963	2,70900
Kab. Ngawi	0,75313	1,17333	0,18444	1,59741	3,70831
Kab. Lamongan	0,68750	2,49330	0,65920	0,88170	4,72170
Kab. Jembrana	0,70000	4,68000	0,36380	0,73796	6,48171
Kab. Tabanan	0,36560	1,92000	0,31150	0,54720	3,14440
Kab. Badung	1,31880	2,64000	1,57390	2,24560	7,77820
Kab. Gianyar	0,36560	1,94670	0,91880	0,96685	4,19790
Kab. Klungkung	1,07810	1,53330	0,72990	1,88610	5,22740
Kab. Bangli	0,80940	0,89330	0,52310	0,71390	3,27299
Kab. Karangasem	0,93440	0,28000	0,39850	0,61315	2,22600
Kab. Buleleng	0,99690	2,28000	0,43710	1,08556	4,79950
Kab. Sumbawa	0,84380	1,93330	0,44130	1,19350	4,41190
Kab. Ende	0,65310	0,24000	0,65940	0,76670	2,31920
Kab. Barito Selatan	0,72810	0,00000	0,00000	0,18480	0,91290
Kab. Lamandau	0,74688	1,68000	0,32806	0,10000	2,85493
Kab. Paser	1,06250	1,92000	0,35380	0,71940	3,81630
Kab. Malinau	0,80000	2,40000	0,36710	0,64240	4,20950
Kab. Bulungan	0,94060	5,61330	0,29210	0,37833	7,22440
Kab. Tanatidung	0,40630	0,14670	0,33040	0,88060	1,76390
Kab. Kepulauan Sangihe	0,50940	2,16000	0,33540	1,20800	4,21280
Kab. Kepulauan Talaud	0,93440	2,10670	0,54630	0,65650	4,24380
Kab. Bolaang Mongondow Utara	0,84380	0,37330	0,75290	1,01040	2,98040
Kab. Siau Tagulandang Biaro	1,10940	2,40000	1,03570	0,62890	5,17400
Kab. Banggai Kepulauan	0,30940	1,92000	0,06150	0,60330	2,89420
Kab. Toli-Toli	1,00940	2,64000	0,96170	1,70430	6,27160
Kab. Parigi Moutong	0,61880	0,00000	0,00000	0,44300	1,06170
Kab. Tojo Una Una	0,60940	2,00000	0,34040	0,35930	3,30910
Kab. Sigi	0,77190	0,69330	0,65880	0,69940	2,82340
Kab. Sinjai	0,36880	0,17330	0,45320	0,59910	1,59440
Kab. Maros	1,02190	2,37330	0,27610	0,44070	4,11210
Kab. Pangkajene dan Kepulauan	0,76250	1,93330	0,88460	1,20280	4,78320
Kab. Barru	0,97190	2,22670	0,50540	0,99690	4,70080
Kab. Wajo	0,52190	0,20000	0,22380	0,43850	1,38410

Kab. Sidenreng Rappang	0,50000	0,10000	0,40000	0,10000	1,10410
Kab. Luwu Utara	1,05000	2,20000	1,05310	0,99810	5,30120
Kab. Konawe Selatan	1,18750	2,58670	1,46500	2,16780	7,40690
Kab. Bombana	0,65310	0,49330	0,94010	1,36630	3,45290
Kab. Gorontalo Utara	0,67190	0,33330	0,61850	0,34185	1,96550
Kab. Mamuju Tengah	0,55000	0,41330	0,58420	0,81260	2,36010
Kab. Halmahera Selatan	0,85940	2,18670	0,77130	0,55759	4,37490
Kab. Fak-fak	0,68750	1,76000	0,58000	0,66870	3,69620
Kab. Merauke	0,95630	2,22670	0,38860	0,77130	4,34280
Maksimum	1,50940 (Kab. Bantul)	7,28000 (Kab. Bantul)	3,43750 (Kab. Belitung)	3,31110 (Kab. Bantul)	8,52350 (Kab. Bogor)
Minimum	0,09380 (Kab. Dairi)	0,00000 (Kab. Dairi)	0,00000 (Kab. Parigi Moutong)	0,00000 (Kab. Lima Puluh Kota)	0,34240 (Kab. Dairi)



Gambar 4.5. Skor Indeks dilihat dari 30 nilai SKOR/INDEKS IDSD tertinggi DARI PEMETAAN IDSD TINGKAT kabupaten



Gambar 4.6. Perbandingan Indeks dari 4 (empat) Aspek dilihat dari 30 nilai SKOR/INDEKS IDSD tertinggi DARI PEMETAAN IDSD TINGKAT kabupaten

Indeks dari 4 (empat) Aspek dan Indeks Daya dari 38 pemerintah kota disajikan pada **Tabel 4.3** , **Gambar 4.7 dan 4.8**. Skor Indeks yang paling tinggi adalah Kota Cimahi sebesar 7,95560 dan paling rendah adalah Kota Manado sebesar 0,51050. Sedangkan Indeks Aspek Penguat/Enabling Environment tertinggi dimiliki oleh Kota Surakarta dengan 1,33750 dan terendah adalah Kota Manado dengan 0,19060 , Indeks Sumber Daya Manusia/Human Capital tertinggi dimiliki oleh Kota Pariaman dengan 5,06667 dan terendah adalah Kota Manado dengan 0 Sedangkan Indeks Pasar/Market tertinggi dimiliki oleh Kota Cimahi dengan 1,48220 dan terendah adalah Kota Bandar Lampung dengan 0 Dan Indeks Ekosistem Inovasi tertinggi dimiliki oleh Kota Semarang dengan 2,84020 dan terendah adalah Kota Banjar dengan 0,03300 . Sekilas menunjukkan bahwa indeks daya saing dipengaruhi dominan terutama oleh Indeks Sumber Daya Manusia/Human Capital.

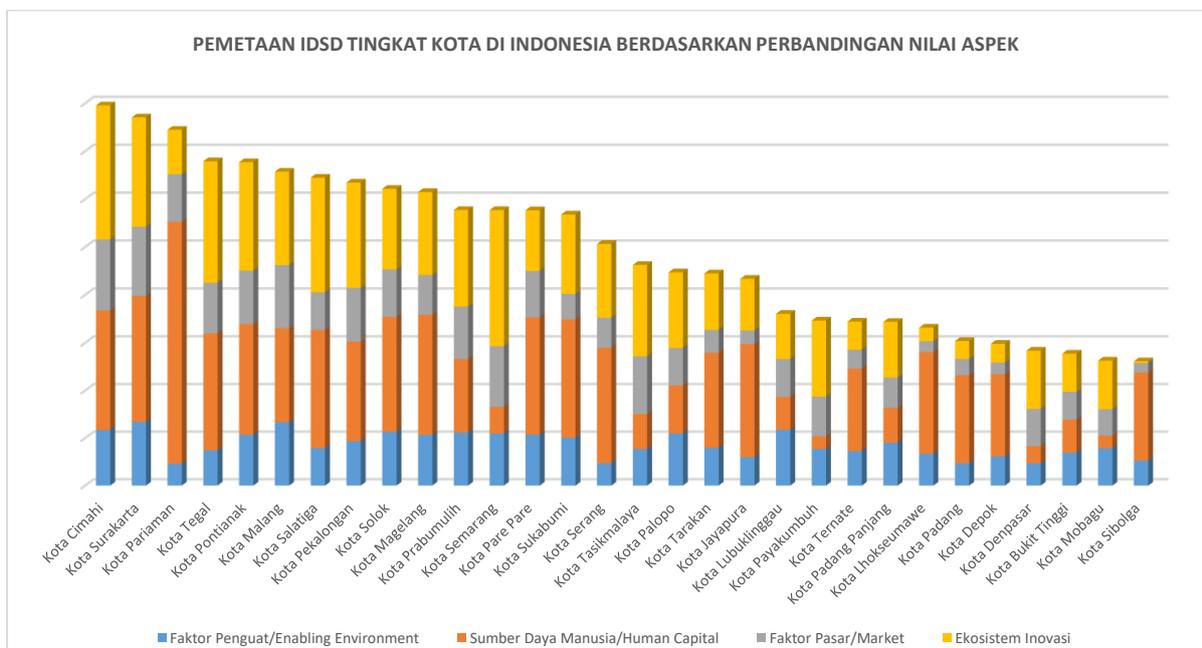
Tabel 4.3. Indeks dari 4 (empat) Aspek dan Indeks Daya dari 34 pemerintah kota

KODE_ID	Nama Daerah	Faktor Penguat/Enabling Environment	Sumber Daya Manusia/Human Capital	Faktor Pasar/Market	Ekosistem Inovasi	Nilai Indeks
1171	Kota Banda Aceh	0,98440	0,45330	0,32460	0,68330	2,44560
1174	Kota Lhokseumawe	0,67190	2,13330	0,22760	0,28330	3,31620
1271	Kota Sibolga	0,52500	1,85330	0,19580	0,04070	2,61490
1303	Kota Solok	1,13130	2,41330	0,98790	1,68200	6,21450
1371	Kota Padang	0,46880	1,85330	0,34210	0,37170	3,03580
1373	Kota Sawahlunto	0,36875	0,98667	0,48611	0,72333	2,56486
1374	Kota Padang Panjang	0,90000	0,73330	0,63530	1,16720	3,43580
1375	Kota Bukit Tinggi	0,69380	0,69330	0,58440	0,80200	2,77360

1376	Kota Payakumbuh	0,76880	0,26670	0,83640	1,59260	3,46440
1377	Kota Pariaman	0,45938	5,06667	0,99250	0,92889	7,44743
1672	Kota Prabumulih	1,11563	1,54667	1,09444	2,01519	5,77192
1673	Kota Lubuklinggau	1,17188	0,69333	0,79667	0,94259	3,60447
1871	Kota Bandar Lampung	0,56880	0,13330	0,00000	0,08000	0,78210
3271	Kota Sukabumi	1,00630	2,48000	0,53290	1,65870	5,67790
3274	Kota Bekasi	0,59690	0,38670	0,27150	0,33910	1,59410
3275	Kota Depok	0,61250	1,73330	0,24100	0,39190	2,97870
3276	Kota Cimahi	1,16880	2,50670	1,48220	2,79800	7,95560
3277	Kota Tasikmalaya	0,76875	0,73333	1,21556	1,90741	4,62505
3278	Kota Banjar	0,53440	0,58670	0,24380	0,03300	1,39780
3371	Kota Magelang	1,06560	2,52000	0,82960	1,73070	6,14590
3371	Kota Surakarta	1,33750	2,64000	1,44670	2,28120	7,70540
3373	Kota Salatiga	0,78750	2,48000	0,78610	2,39430	6,44790
3374	Kota Semarang	1,09380	2,1600	1,27600	2,84020	7,3699
3375	Kota Pekalongan	0,93130	2,09330	1,12060	2,19940	6,34460
3376	Kota Tegal	0,74380	2,45330	1,05630	2,53590	6,78930
3573	Kota Malang	1,33130	1,97330	1,31690	1,95190	6,57340
3672	Kota Cilegon	0,63750	0,18667	0,17972	0,96481	1,96870
3673	Kota Serang	0,46880	2,42670	0,62930	1,53980	5,06450
5171	Kota Denpasar	0,46880	0,36000	0,78560	1,22240	2,83670
6171	Kota Pontianak	1,06880	2,32000	1,11970	2,26300	6,77140
6271	Kota Palangka Raya	0,35630	0,10670	0,67380	1,11430	2,25090
6571	Kota Tarakan	0,79380	2,00000	0,47460	1,18020	4,44850
7171	Kota Manado	0,19060	0,00000	0,08650	0,23330	0,51050
7174	Kota Moberu	0,78440	0,26670	0,55540	1,02130	2,62780
7372	Kota Pare Pare	1,07500	2,45330	0,97350	1,26390	5,76570
7373	Kota Palopo	1,09380	1,01330	0,78670	1,57800	4,47170
8271	Kota Ternate	0,72500	1,73330	0,39680	0,58780	3,44290
9471	Kota Jayapura	0,59690	2,37330	0,28830	1,07740	4,33595
	Maksimum	1,33750 (Kota Surakarta)	5,06667 (Kota Pariaman)	1,48220 (Kota Cimahi)	2,84020 (Kota Semarang)	7,95560 (Kota Cimahi)
	Minimum	0,19060 (Kota Manado)	0,00000 (Kota Manado)	0,00000 (Kota Bandar Lampung)	0,03300 (Kota Banjar)	0,51050 (Kota Manado)



Gambar 4.7. Skor Indeks dilihat dari 30 nilai SKOR/INDEKS IDSD tertinggi DARI PEMETAAN IDSD TINGKAT Kota



Gambar 4.8. Perbandingan Indeks dari 4 (empat) Aspek dilihat dari 30 nilai SKOR/INDEKS IDSD tertinggi DARI PEMETAAN IDSD TINGKAT kota

4.3. Faktor Dominan yang Mempengaruhi Daya Saing Daerah

Faktor dominan yang menguatkan daya saing daerah dalam kajian ini adalah faktor Sumber Daya Manusia/Human Capital yang terpilih berdasarkan pemetaan dalam membangun model indeks daya saing. Faktor dominan tersebut dapat menjelaskan hubungan indeks daya saing dengan faktor Sumber Daya Manusia/Human Capital dan memberikan kontribusi yang paling besar.

4.4. Strategi Kebijakan Peningkatan Daya Saing

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin dinamis di daerah maka diperlukan upaya pembinaan, pengembangan dan inovasi secara lebih terarah dan terpadu sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah pada dasarnya bersifat multisektoral dengan melibatkan banyak pelaku pembangunan sehingga diperlukan kerja sama dan koordinasi di antara semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi daerah dibutuhkan identifikasi terhadap kriteria evaluasi dan pengukuran daya saing yang tepat. Kemampuan mengidentifikasi potensi dan daya saing daerah mutlak diperlukan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan di daerah sebagai pijakan dalam menyediakan kebijakan dasar yang diperlukan bagi pembangunan daerah.

Pembangunan sarana dan prasarana, investasi dan akses terhadap sumber dana, kebijakan lingkungan, pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) serta pengembangan sumber daya manusia sudah seharusnya didasarkan pada keperluan untuk mengatasi gap daya saing yang masih dialami di berbagai daerah.

Dalam rangka pengembangan potensi daerah di tengah lingkungan yang semakin dinamis, tentunya diperlukan berbagai upaya pengembangan dan inovasi secara lebih terarah dan terpadu sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah. Pengembangan wilayah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan suatu pembangunan yang berkelanjutan.

Proses menuju kemandirian suatu daerah dalam era globalisasi saat ini tidaklah terlepas dari perlu adanya daya saing dalam membentuknya. Daya saing tidaklah hanya berorientasi pada indikator ekonomi saja, tetapi lebih jauh lagi yaitu daya saing tersebut diartikan sebagai kemampuan daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global untuk peningkatan kesejahteraan hidup rakyat yang nyata dan berkelanjutan serta secara politis, sosial dan budaya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Tingkat daya saing (competitiveness) merupakan salah satu parameter dalam konsep daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Perbandingan dayasaing diperlukan untuk melihat dan menjelaskan perbedaan tingkat kemakmuran daerah. Secara konsep, daya saing menunjukkan kemampuan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Daerah harus mencari dan mengenal potensi yang akan dikembangkan dan dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat. Apalagi dengan semakin terbukanya pasar bebas yang memungkinkan produk impor masuk ke daerah-daerah, tentunya usaha-usaha yang dilakukan daerah harus lebih nyata dan terukur. Ukuran keberhasilannya adalah meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Setiap daerah dituntut untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif yang dapat menciptakan ide-ide baru, perbaikan-perbaikan yang dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru, industri baru, lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Prioritas pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan membutuhkan dukungan tatakelola dan sinergi antara pusat dan daerah. Usaha untuk meningkatkan tatakelola dan sinergi pusat-daerah dapat dilakukan dengan membenahi kapabilitas pemerintah daerah. Kualitas sumber daya manusia, pengembangan kualitas aparatur pemerintah daerah, pengelolaan anggaran dan pembangunan infrastruktur serta peningkatan layanan publik merupakan hal mendasar yang perlu menjadi perhatian pusat untuk meningkatkan daya saing daerah.

Dalam era globalisasi, penguatan daya saing semakin menentukan keunggulan posisional (position advantage) daerah dan sangat diperlukan dalam rangka akselerasi pembangunan ekonomi. Dalam perdagangan nasional maupun regional beragam hambatan tarif dan non tarif kini semakin bergeser untuk menggunakan hambatan teknis. Isu Hak Kekayaan Intelektual (HKI), standarisasi, sertifikasi, dan isu lingkungan sangat menentukan daya saing suatu daerah. Dalam pengertian tersebut, pembentukan daya saing tentu mencakup upaya untuk memperkuat sinergi berbagai sektor pembangunan daerah, juga mencakup penyempurnaan secara struktural dalam sistem pembangunan daerah agar pembangunan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara lebih efektif dan efisien. Peran institusi pendidikan tinggi di daerah juga menjadi penting dalam meningkatkan kapabilitas pemerintah daerah, sehingga pendapatan asli daerah juga akan meningkat dengan bertahap. Satu hal yang dapat dikaji melalui penelitian institusi pendidikan tinggi adalah pemberdayaan potensi daerah, selain itu pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) daerah dalam memasarkan produknya, karena banyak sekali hasil produksi UMKM dari berbagai daerah yang masih belum dapat menembus pasar ekspor dengan kendala keterbatasan informasi yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Saat ini konsep klaster sebagai suatu pendekatan kebijakan baru dalam pengembangan wilayah telah semakin luas digunakan di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang, terutama dikaitkan dengan kesiapan suatu wilayah meningkatkan daya saingnya dalam menghadapi regionalisasi dan globalisasi.

Klaster secara signifikan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah untuk membangun kekayaan masyarakat. Klaster mampu bertindak sebagai pendorong inovasi, dimana keberadaan unsur-unsur dalam klaster diperlukan untuk mengubah gagasan menjadi kenyataan. Unsur universitas atau pusat riset merupakan tulang punggung dalam menciptakan berbagai temuan baru yang kemudian ditransformasikan oleh perusahaan ke dalam berbagai produk atau jasa baru. Unsur pemasok menyediakan perlengkapan atau komponen penting. Unsur perusahaan pemasaran dan distribusi membawa produk itu ke pelanggan. Hasilnya adalah kawasan dengan klaster yang tumbuh dan bekerja dengan baik akan menikmati upah, produktivitas, pertumbuhan usaha, dan inovasi yang lebih tinggi. Kajian lebih lanjut mengenai pengembangan klaster di Indonesia sangat diperlukan untuk mendalami fenomena terbentuknya klaster-klaster tersebut dan menemukan upaya-upaya pengembangan yang dapat serta perlu dilakukan.

Ke depan, dalam rangka membangun daya saing daerah, pemerintah daerah perlu melakukan beberapa hal, antara lain: (a) Memetakan potensi daerah berikut supply dan demand, (b) Memperkuat seluruh infrastruktur ekonomi untuk mendorong potensi daerah, termasuk SDM-nya, (c) Menguasai rantai pasokan (hulu-hilir) untuk menekan inefisiensi (sinergi provinsi dan kabupaten /kota), (d) Menciptakan inovasi produk, serta (e) Mendorong ekonomi rakyat dengan terus meningkatkan penggunaan produksi lokal. Akhirnya, kesiapan kapabilitas pemerintah daerah perlu didukung oleh peningkatan kemampuan dalam mengelola keuangan daerahnya. Kualitas sumber daya manusia perlu dipersiapkan, sehingga dana yang dimiliki dapat dikelola dengan efektif dan secara bertahap dapat membangun daya saing pemerintah daerah di Indonesia.

Untuk Peningkatan Daya Saing guna Peningkatan efisiensi nasional dan daerah melalui Program **Penguatan Efisiensi Melalui Kelembagaan** melalui kebijakan Meningkatkan efisiensi nasional dan daerah melalui strategi Membangun Kawasan Ekonomi Khusus atas dasar potensi dan keunggulan



daerah, Mengembangkan efisiensi perekonomian nasional dan daerah dengan melakukan pengawasan birokrasi disertai dengan penegakan hukum yang tegas , Menetapkan perda-perda yang berorientasi pada pencapaian efisiensi nasional dan daerah

Dalam menjalankan bisnis dan tingkat daya saing ekonomi. Masalah pemberdayaan kelembagaan birokrasi tampaknya memang menjadi soal sangat serius. Dalam upaya menciptakan efektif dan efisiensi birokrasi seyogyanya menjadi upaya bersama untuk diwujudkan percepatannya.

Pemerintah daerah seyogyanya mengubah paradigma penggalan pendapatan daerah yang bersumber dari pungutan daerah, serta menjadikan pemodal atau investor yang akan menanamkan modalnya di daerah sebagai pihak yang membutuhkan pelayanan yang baik.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk basis inovasi di kelembagaan pemerintahan daerah juga perlu dilakukan karena arah birokrasi ke depan adalah otomasi atau bahkan digitalisasi yang akan makin mengefisienkan roda birokrasi.

Dari sisi SDM, perlu terus diupayakan membangun meritokrasi sistem staffing birokrasi, melalui implementasi open recruitment, dengan open recruitment, diharapkan akan didapatkan calon-calon yang kapabel untuk memegang jabatan tertentu. Menata ulang kelembagaan dan SDM birokrasi seyogyanya menjadi prioritas pada semua tataran birokrasi, mengingat semakin ketatnya persaingan ekonomi kawasan pada masa mendatang.

Transformasi jiwa-jiwa entrepreneurship kedalam birokrasi dapat menjadi alternatif solusi dalam menjawab tantangan tersebut, mewirausahakan birokrasi sejatinya adalah sebuah usaha reformasi birokrasi dari aspek sumber daya manusia, yang dapat dilakukan paralel dengan usaha untuk mereformasi birokrasi dari aspek sistem dan kelembagaan birokrasi yang ada. Sikap-sikap mental yang positif dari jiwa-jiwa entrepreneurship seyogyanya dapat menjadi sebuah daya yang besar dalam mengoptimalkan kinerja birokrasi dalam mengembangkan investasi, mengatasi masalah ketenagakerjaan, pembangunan infrastruktur dan mengembangkan ekonomi kreatif.

Optimalisasi kinerja birokrasi sangat dibutuhkan dalam memenangkan kompetisi yang terjadi di segala lini dari mulai persaingan mendapatkan investasi, kualitas dan harga jual produk ekspor, pasar tenaga kerja, kualitas infrastruktur, hingga regulasi yang pro-investasi. Harapannya dengan mentransformasi spirit kewirausahaan dalam birokrasi akan dapat semakin meningkatkan kinerja birokrasi dalam memperkuat daya saing, sehingga dapat mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat.

BAB 5 PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Indeks daya saing dapat digunakan sebagai potret atau alat ukur keberhasilan pembangunan sebuah daerah secara luas. Indeks ini juga dapat digunakan sebagai alat ukur tingkat kesejahteraan penduduk dan merupakan potret pembangunan sebuah daerah. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sangat penting dilakukan. Mengapa? Karena pengukuran Indeks Daya Saing Daerah bertujuan menginformasikan sebuah seri struktur dialog multi-stakeholder yang dapat meningkatkan kewaspadaan untuk mendorong transformasi sebuah negara, region, atau kota untuk menolong mereka menjadi lebih berdaya saing, dengan menawarkan serta memberi ruang pada kesempatan untuk meningkatkan kemakmuran.

Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah sangat perlu dilakukan guna memberi arah dan peta jalan (road map) bagi para politisi dan semua pemangku kepentingan daerah agar dapat menetapkan strategi pembangunan daerah.

Indeks Daya Saing Daerah perlu dikembangkan dan dikelola agar Pemimpin Tertinggi Negara (Presiden) dalam melihat dengan mudah progres perkembangan, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kesempatan kerja, dan kesejahteraan daerah. Indeks Daya Saing dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan sebuah daerah mengembangkan diri dan meningkatkan kesejahteraan penduduk daerah tersebut.

Definisi operasional indeks daya saing daerah adalah ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan persaingan baik secara domestik maupun internasional; demi terwujudnya kesejahteraan yang tinggi pada masyarakat secara berkelanjutan.

Komponen IDSD terdiri dari 4 Aspek, 12 Pilar, dan 23 Dimensi, 78 indikator. Komponen terbanyak terletak pada aspek ekosistem inovasi. Komposisi ini dihasilkan berdasarkan berbagai studi literatur dan masukan para pakar (expert judgement). Ini juga menunjukkan bahwa aspek ekosistem inovasi diyakini menjadi aspek yang akan sangat berpengaruh kepada tingkat daya saing suatu wilayah. Pengisian kuesioner Indeks Daya Saing Daerah melalui aplikasi database Indeks Daya Saing Daerah.

5.2. SARAN DAN REKOMENDASI

1. Untuk mendukung proses pelaksanaan Pengukuran Indeks Daya Saing di Daerah, pemrakarsa perlu membangun dan mengelola Database dan Sistem Informasi Aplikasi Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah yang terintegrasi
2. Perlu partisipasi dan dukungan berbagai Kementerian dan Lembaga baik pusat maupun daerah, dunia usaha, akademisi dan stakeholder lainnya, berkenaan dengan penyediaan data yang disampaikan secara online.
3. Agar terjadi sinergi penetapan, pelaksanaan, pengelolaan data dan informasi, serta pemanfaatan pengukuran indeks daya saing daerah, maka perlu dibentuk Tim Nasional yang anggotanya terdiri dari : Kementerian dan Lembaga, dunia usaha, akademisi dan stakeholder lainnya

- 
4. Perlu ada sosialisasi dan bimbingan teknis yang lebih intens bagi pelaksana yang menangani maupun pelaksana teknis agar proses koordinasi tingkat kab/kota dan pengisian data dapat optimal sehingga hasilnya dapat lebih menunjukkan kondisi daya saing riil masing-masing daerah.

DAFTAR BACAAN

- Abdullah, Petter. Daya Saing Daerah Konsep dan Pengukurannya di Indonesia. Yogyakarta: BPFE, 2002
- Direktorat Sistem Inovasi Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, 2017. Naskah Urgensi Indeks Daya Saing Daerah
- Direktorat Sistem Inovasi Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, 2018. Laporan Hasil Pemetaan Pengembangan Sistem Informasi Indeks Daya Saing Daerah Dan Data Inovasi
- Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2013. Membangun Daya Saing Daerah, <http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/22-membangun-daya-saing-daerah>, diakses 5 November jam 11.02
- Eddy Cahyono, 2014. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Peran Birokrasi, : <https://setkab.go.id/peningkatan-daya-saing-ekonomi-dan-peran-birokrasi/> diakses 5 November jam 11.53
- IMD World Competitiveness Rankings 2018 Results <https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-competitiveness-ranking-2018/>, diakses 25 Oktober jam 10.55
- The IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019 results, <https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2019/>, diakses 25 Oktober jam 11.15
- Kajian atas kebijakan penguatan daya saing daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kementerian Keuangan, Direktorat Jendral Pengembangan Keuangan
- Martin, R., Kitson, M., & Tyler, P. (Eds.). (2003). Regional competitiveness. Routledge.
- Tarigan, S. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Bumi Aksara.
- Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia dan Laboratorium Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pengkajian Ekonomi (LP3E) Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran. (2008). Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten Kota di Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Teori Stufenbau, https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Stufenbau, diakses 25 Oktober jam 8.57





LAMPIRAN

Hasil Pemetaan Provinsi / Kabupaten/ Kota

Hasil pemetaan masing-masing Provinsi se-indonesia, berdasarkan data tanggal 30 November 2019 dari website <https://indeks.inovasi.ristekdikti.go.id>. Berikut list Provinsi beserta nilai indeks yang telah mengisi kuesioner :

KODE_ID	Nama Daerah	Nilai Indeks
81	Prop. Maluku	2,33310
82	Prov. Maluku Utara	2,76890
19	Kepulauan Bangka Belitung	6,35877
11	Prov. Aceh	3,34920
71	Prov. Sulawesi Utara	3,24900
53	Prop. Nusa Tenggara Timur	3,91563
21	Prop. Kepulauan Riau	2,26170
36	Prov. Banten	4,00319
62	Prov. Kalimantan Tengah	7,20270
18	Prov. Lampung	8,55255
65	Prov. Kalimantan Utara	8,18420
51	Prov. Bali	4,68600
63	Prov. Kalimantan Selatan	3,84875
72	Prov. Sulawesi Tengah	4,90292
73	Prov. Sulawesi Selatan	8,34227
14	Prov. Riau	9,42260
15	Prov. Jambi	5,60060
13	Prov. Sumatera Barat	4,96750
74	Prov. Sulawesi Tenggara	6,72620
16	Prov. Sumatera Selatan	6,30190
35	Prov. Jawa Timur	10,13780
34	Prov. DI Yogyakarta	10,20770
75	Prop. Gorontalo	5,61180
33	Prov. Jawa Tengah	11,50740
32	Prov. Jawa Barat	11,75600

PROVINSI ACEH



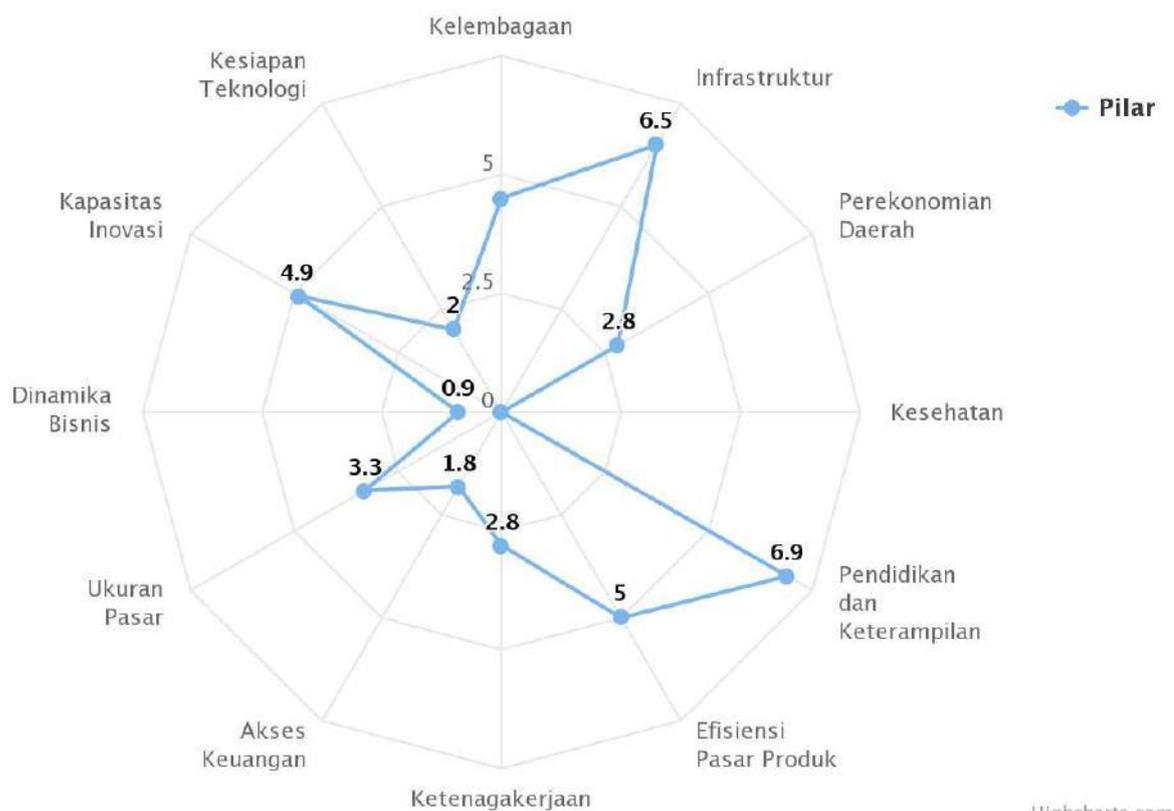
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3.3492**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Pendidikan dan Ketrampilan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

PROVINSI SUMATERA BARAT



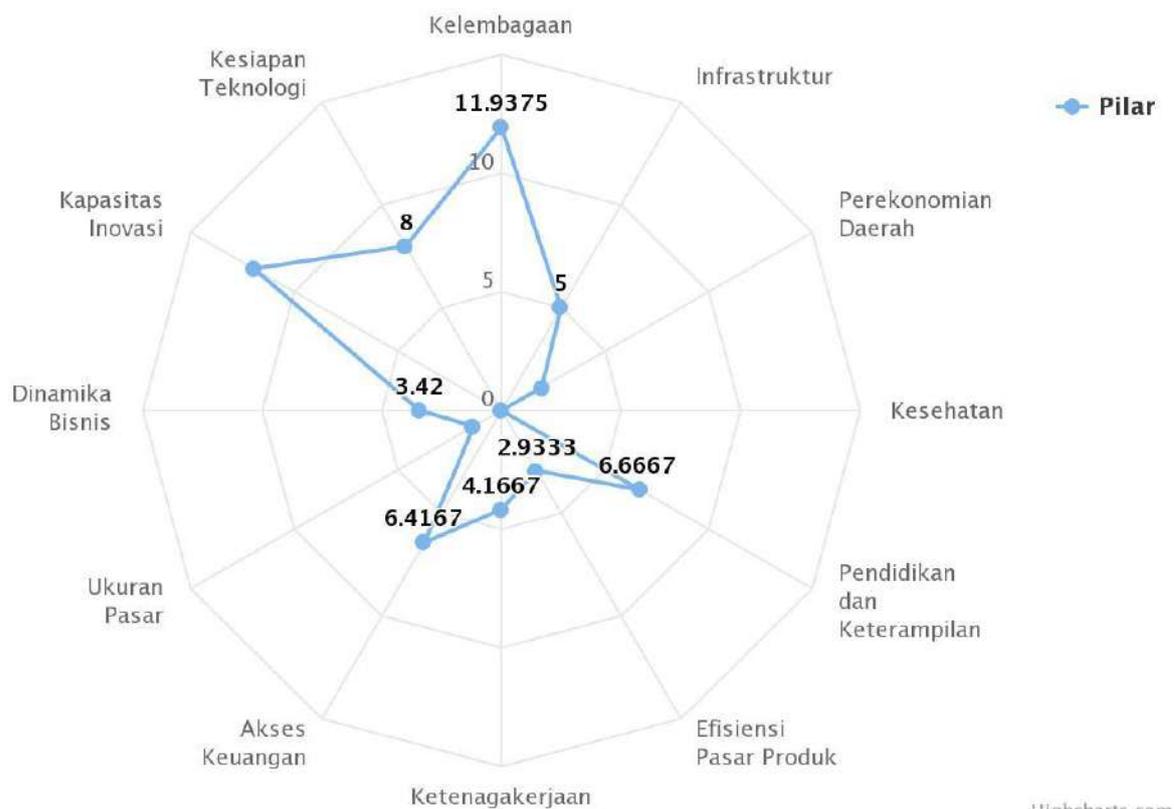
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4.9675**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kapasitas Inovasi dan Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

PROVINSI RIAU



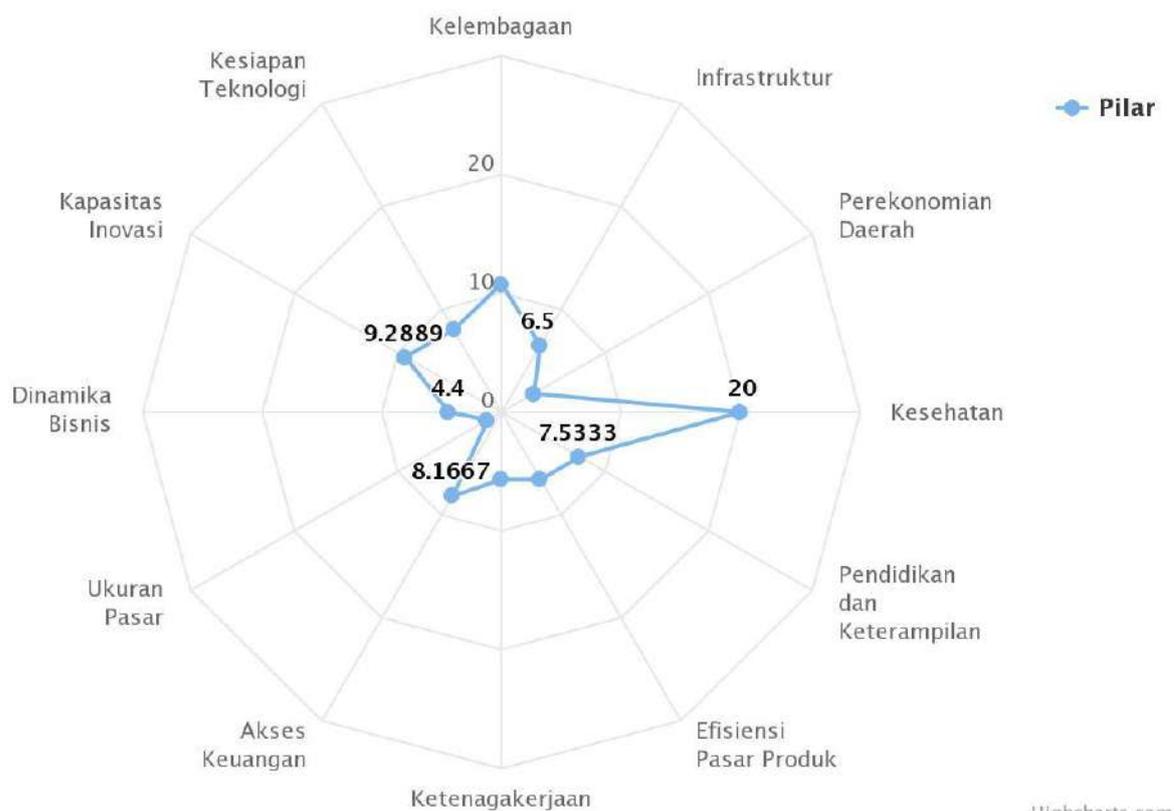
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
9,42260**

**KATEGORI :
SANGAT TINGGI**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

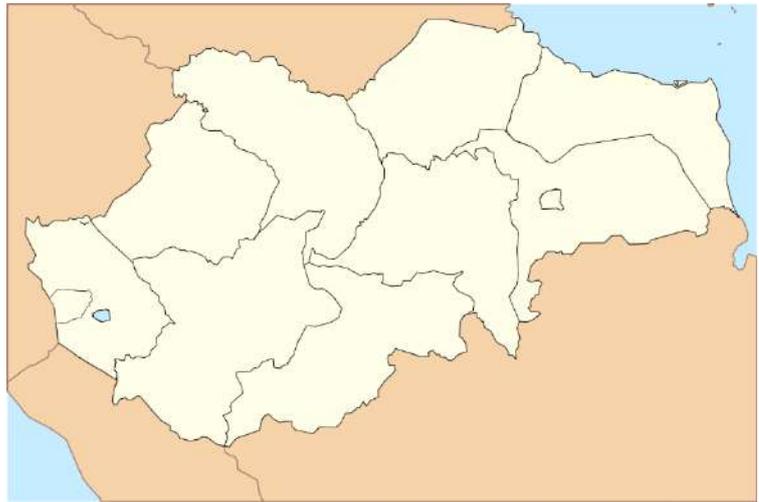
PROVINSI JAMBI



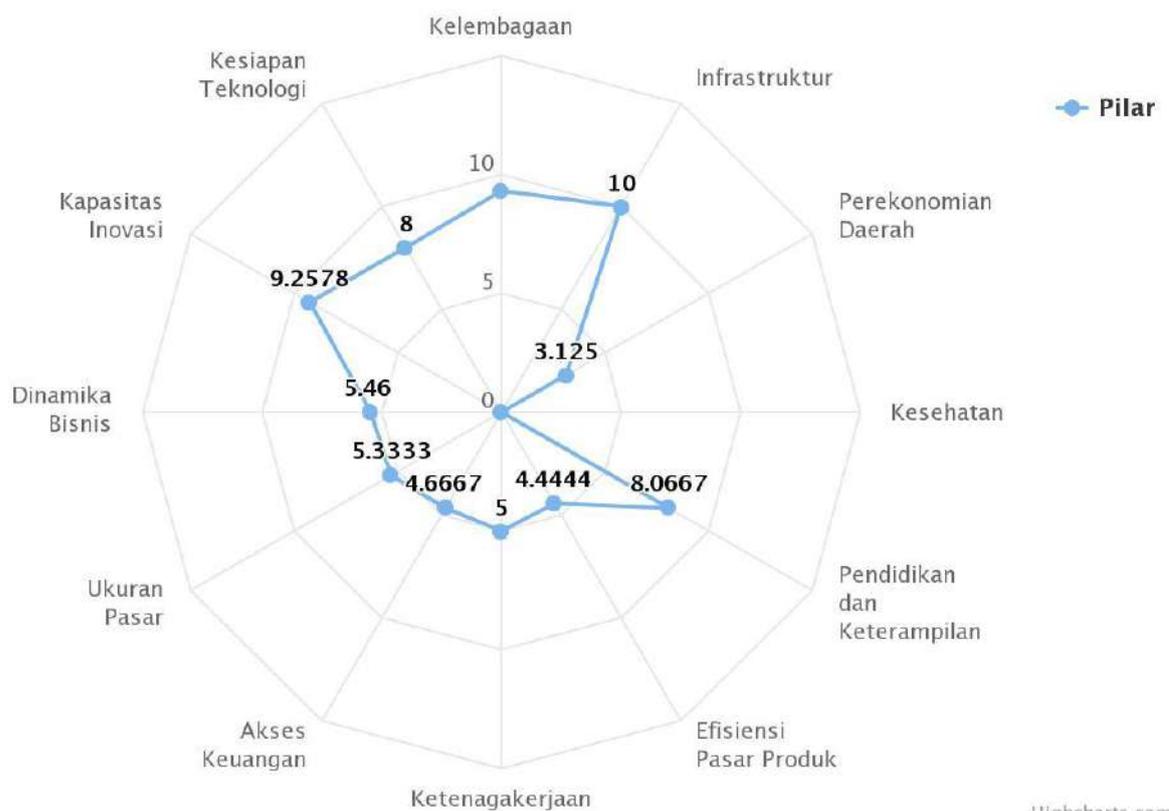
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
5,60060**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan Infrastruktur
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

PROVINSI SUMATERA SELATAN

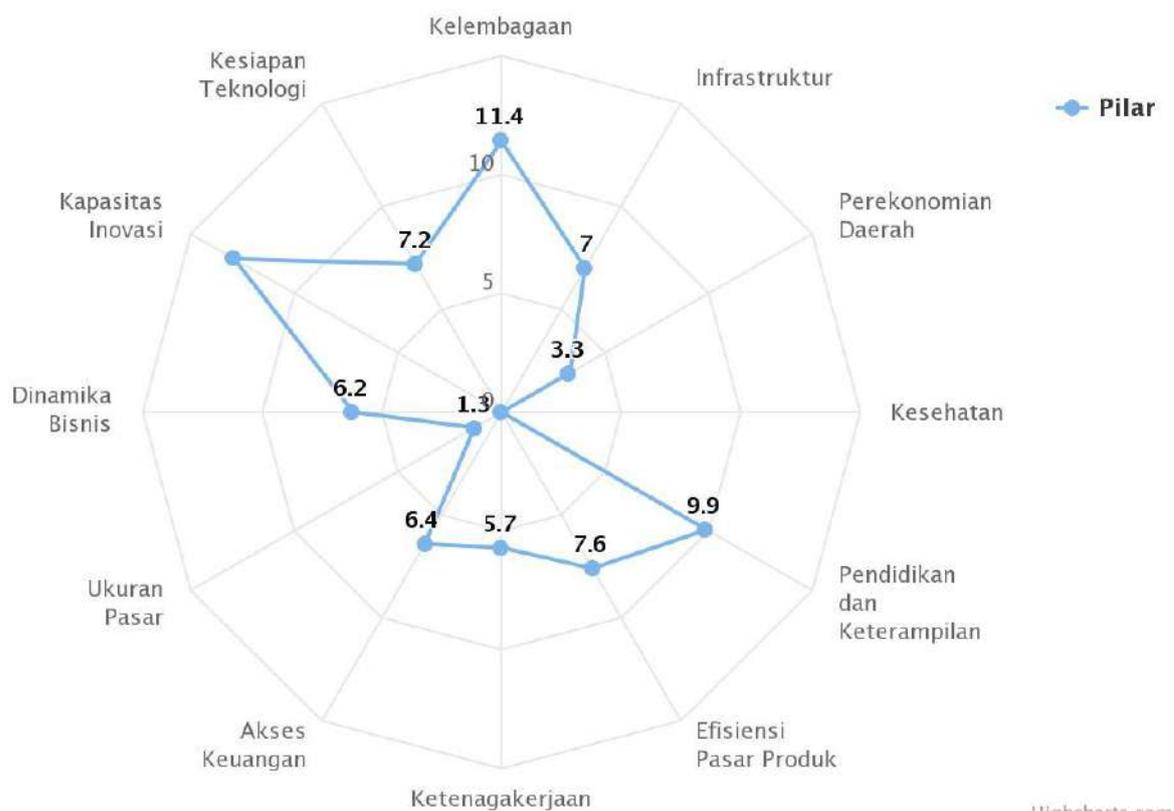


**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
6,30190**

**KATEGORI :
TINGGI**

Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kapasitas Inovasi dan Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

PROVINSI LAMPUNG



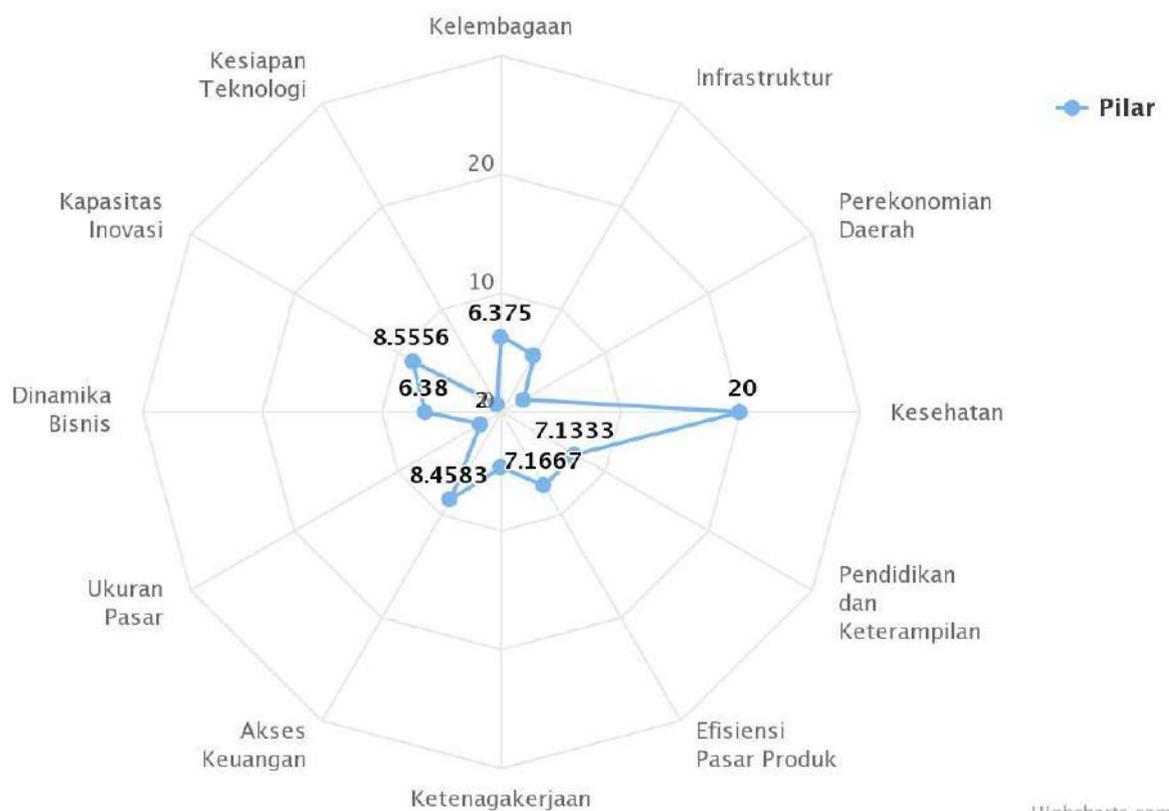
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
8,55255**

**KATEGORI :
SANGAT TINGGI**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesiapan Teknologi

PROVINSI BANGKA BELITUNG



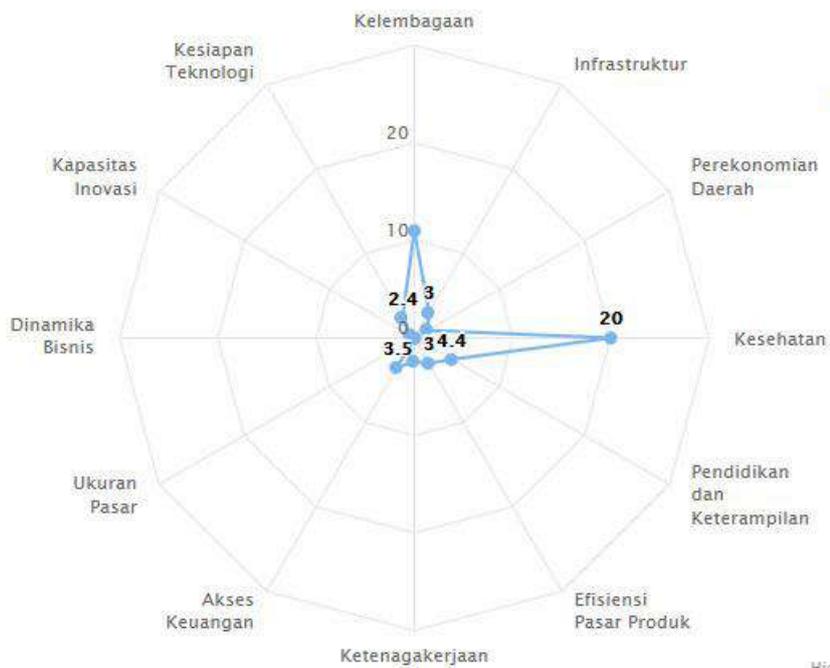
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
6,3588**

**KATEGORI :
TINGGI**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Dinamika Bisnis dan Perekonomian Daerah

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



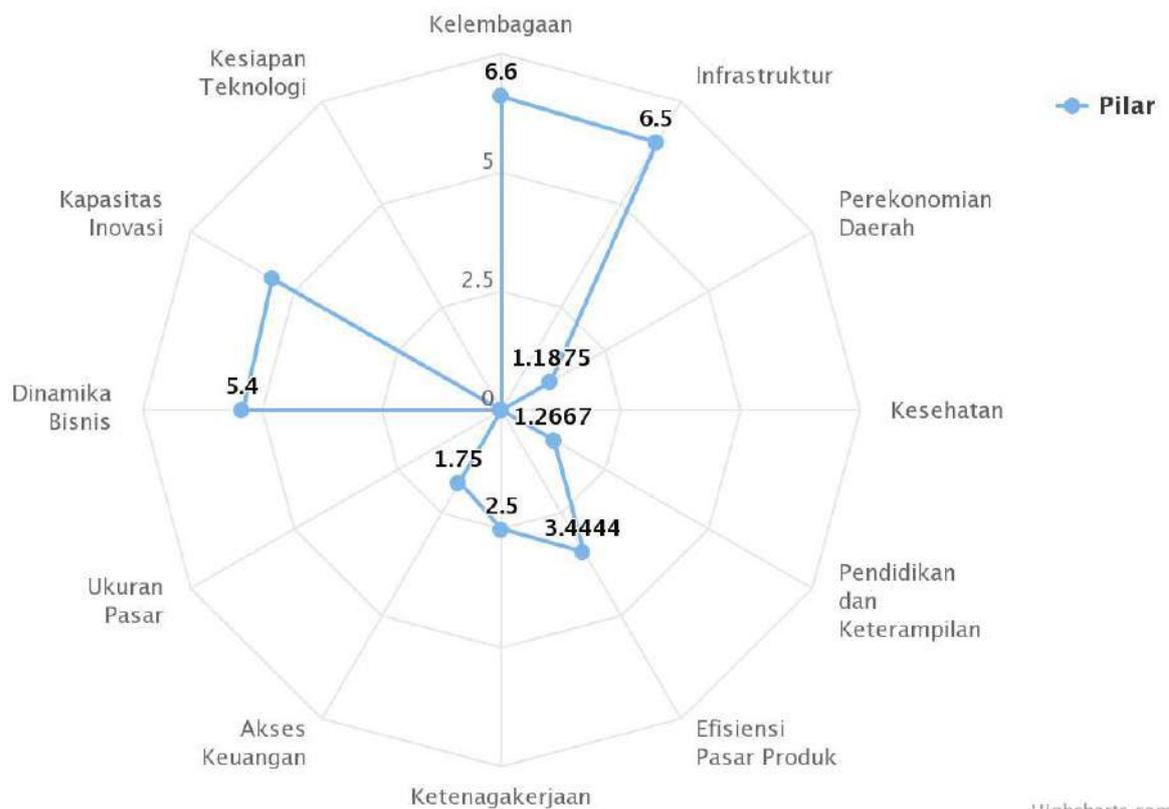
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
2,26170**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

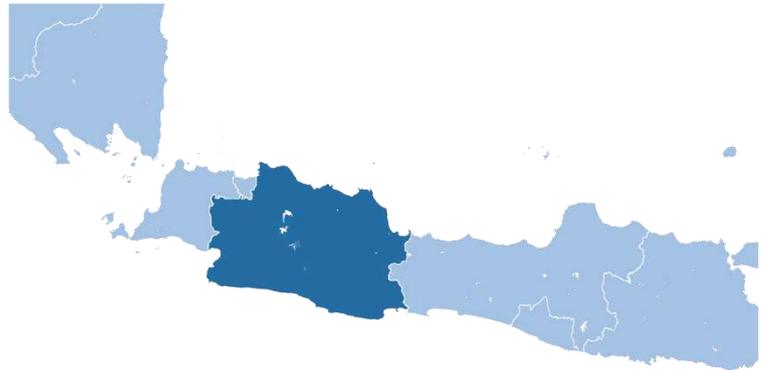
PROVINSI JAWA BARAT



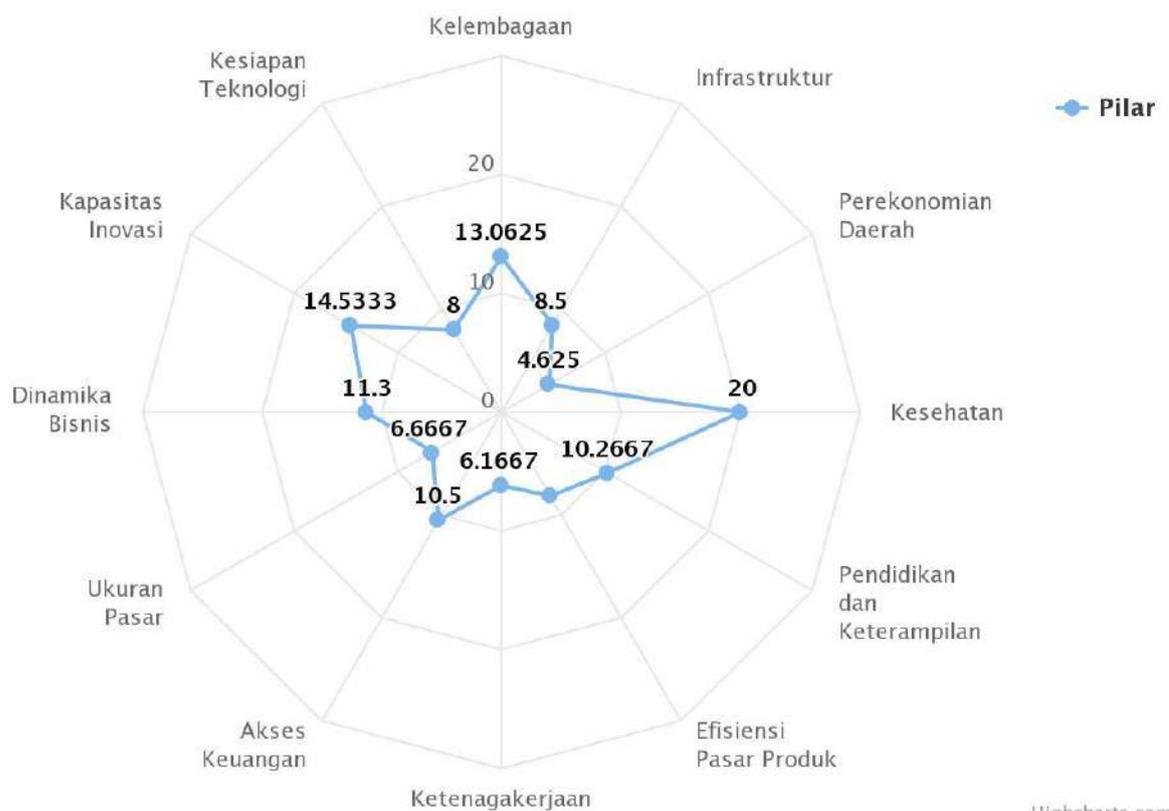
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
11,75600**

**KATEGORI :
SANGAT TINGGI**



Score Pilar

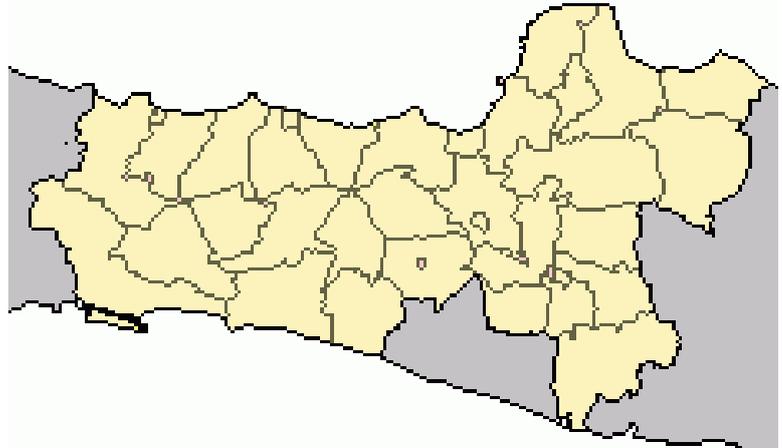


Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Perekonomian Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH

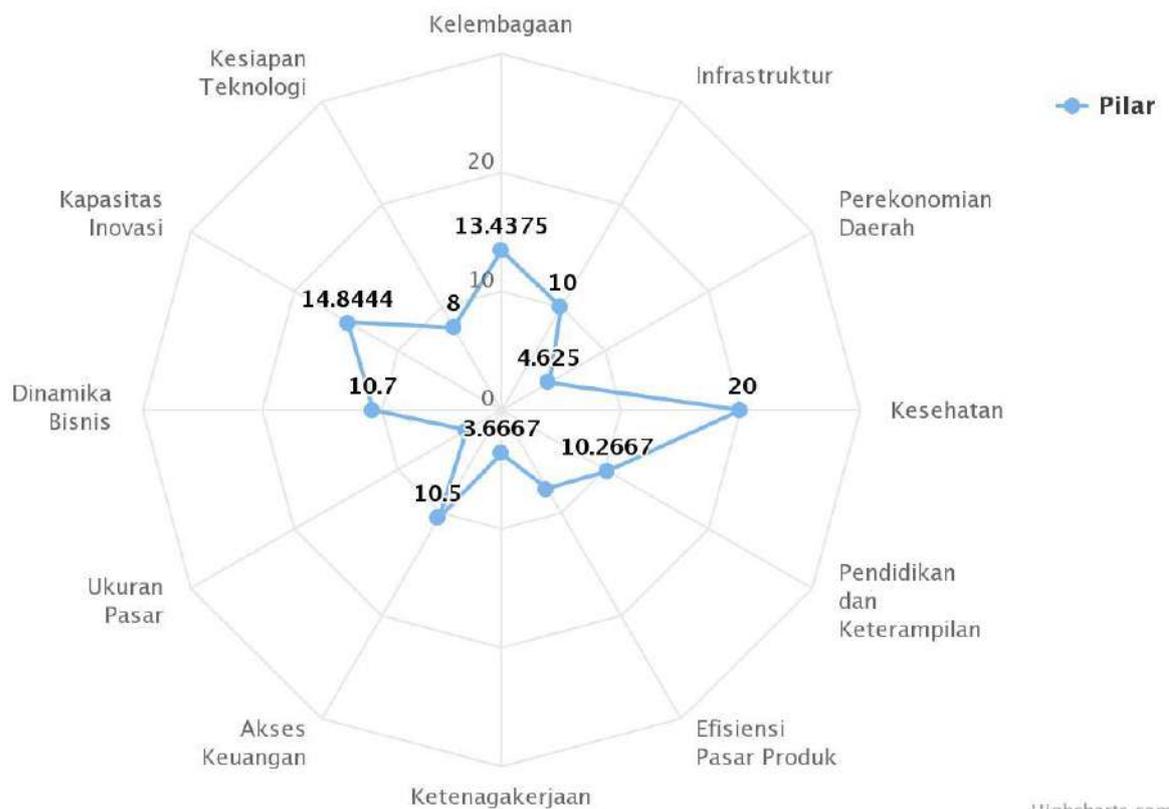


**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
11,50740**

**KATEGORI :
SANGAT TINGGI**

Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

PROVINSI D.I YOGYAKARTA



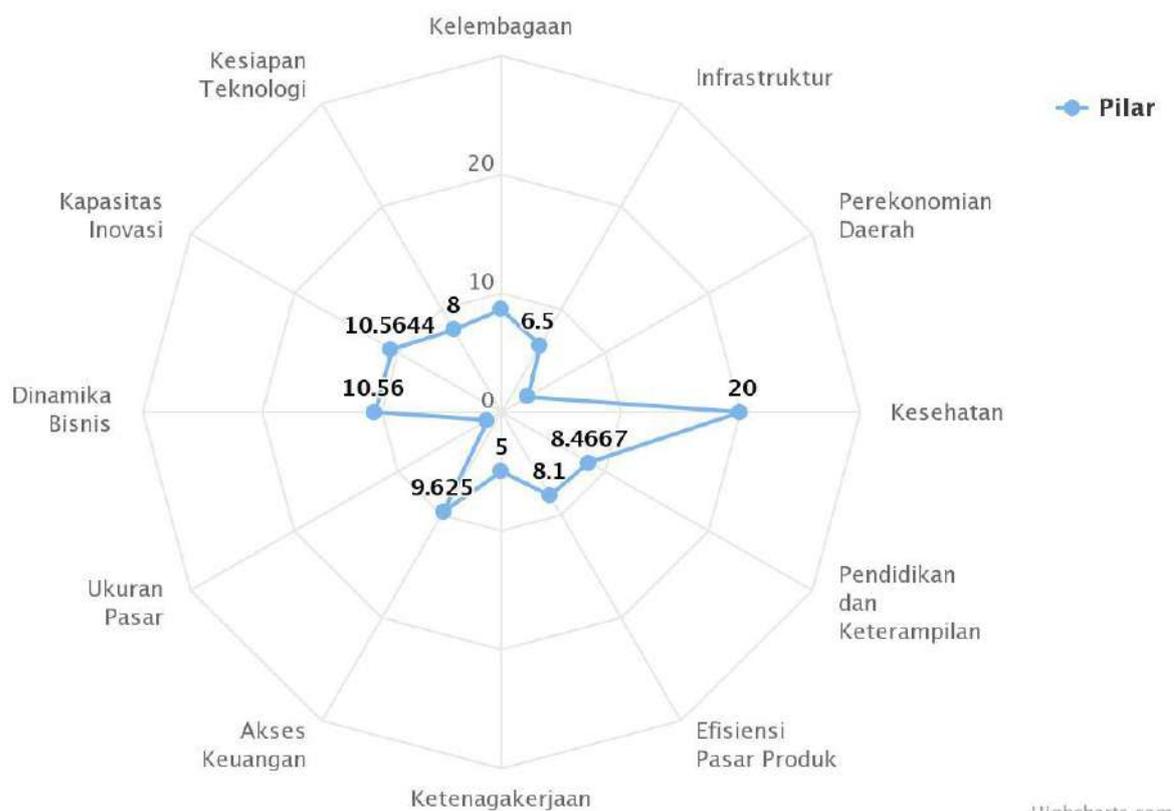
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
10,20770**

**KATEGORI :
SANGAT TINGGI**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

PROVINSI JAWA TIMUR



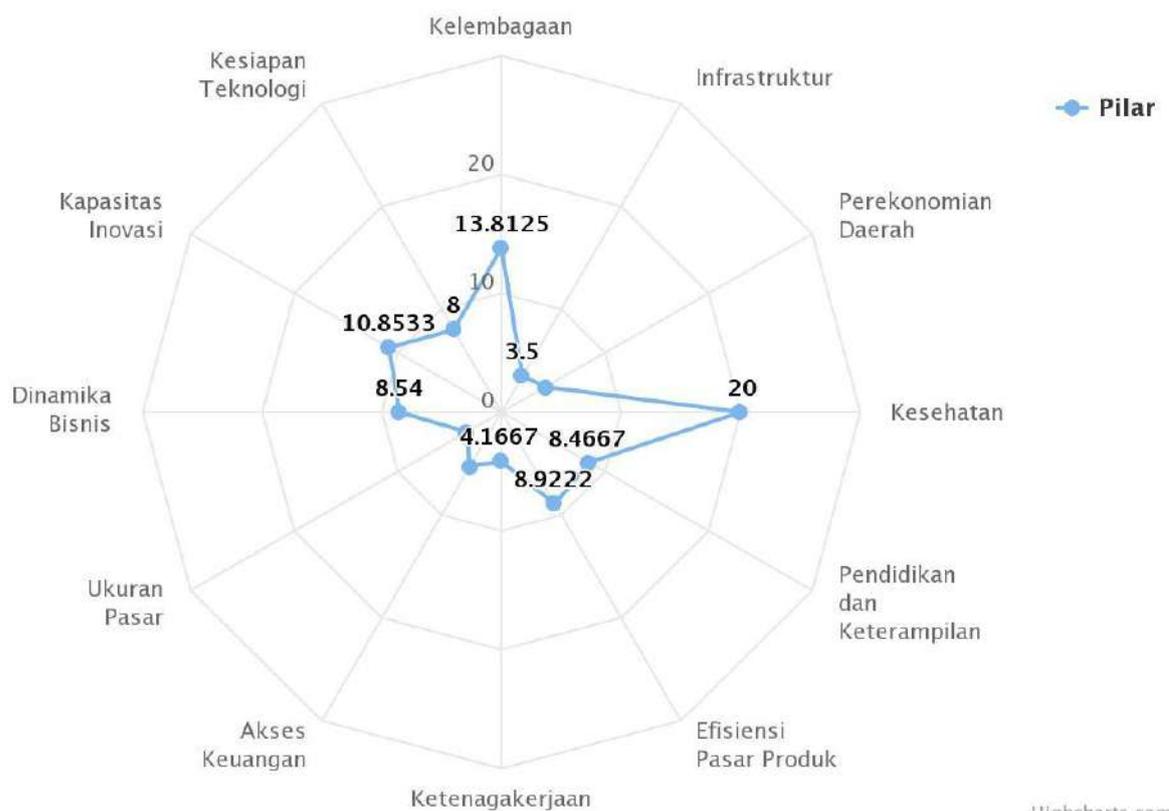
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
10,13780**

**KATEGORI :
SANGAT TINGGI**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

PROVINSI BANTEN



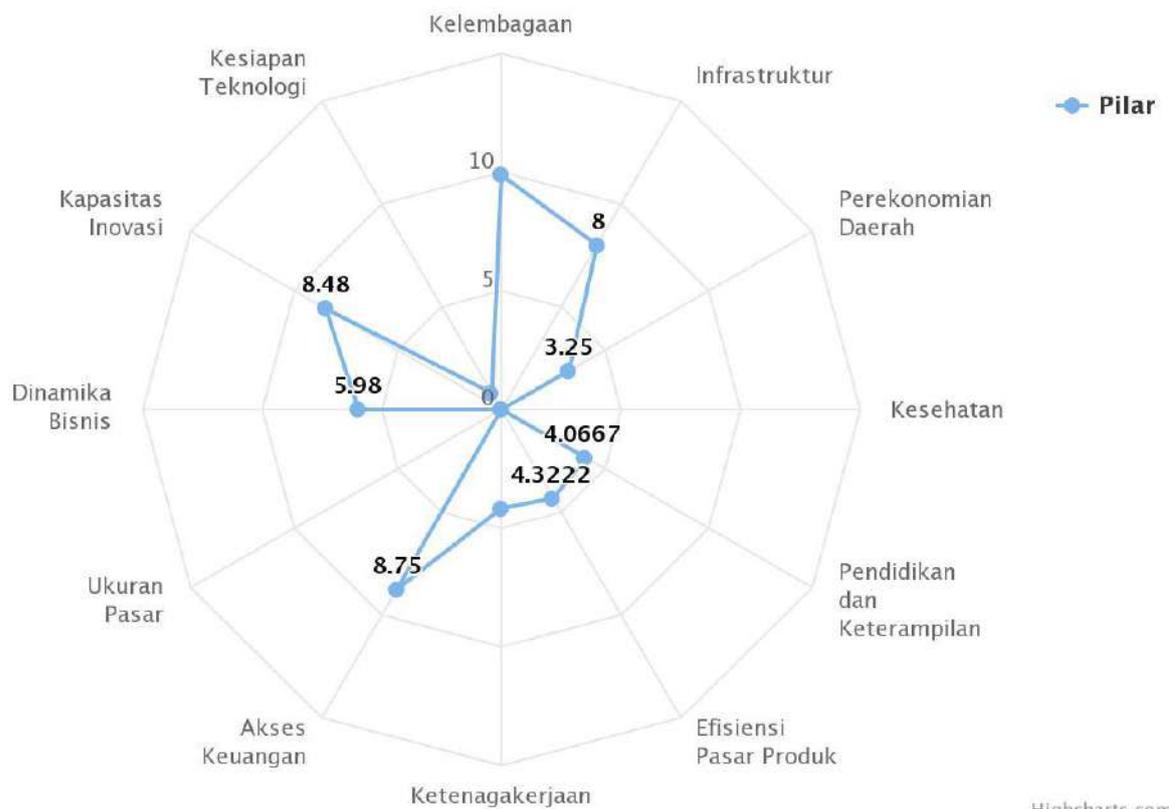
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,00319**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

PROVINSI BALI



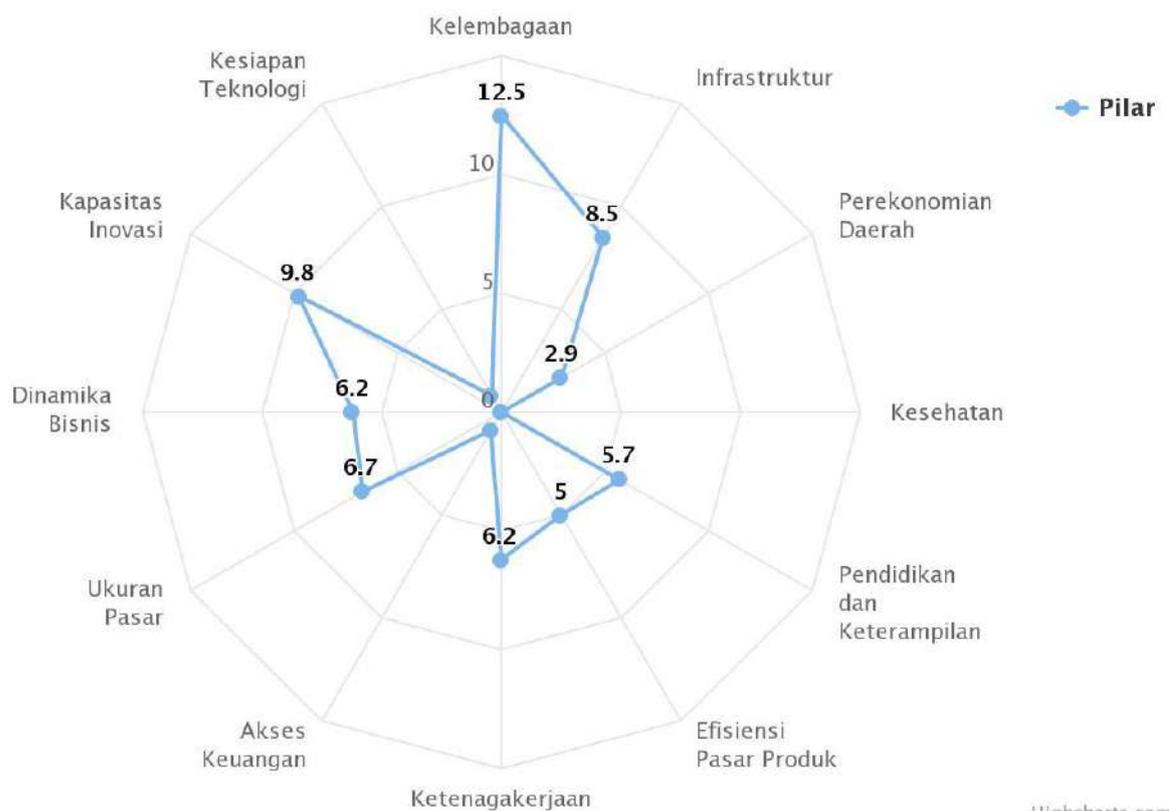
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,68600**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



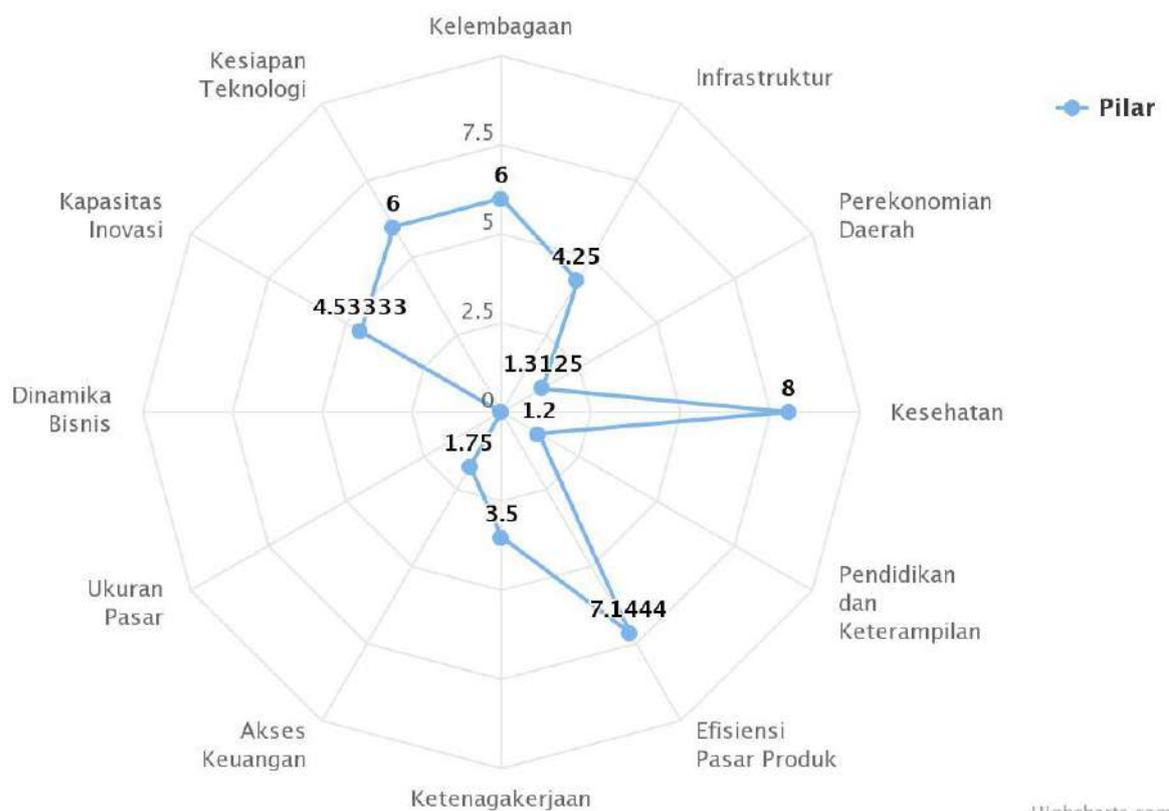
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3,91563**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada Pendidikan dan Ketrampilan

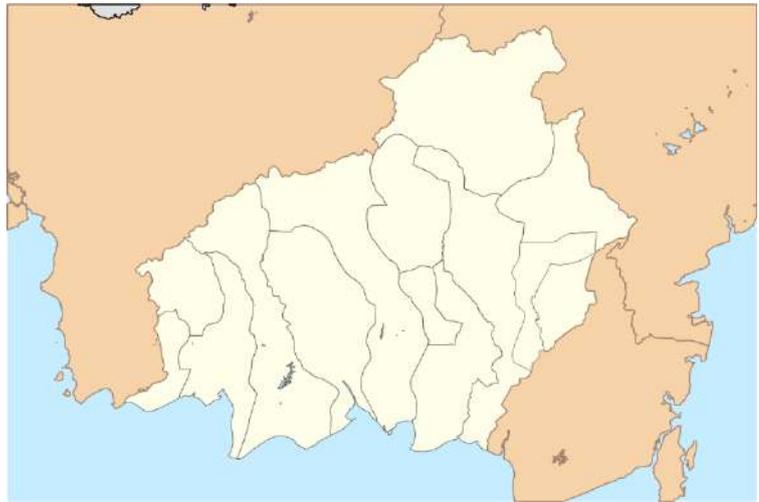
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



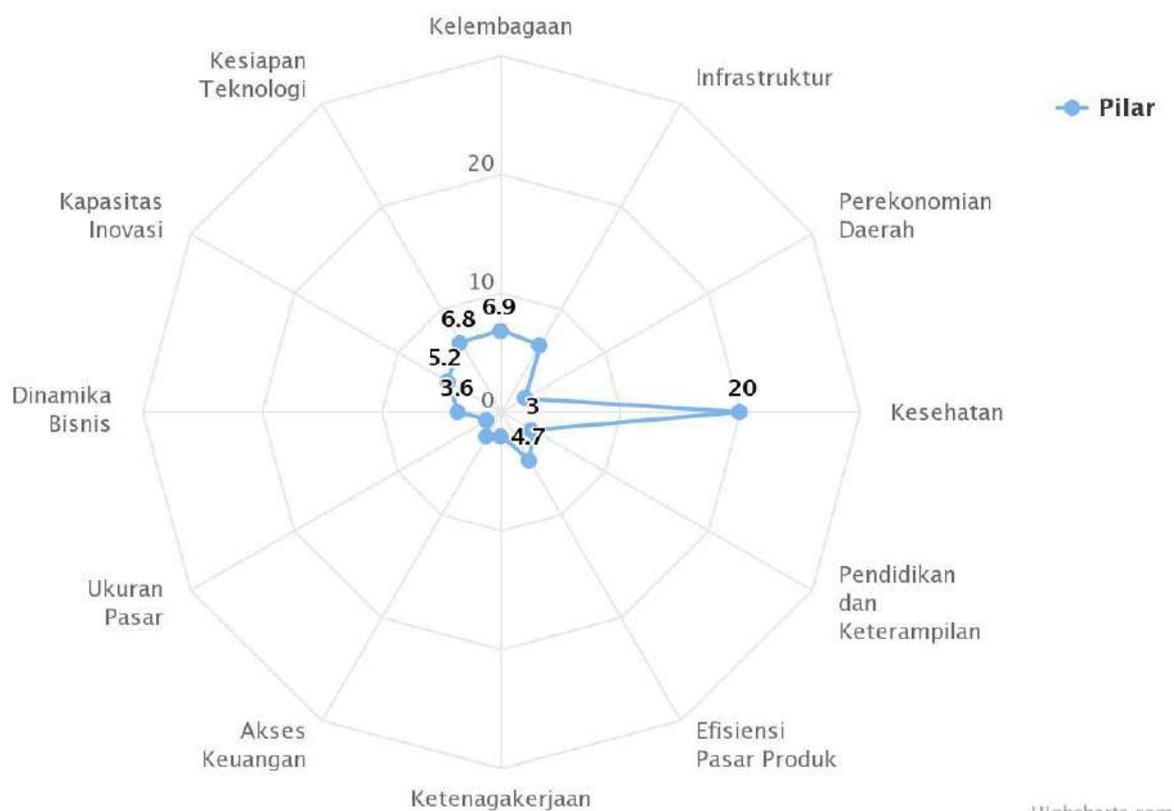
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
7,20270**

**KATEGORI :
TINGGI**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada Ukuran Pasar

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



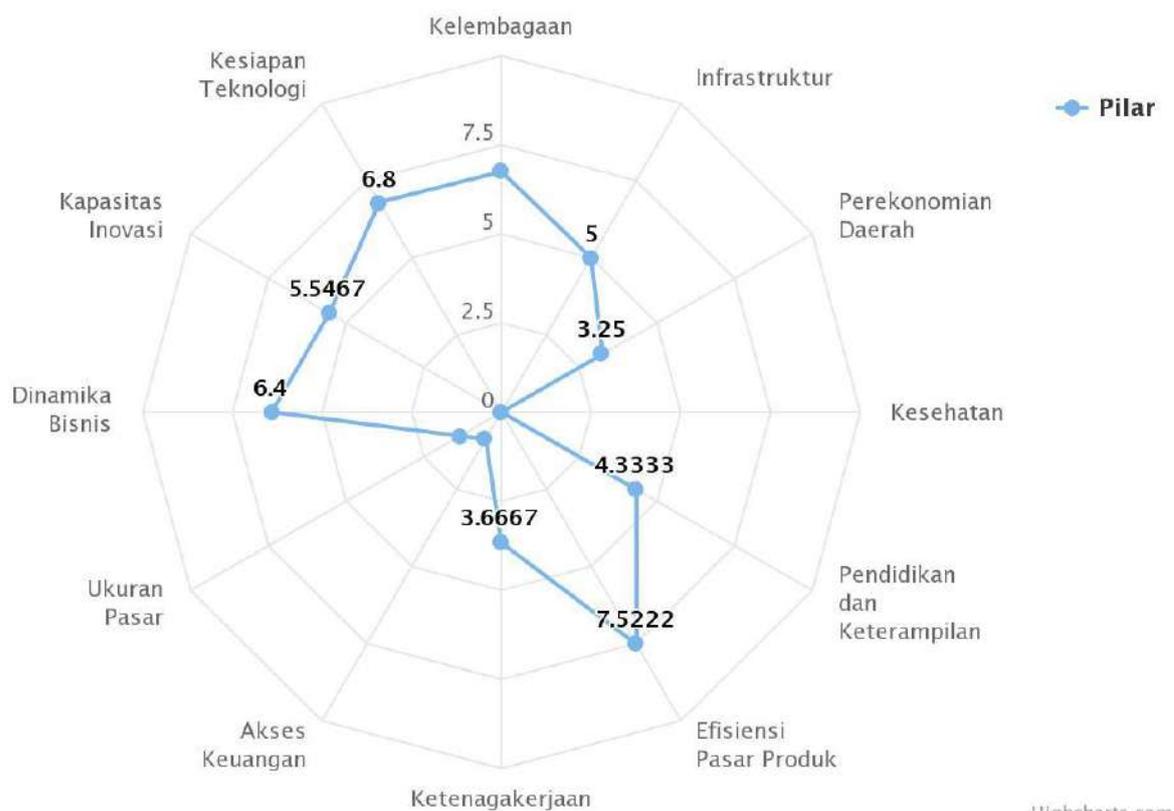
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3,84875**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Efisiensi Pasar Produk
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

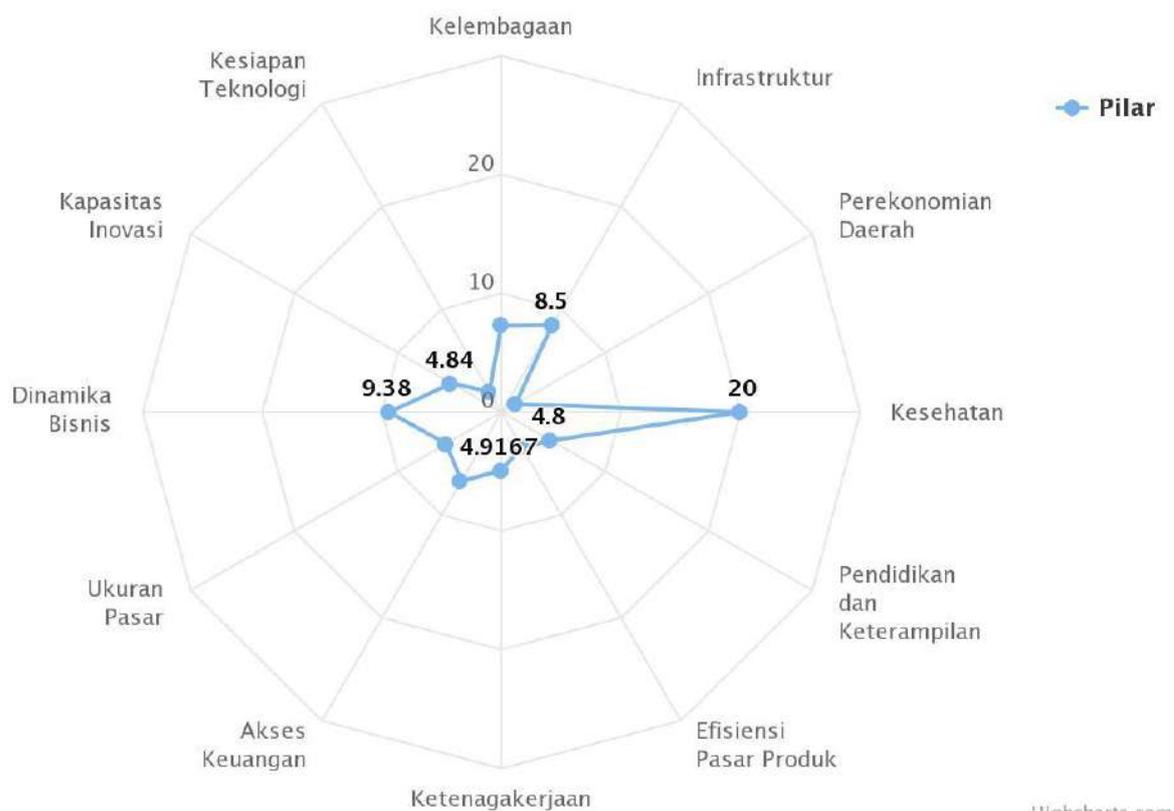


**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
8,18420**

**KATEGORI :
SANGAT TINGGI**

Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Perekonomian Daerah

PROVINSI SULAWESI UTARA



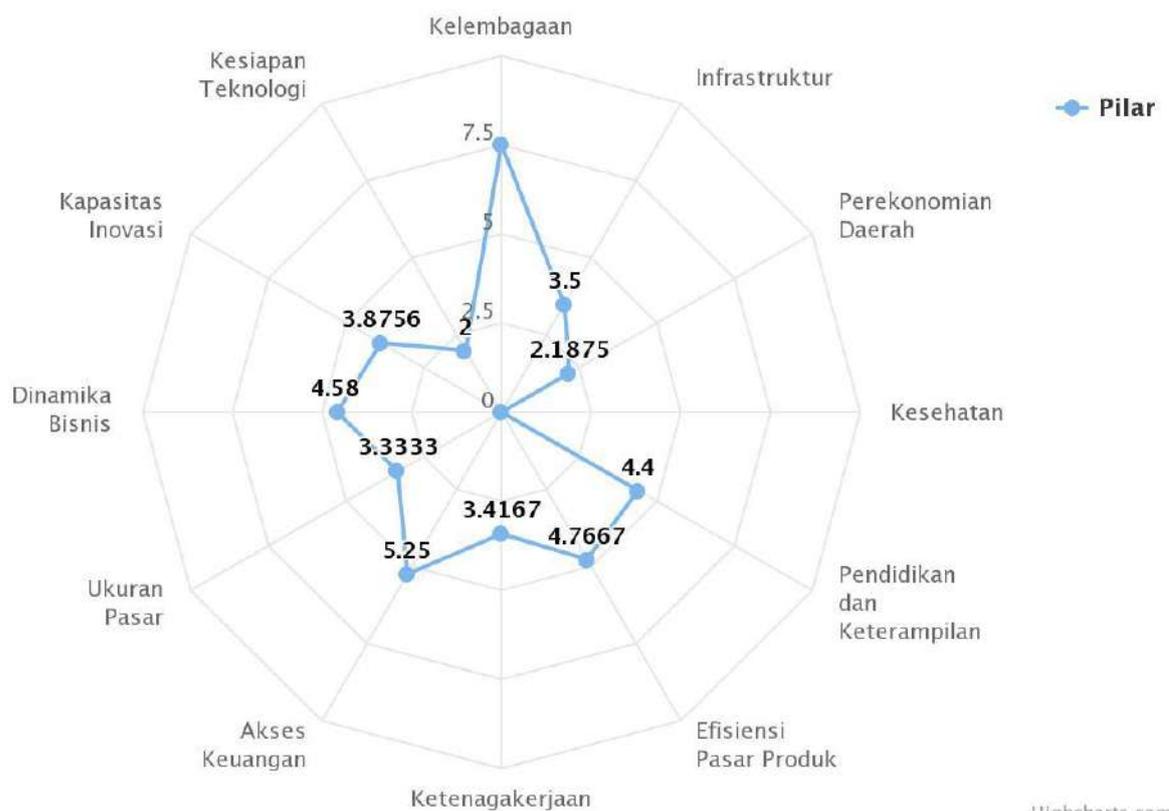
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3,24900**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

PROVINSI SULAWESI TENGAH



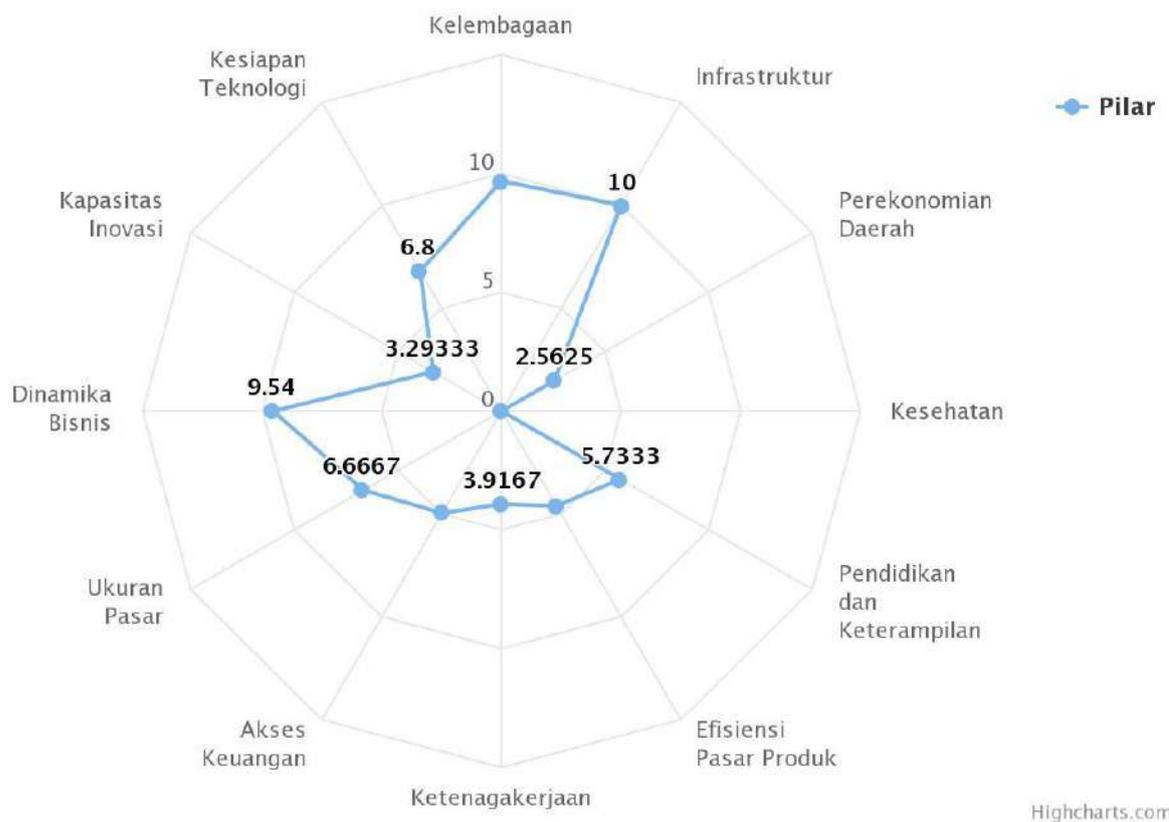
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,90292**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan dan Infrastruktur
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

PROVINSI SULAWESI SELATAN



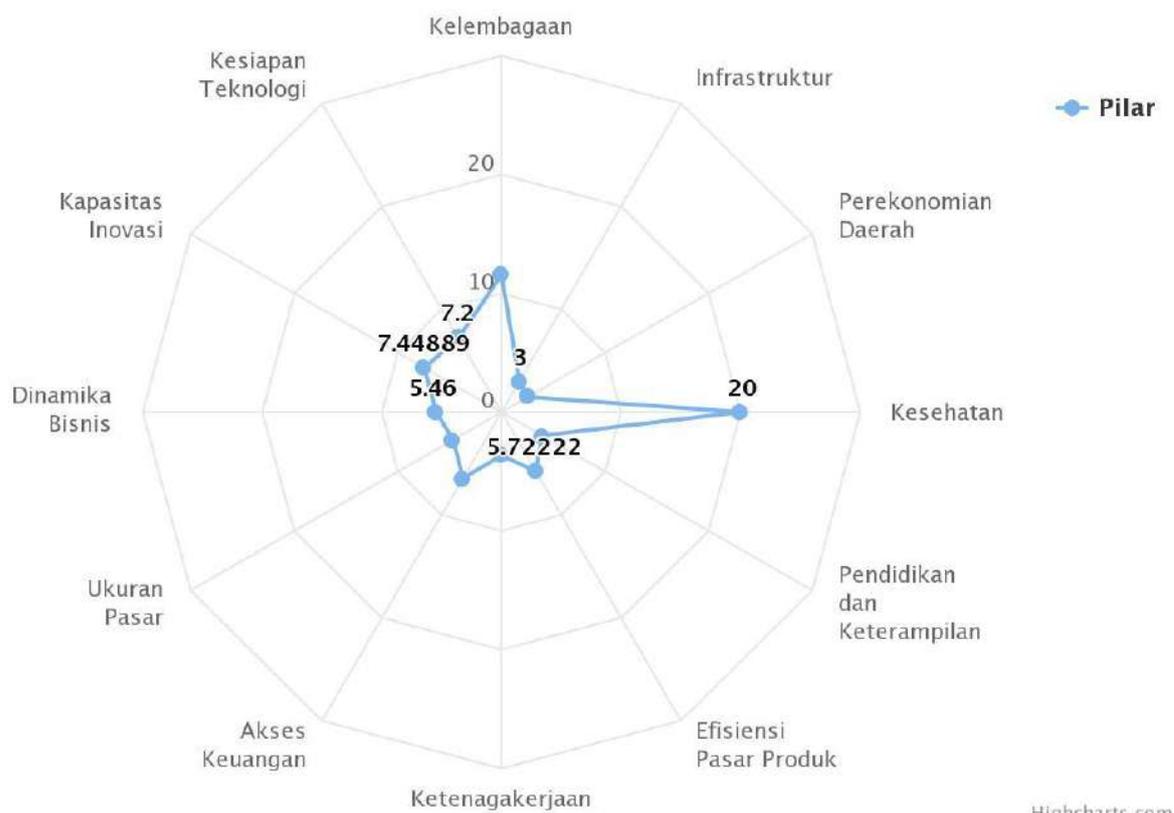
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
8,34227**

**KATEGORI :
SANGAT TINGGI**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Perekonomian Daerah

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

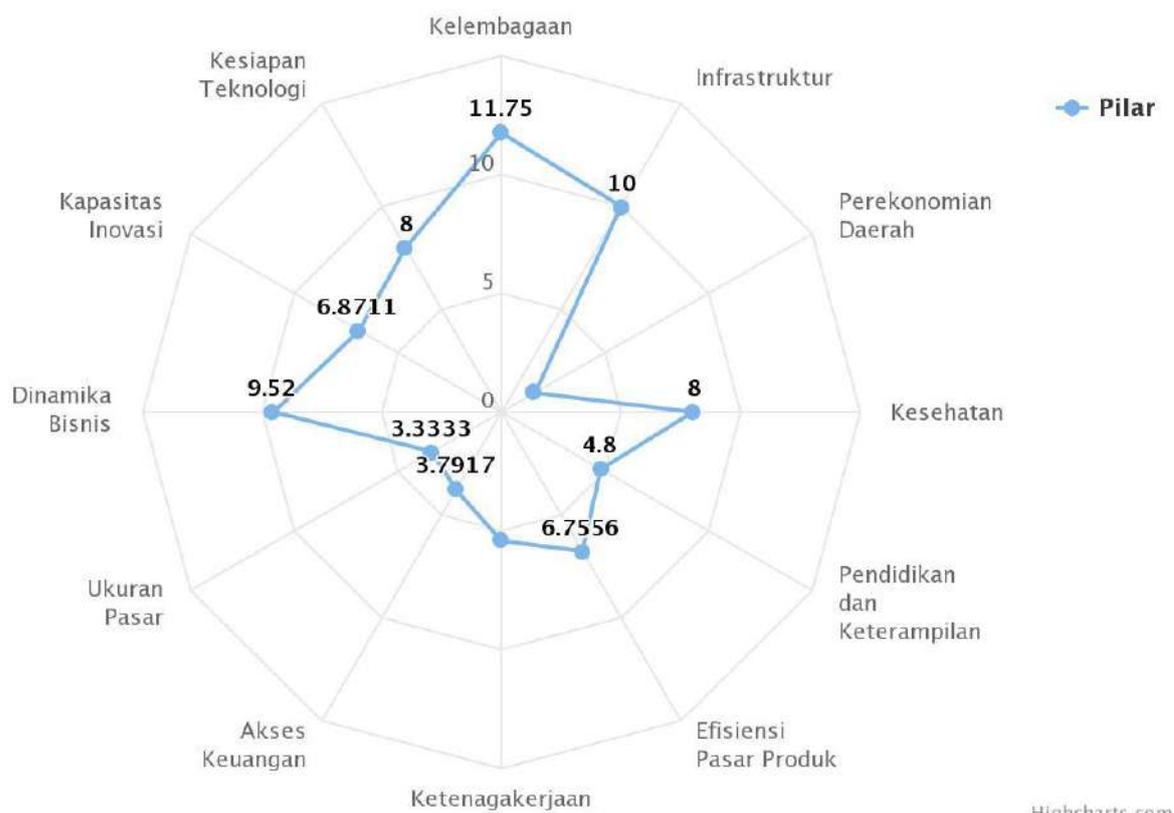


**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
6,72620**

**KATEGORI :
TINGGI**

Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Perekonomian Daerah

PROVINSI GORONTALO



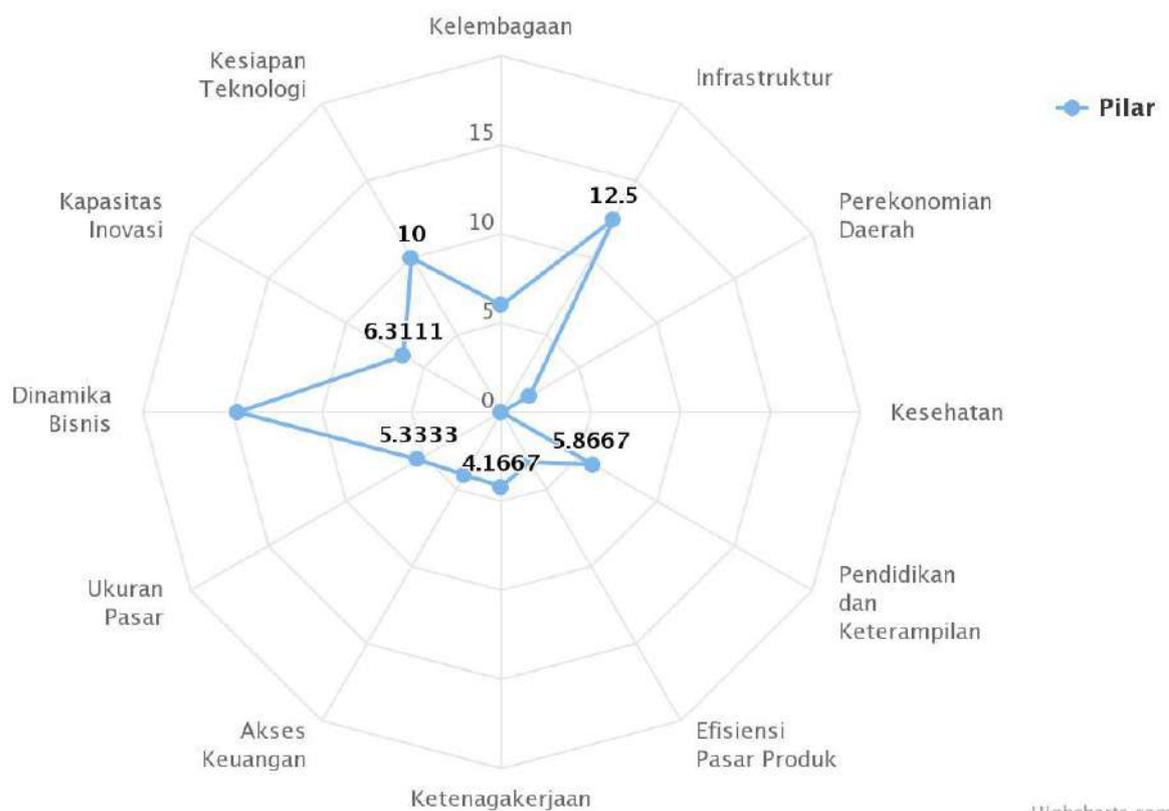
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
5,61180**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Dinamika Bisnis
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

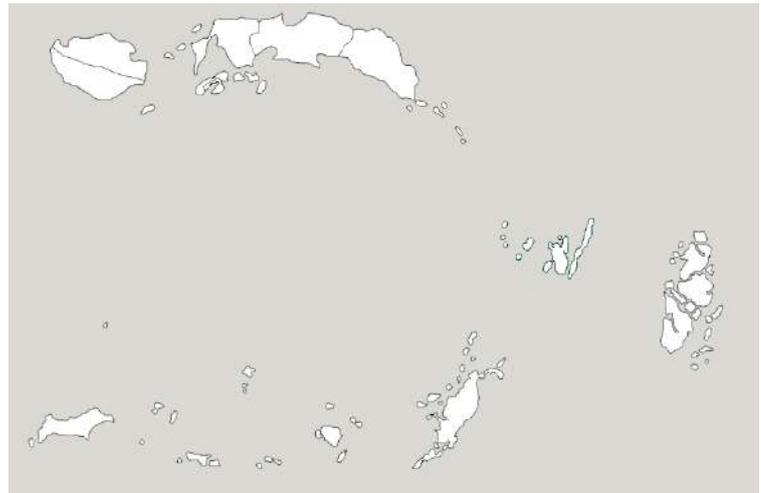
PROVINSI MALUKU



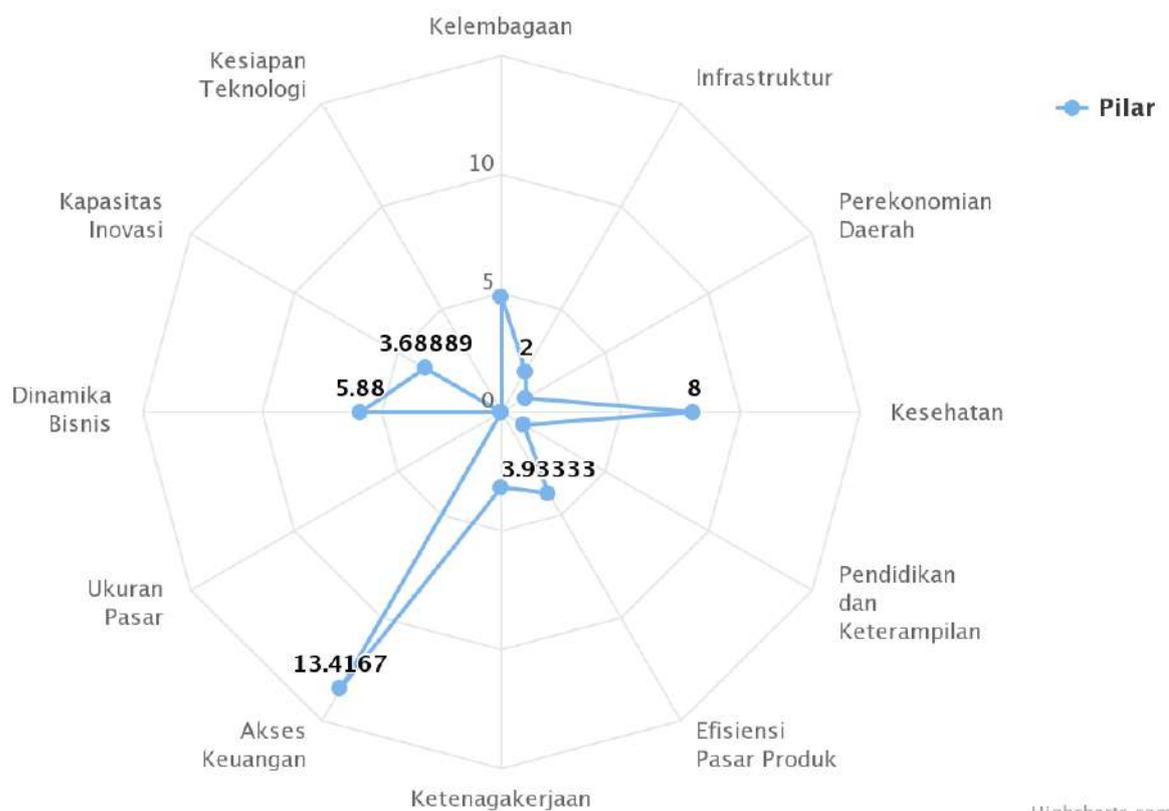
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,03970**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Akses Keuangan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesiapan Teknologi

PROVINSI MALUKU UTARA



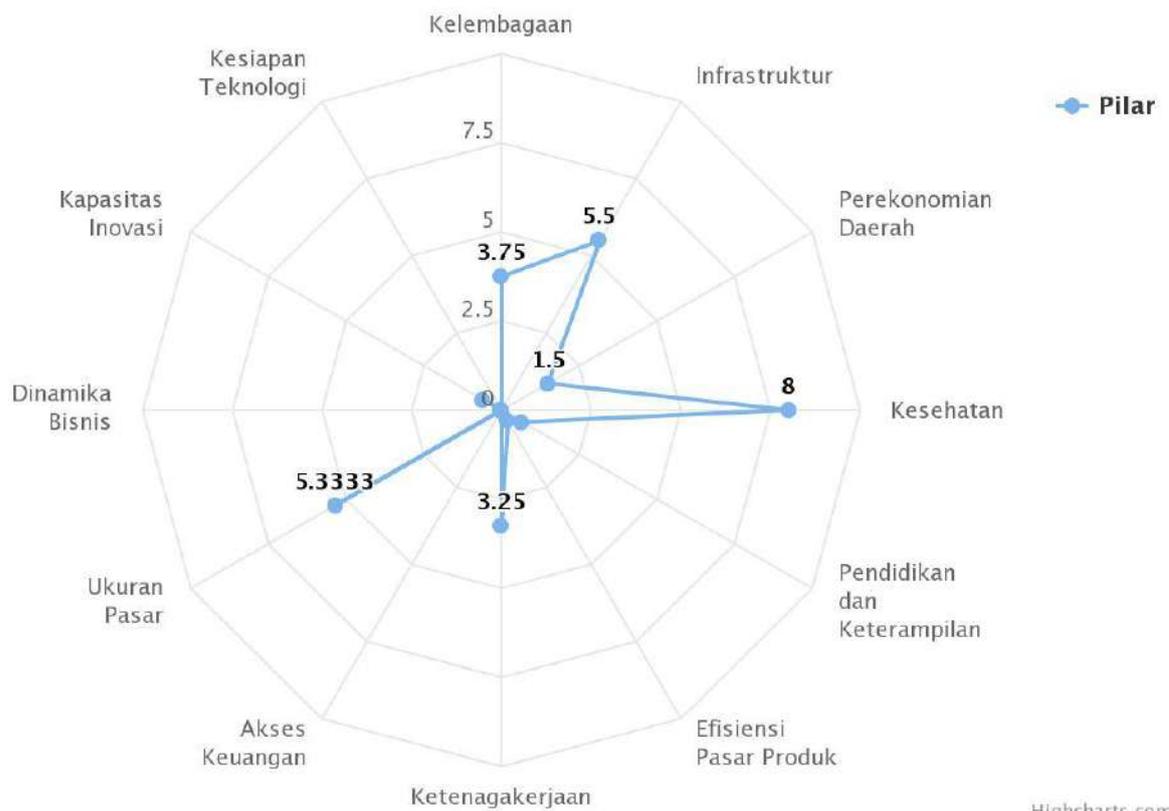
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
2,76890**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesiapan Teknologi

Hasil penilaian masing-masing kabupaten se-indonesia, berdasarkan data tanggal 30 November 2019 dari website <https://indeks.inovasi.ristekdikti.go.id>. Berikut list kabupaten beserta nilai indeks yang telah mengisi kuesioner :

KODE_ID	Nama Daerah	Nilai Indeks
1105	Kab. Aceh Timur	1,1783
1109	Kab. Pidie	2,5583
1113	Kab. Gayo Lues	0,6694
1116	Kab. Aceh Jaya	1,9014
1118	Kab. Pidie Jaya	1,9811
1202	Kab. Mandailing Natal	2,6685
1203	Kab. Tapanuli Selatan	1,7199
1204	Kab. Tapanuli Tengah	2,9611
1206	Kab. Toba Samosir	1,9942
1207	Kab. Labuhan Batu	3,0427
1210	Kab. Dairi	0,3424
1211	Kab. Karo	3,0745
1213	Kab. Langkat	2,8490
1214	Kab. Nias Selatan	3,4159
1216	Kab. Pakpak Barat	3,9650
1217	Kab. Samosir	4,0414
1219	Kab. Batu Bara	1,0408
1302	Kab. Pesisir Selatan	4,1167
1304	Kab. Sijunjung	3,5230
1306	Kab. Padang Pariaman	3,3650
1307	Kab. Agam	7,0494
1308	Kab.Lima Puluh Kota	0,6563
1309	Kab. Pasaman	4,9940
1310	Kab. Solok Selatan	3,2494
1312	Kab. Pasaman Barat	1,0664
1502	Kab. Merangin	4,7487
1503	Kab. Sarolangun	3,8780
1504	Kab. Batang Hari	1,6609
1506	Kab. Tanjung Jabung Timur	3,7255
1509	Kab. Bungo	1,5459
1602	Kab. Ogan Komering Ilir	2,04174
1603	Kab. Muara Enim	5,6532
1605	Kab. Musi Rawas	4,4452
1607	Kab. Banyu Asin	1,9411
1608	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	3,4098
1703	Kab. Bengkulu Utara	0,7594
1801	Kab. Lampung Barat	1,0311
1805	Kab. Lampung Tengah	4,8500
1810	Kab. Pringsewu	2,0140
1902	Kab. Belitung	6,4453
1903	Kab. Bangka Barat	3,3103
1904	Kab. Bangka Tengah	2,3028
1905	Kab. Bangka Selatan	1,4448
1906	Kab. Belitung Timur	4,5287
2102	Kab. Bintan	4,5287
3201	Kab. Bogor	8,5235
3203	Kab. Cianjur	5,3592
3205	Kab. Garut	5,1923
3207	Kab. Ciamis	1,4626
3208	Kab. Kuningan	1,0585
3211	Kab. Sumedang	3,8180
3214	Kab. Purwakarta	2,7292
3217	Kab. Bandung Barat	2,2891

3218	Kab. Pangandaran	3,5507
3301	Kab. Cilacap	5,4258
3302	Kab. Banyumas	5,9711
3303	Kab. Purbalingga	3,3021
3304	Kab. Banjarnegara	4,0316
3305	Kab. Kebumen	4,5573
3306	Kab. Purworejo	5,0199
3307	Kab. Wonosobo	4,3211
3308	Kab. Magelang	4,8334
3309	Kab. Boyolali	5,8842
3310	Kab. Klaten	5,1454
3311	Kab. Sukoharjo	2,2136
3312	Kab. Wonogori	7,5986
3313	Kab. Karanganyar	3,1295
3314	Kab. Sragen	4,6952
3315	Kab. Grobogan	5,3803
3316	Kab. Blora	4,3295
3317	Kab. Rembang	7,0487
3318	Kab. Pati	6,7577
3319	Kab. Kudus	5,5537
3320	Kab. Jepara	3,5736
3321	Kab. Demak	4,7144
3322	Kab. Semarang	6,4046
3323	Kab. Temanggung	4,0409
3324	Kab. Kendal	7,7997
3325	Kab. Batang	6,0909
3326	Kab. Pekalongan	5,8211
3326	Kab. Pemasang	4,6420
3328	Kab. Tegal	5,6897
3329	Kab. Brebes	6,3122
3329	Kab. Brebes	2,7090
3401	Kab. Kulonprogo	7,0740
3402	Kab. Bantul	1,9411
3403	Kab. Gunung Kidul	4,1881
3404	Kab. Sleman	2,6620
3503	Kab. Trenggalek	2,9078
3505	Kab. Blitar	4,6194
3507	Kab. Malang	4,5713
3514	Kab. Pasuruan	3,1129
3517	Kab. Jombang	4,1254
3519	Kab. Madiun	3,2751
3521	Kab. Ngawi	3,7083
3524	Kab. Lamongan	4,7217

KABUPATEN ACEH TIMUR



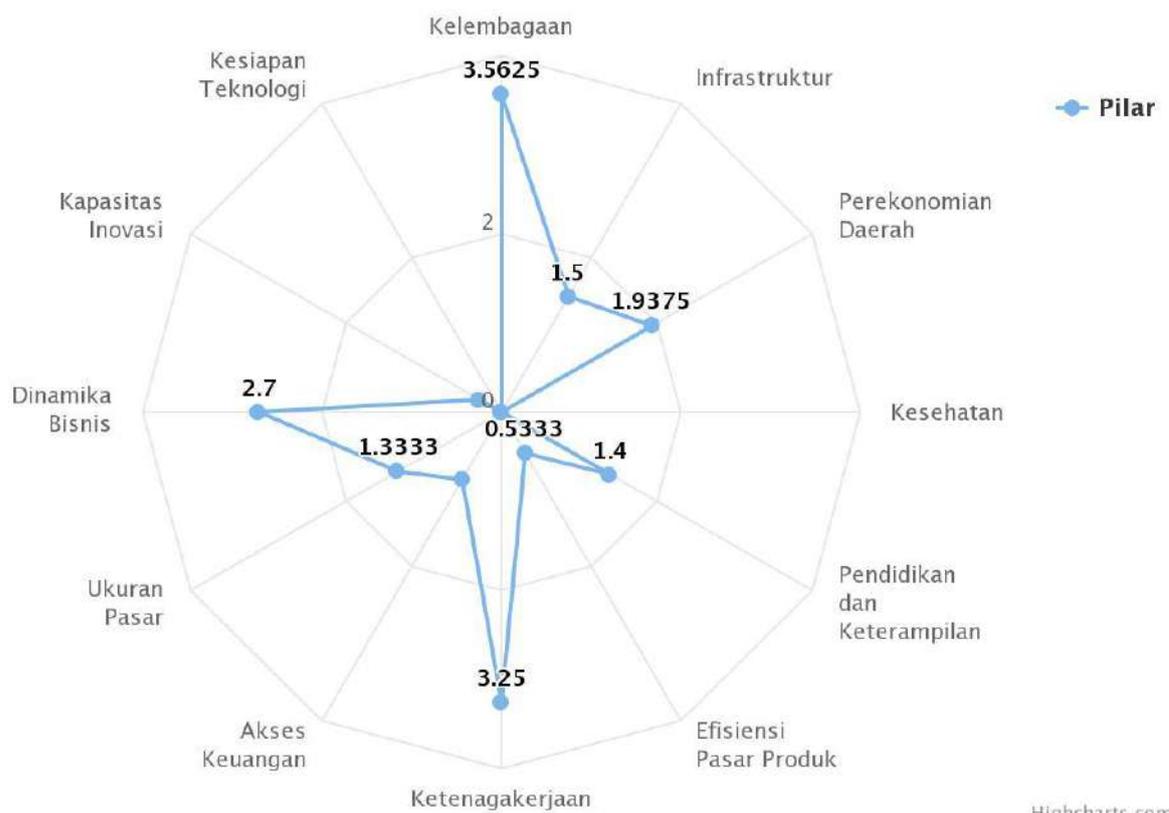
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
1,17830**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KABUPATEN PIDIE



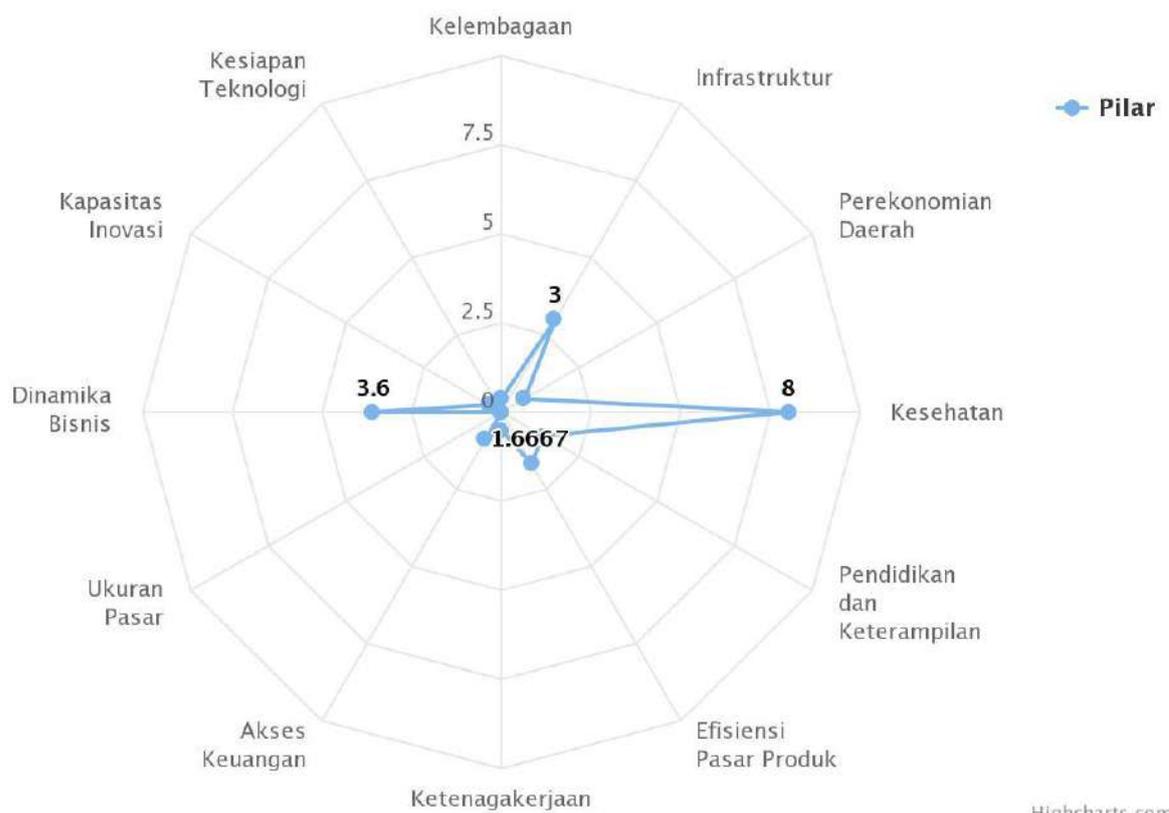
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
2,55830**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada Kesiapan Teknologi

KABUPATEN GAYO LUES



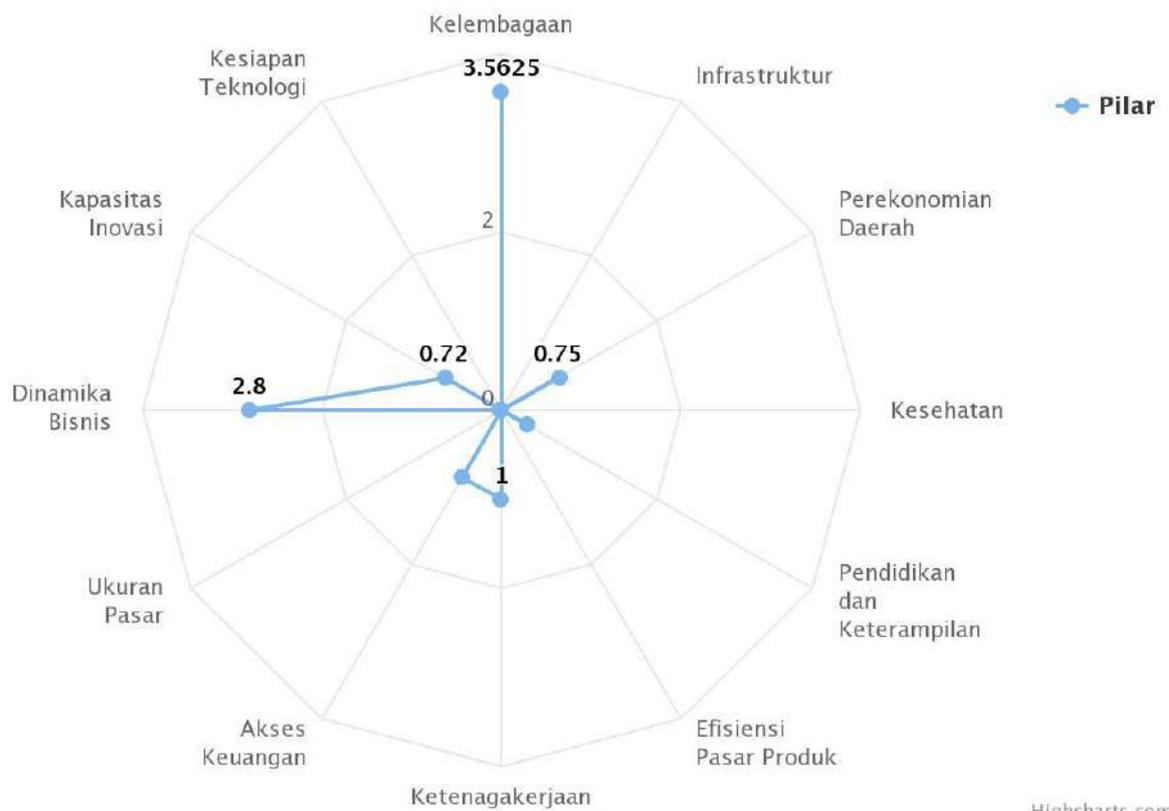
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
0,66940**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KABUPATEN ACEH JAYA



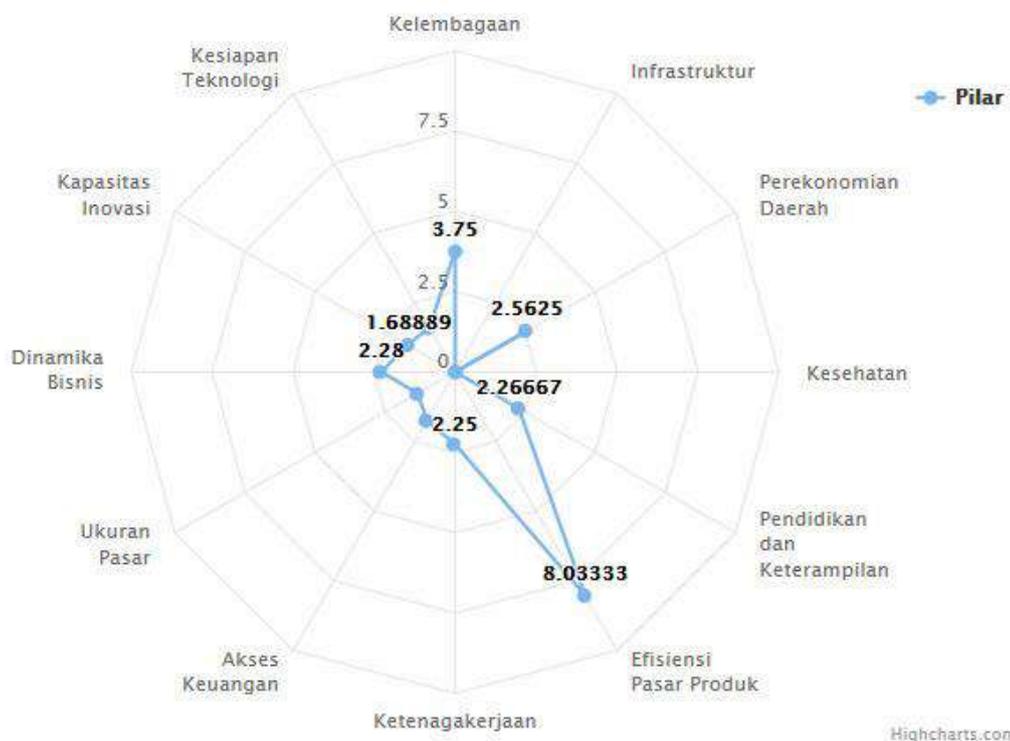
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
1,90137**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Efisiensi Pasar Produk
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KABUPATEN PIDIE JAYA



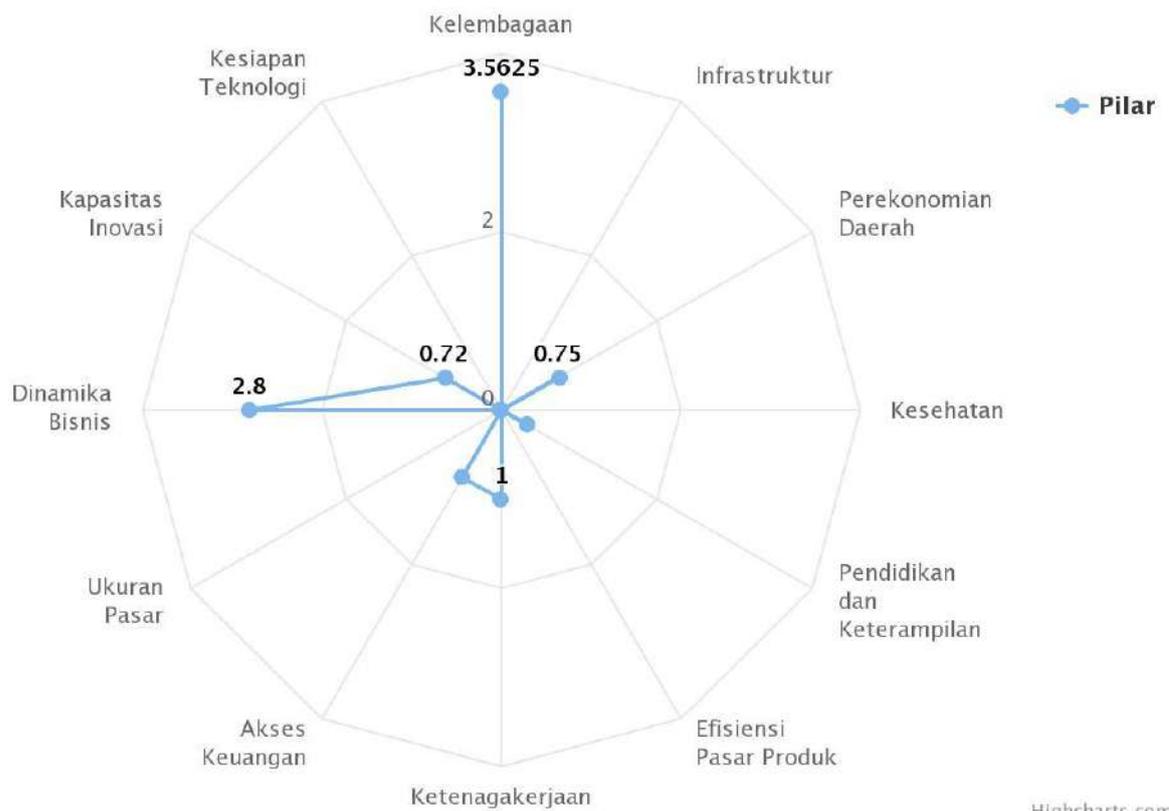
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
1,98110**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Infrastruktur
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KABUPATEN MANDAILING NATAL



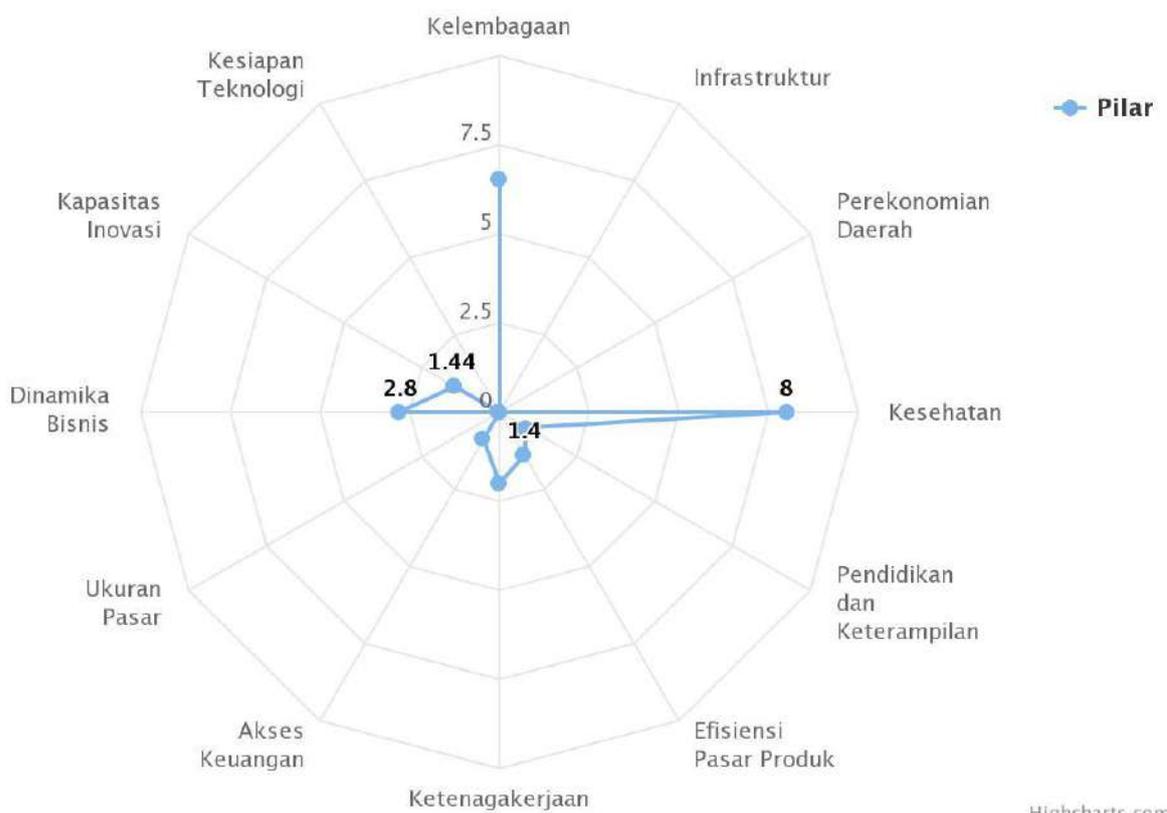
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
2,66850**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Perekonomian Daerah

KABUPATEN TAPANULI SELATAN



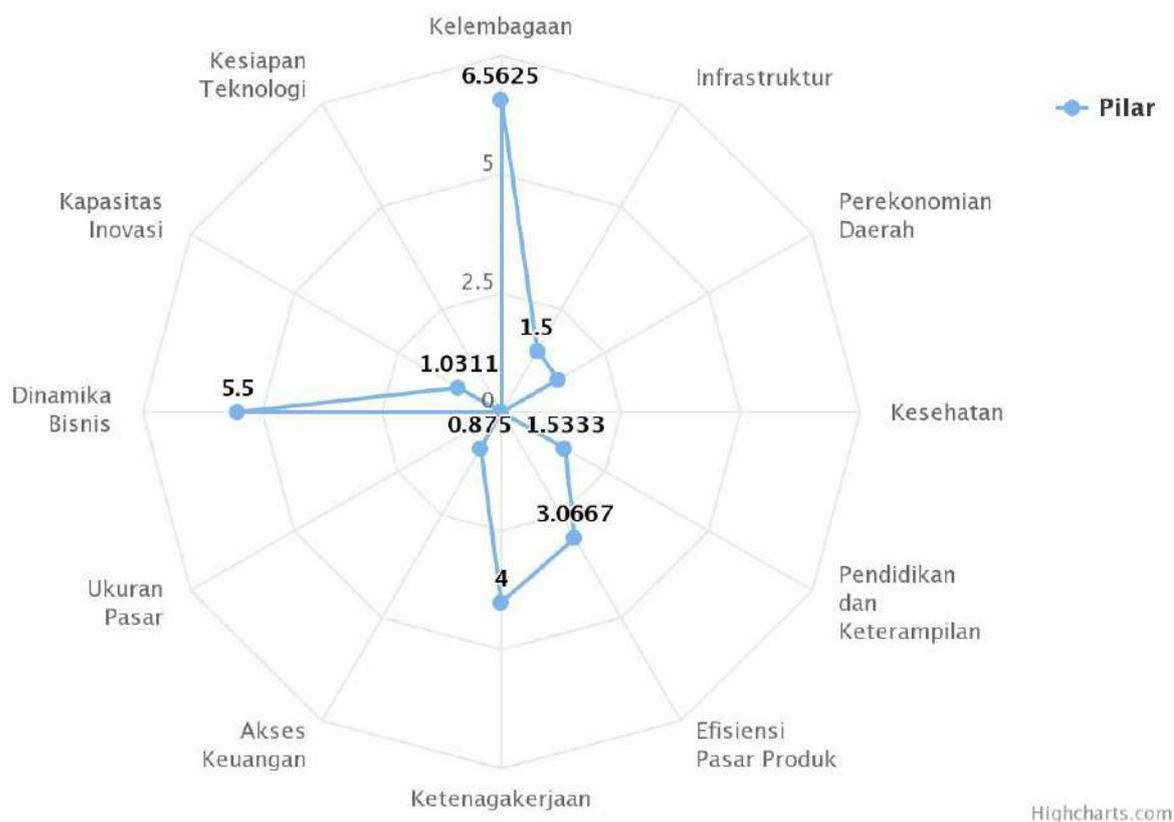
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
1,71990**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan dan Dinamika Bisnis
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesiapan Teknologi

KABUPATEN TAPANULI TENGAH



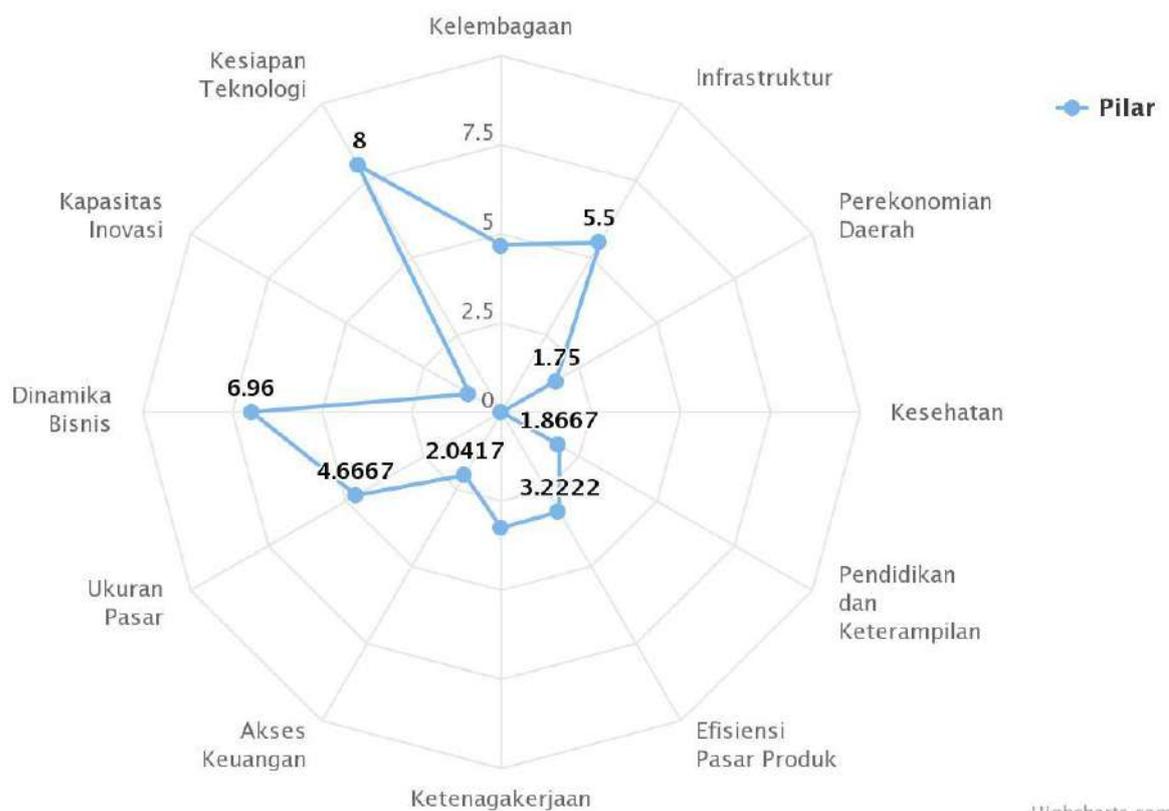
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
2,96110**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesiapan Teknologi
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KABUPATEN TOBA SAMOSIR



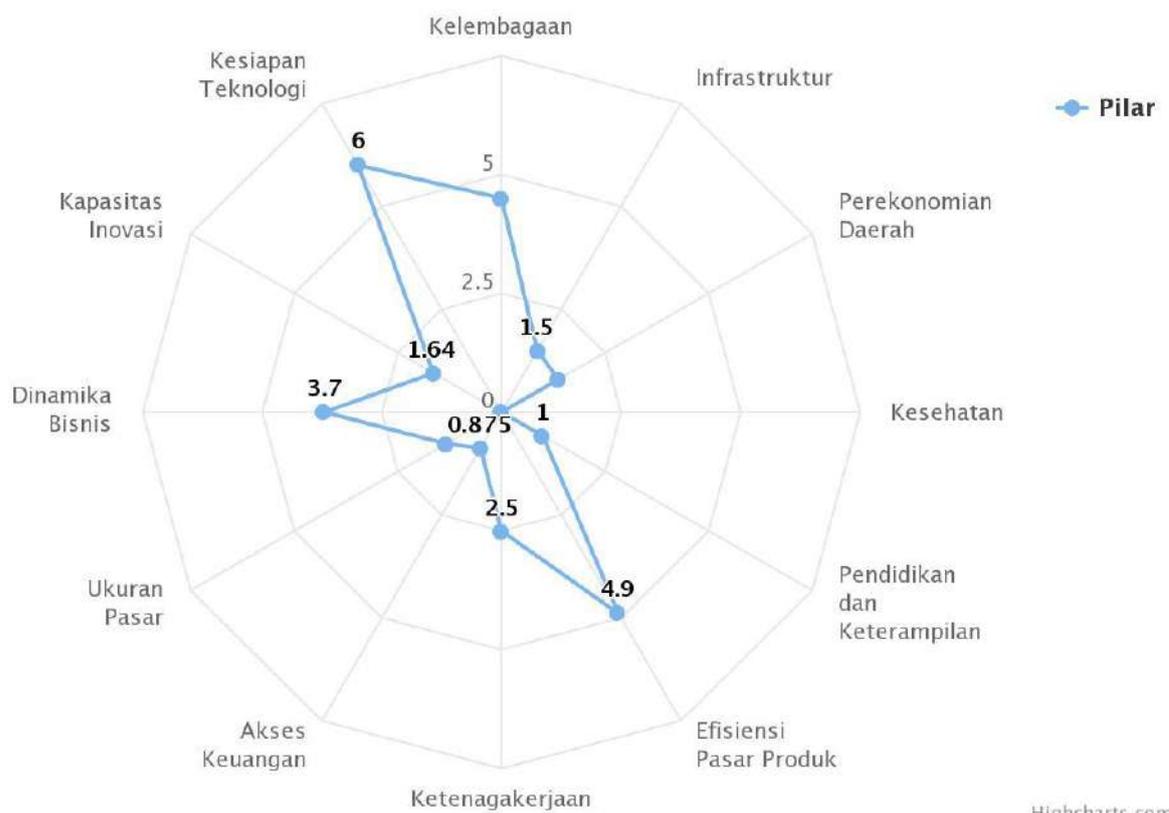
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
1,99420**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesiapan Teknologi
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KABUPATEN LABUHAN BATU



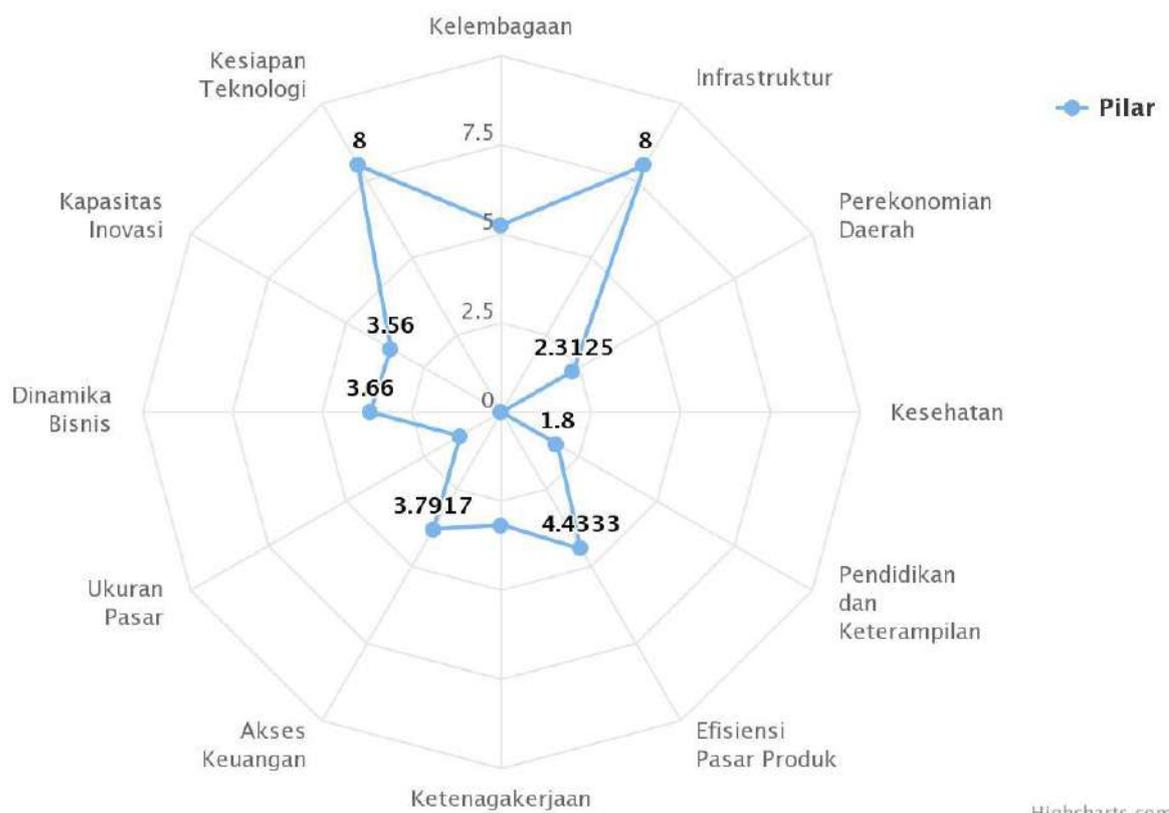
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3,04270**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesiapan Teknologi dan Infrastruktur
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

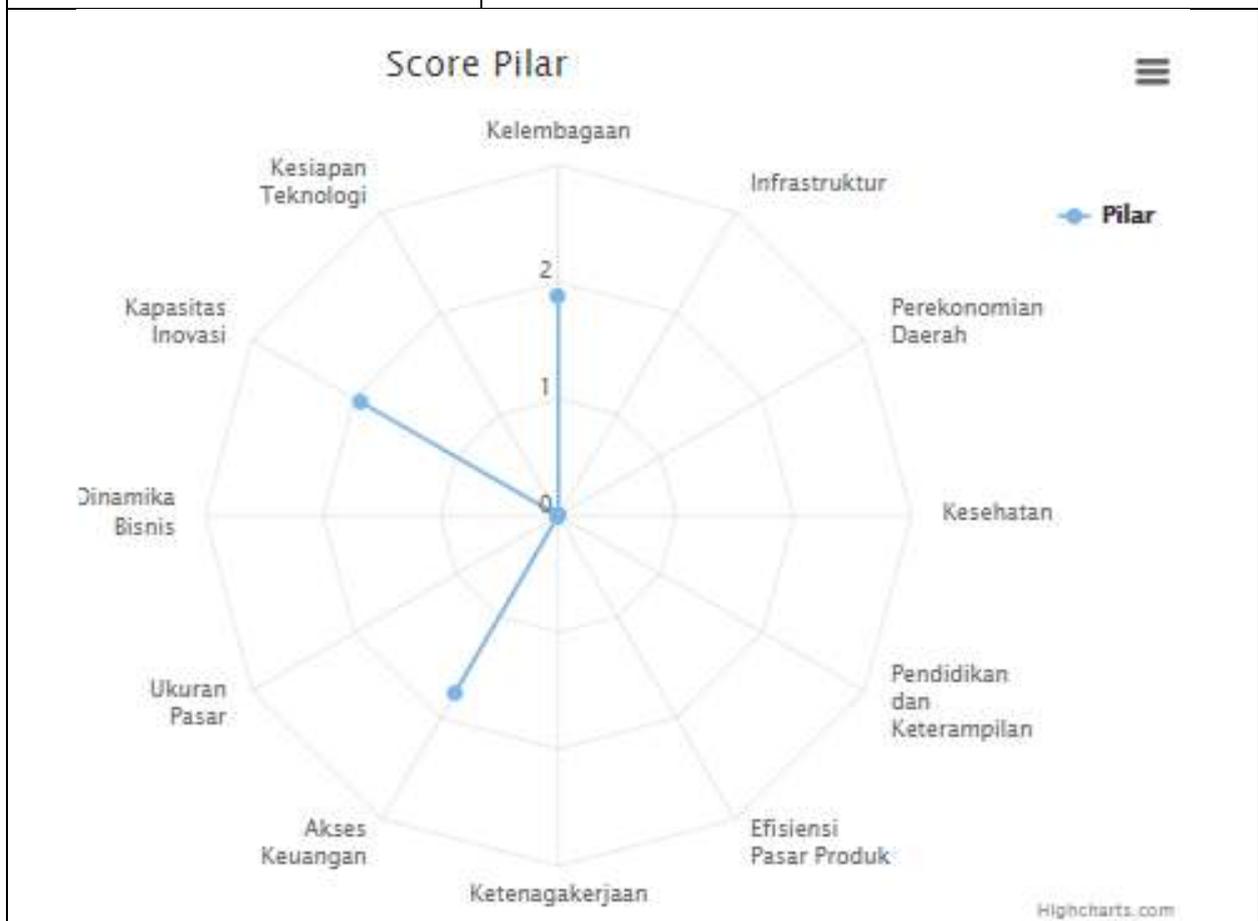
KABUPATEN DAIRI



**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
0,34240**

**KATEGORI :
RENDAH**



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Pendidikan dan Keterampilan

KABUPATEN KARO



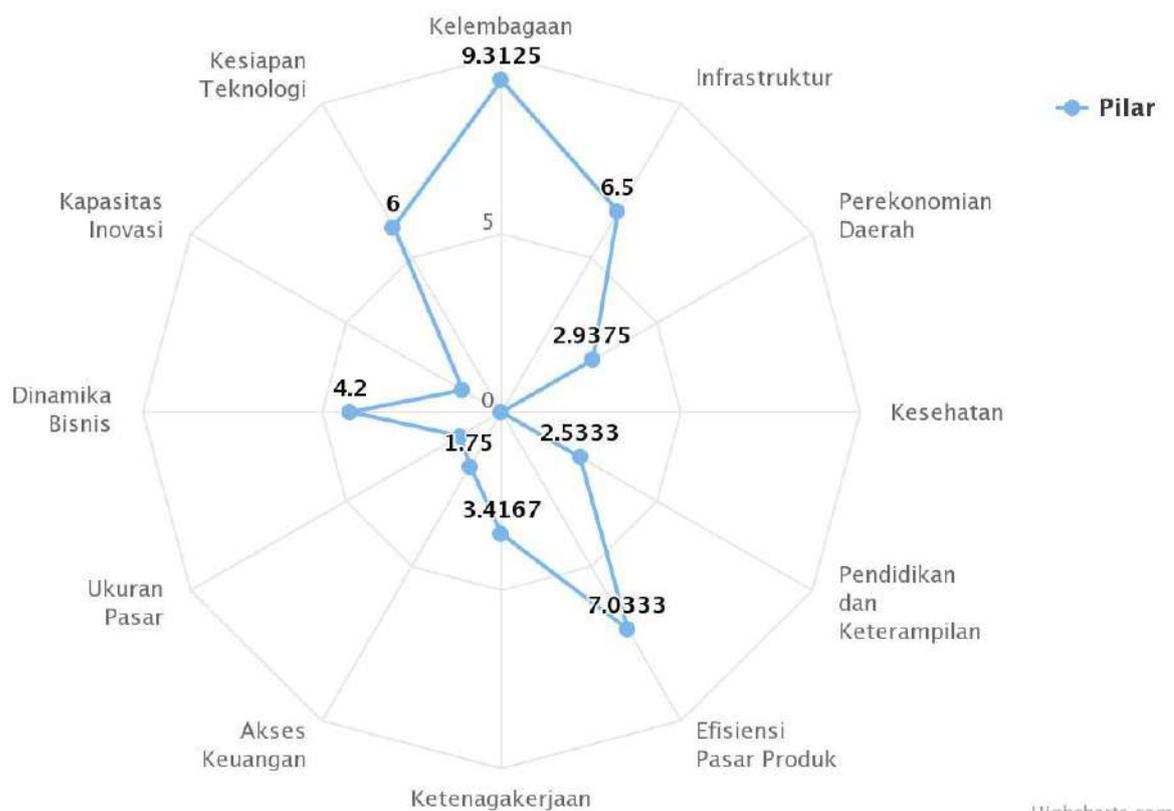
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3,07450**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KABUPATEN LANGKAT



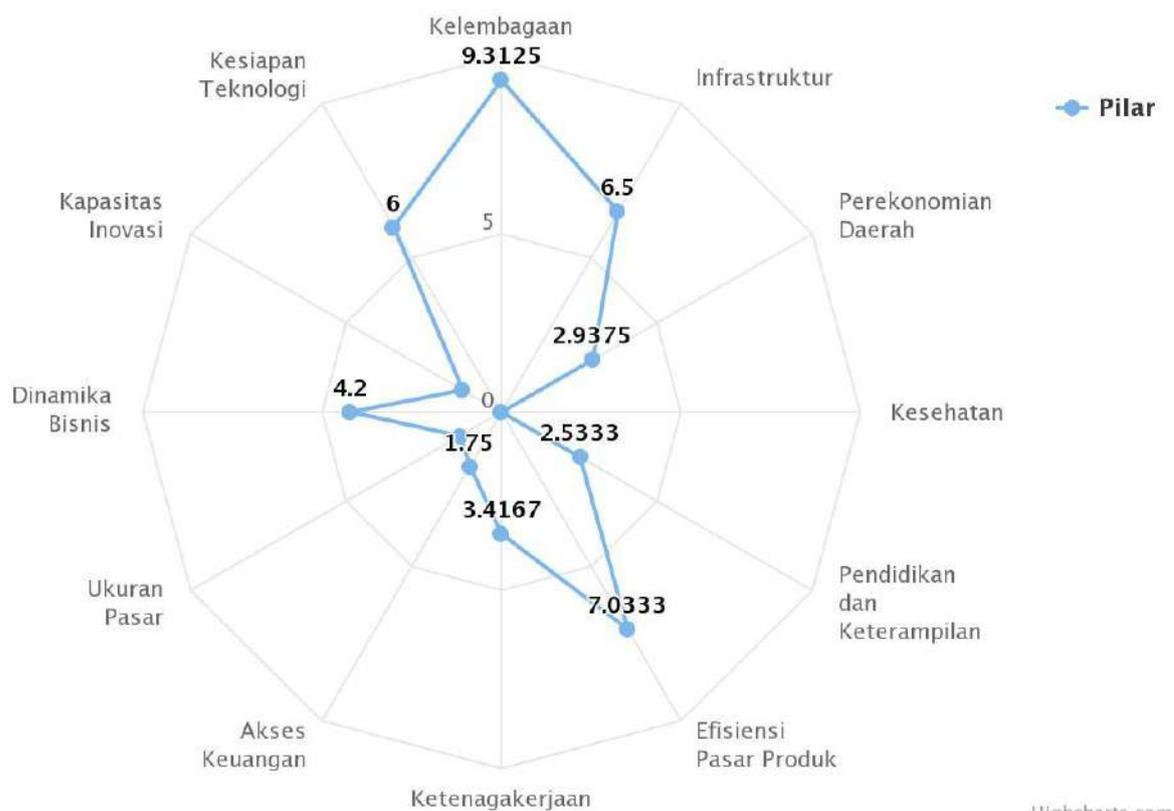
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
2,84900**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesiapan Teknologi

KABUPATEN NIAS SELATAN



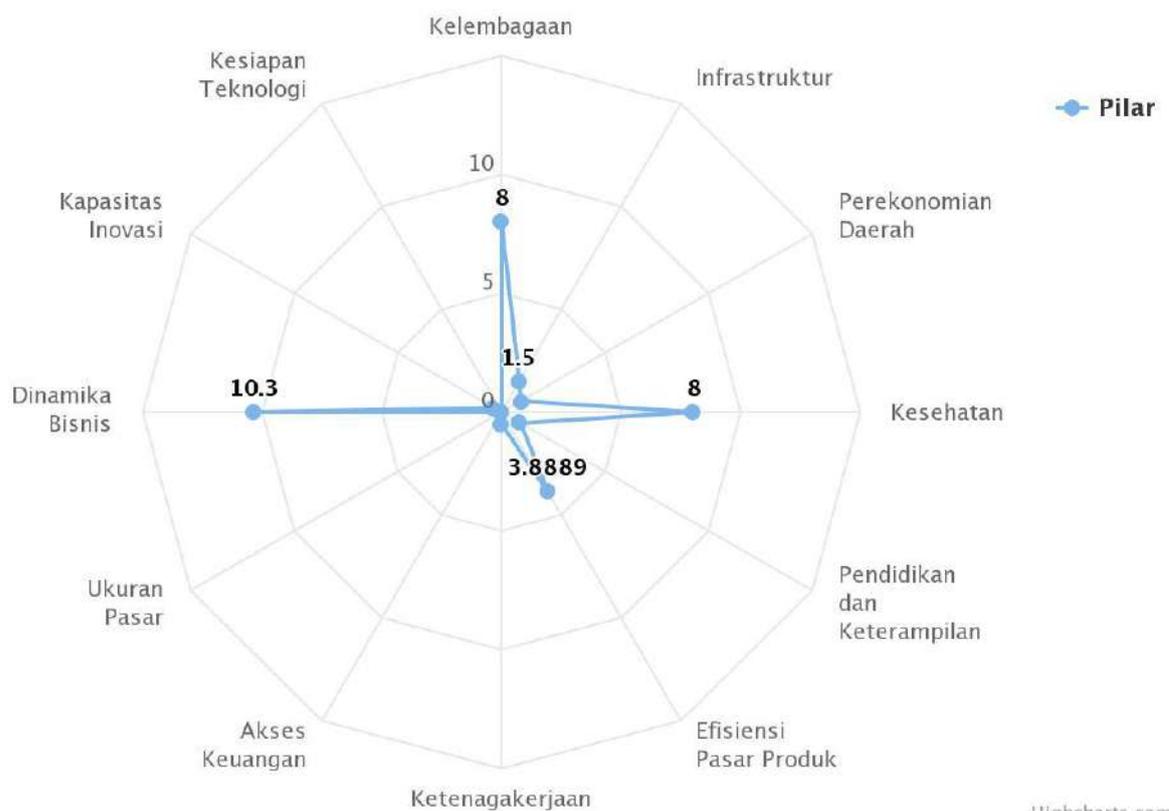
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3,41590**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Dinamika Bisnis
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kapasitas Inovasi

KABUPATEN PAKPAK BHARAT

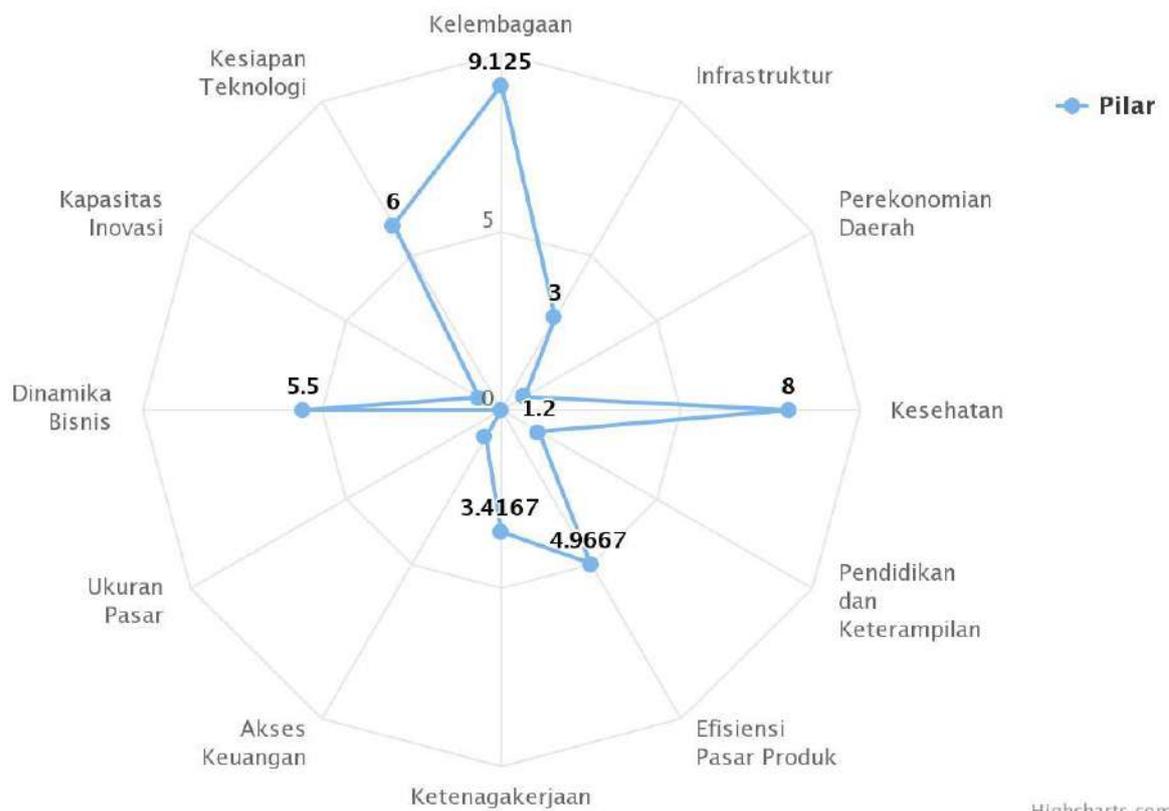


**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3,96500**

**KATEGORI :
SEDANG**

Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

KABUPATEN SAMOSIR

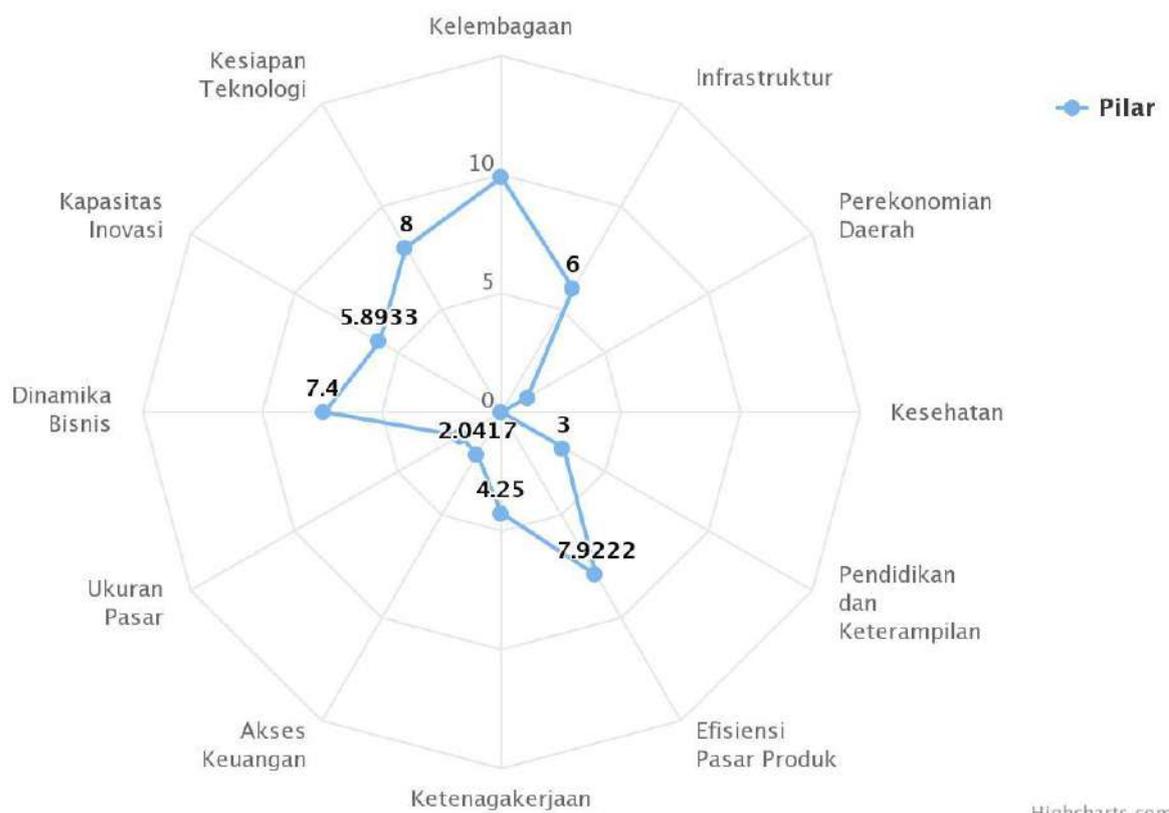


**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
1,04080**

**KATEGORI :
RENDAH**

Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KABUPATEN BATU BARA



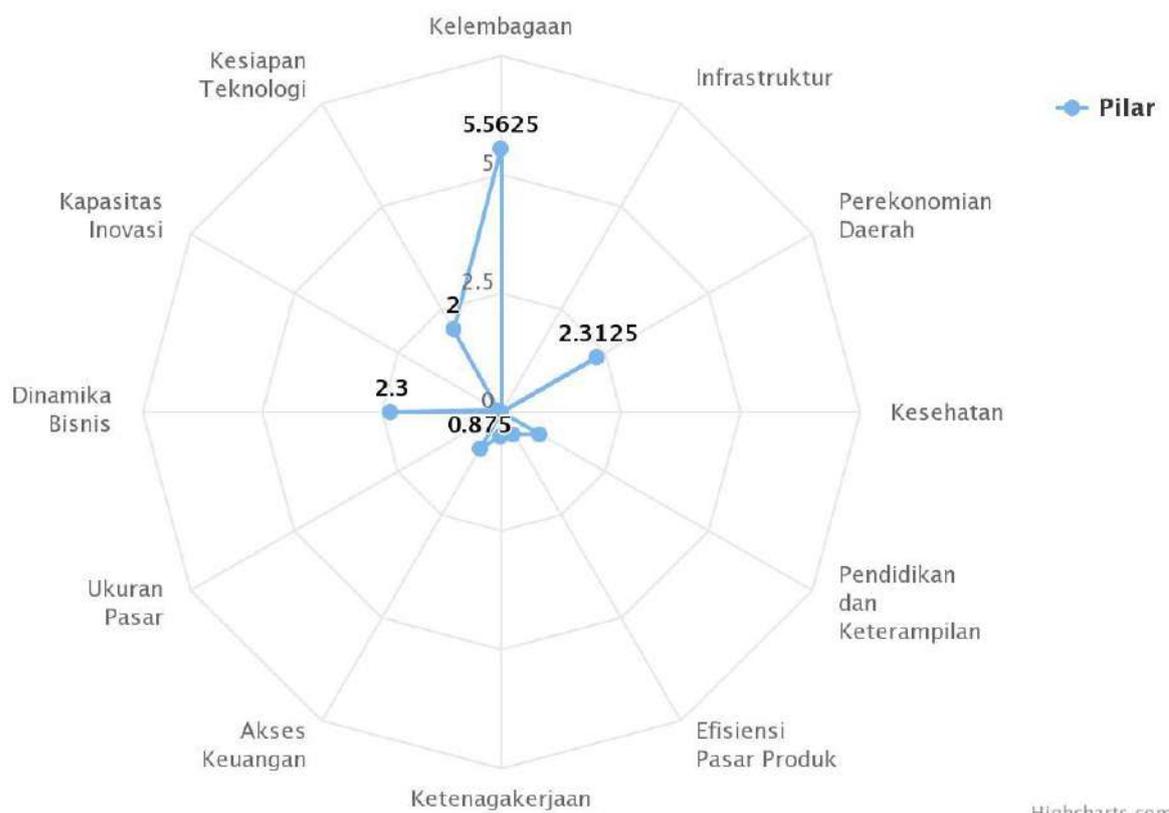
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
1,04080**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kapasitas Inovasi

KABUPATEN PESISIR SELATAN



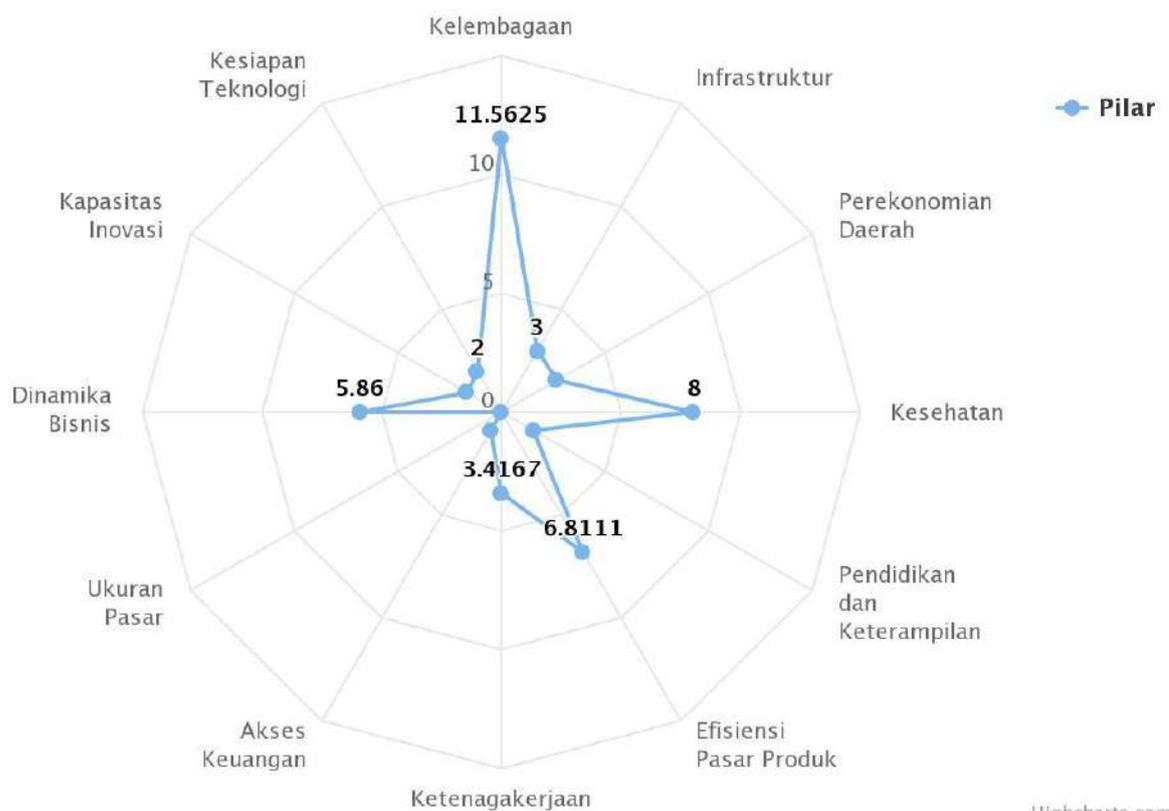
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,11670**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

KABUPATEN SIJUNJUNG

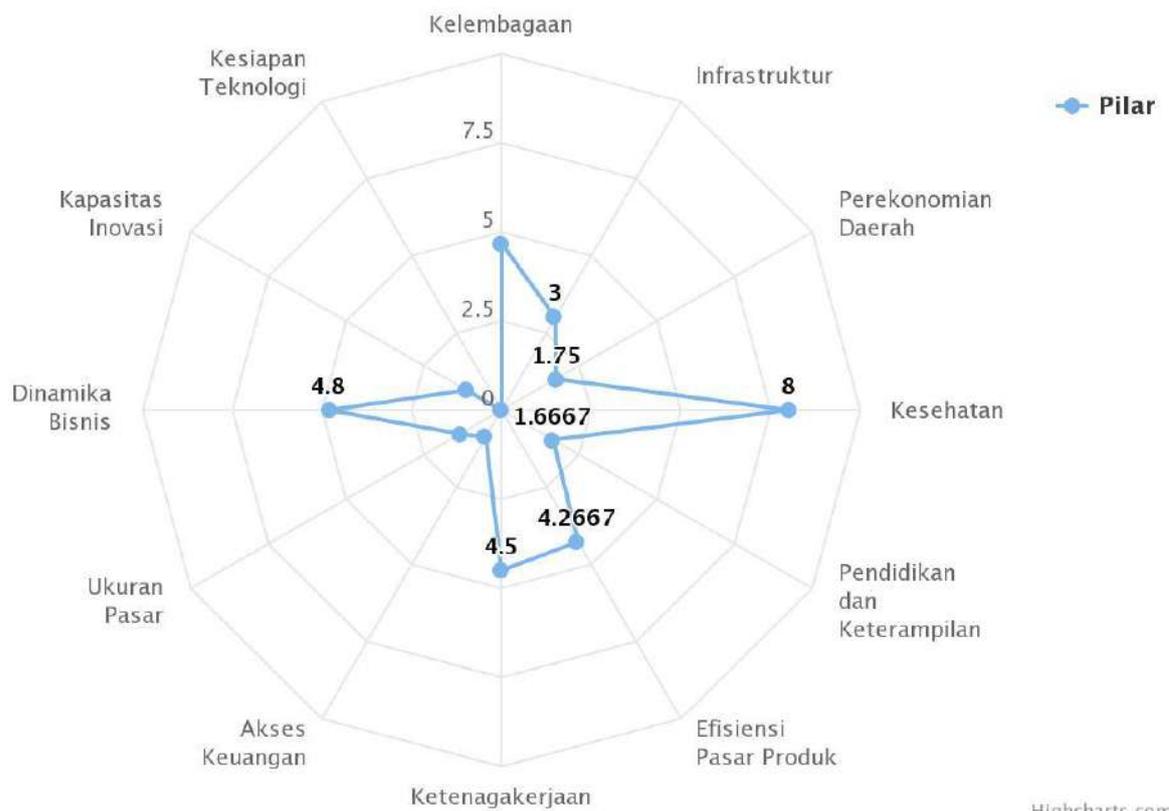


**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3,52300**

**KATEGORI :
SEDANG**

Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesiapan Teknologi

KABUPATEN PADANG PARIAMAN



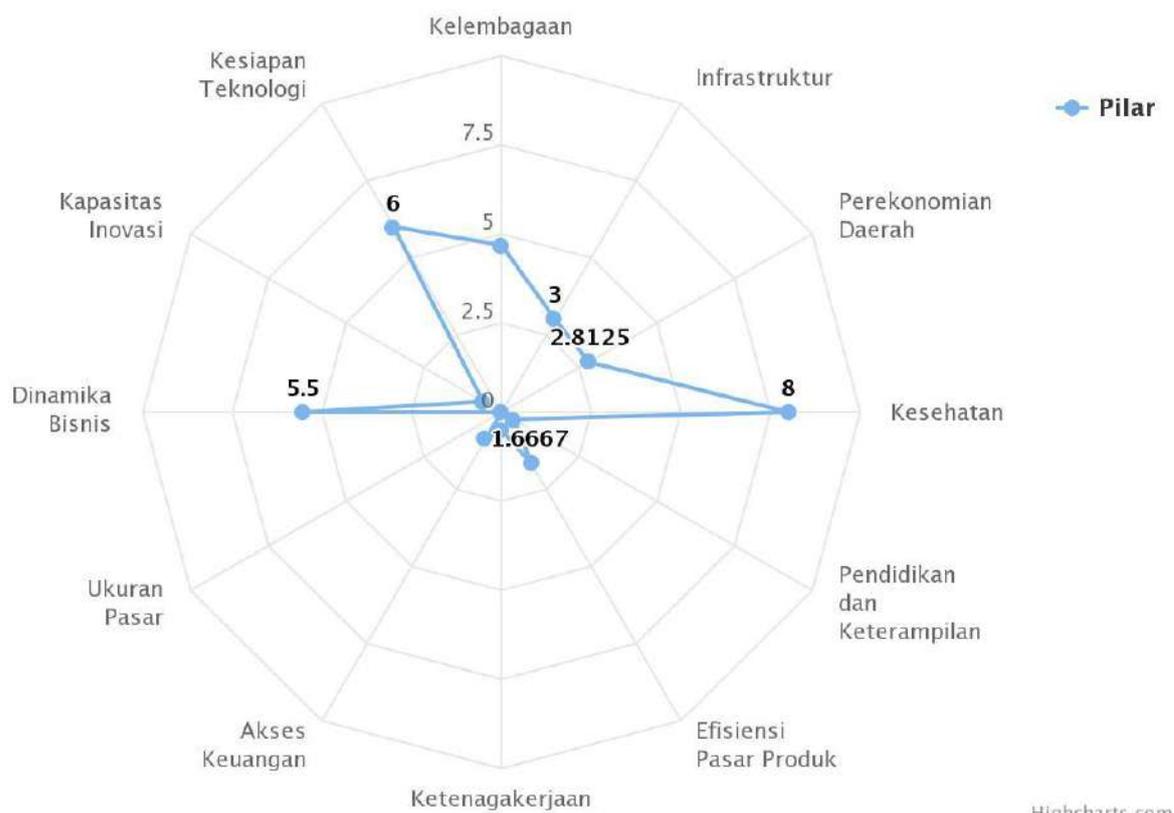
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3,36500**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

KABUPATEN AGAM



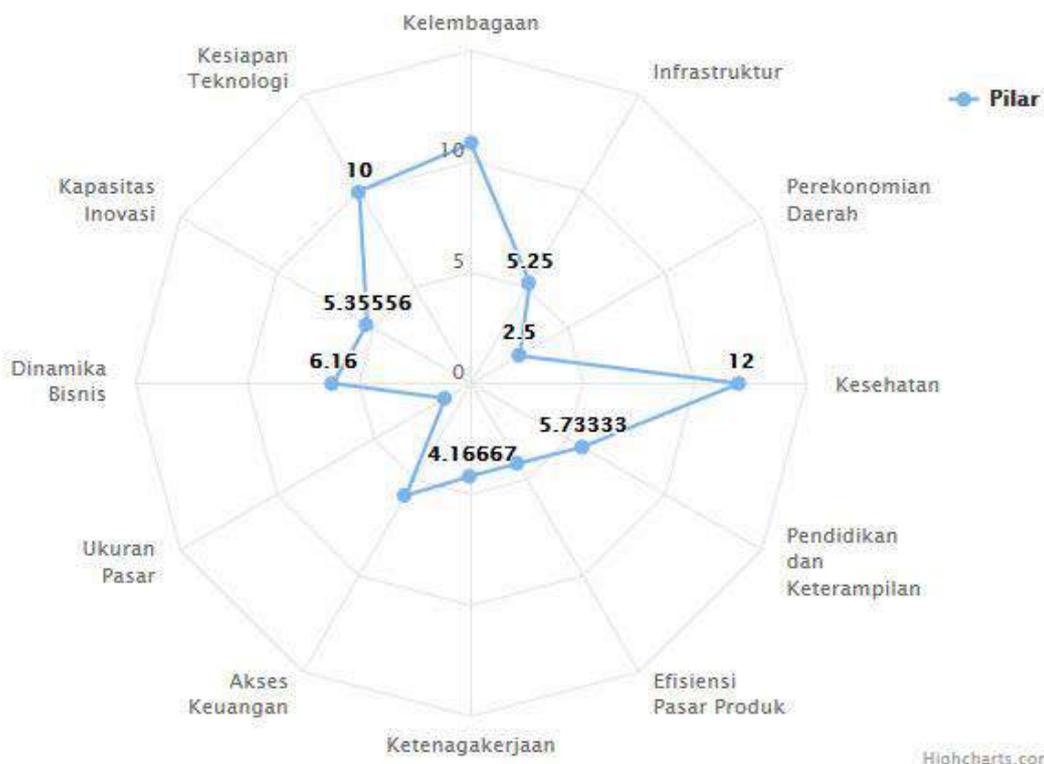
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
7,04942**

**KATEGORI :
TINGGI**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



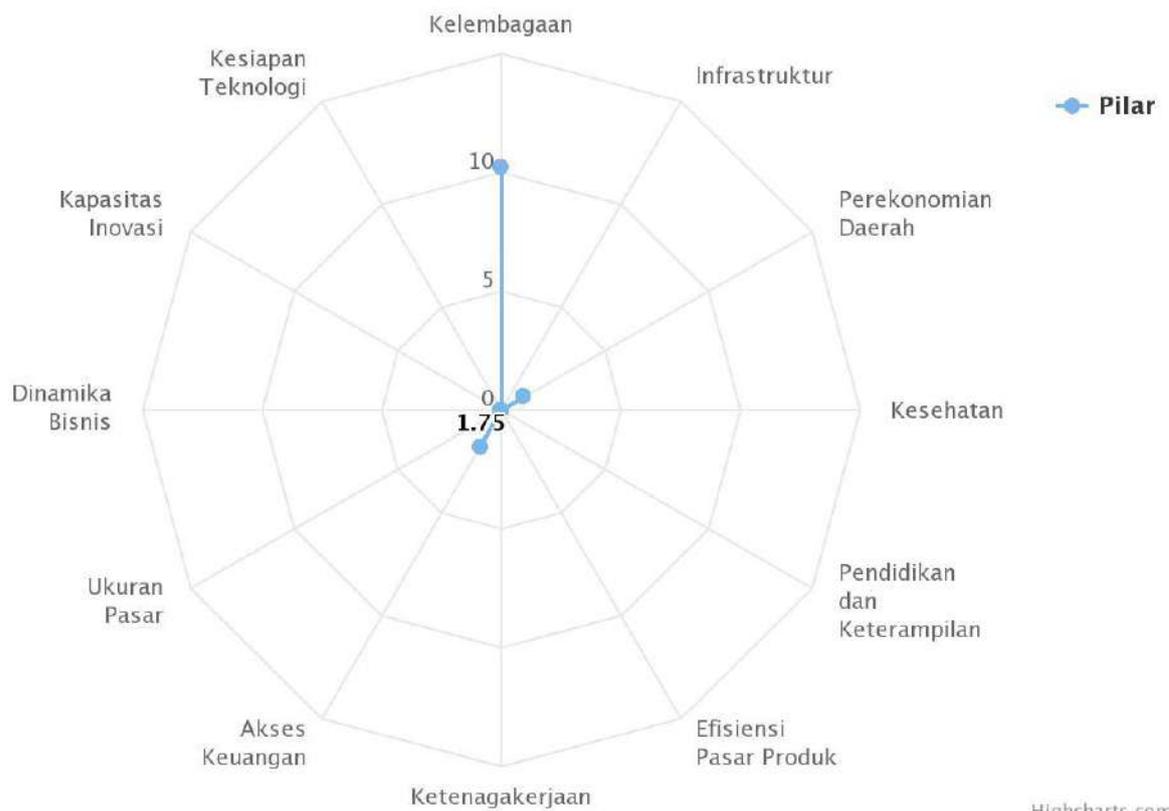
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
0,65630**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ketenagakerjaan

KABUPATEN PASAMAN

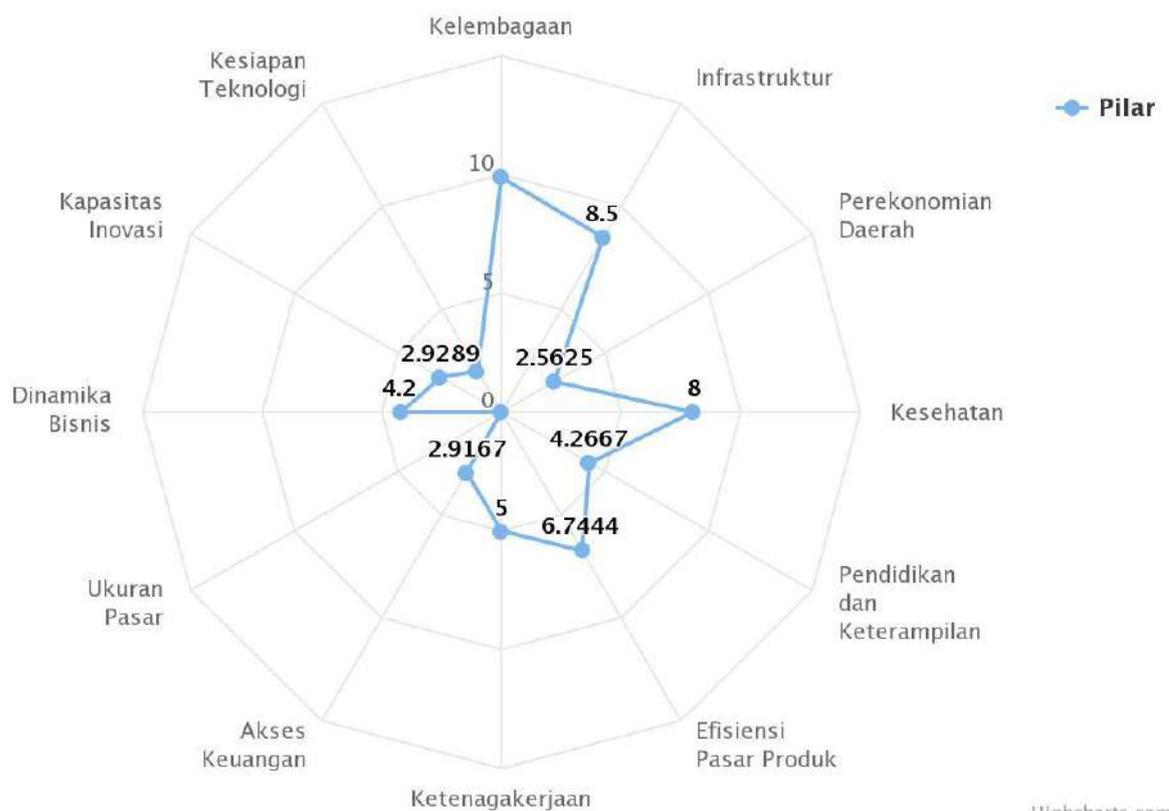


**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,99400**

**KATEGORI :
SEDANG**

Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

KABUPATEN SOLOK SELATAN



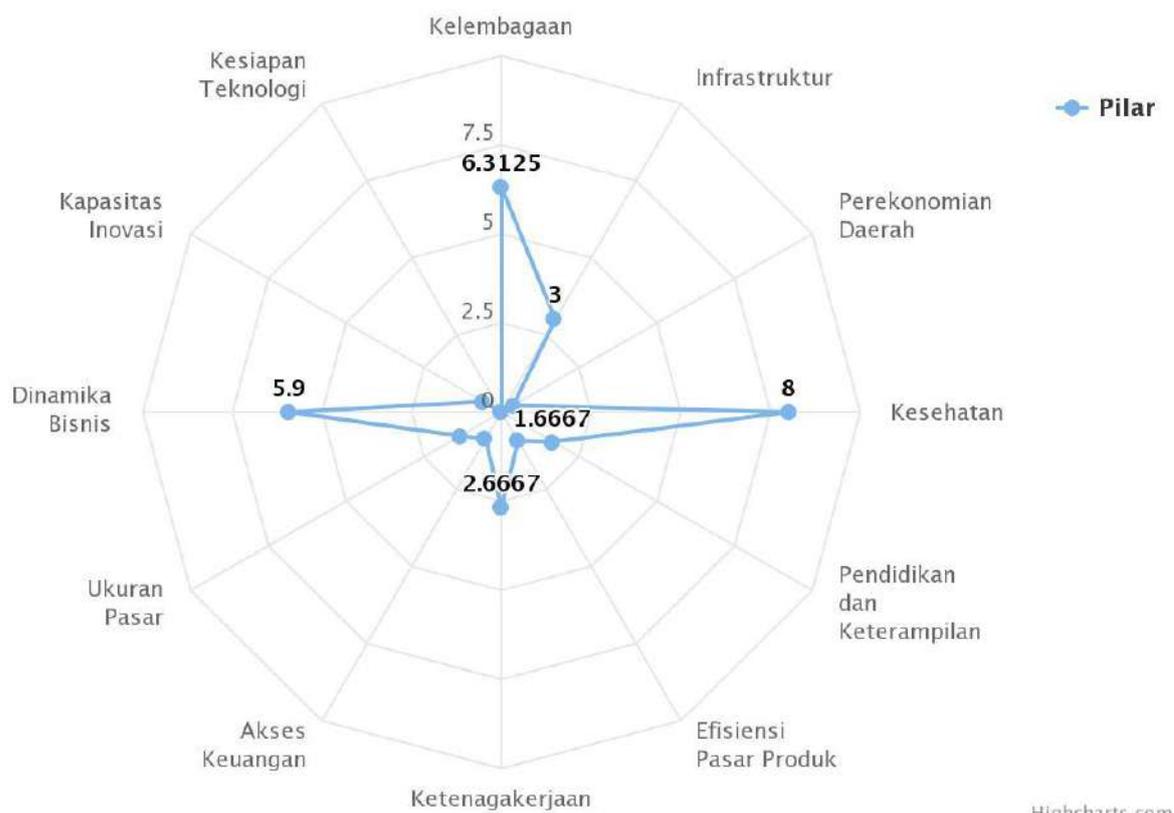
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3,24940**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KABUPATEN PASAMAN BARAT

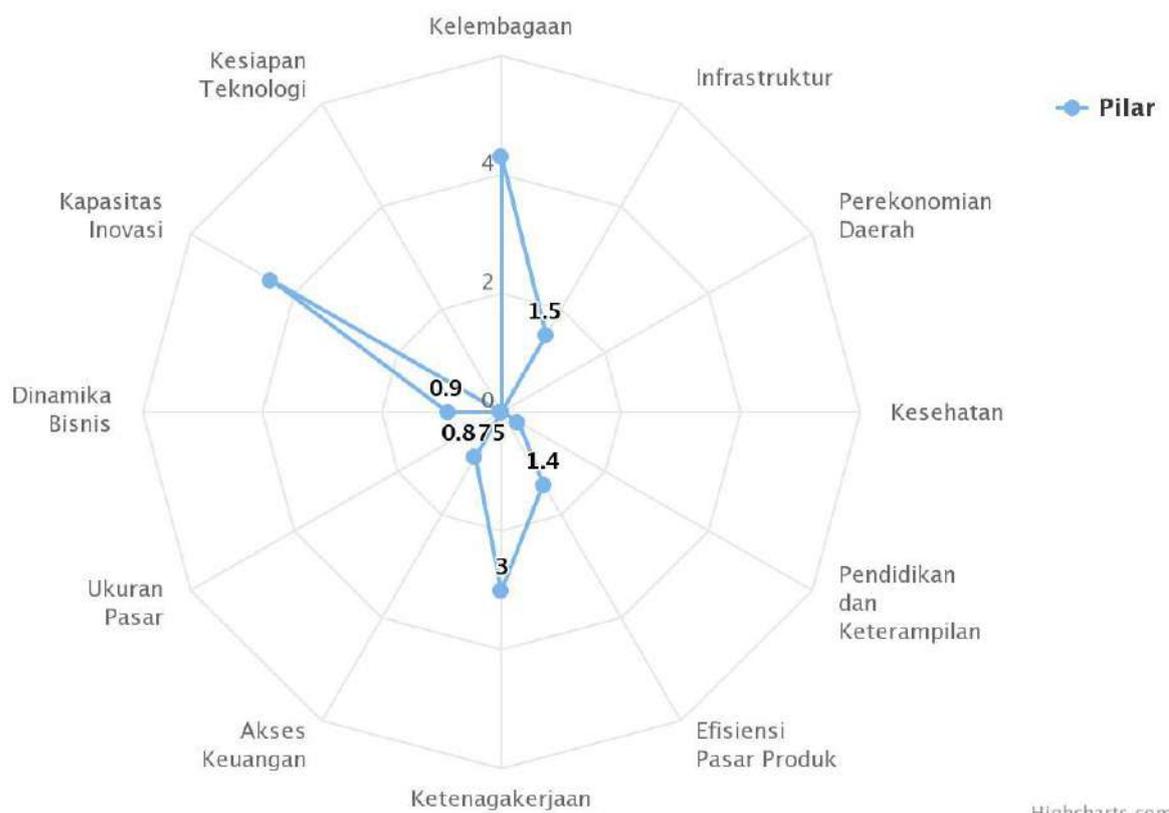


**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
1,06640**

**KATEGORI :
RENDAH**

Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kapasitas Inovasi dan Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KABUPATEN MERANGIN



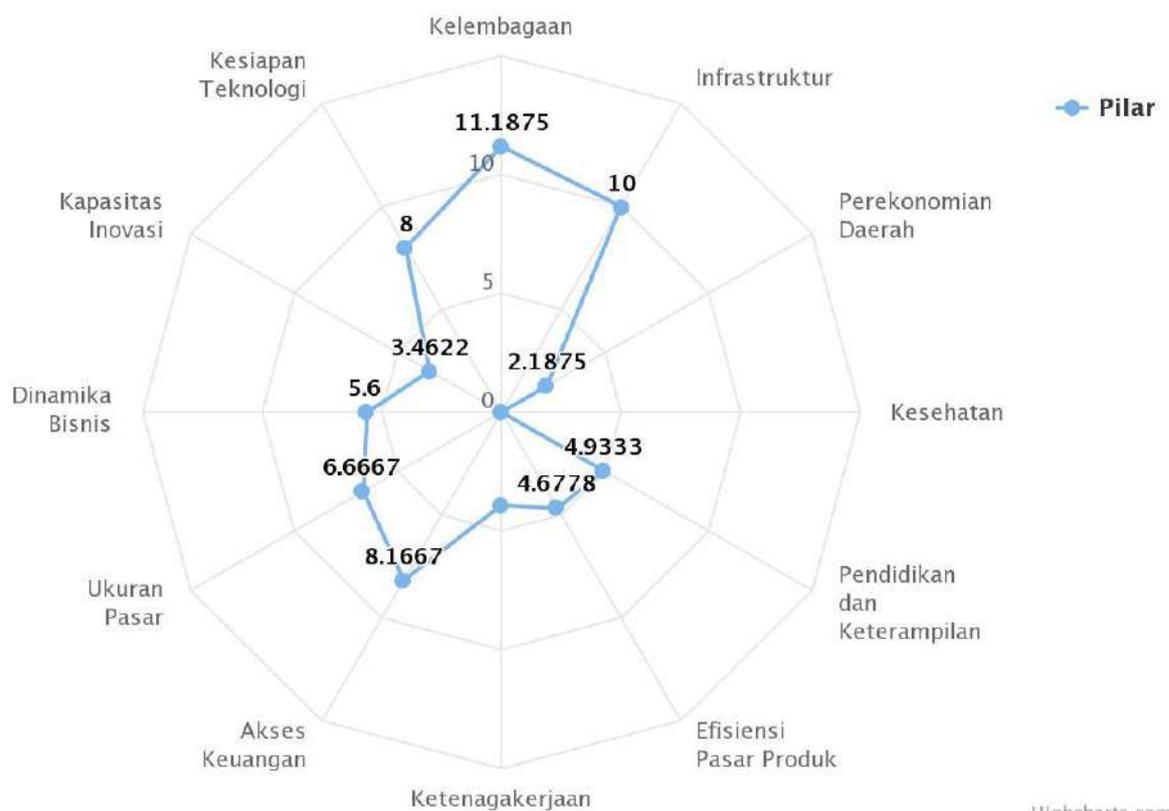
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,74870**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

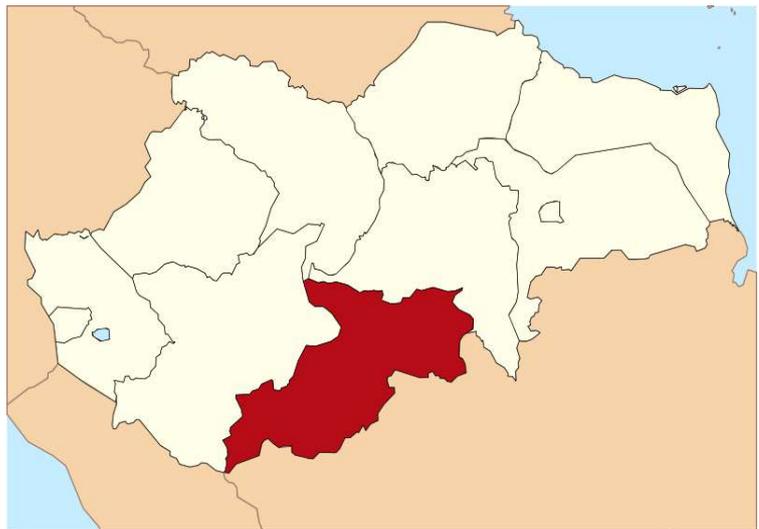
KABUPATEN SAROLANGUN



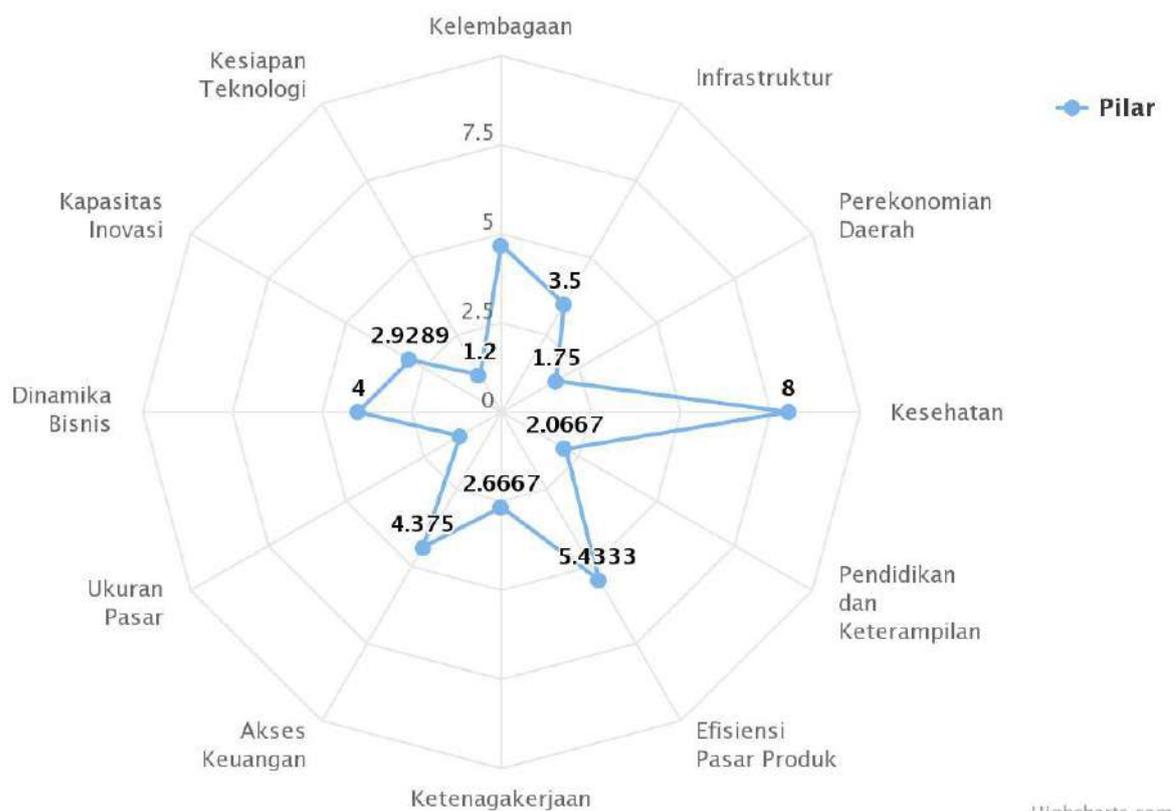
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3,87800**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesiapan Teknologi dan Perekonomian Daerah

KABUPATEN BATANG HARI



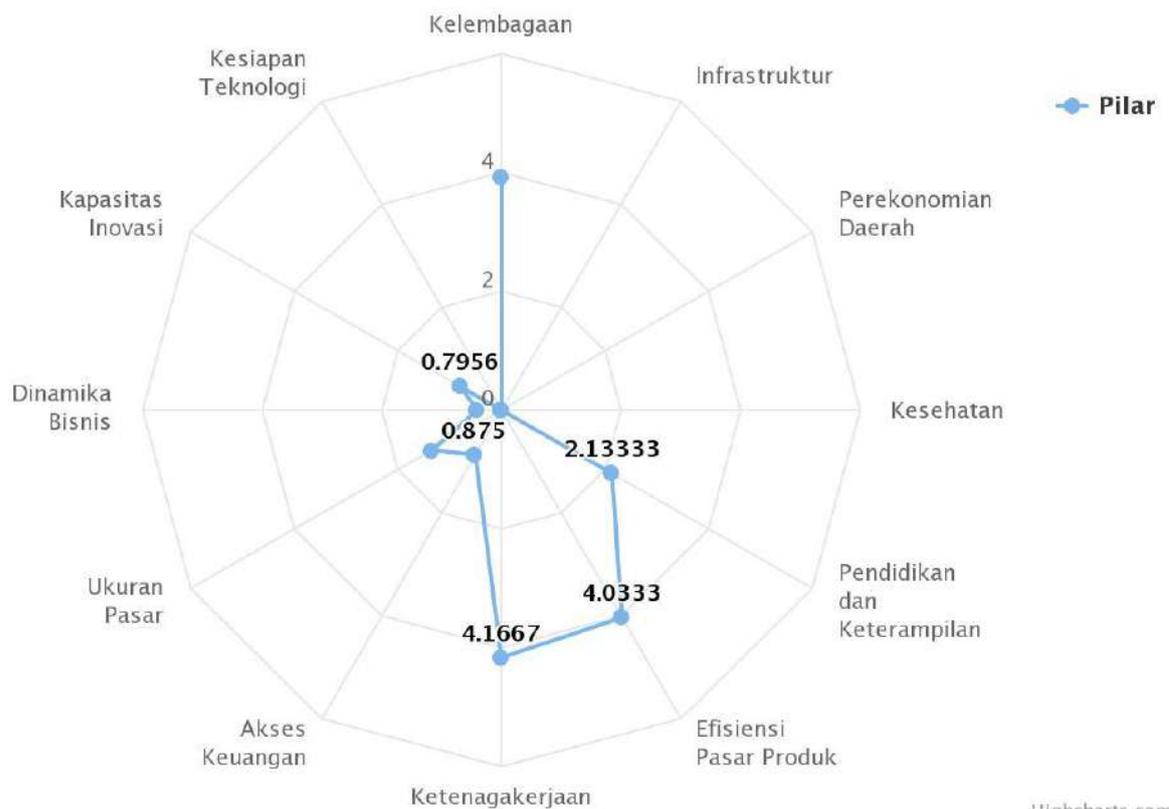
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
1,66090**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Ketenagakerjaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



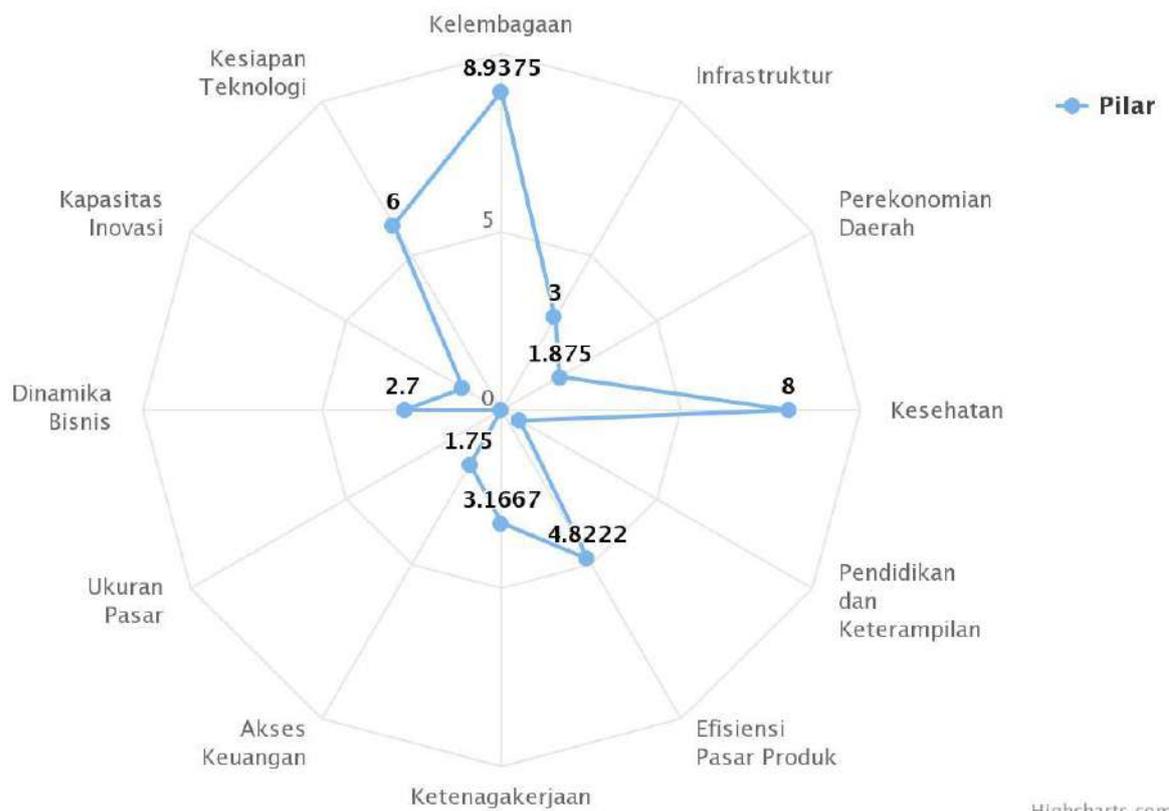
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3,72550**

**KATEGORI :
SEDANG**



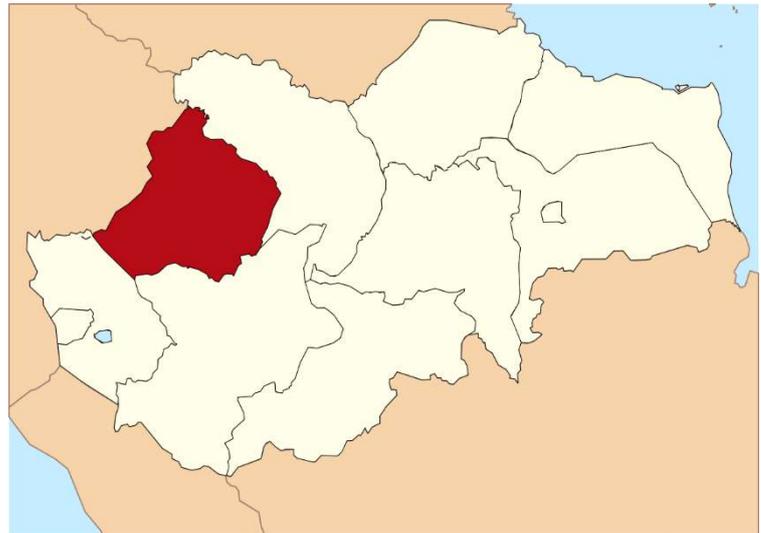
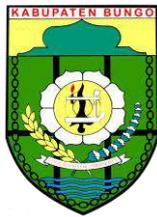
Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

KABUPATEN BUNGO

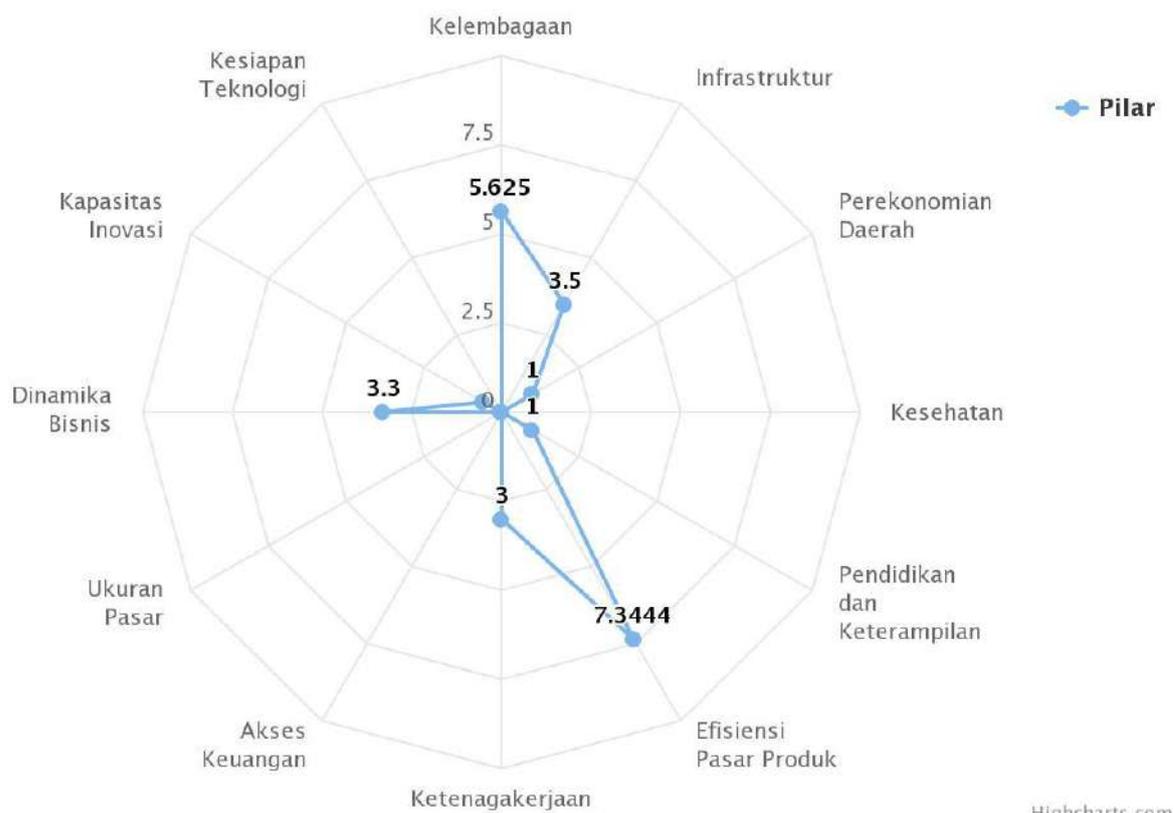


**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
1,54590**

**KATEGORI :
RENDAH**

Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Efisiensi Pasar Produk
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



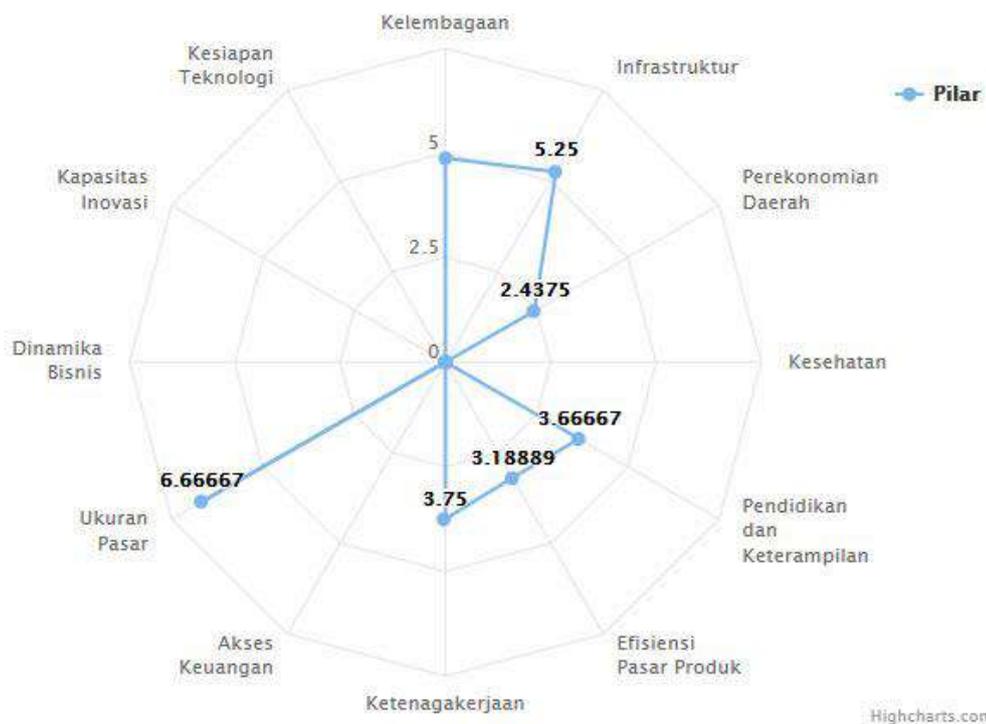
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
2,0417**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Ukuran Pasar
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kapasitas Inovasi

KABUPATEN MUARA ENIM



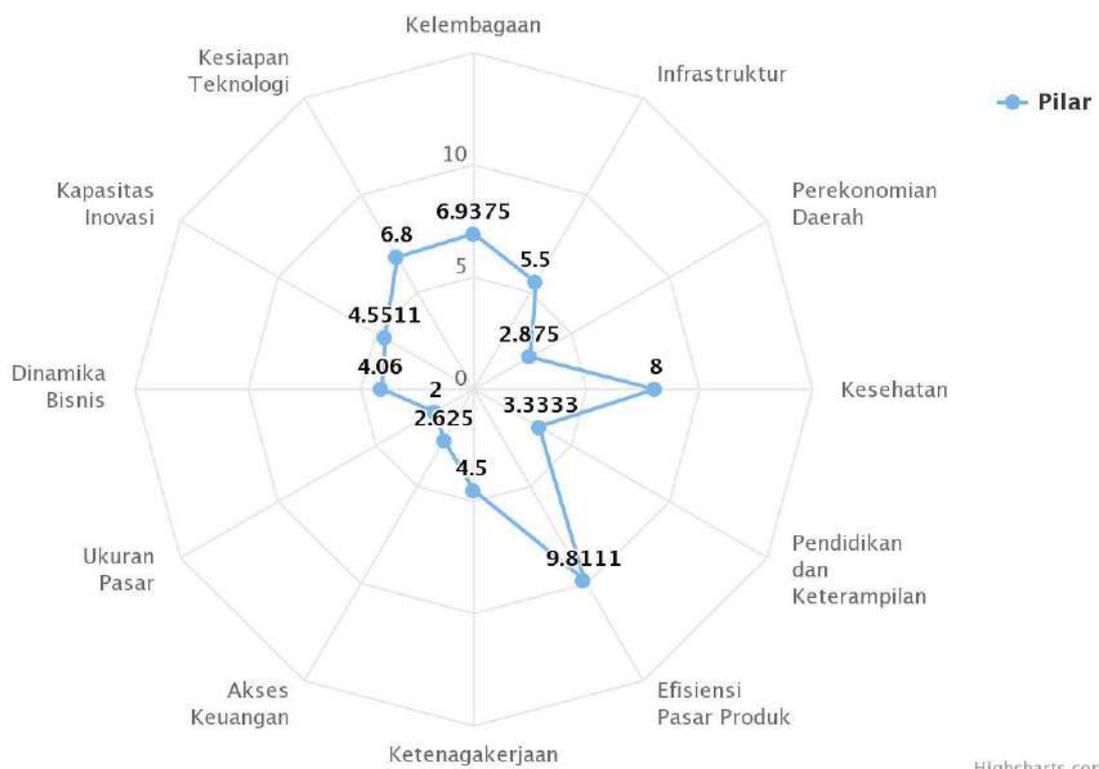
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
5,65320**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Efisiensi Pasar Produk
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

KABUPATEN MUSI RAWAS



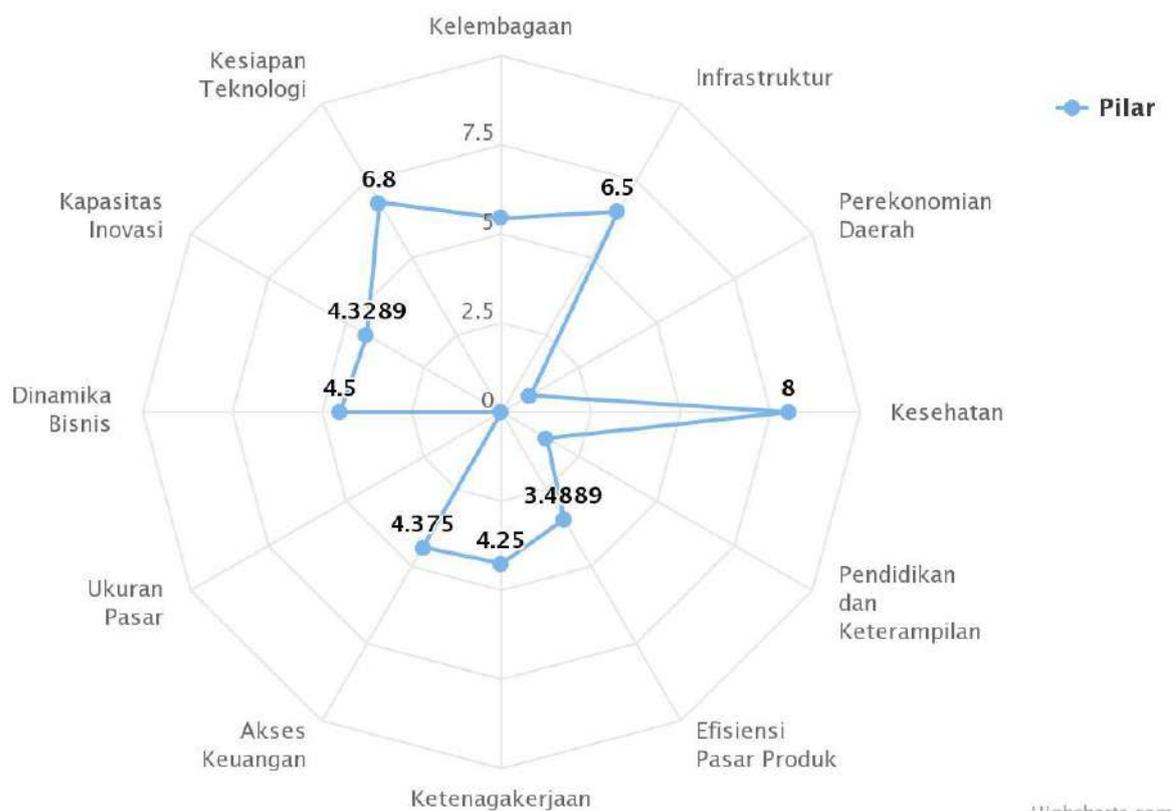
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,44520**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

KABUPATEN BANYUASIN

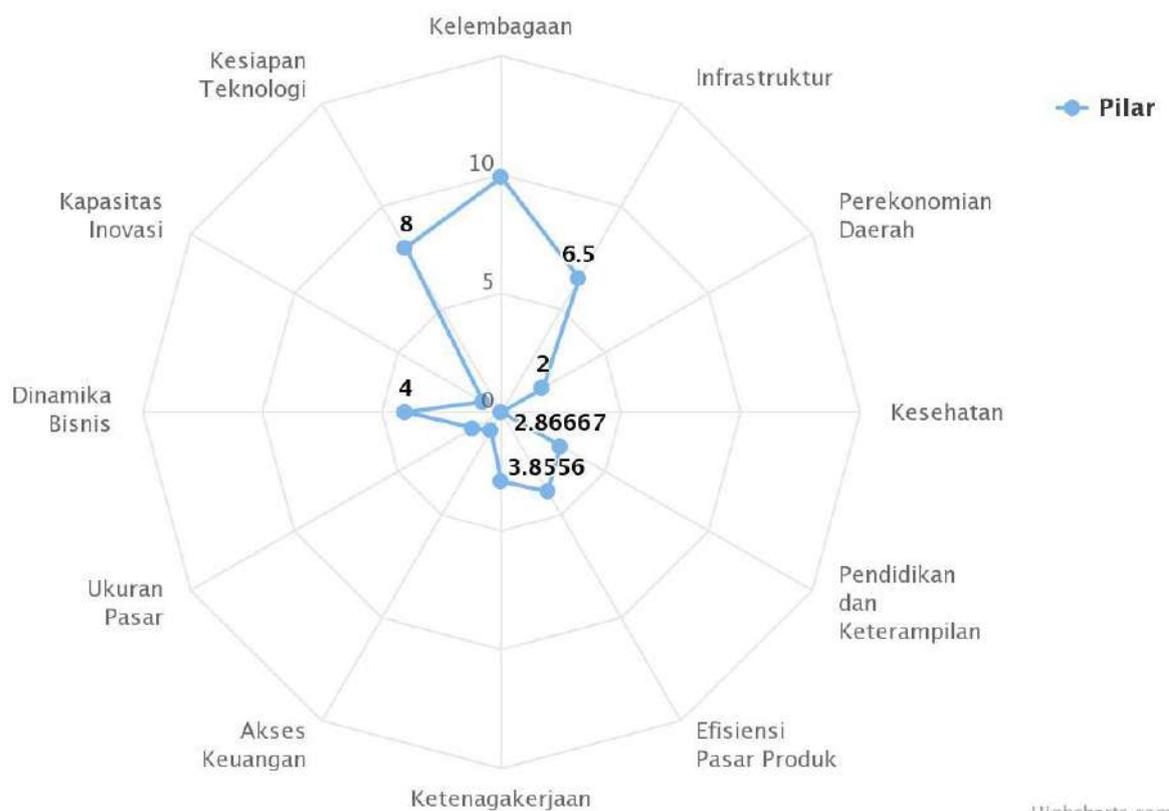


**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
1,94110**

**KATEGORI :
RENDAH**

Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN



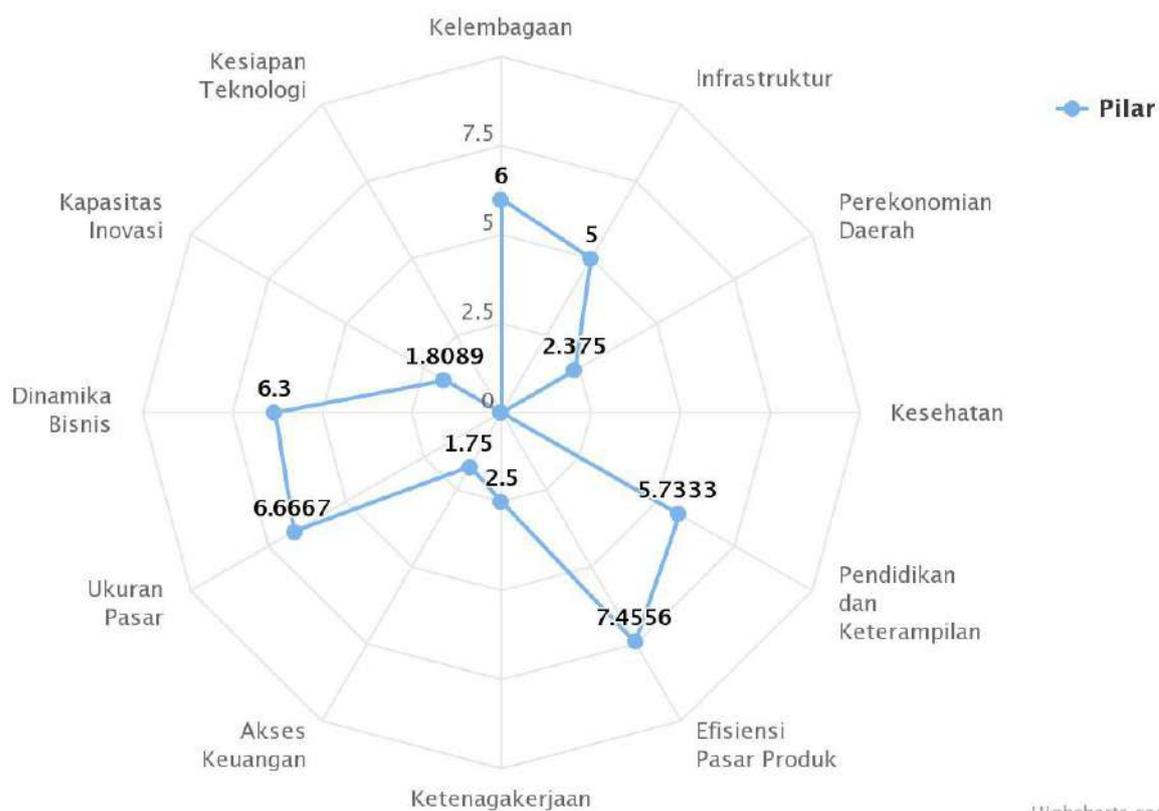
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3,40980**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Efisiensi Pasar Produk
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KABUPATEN BENGKULU UTARA



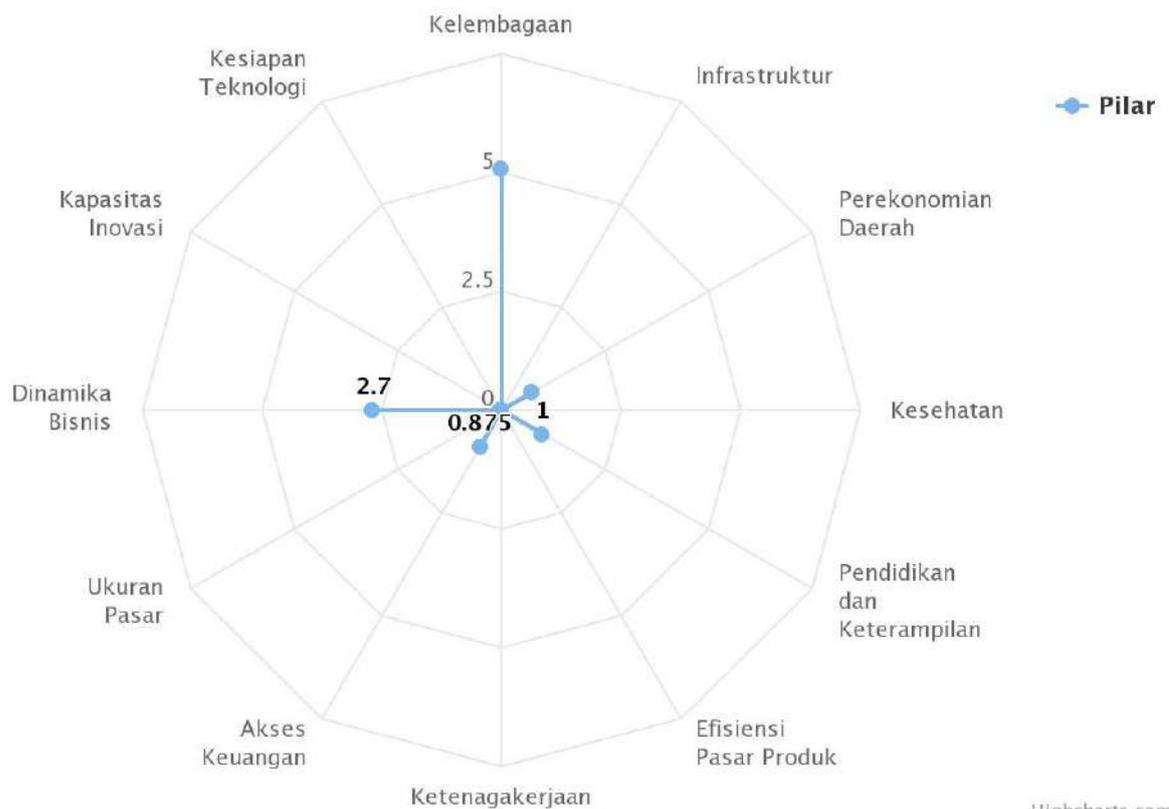
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
0,75940**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ketenagakerjaan

KABUPATEN LAMPUNG BARAT



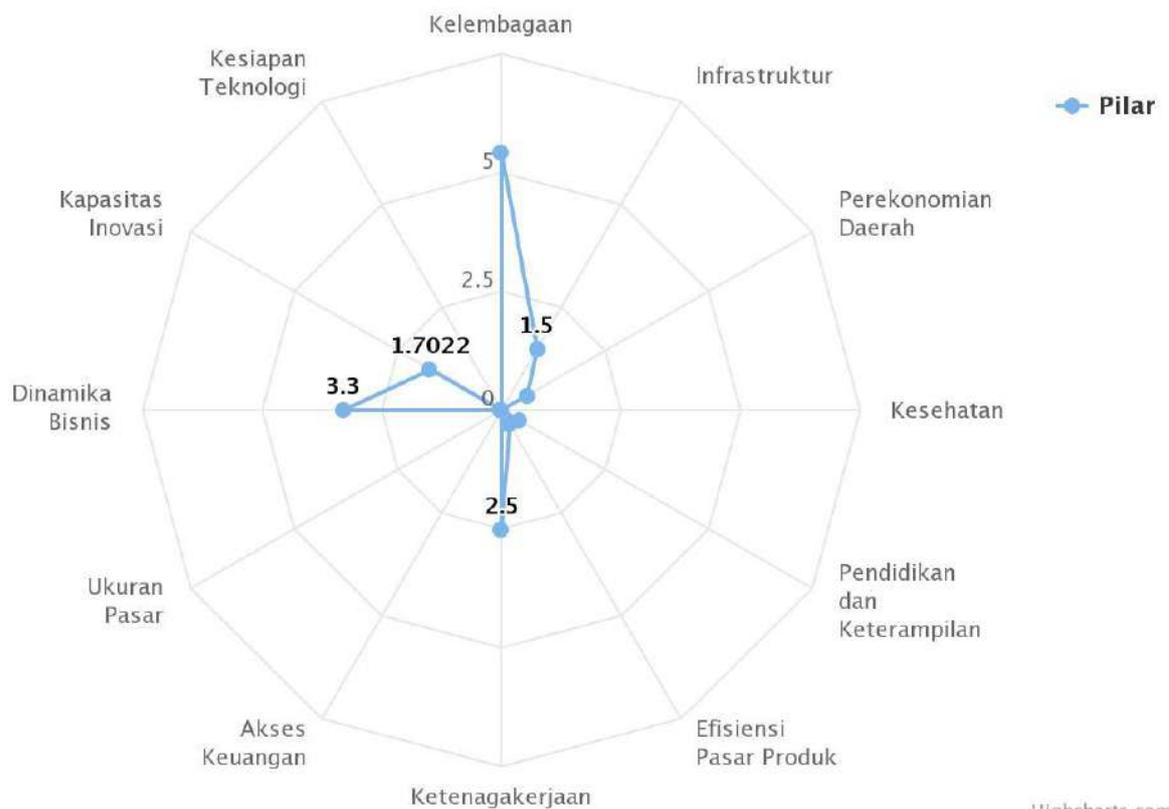
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
1,03110**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

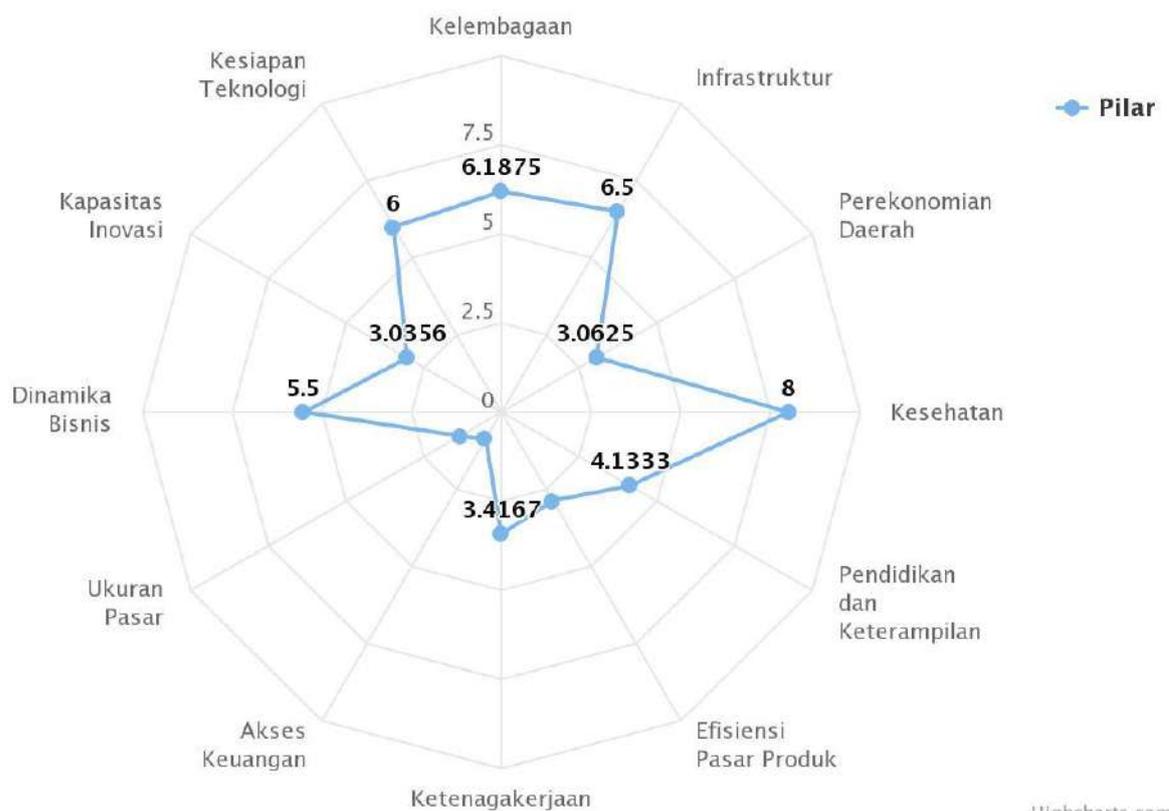


**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,85000**

**KATEGORI :
SEDANG**

Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Akses Keuangan

KABUPATEN PRINGSEWU



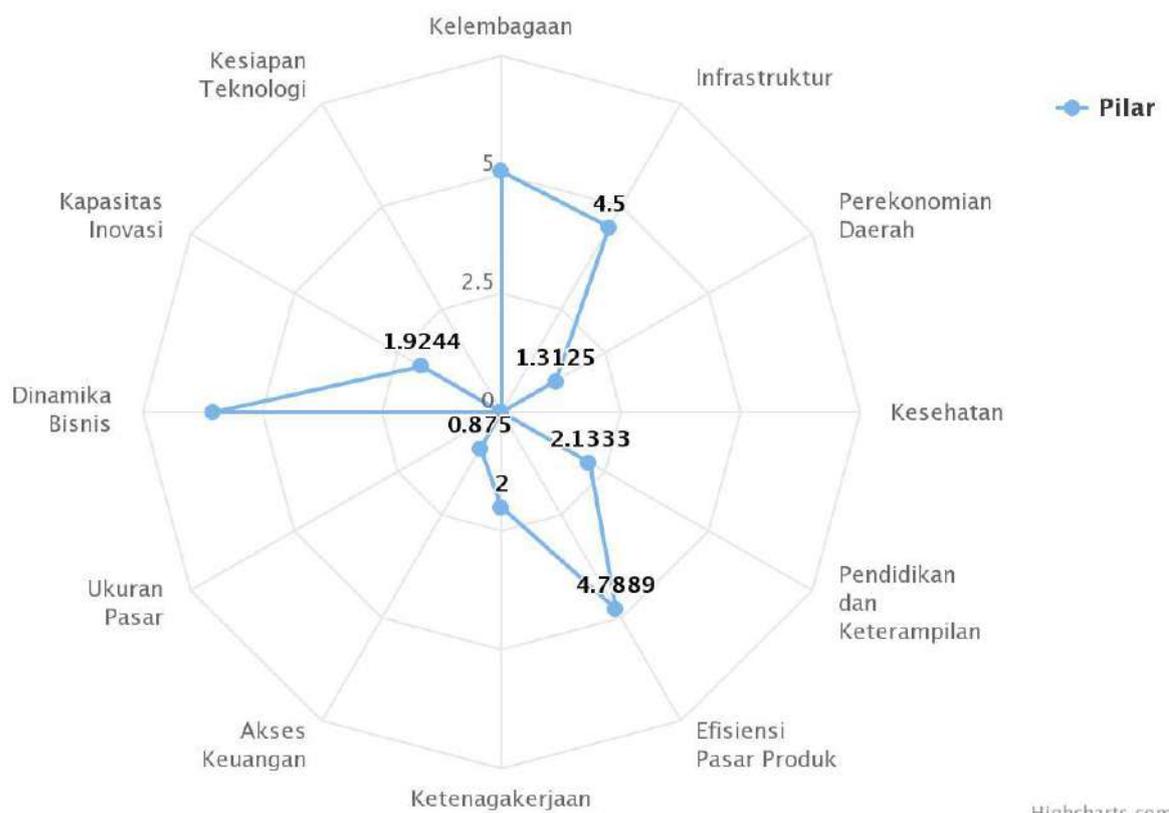
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
2,01400**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Dinamika Bisnis
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

KABUPATEN BELITUNG



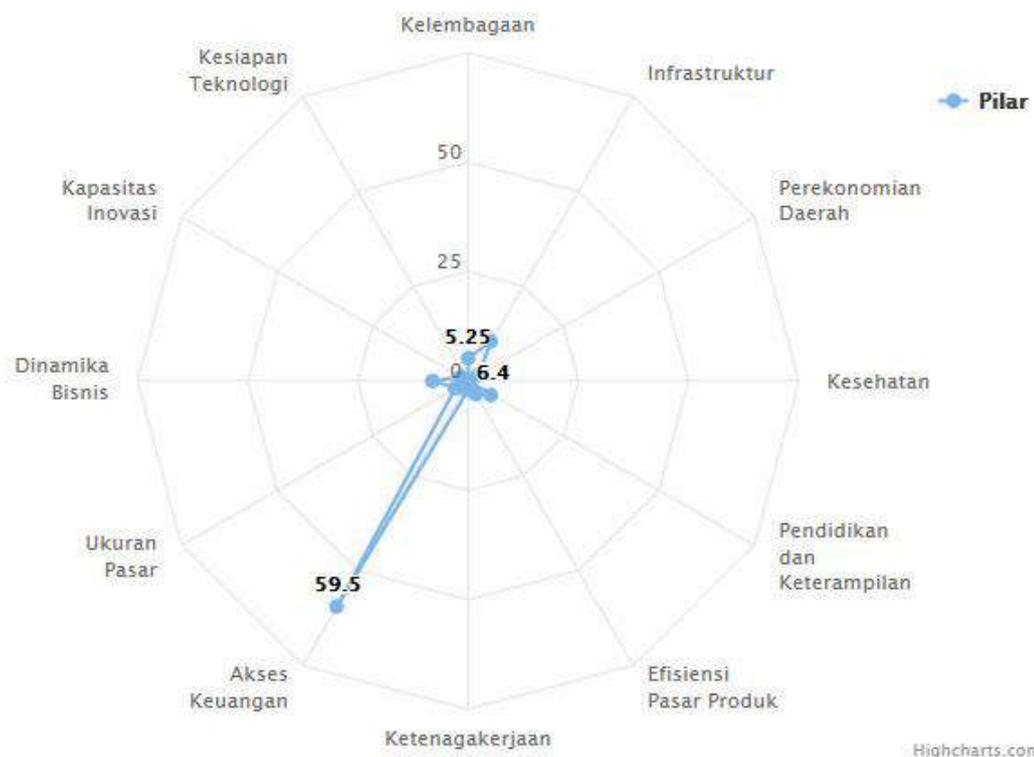
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
6,44530**

**KATEGORI :
TINGGI**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Akses Keuangan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KABUPATEN BANGKA BARAT



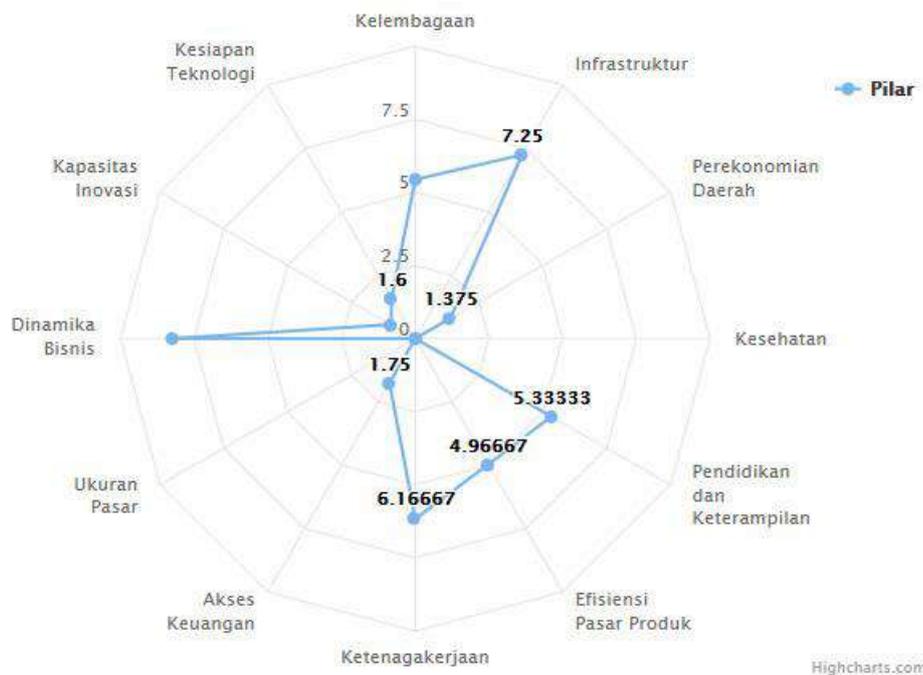
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3,3103**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Dinamika Bisnis
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kapasitas Inovasi

KABUPATEN BANGKA TENGAH

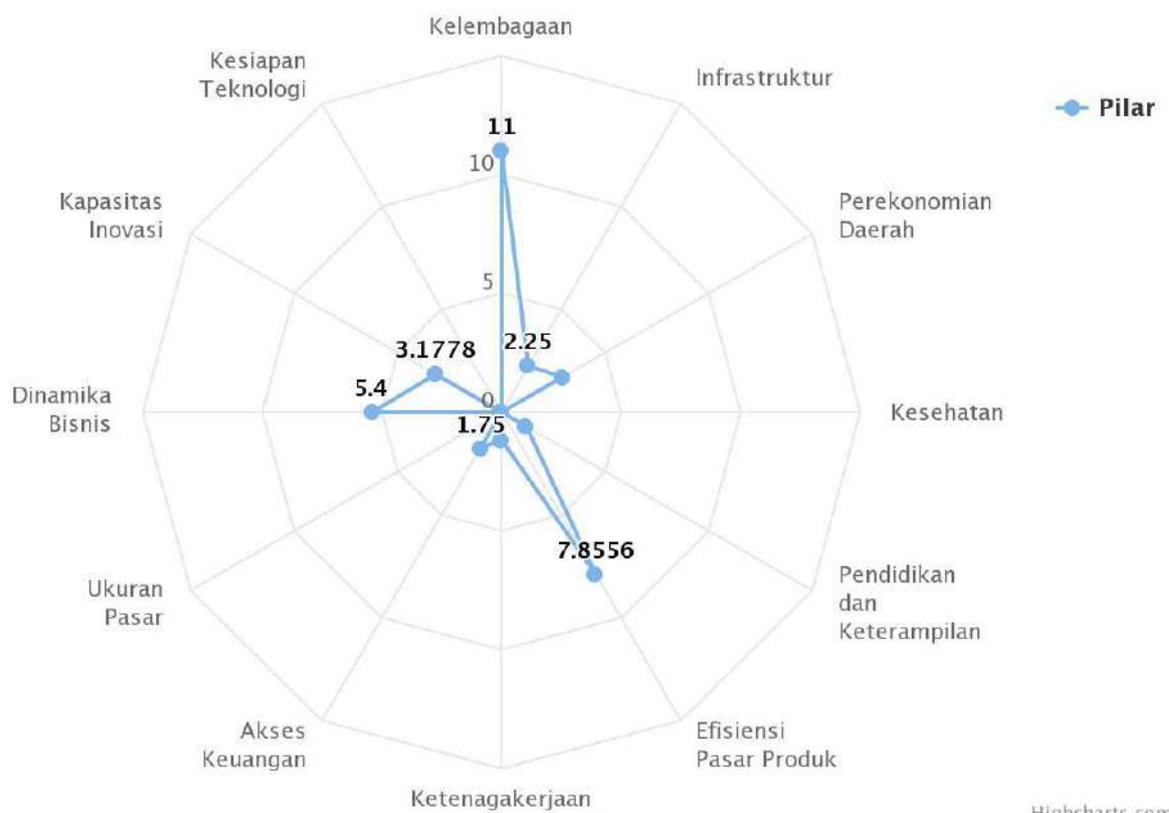


**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
2,30280**

**KATEGORI :
RENDAH**

Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

KABUPATEN BANGKA SELATAN



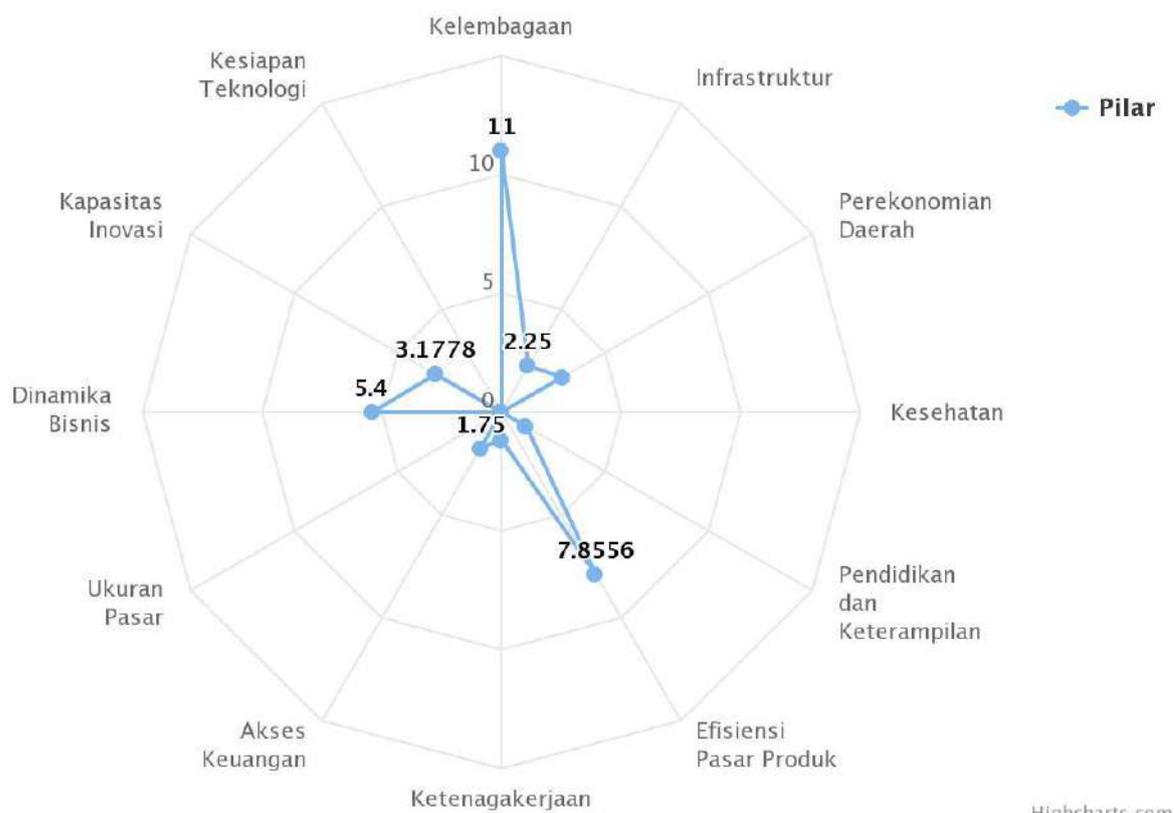
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
1,4448**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan dan Kapasitas Inovasi

KABUPATEN BELITUNG TIMUR



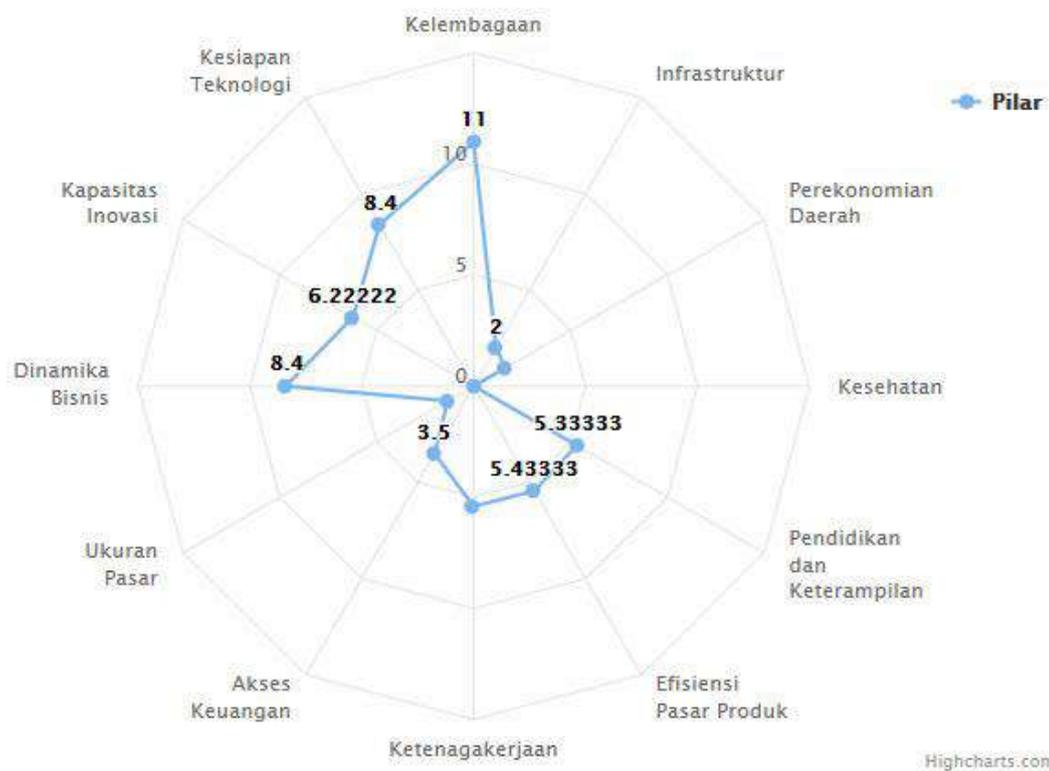
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,52873**

**KATEGORI :
TINGGI**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KABUPATEN BINTAN



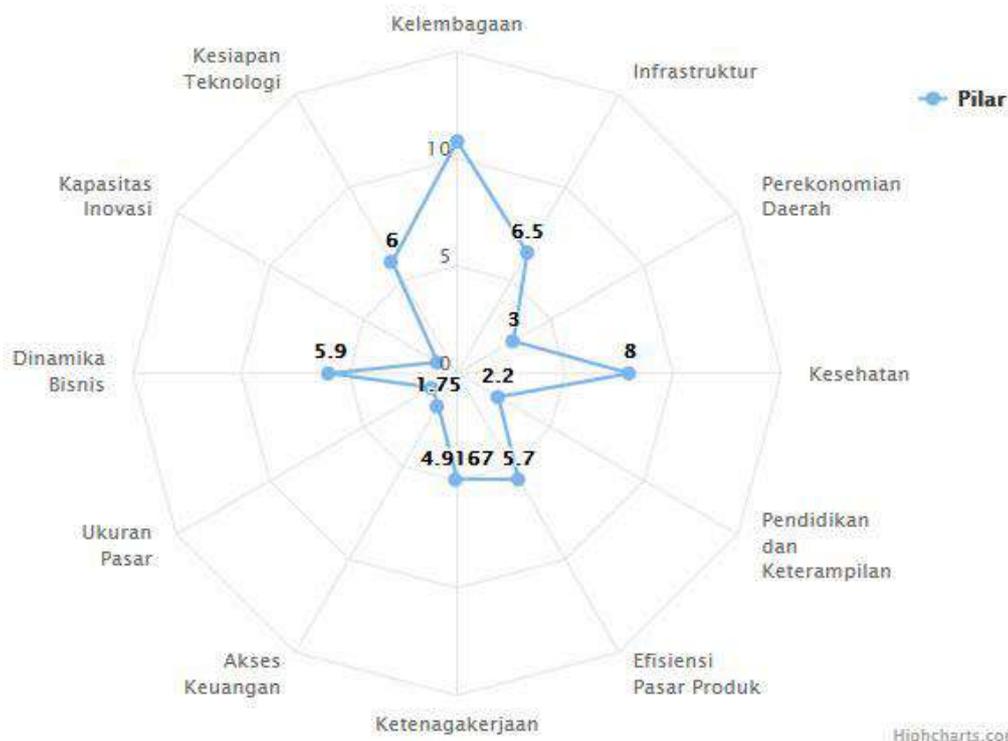
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,83146**

**KATEGORI :
TINGGI**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kapasitas inovasi

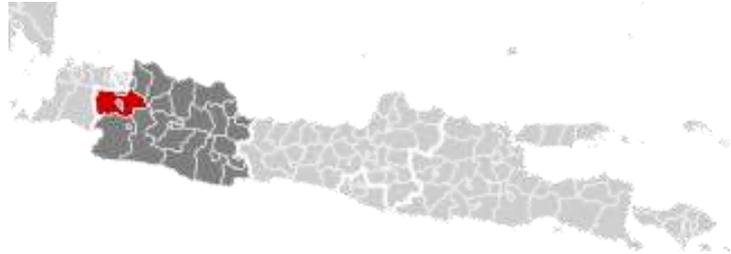
KABUPATEN BOGOR



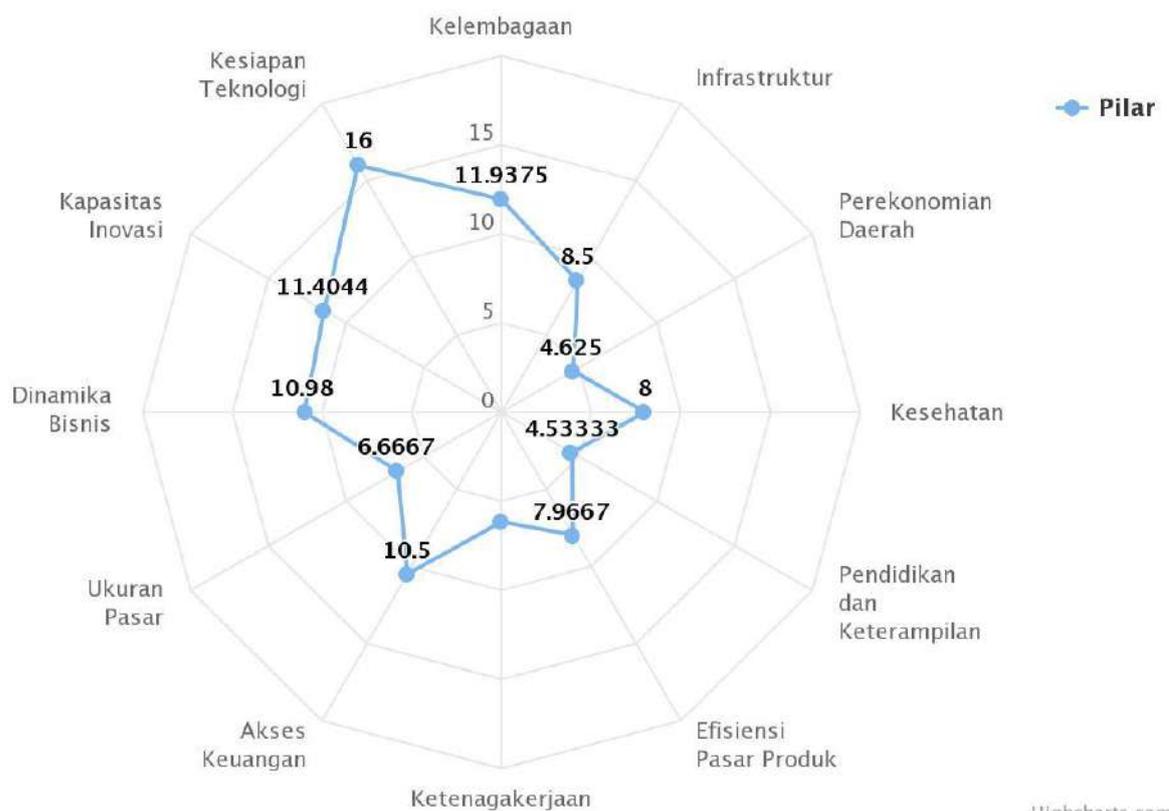
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
8,52350**

**KATEGORI :
SANGAT TINGGI**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesiapan Teknologi
2. Kondisi paling rendah pada pilar Pendidikan dan Keterampilan

KABUPATEN CIANJUR



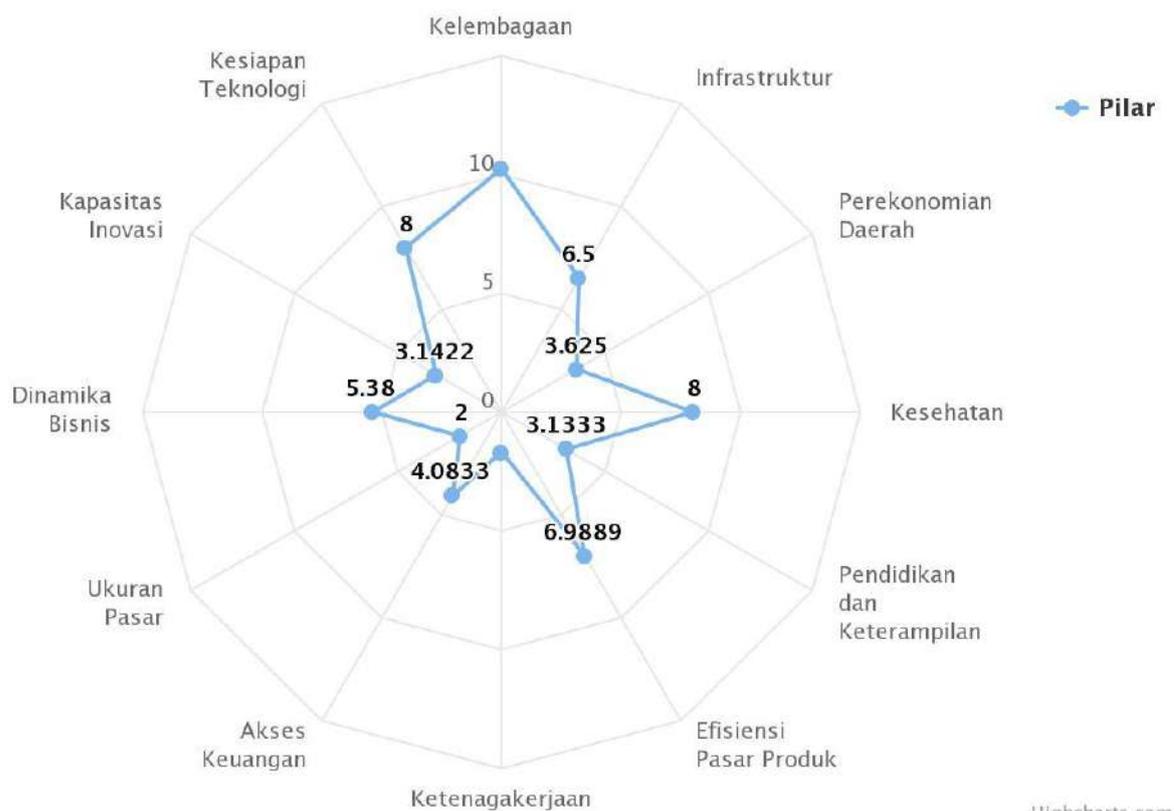
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
5,35920**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

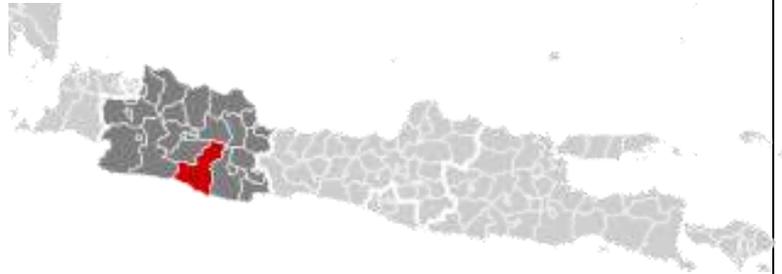
KABUPATEN GARUT



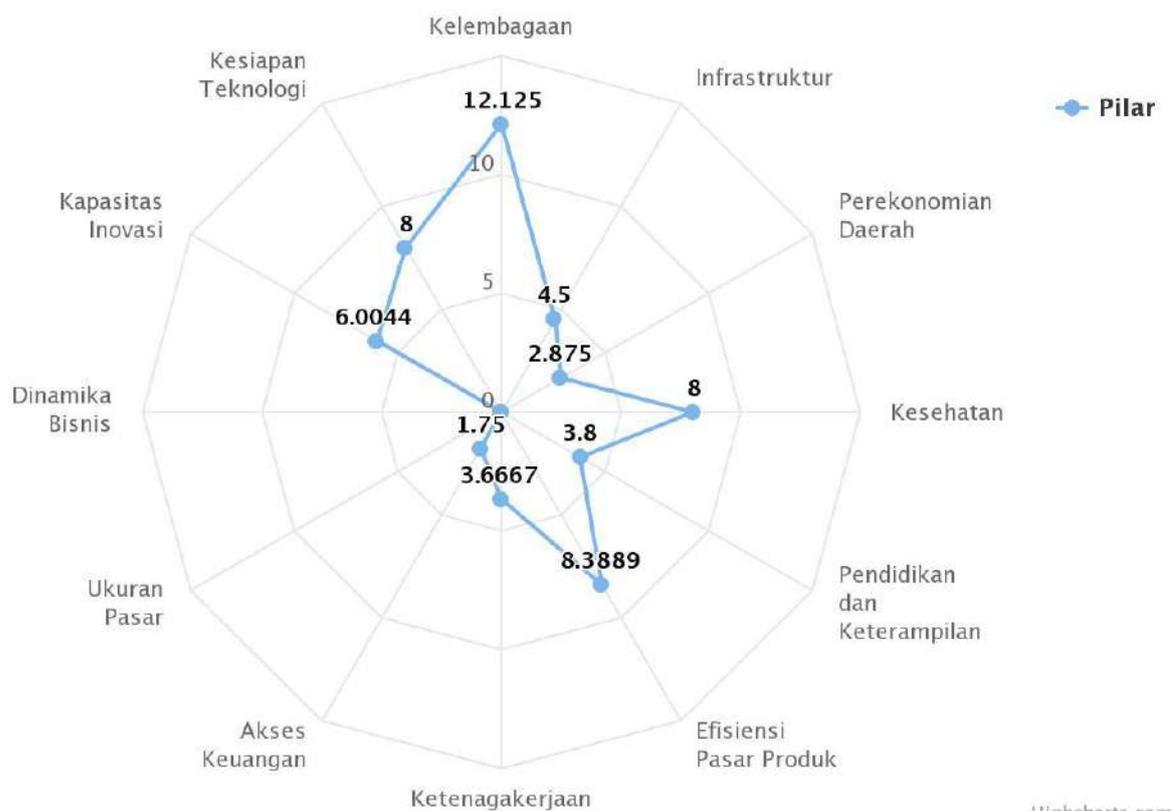
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
5,19230**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar

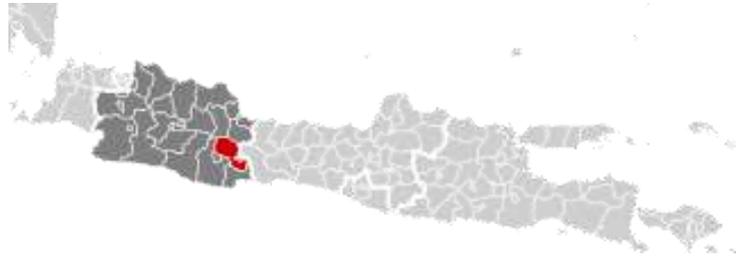


Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Dinamika Bisnis

KABUPATEN CIAMIS

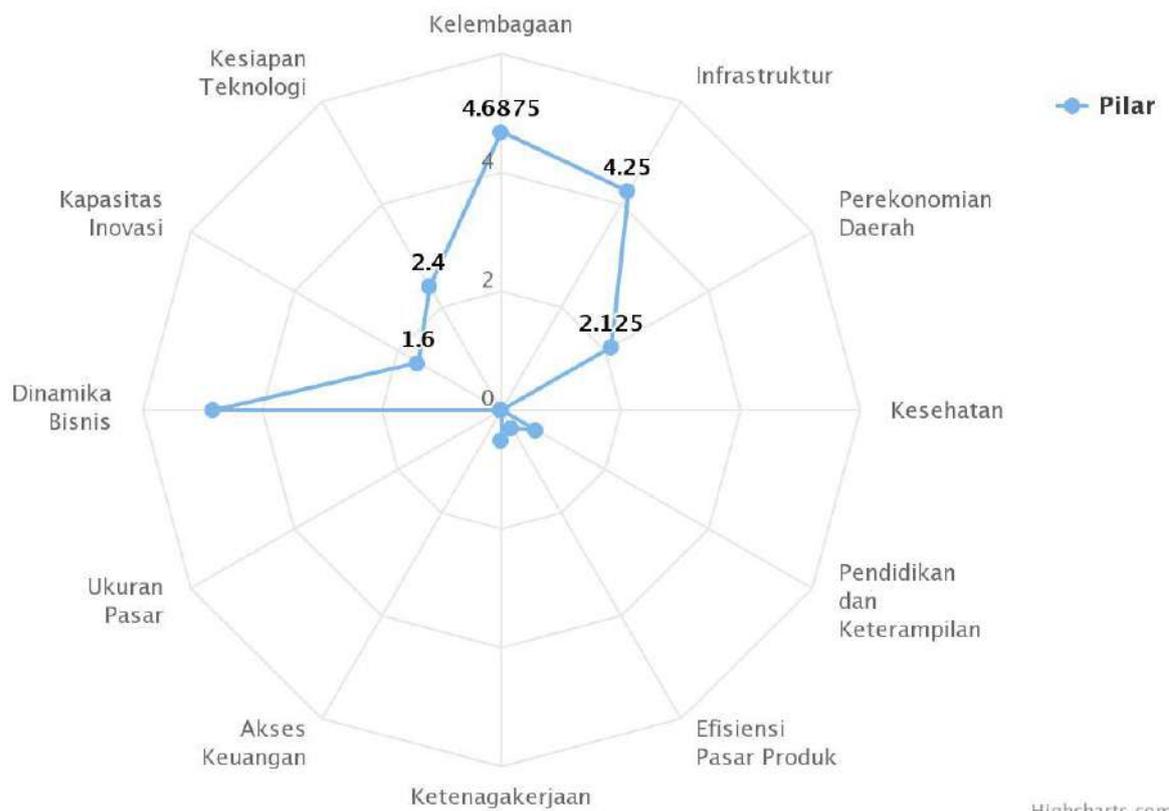


**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
1,46260**

**KATEGORI :
RENDAH**

Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Dinamika Bisnis
2. Kondisi paling rendah pada pilar Akses Keuangan

KABUPATEN KUNINGAN



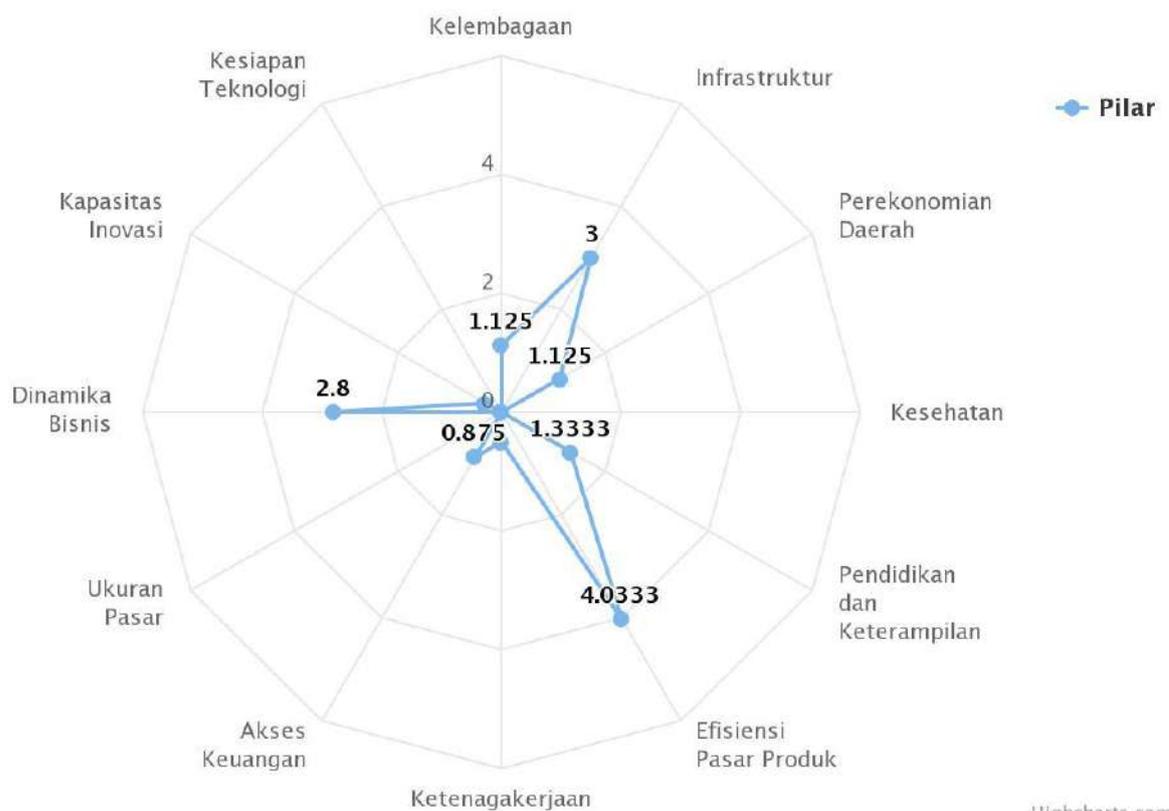
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
1,05850**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Efisiensi Pasar Produk
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesiapan Teknologi

KABUPATEN SUMEDANG

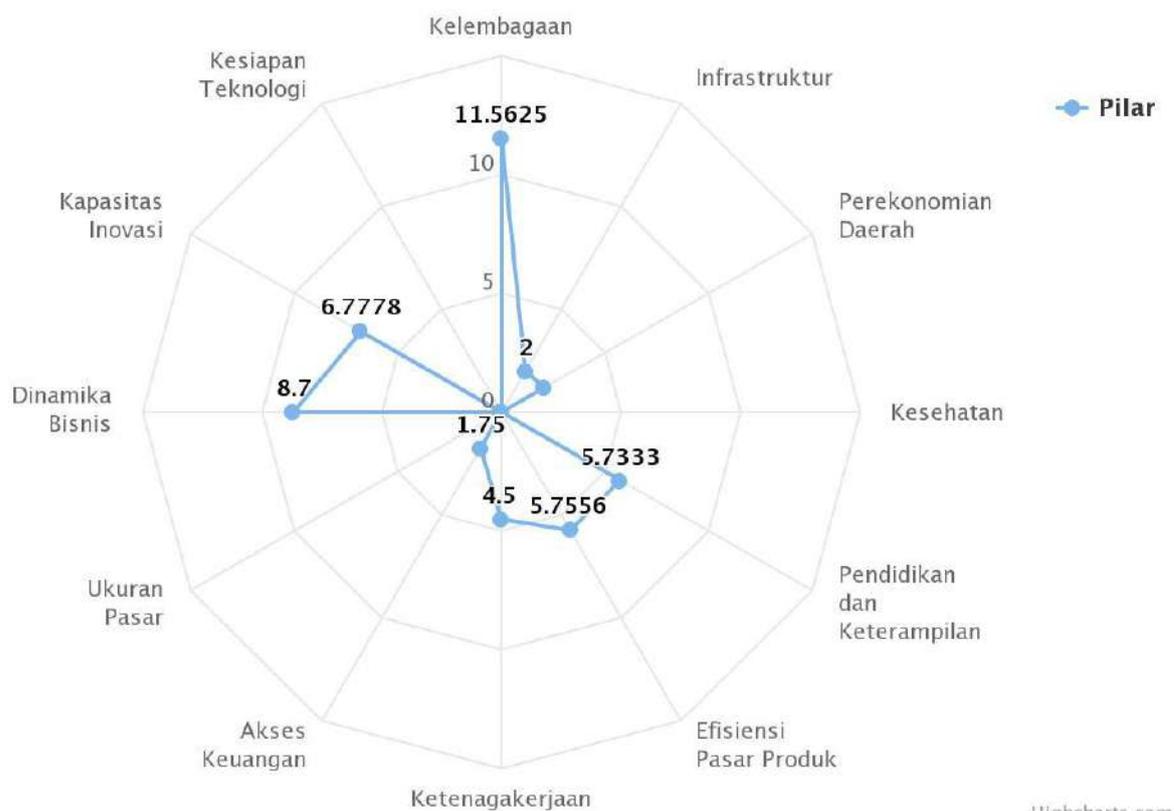


**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3,81800**

**KATEGORI :
SEDANG**

Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

KABUPATEN PURWAKARTA



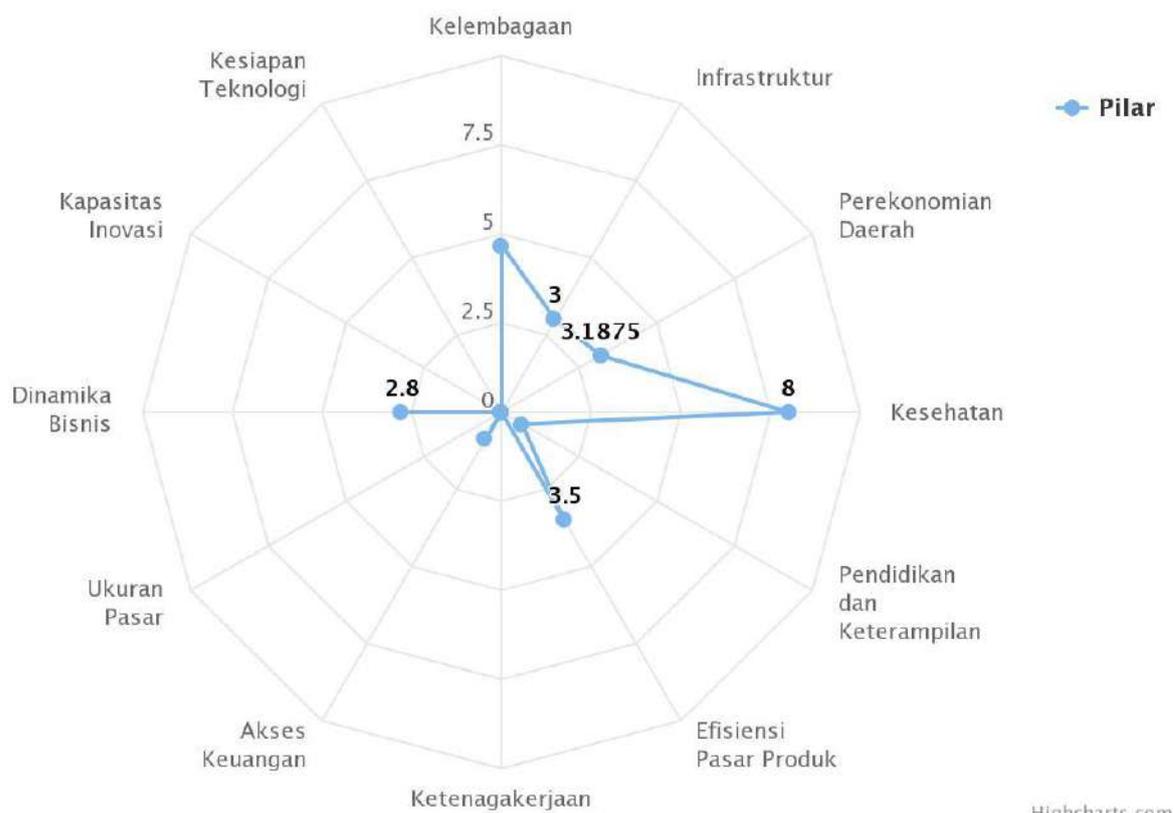
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
2,72920**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesiapan Teknologi

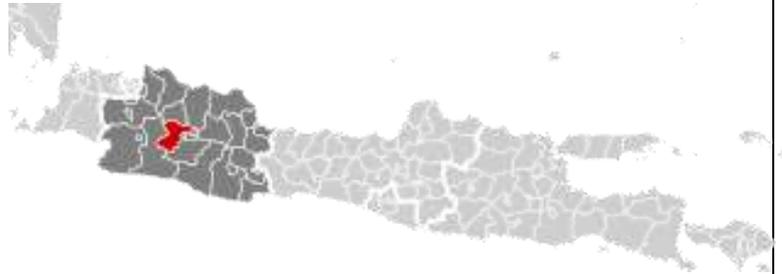
KABUPATEN BANDUNG BARAT



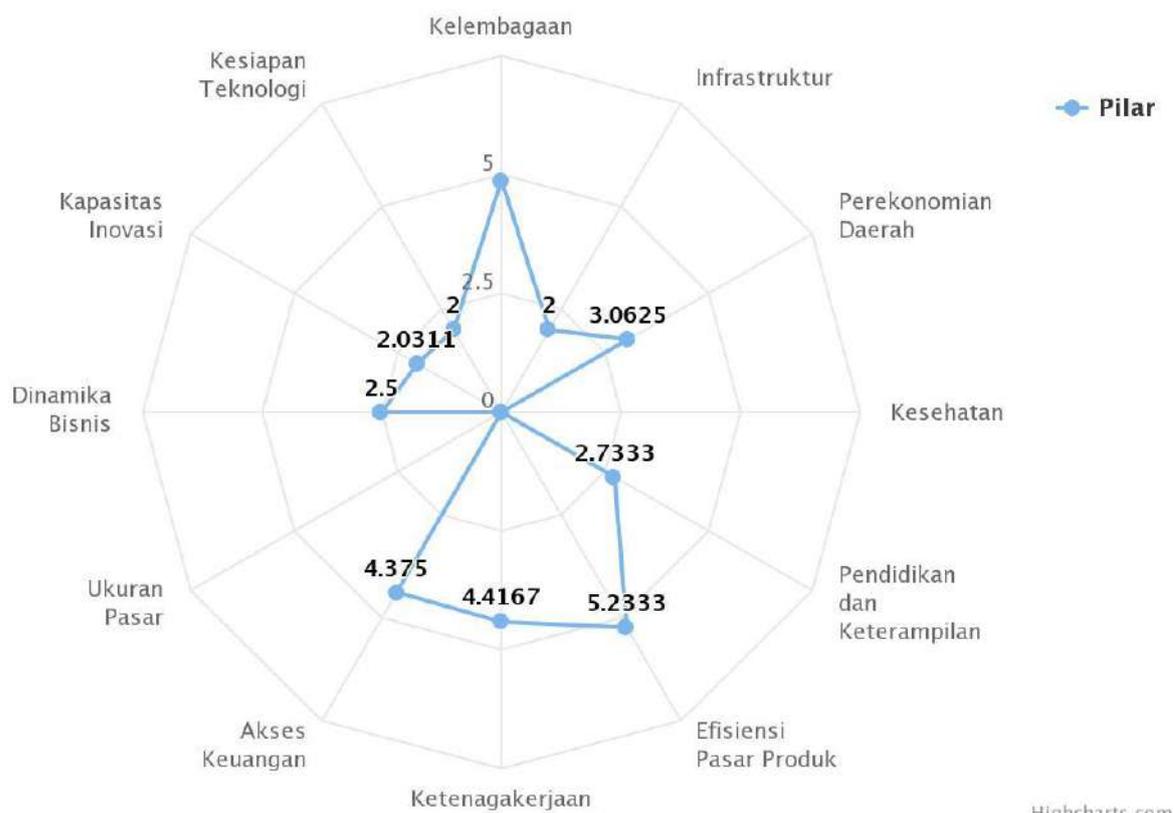
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
2,28910**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Efisiensi Pasar Produk
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KABUPATEN PANGANDARAN

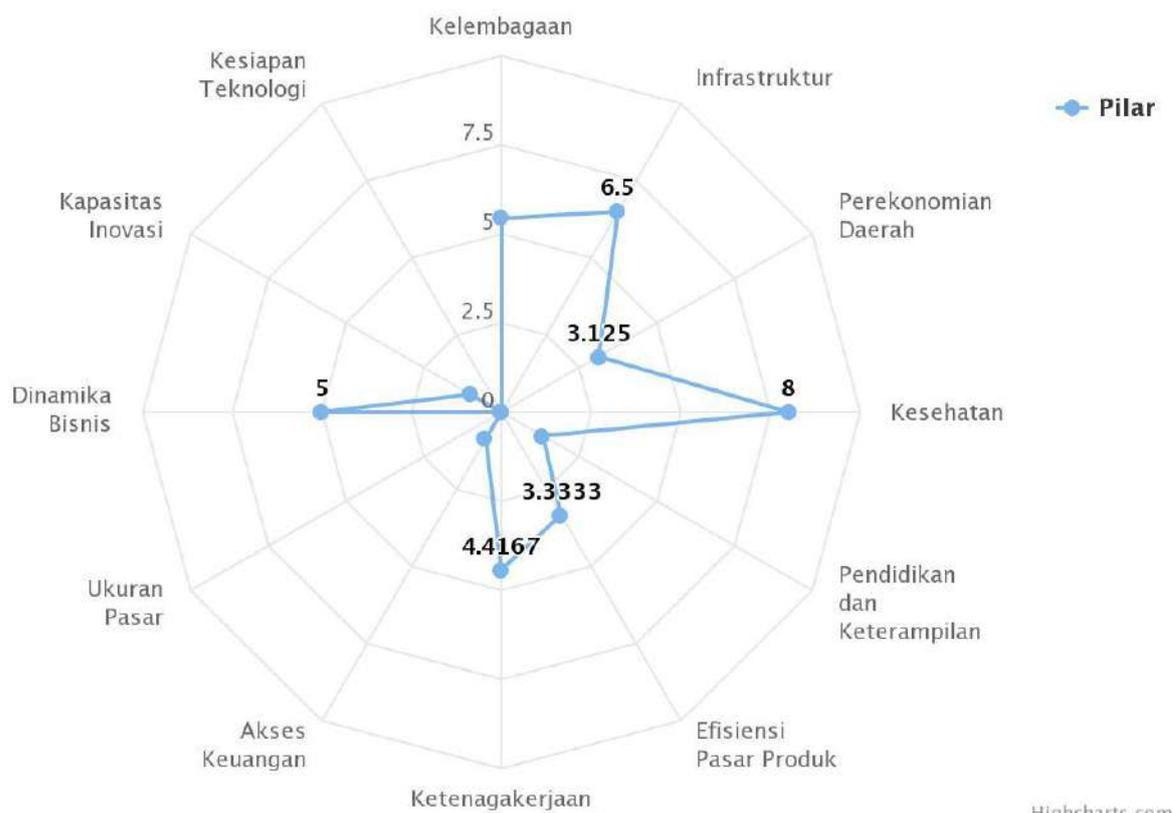


**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3,55070**

**KATEGORI :
SEDANG**

Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesiapan Teknologi

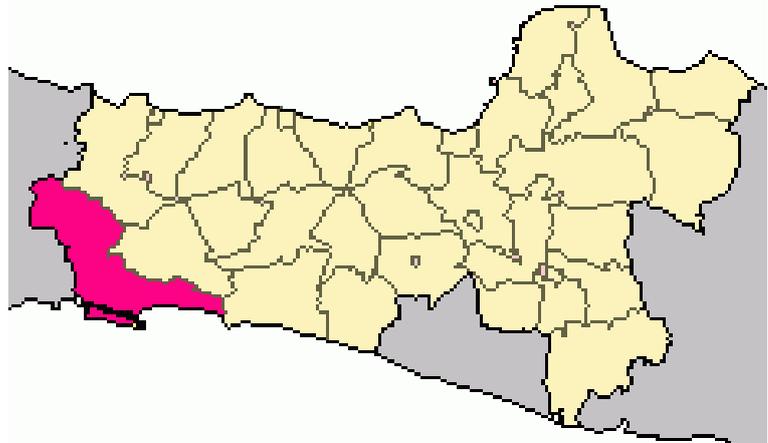
KABUPATEN CILACAP



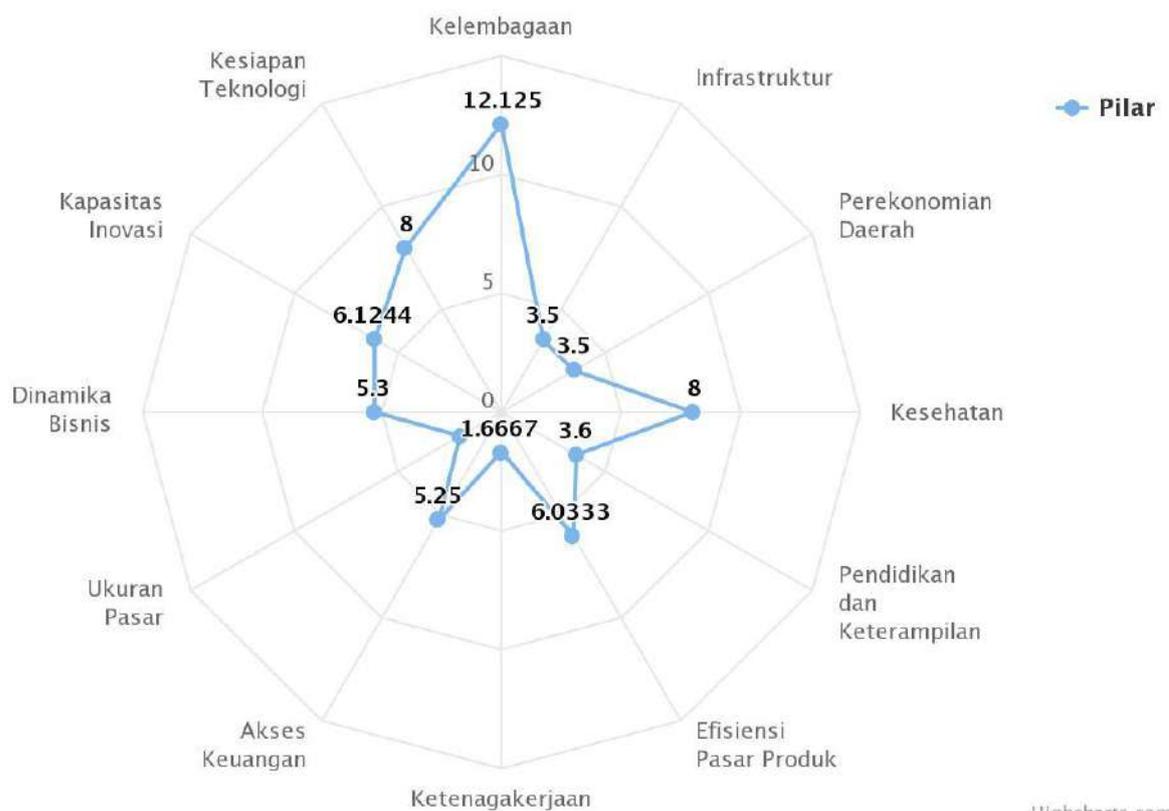
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
5,42580**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar

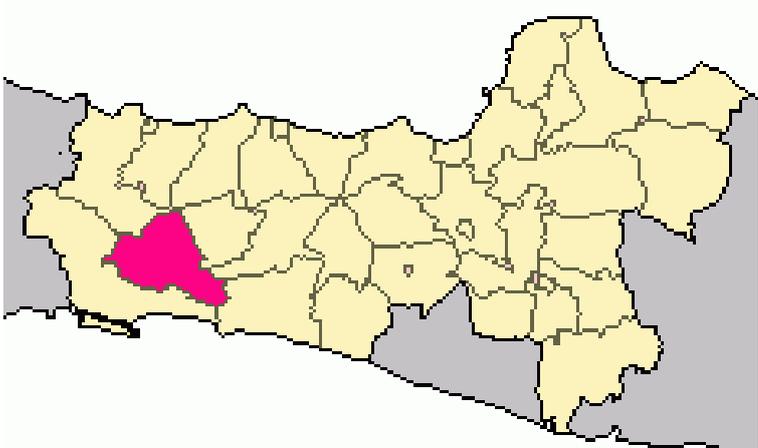


Highcharts.com

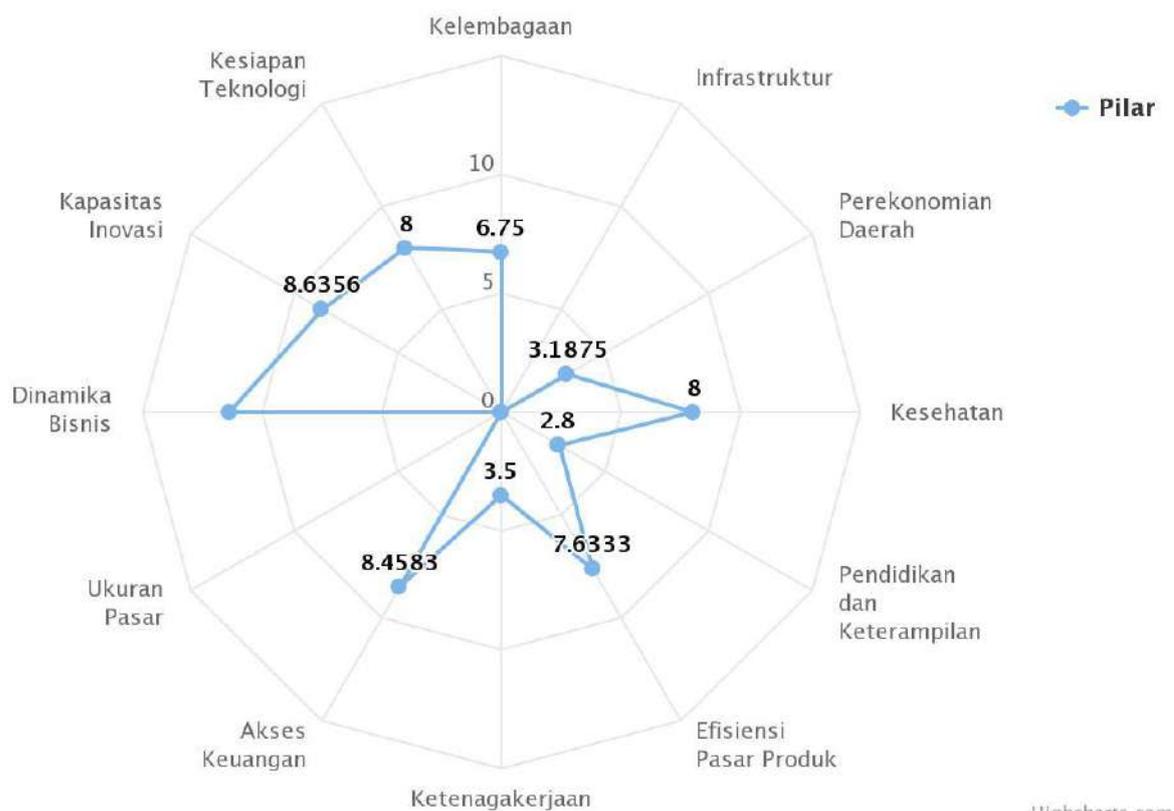
Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan.
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran pasar

KABUPATEN BANYUMAS

	
TAHUN : 2019	
SKOR/NILAI INDEKS : 5,97110	
KATEGORI : SEDANG	

Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar dinamika bisnis.
2. Kondisi paling rendah pada pilar infrastruktur

KABUPATEN PURBALINGGA



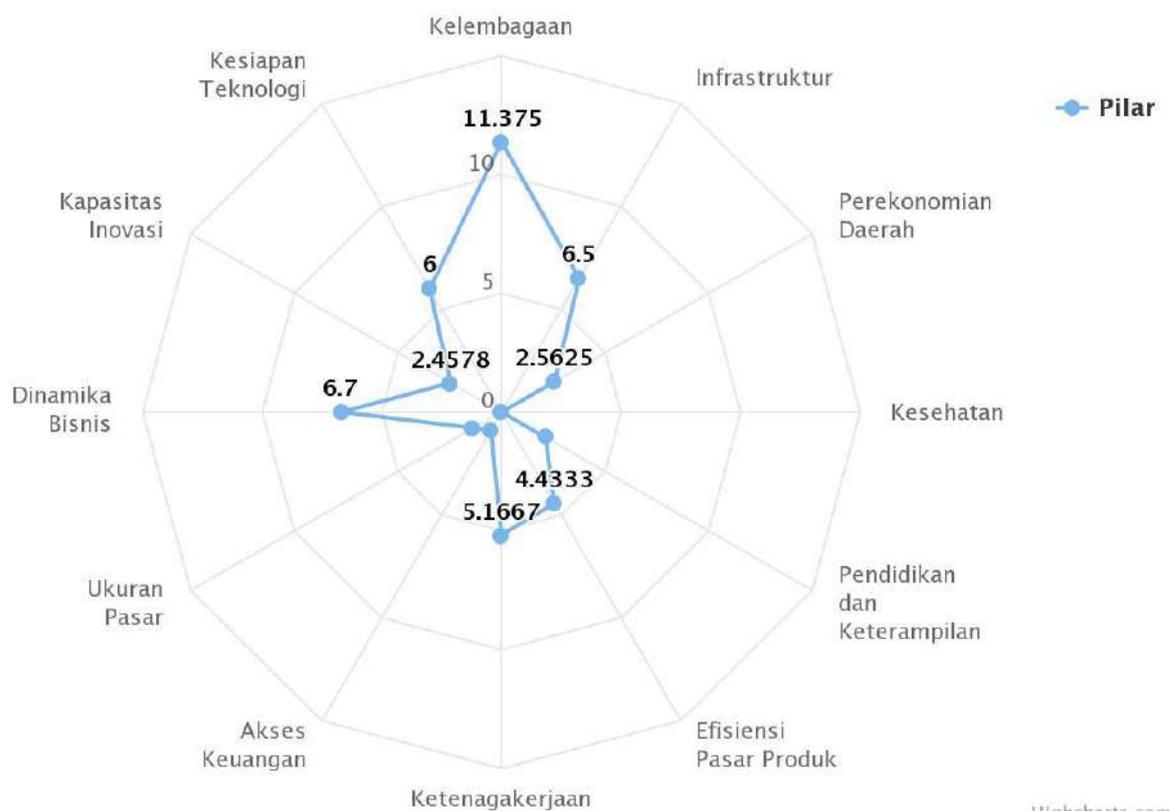
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3,30210**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KABUPATEN BANJARNEGARA



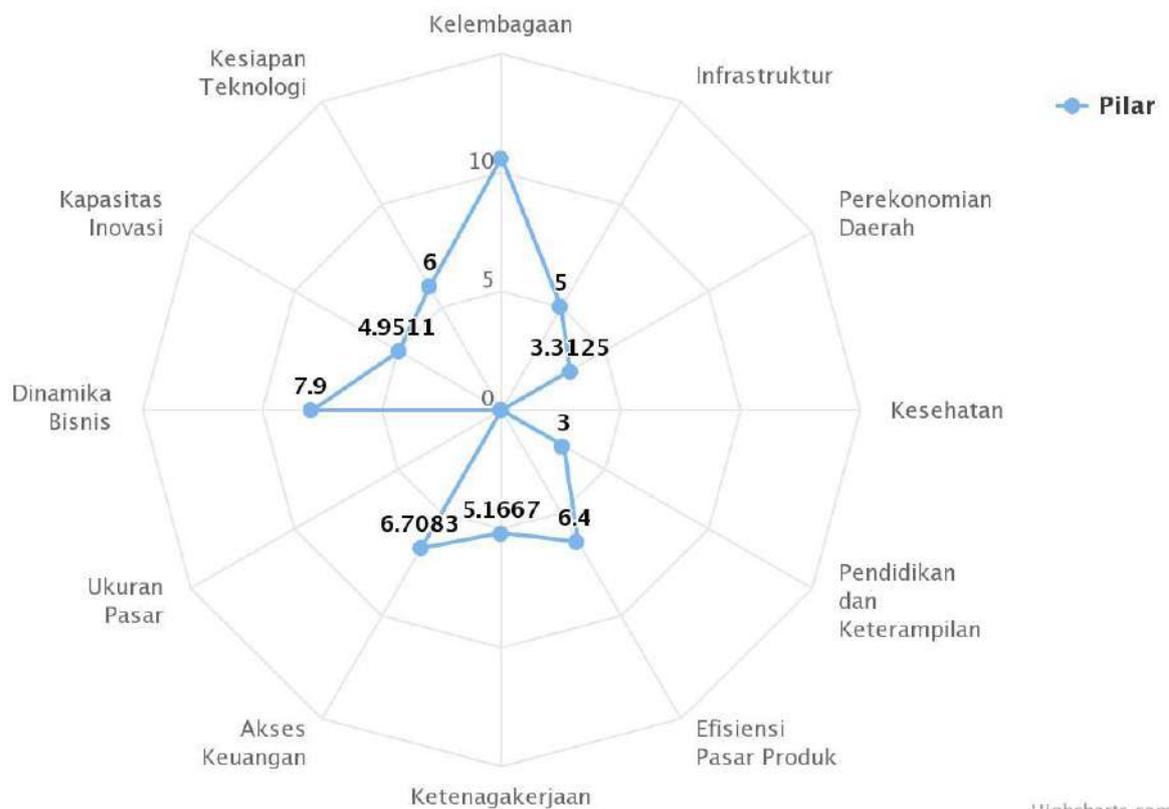
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,03160**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KABUPATEN KEBUMEN

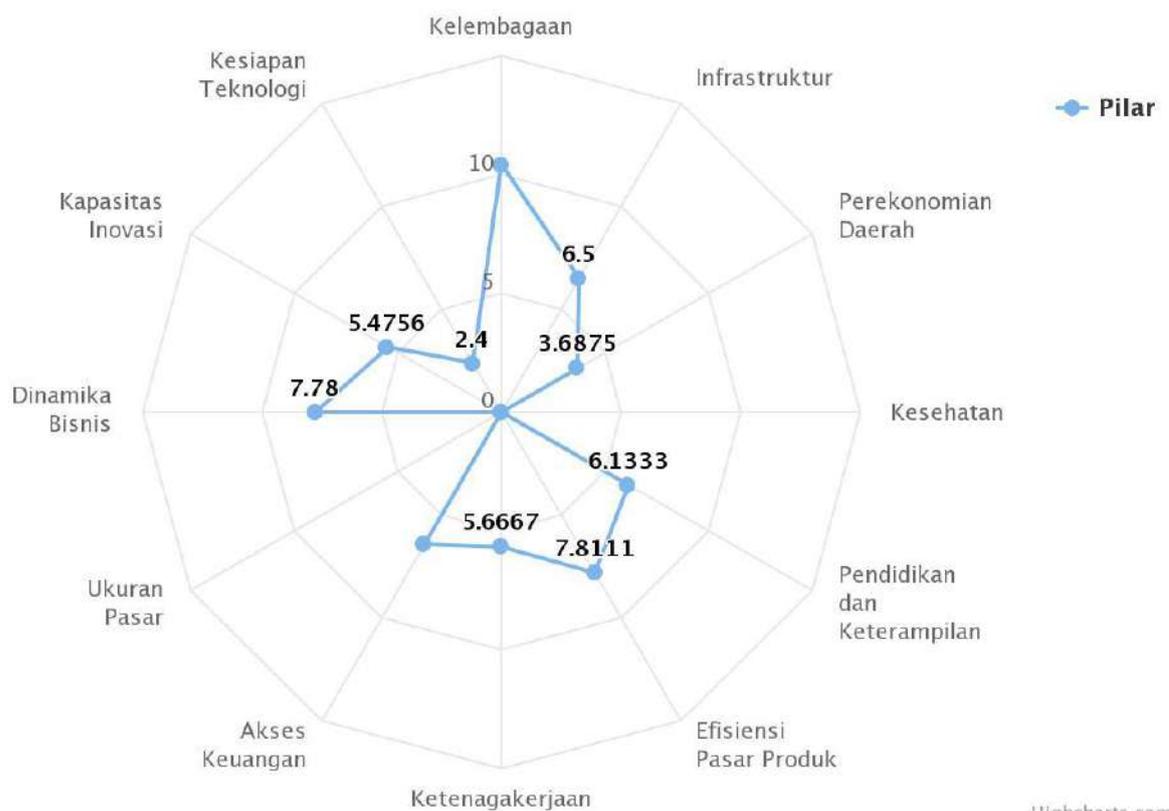


**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,55730**

**KATEGORI :
SEDANG**

Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KABUPATEN PURWOREJO



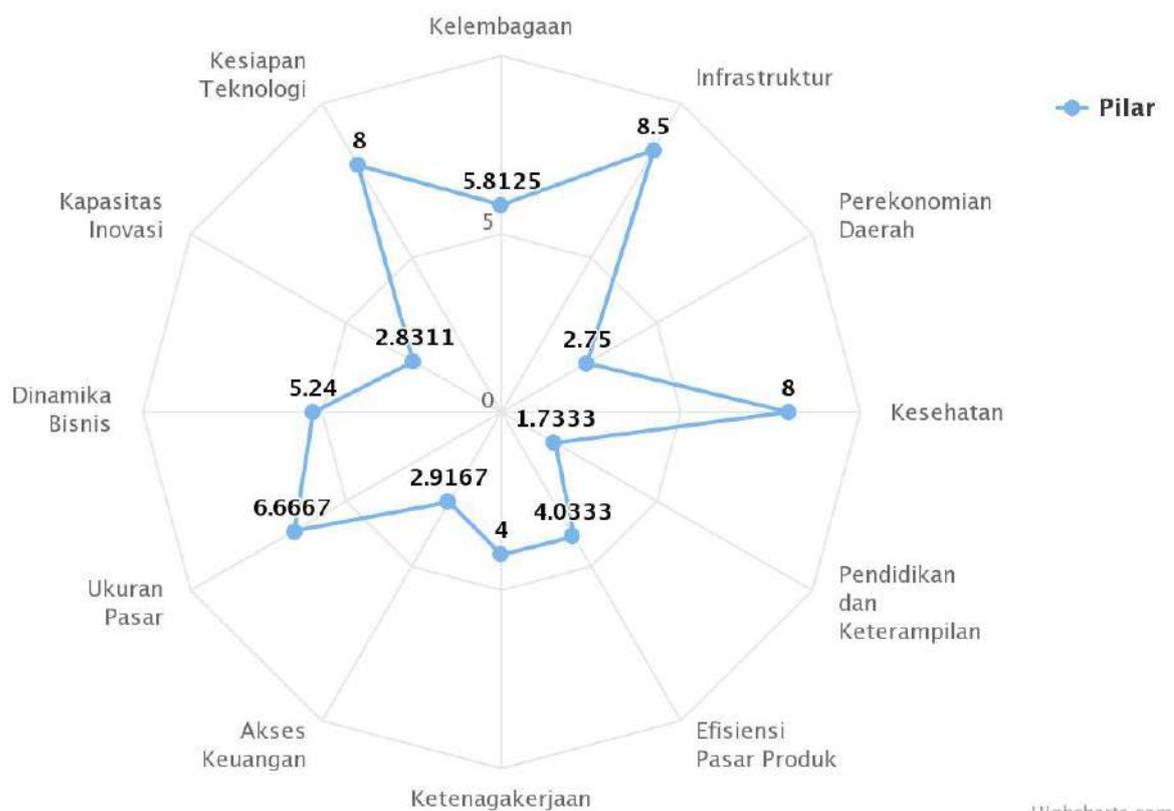
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
5,01990**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Infrastruktur
2. Kondisi paling rendah pada pilar Pendidikan dan Ketrampilan

KABUPATEN WONOSOBO



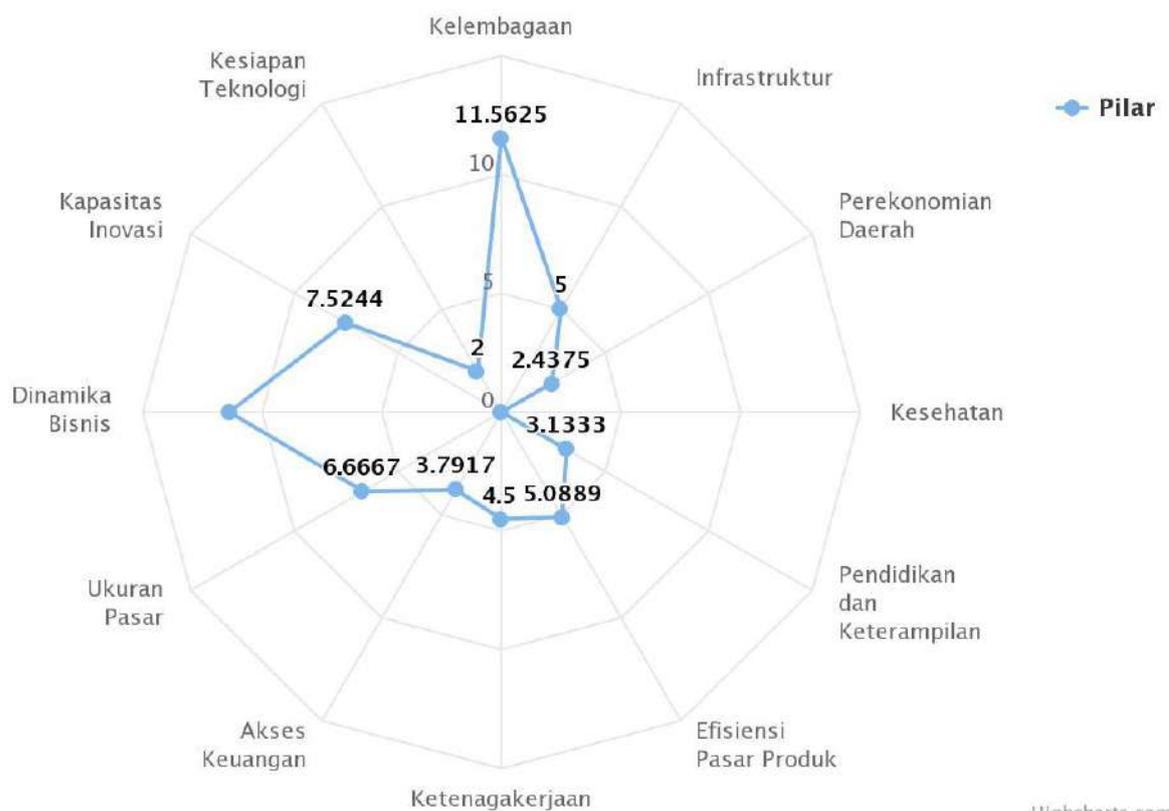
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,32110**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KABUPATEN MAGELANG



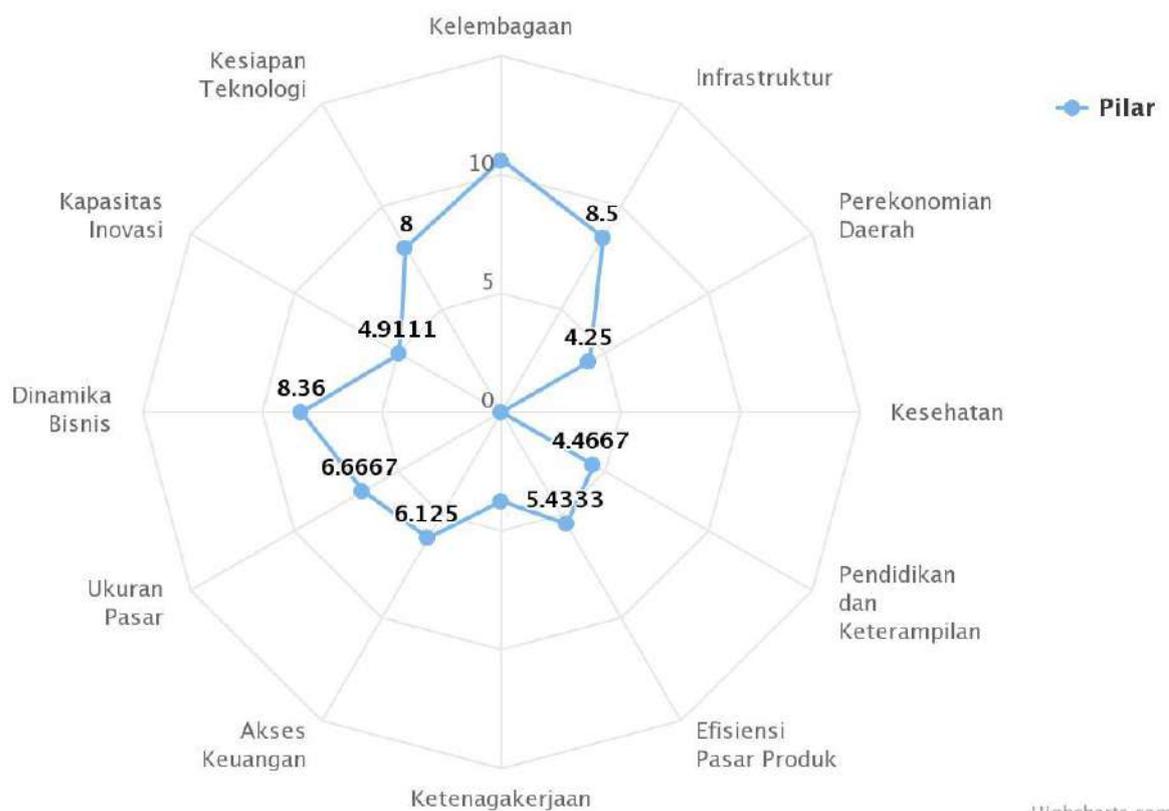
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,83340**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

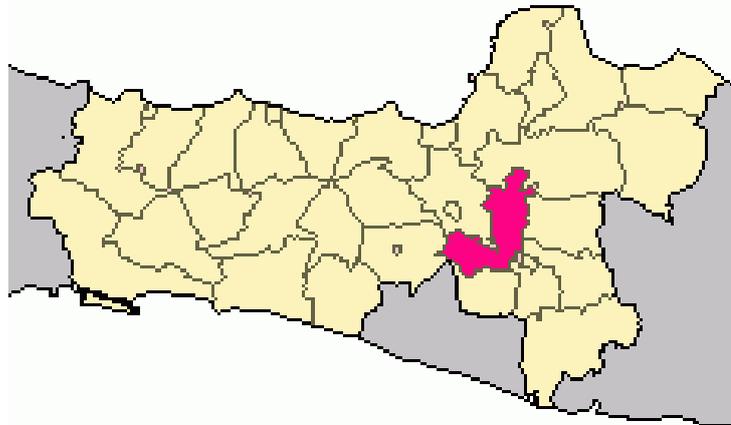
KABUPATEN BOYOLALI



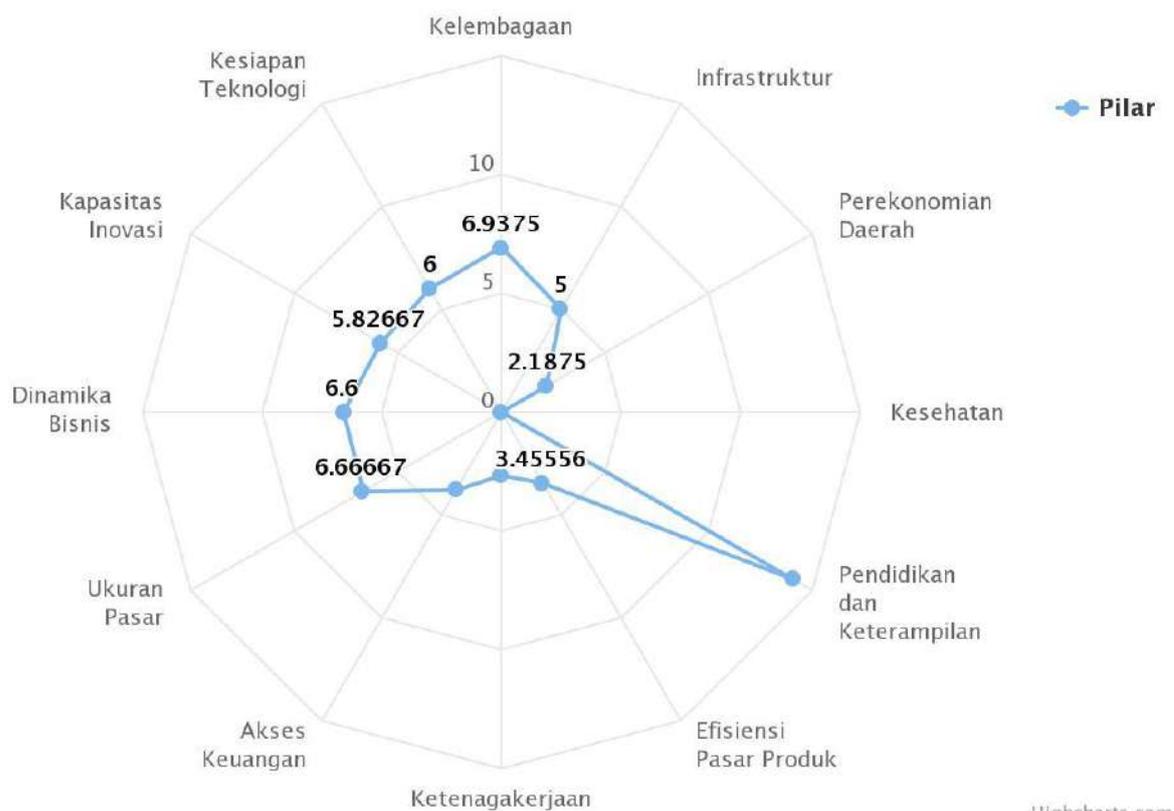
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
5,88417**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Pendidikan dan Keterampilan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

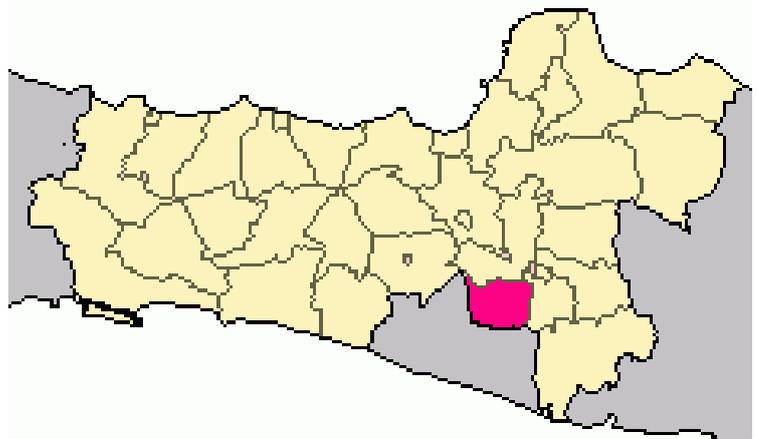
KABUPATEN KLATEN



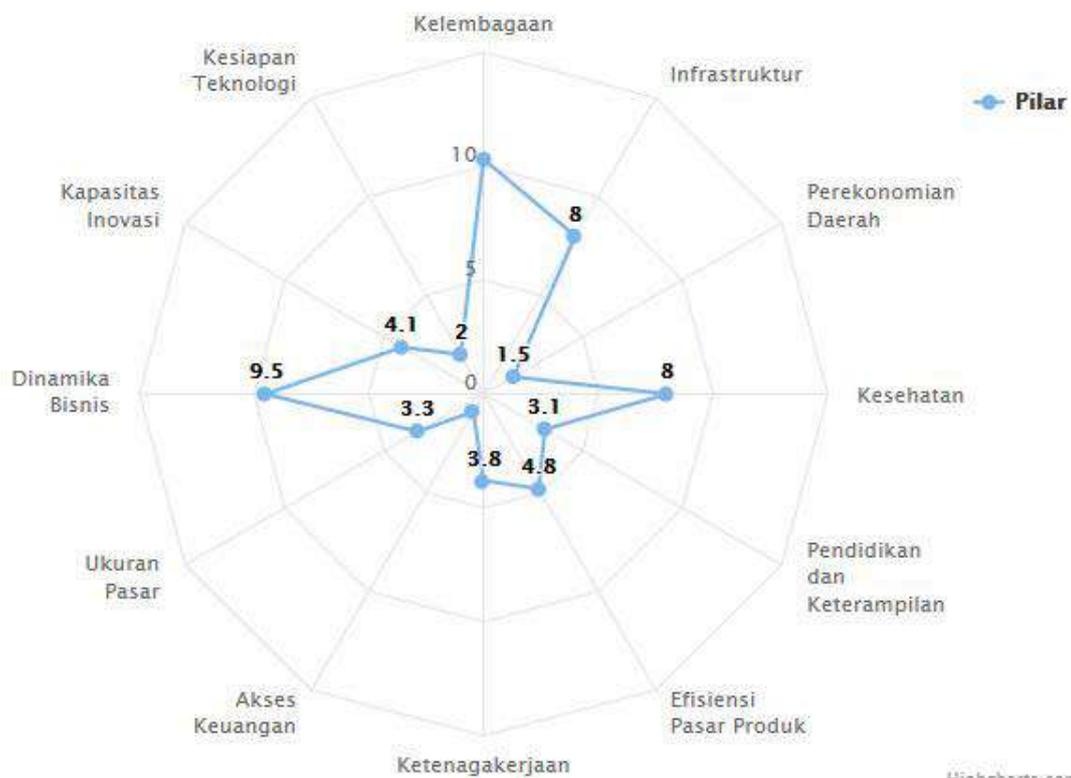
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
5,14540**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Akses Keuangan

KABUPATEN SUKOHARJO



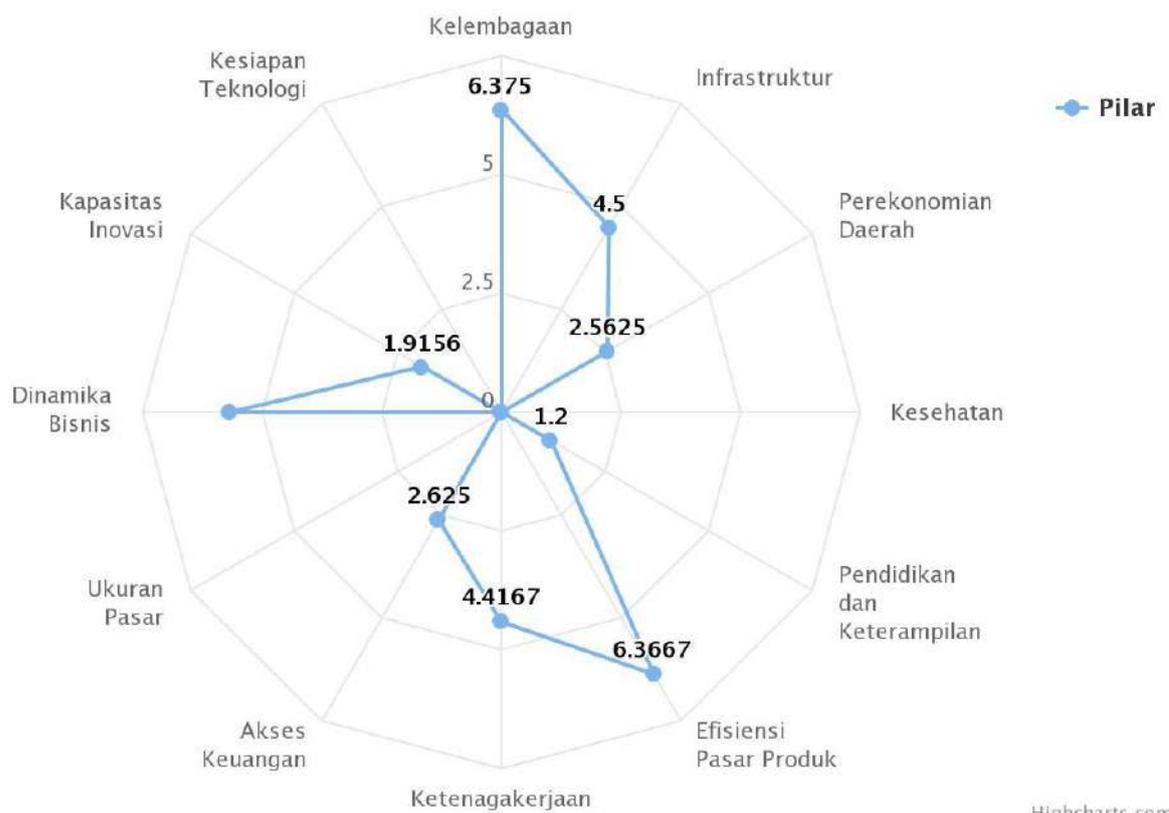
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
2,21360**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan dan Efisiensi Pasar Produk
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

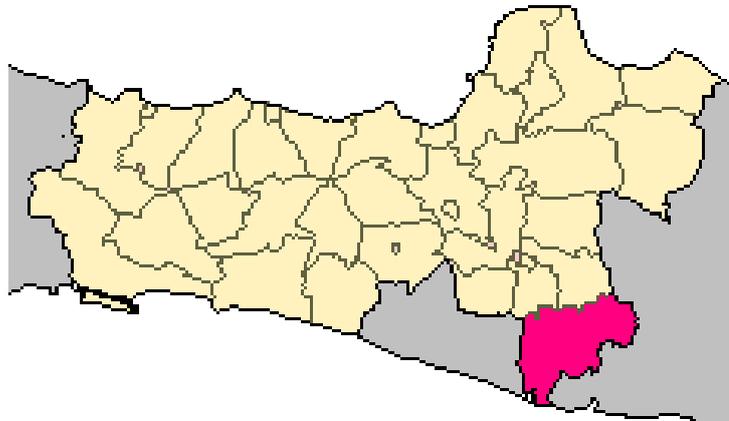
KABUPATEN WONOGIRI



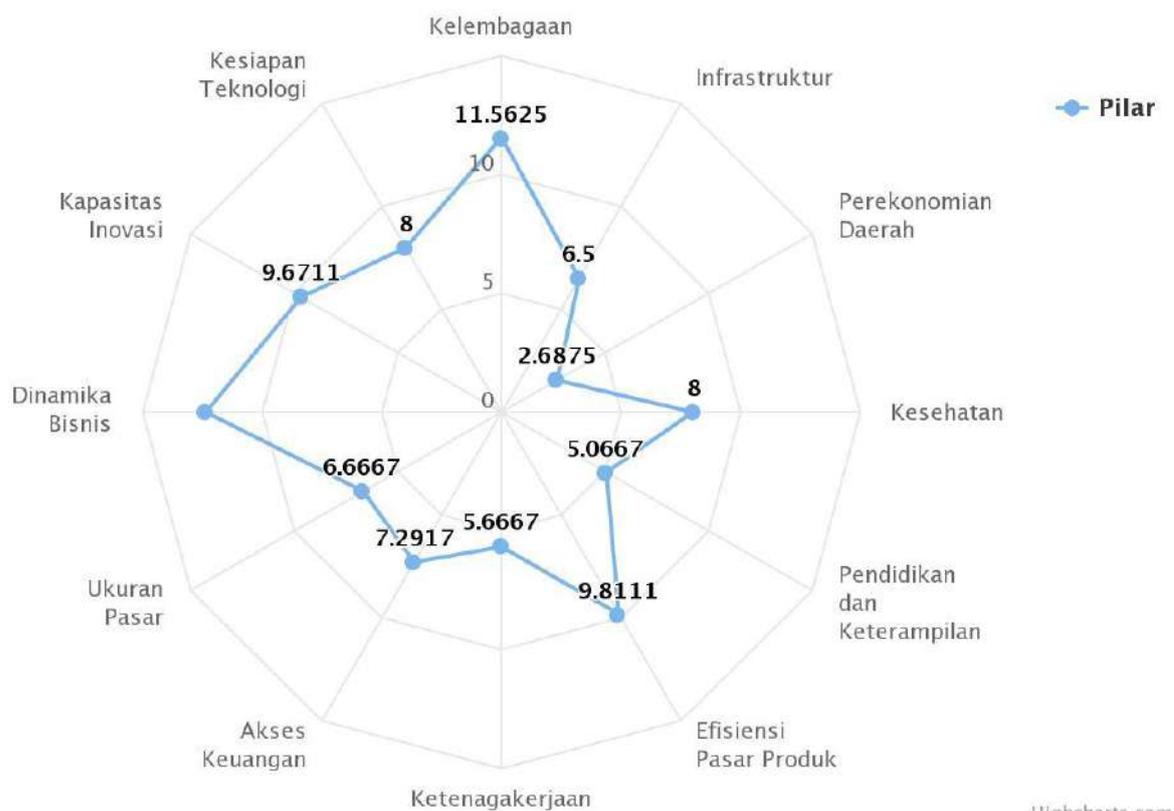
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
7,59860**

**KATEGORI :
TINGGI**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Dinamika Bisnis dan Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Perekonomian Daerah

KABUPATEN KARANGANYAR



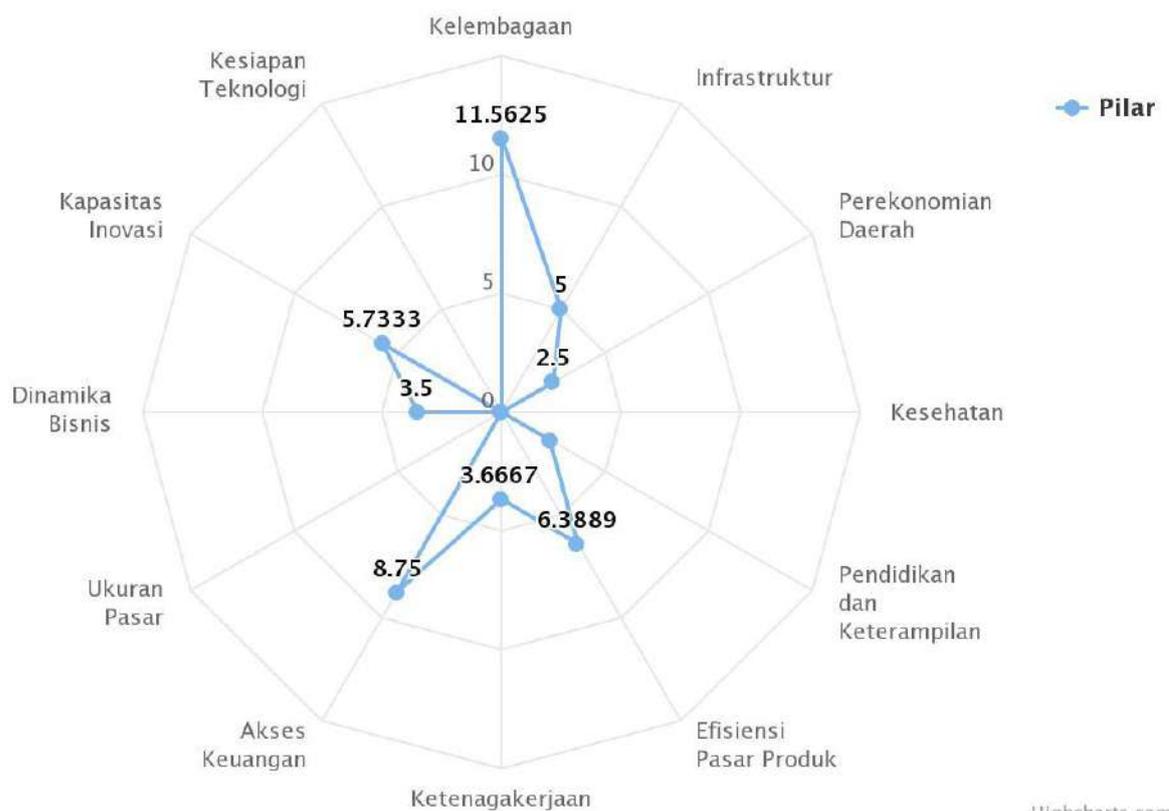
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3,12950**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

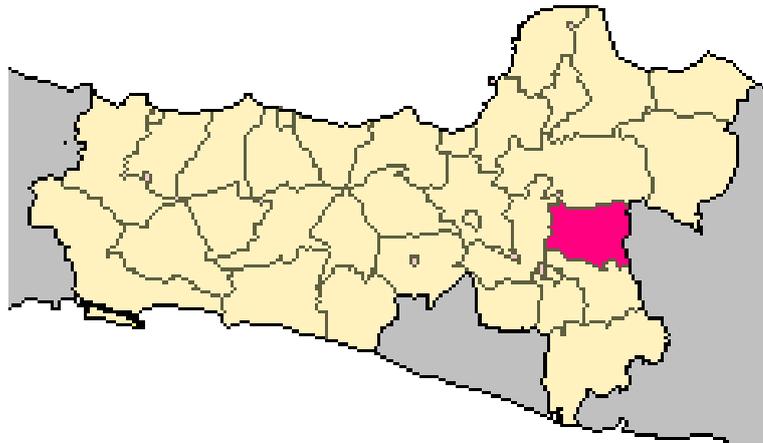
KABUPATEN SRAGEN



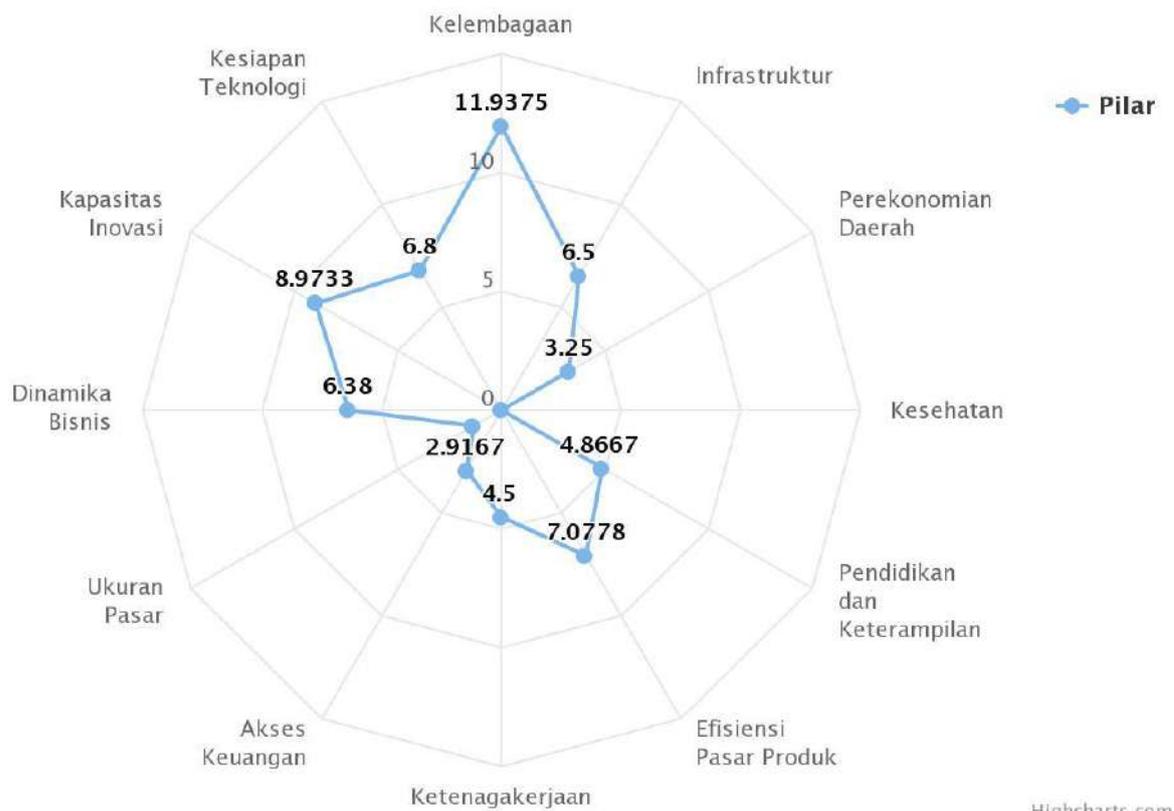
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,69520**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

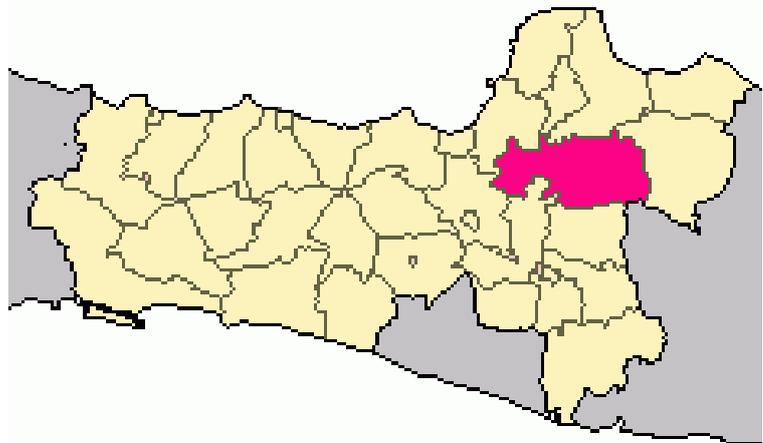
KABUPATEN GROBOGAN



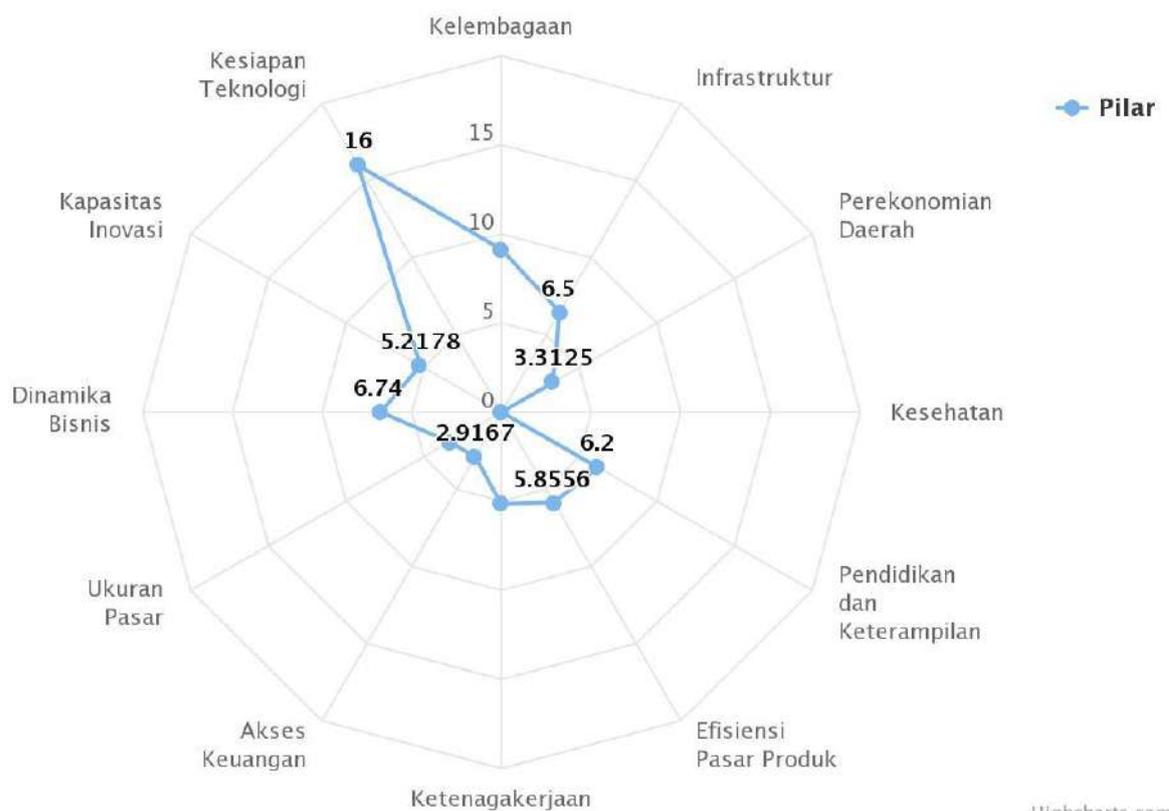
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
5,38030**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesiapan Teknologi
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

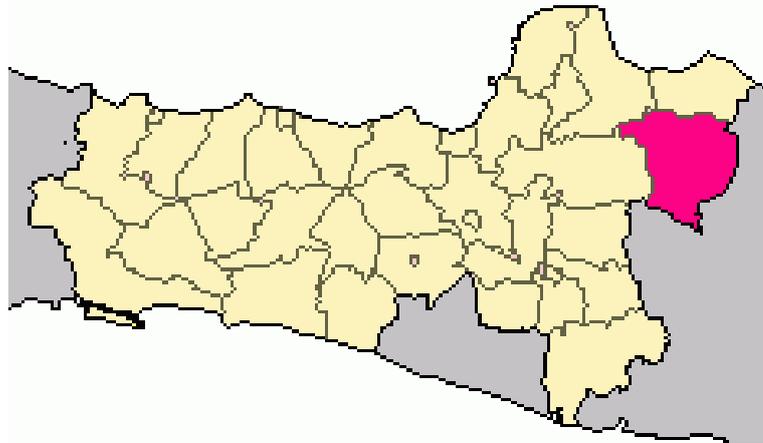
KABUPATEN BLORA



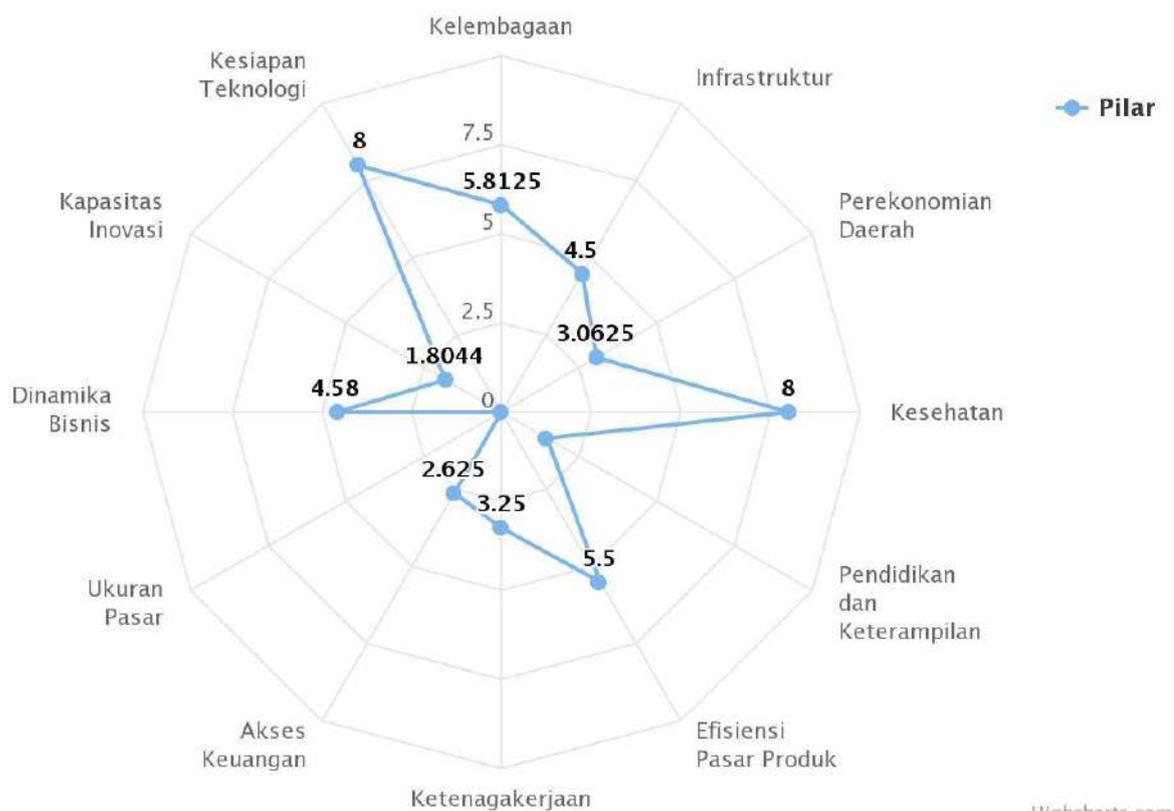
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,32950**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesiapan Teknologi dan Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

KABUPATEN REMBANG



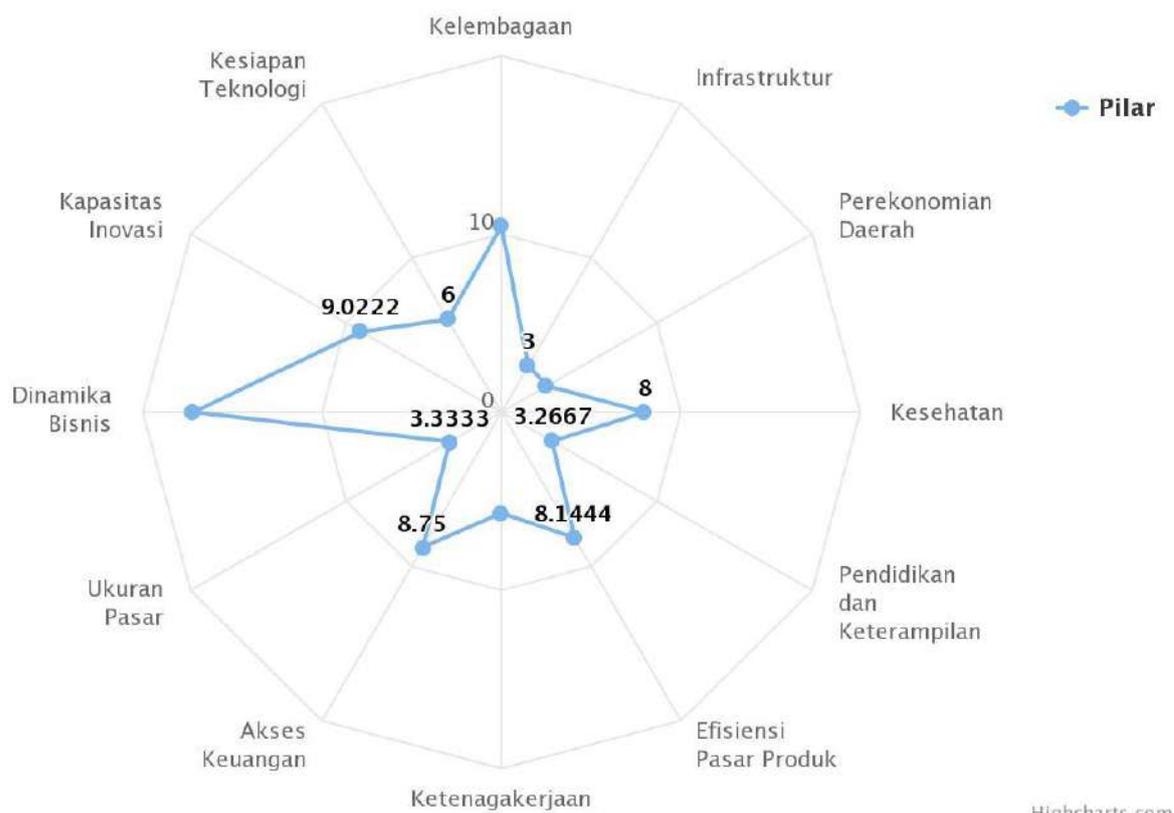
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
7,04870**

**KATEGORI :
TINGGI**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Dinamika Bisnis
2. Kondisi paling rendah pada pilar Perekonomian daerah

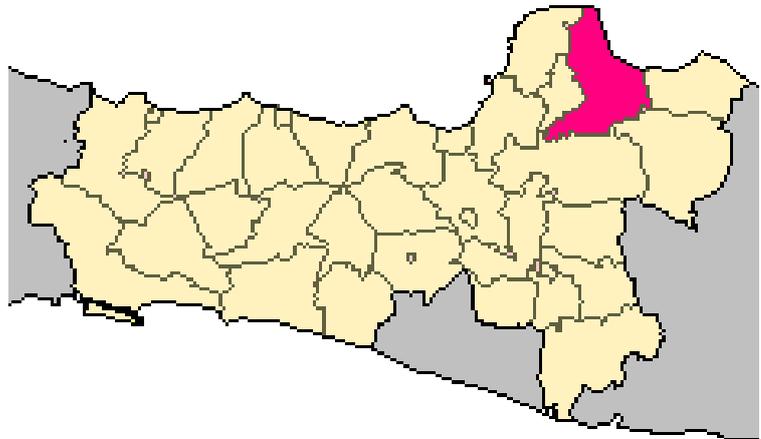
KABUPATEN PATI



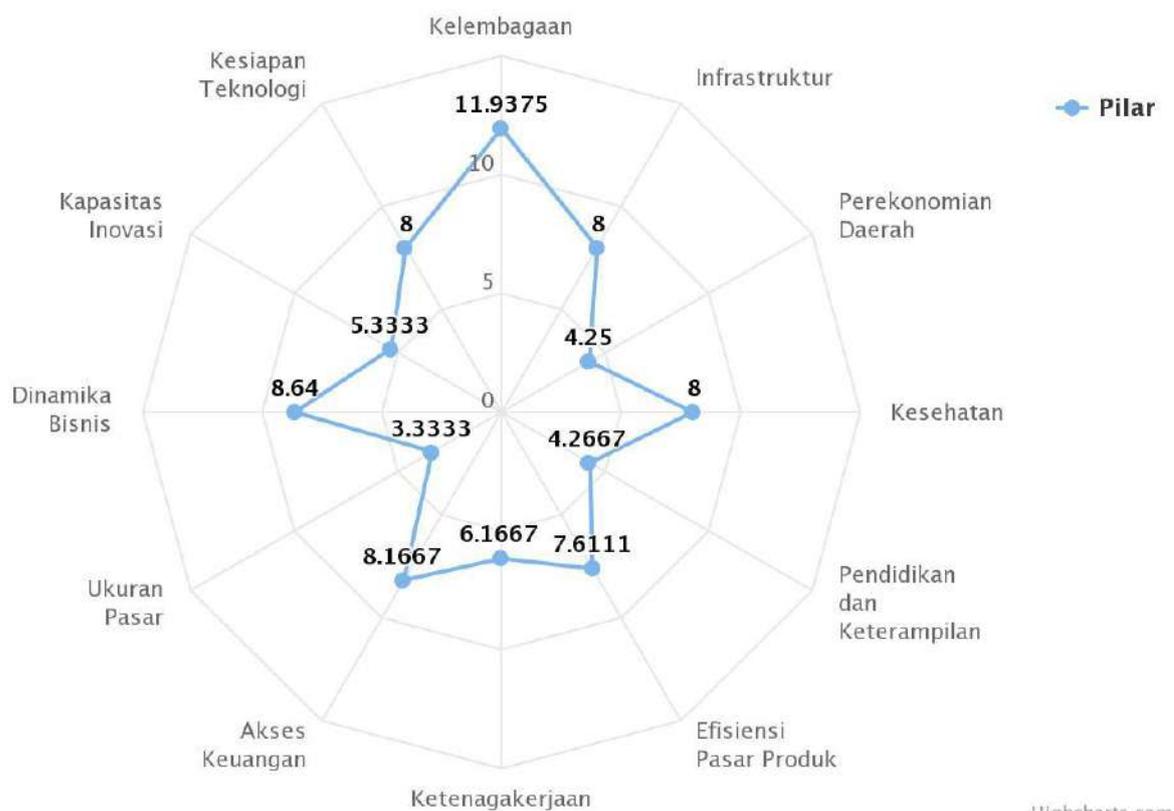
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
6,75770**

**KATEGORI :
TINGGI**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

KABUPATEN KUDUS



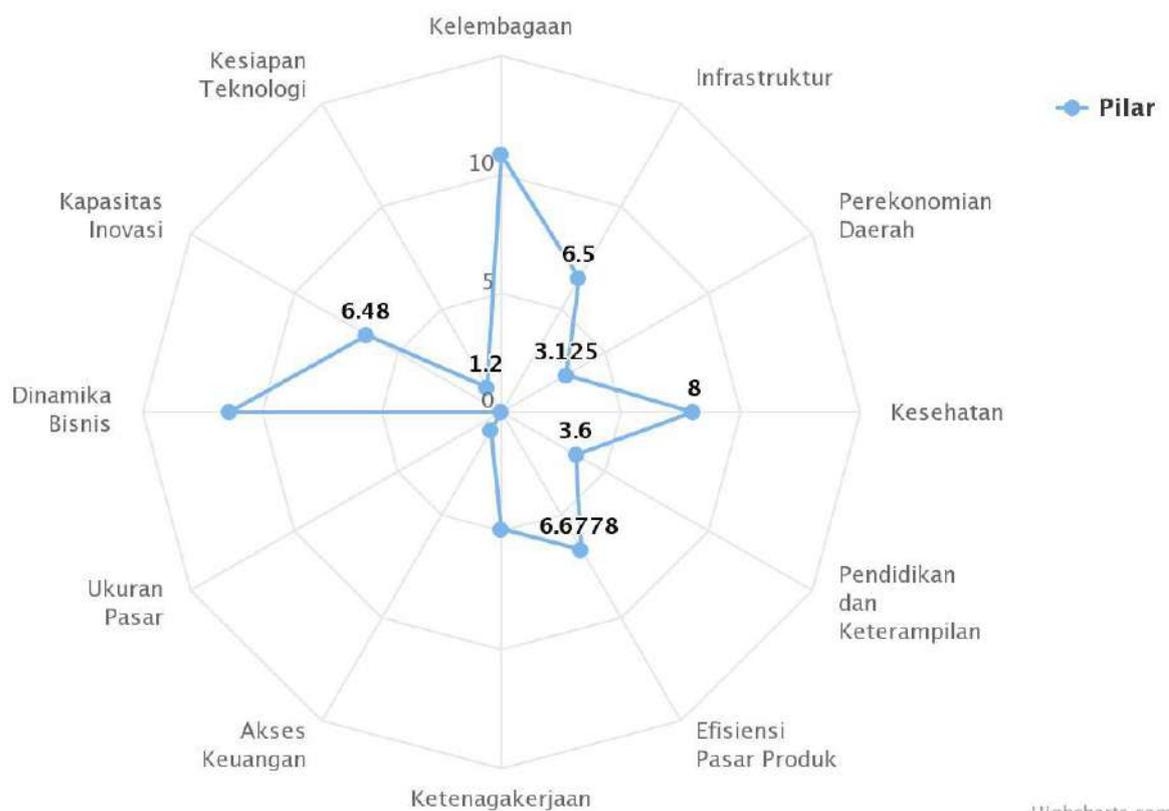
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
5,55370**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Dinamika Bisnis
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

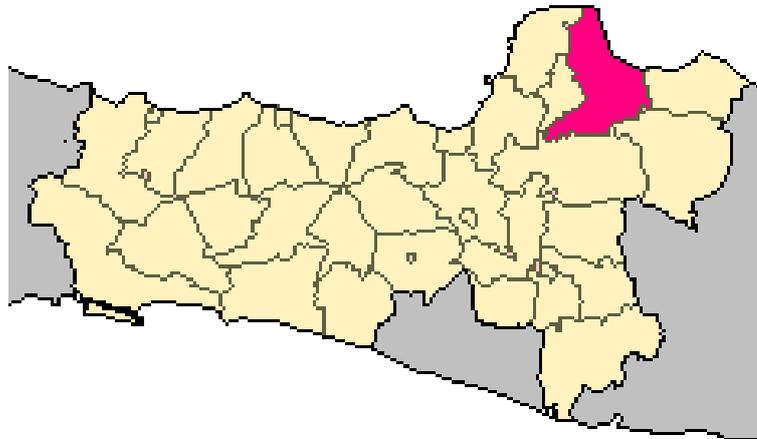
KABUPATEN JEPARA



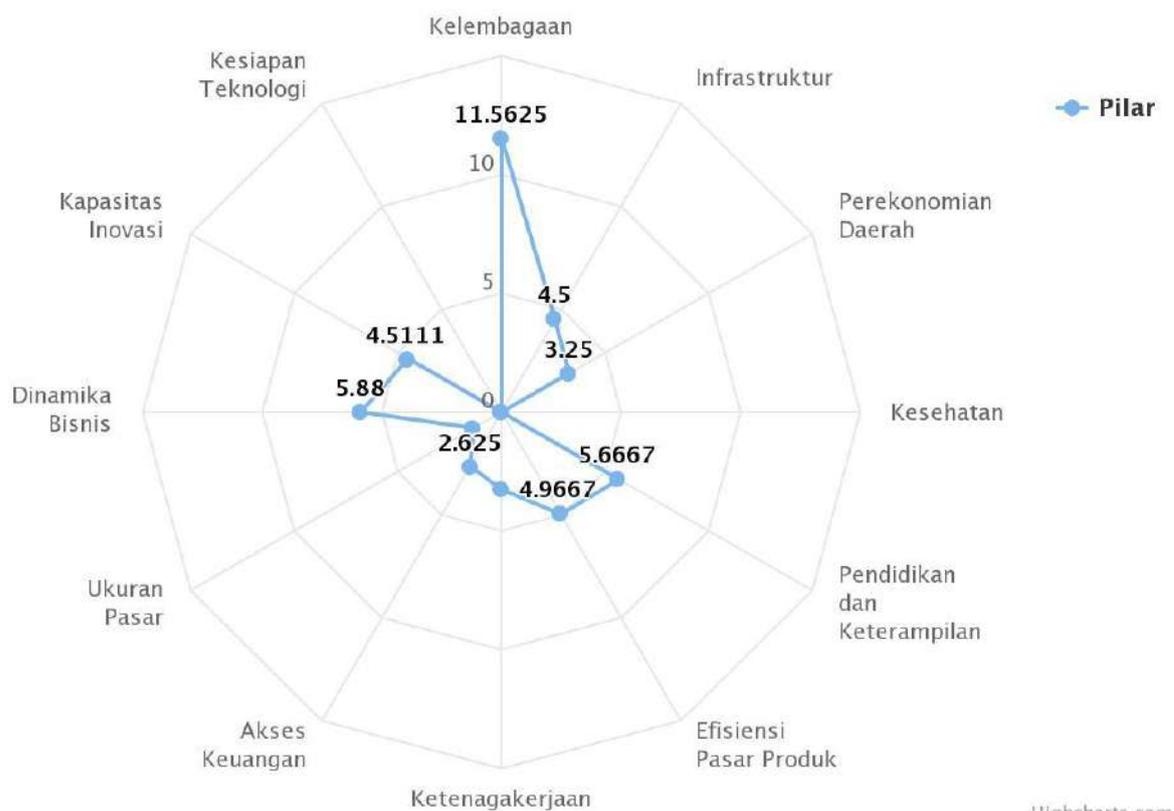
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3,57363**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

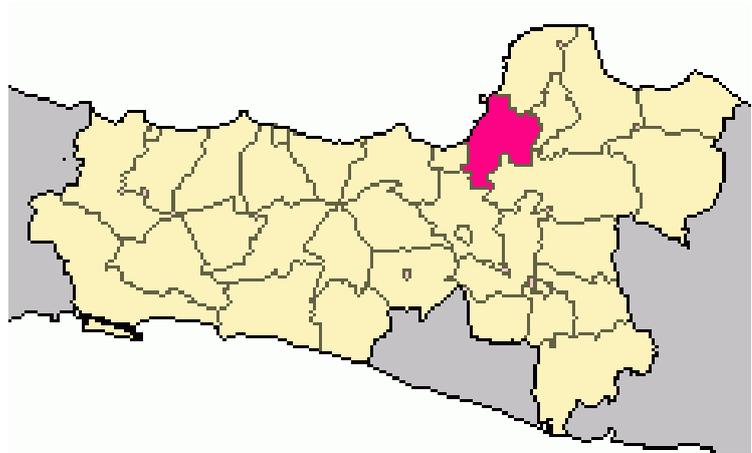
KABUPATEN DEMAK



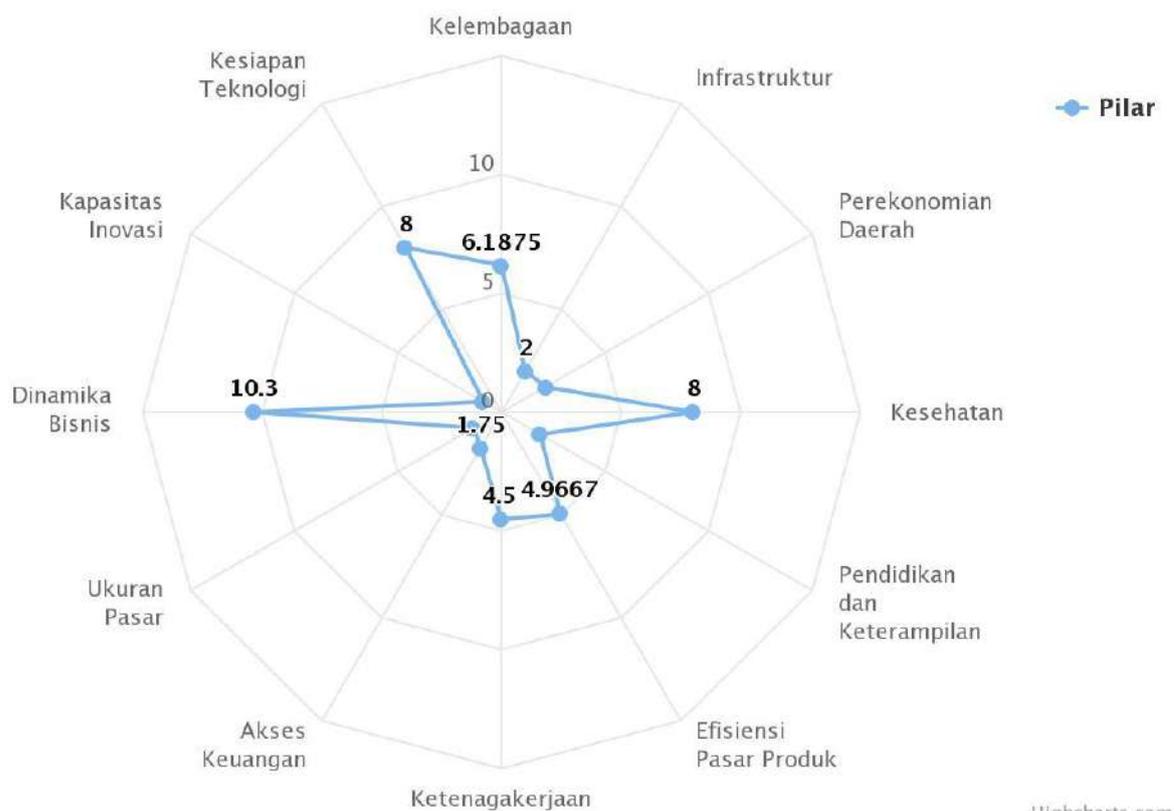
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,71440**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Dinamika Bisnis
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kapasitas Inovasi

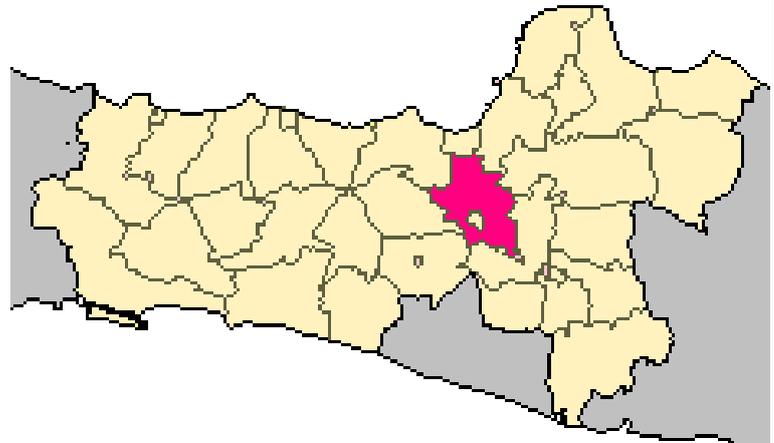
KABUPATEN SEMARANG



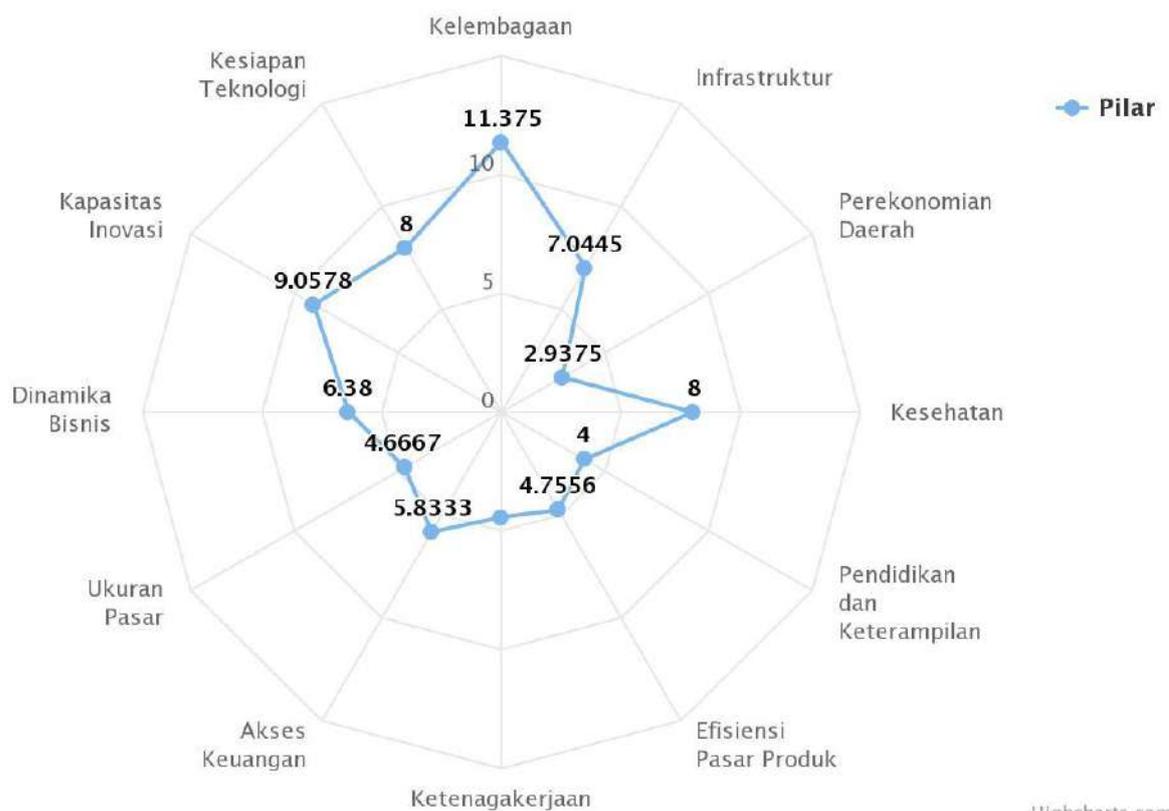
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
6,40460**

**KATEGORI :
TINGGI**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Perekonomian Daerah

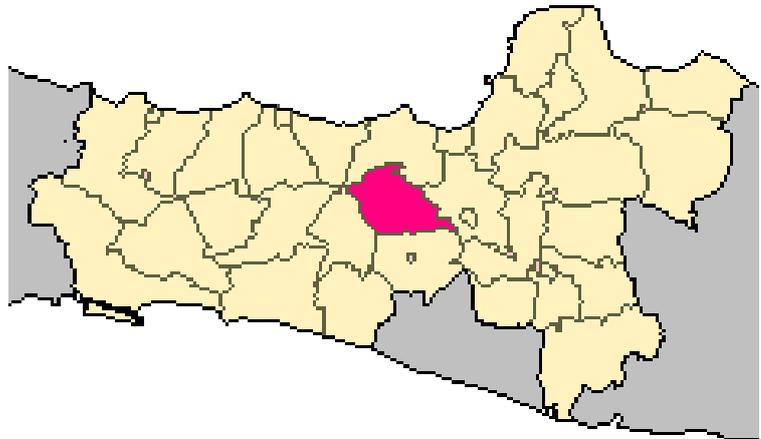
KABUPATEN TEMANGGUNG



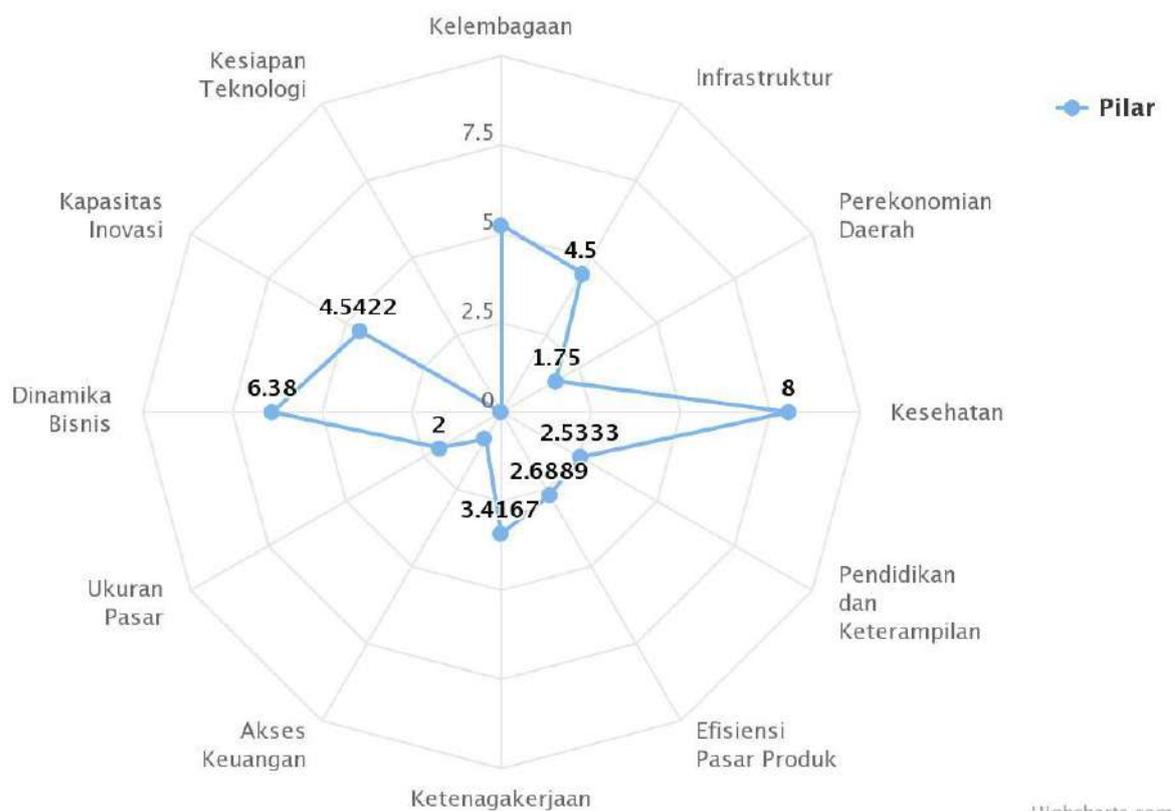
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,04090**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesiapan Teknologi

KABUPATEN KENDAL



**TAHUN :
2019**

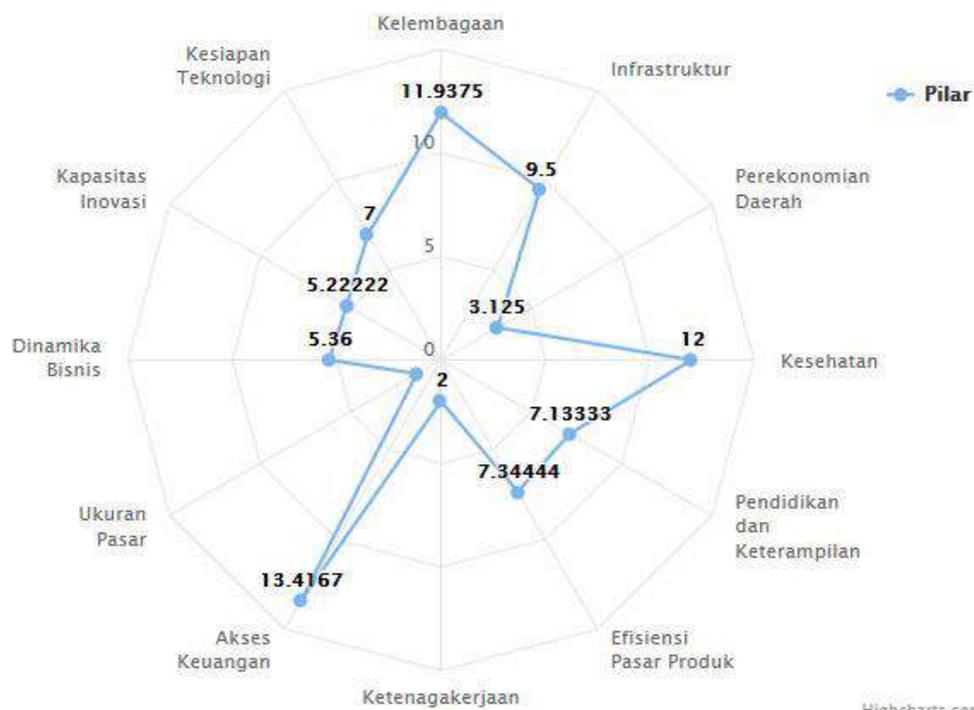
**SKOR/NILAI INDEKS :
7,79970**

**KATEGORI :
TINGGI**



Faktor Pasar/Market

Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Akses Keuangan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

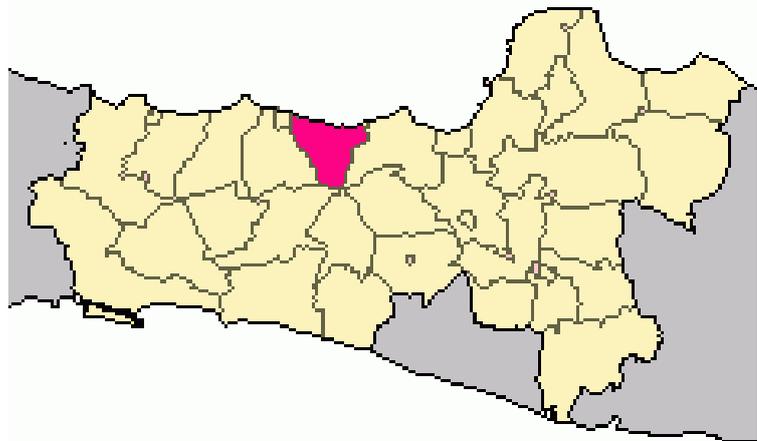
KABUPATEN BATANG



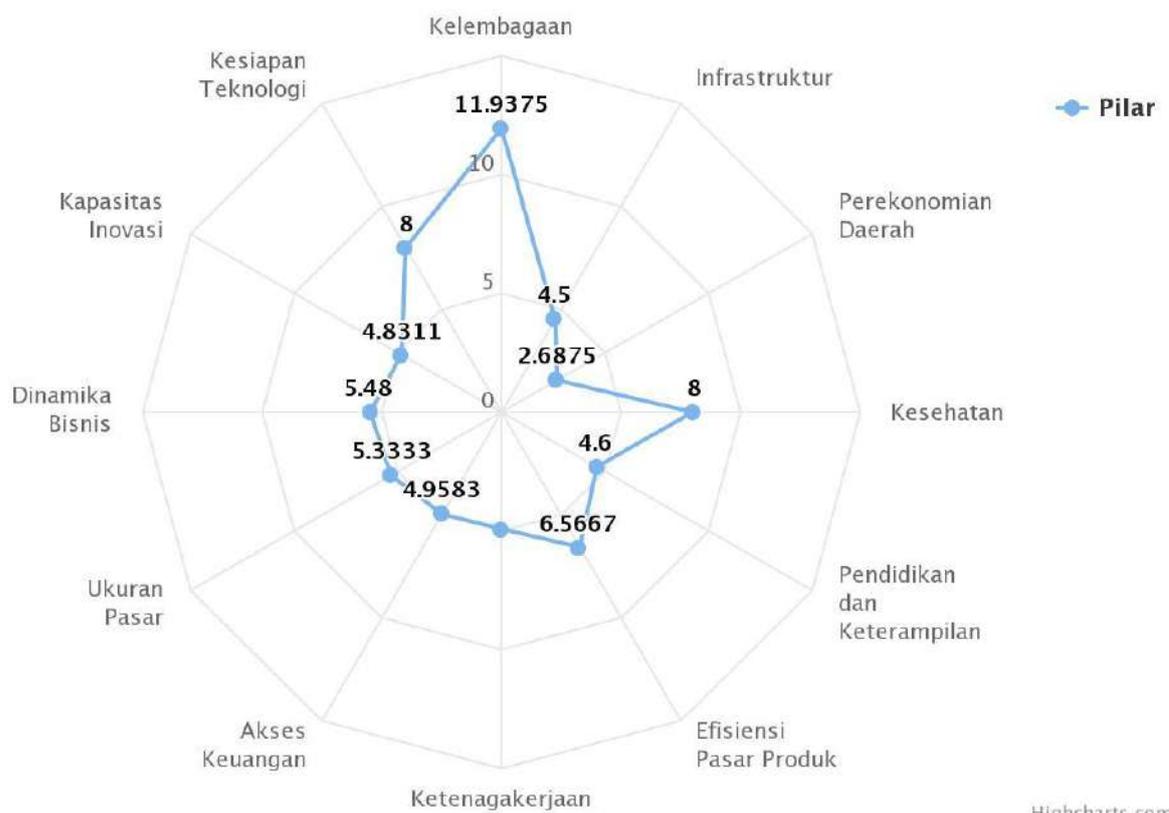
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
6,09090**

**KATEGORI :
TINGGI**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Perekonomian Daerah

KABUPATEN PEKALONGAN



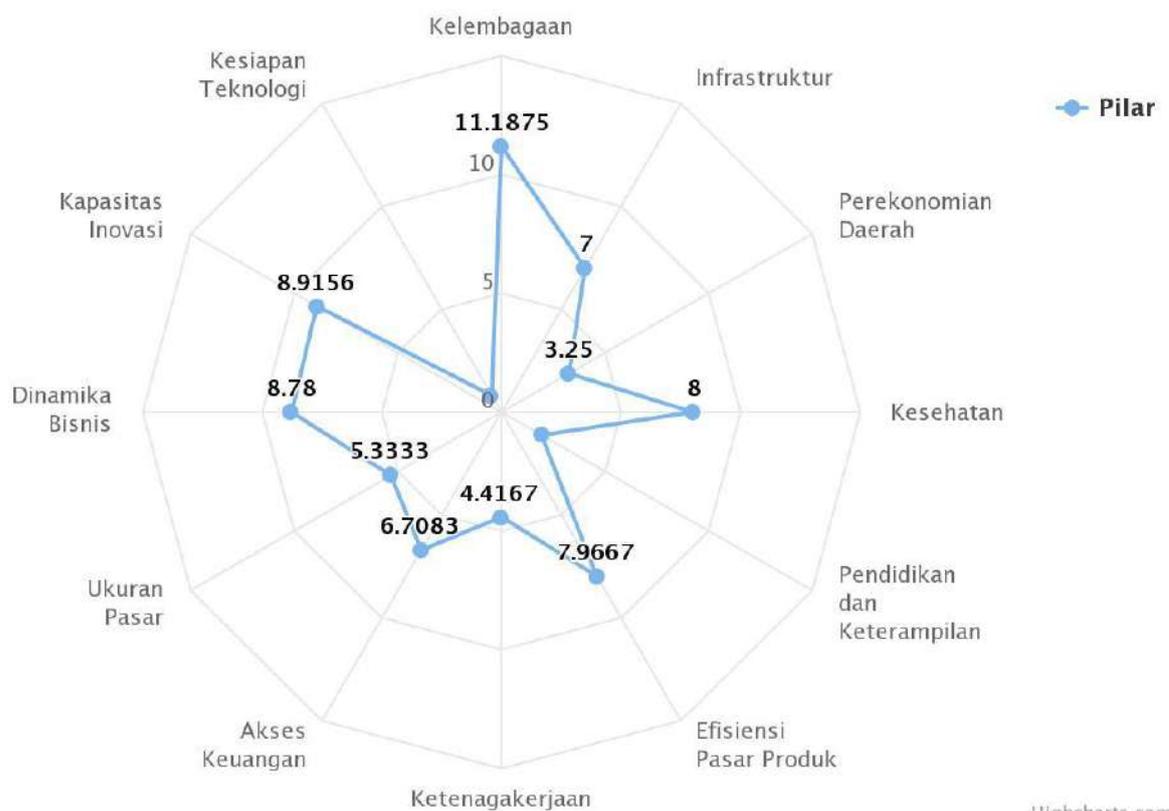
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
5,82110**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesiapan Teknologi

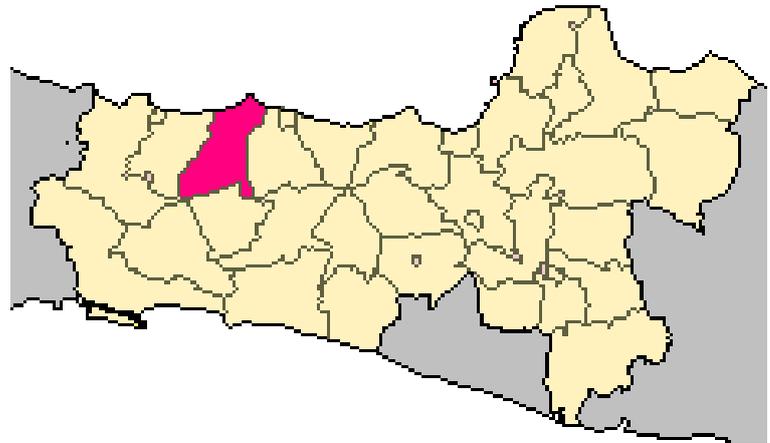
KABUPATEN PEMALANG



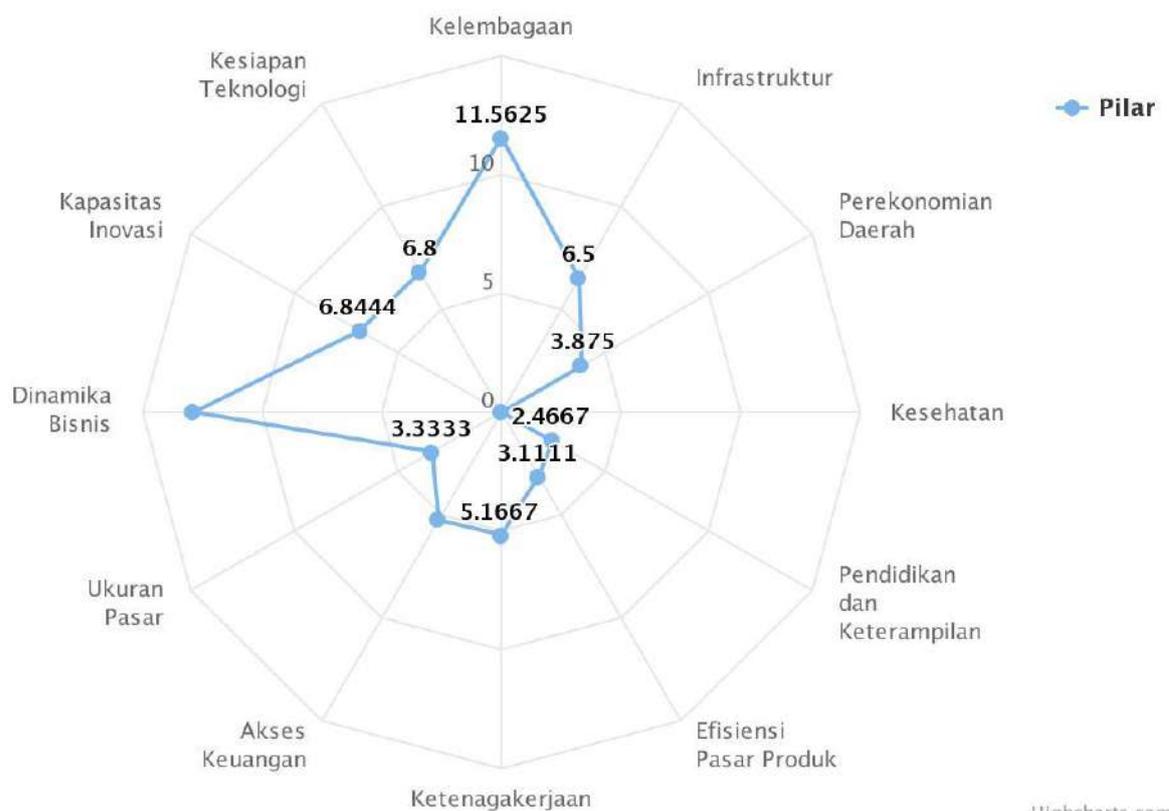
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,64200**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Dinamika Bisnis
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan.

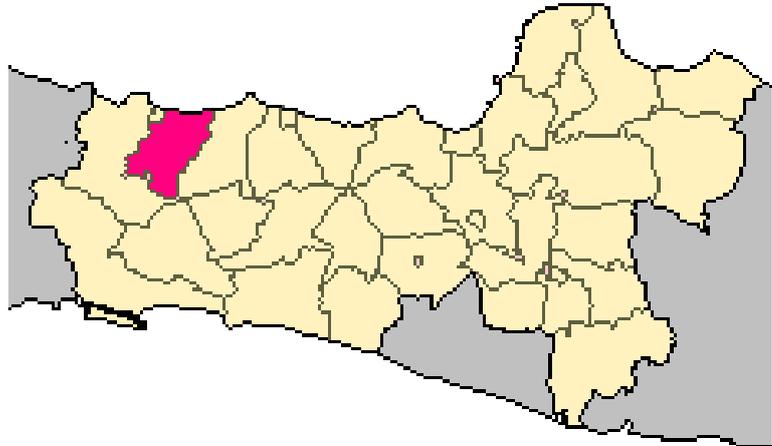
KABUPATEN TEGAL



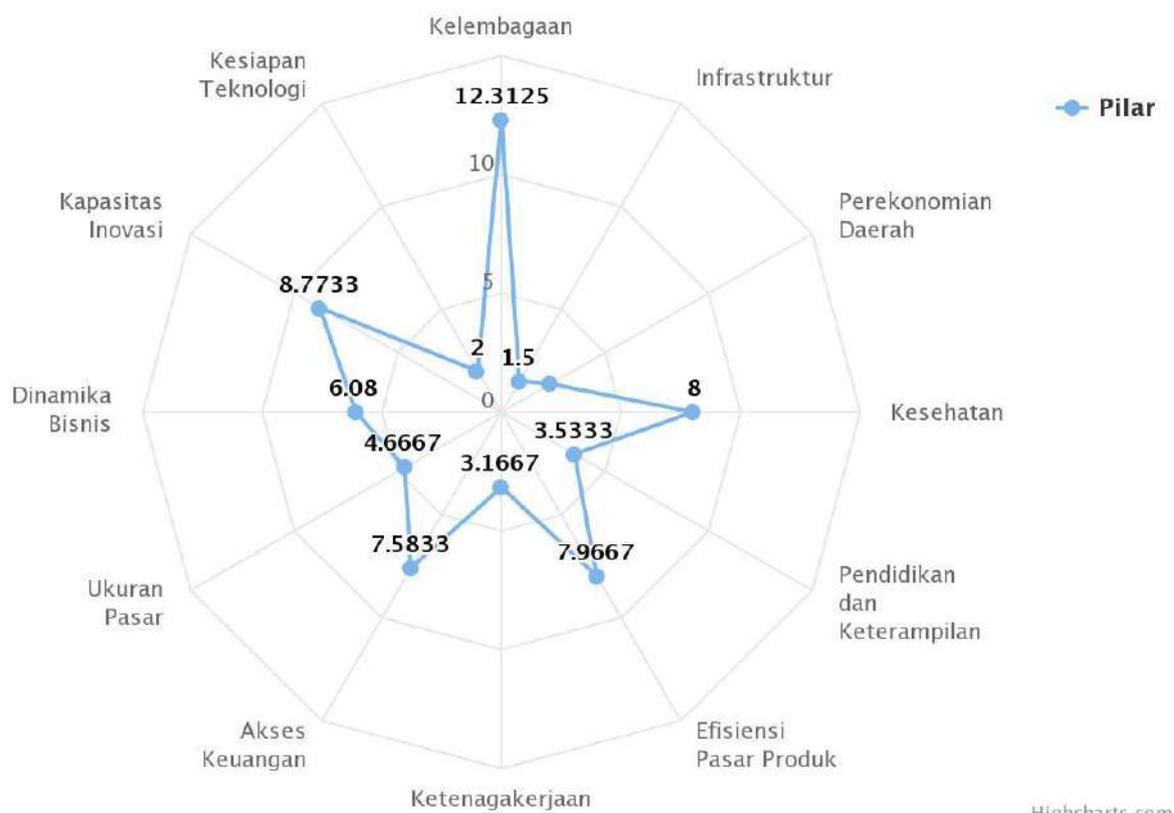
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
5,68970**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Infrastruktur

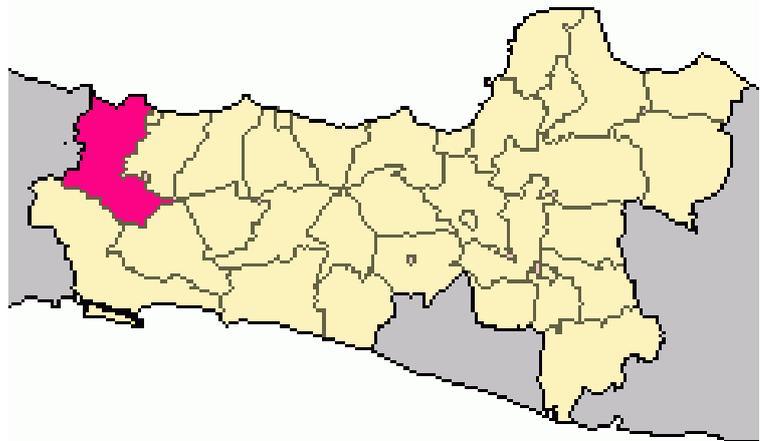
KABUPATEN BREBES



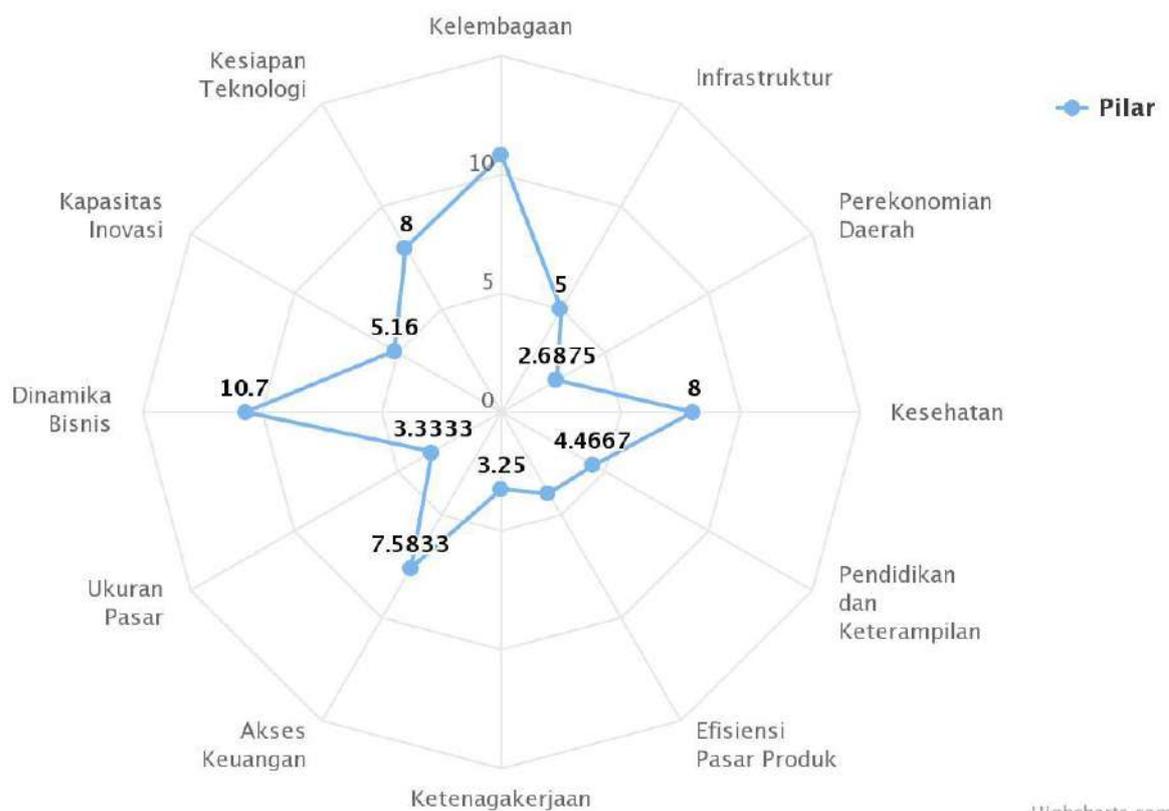
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
6,31220**

**KATEGORI :
TINGGI**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Dinamika Bisnis
2. Kondisi paling rendah pada pilar Perekonomian Daerah

KABUPATEN KULONPROGO



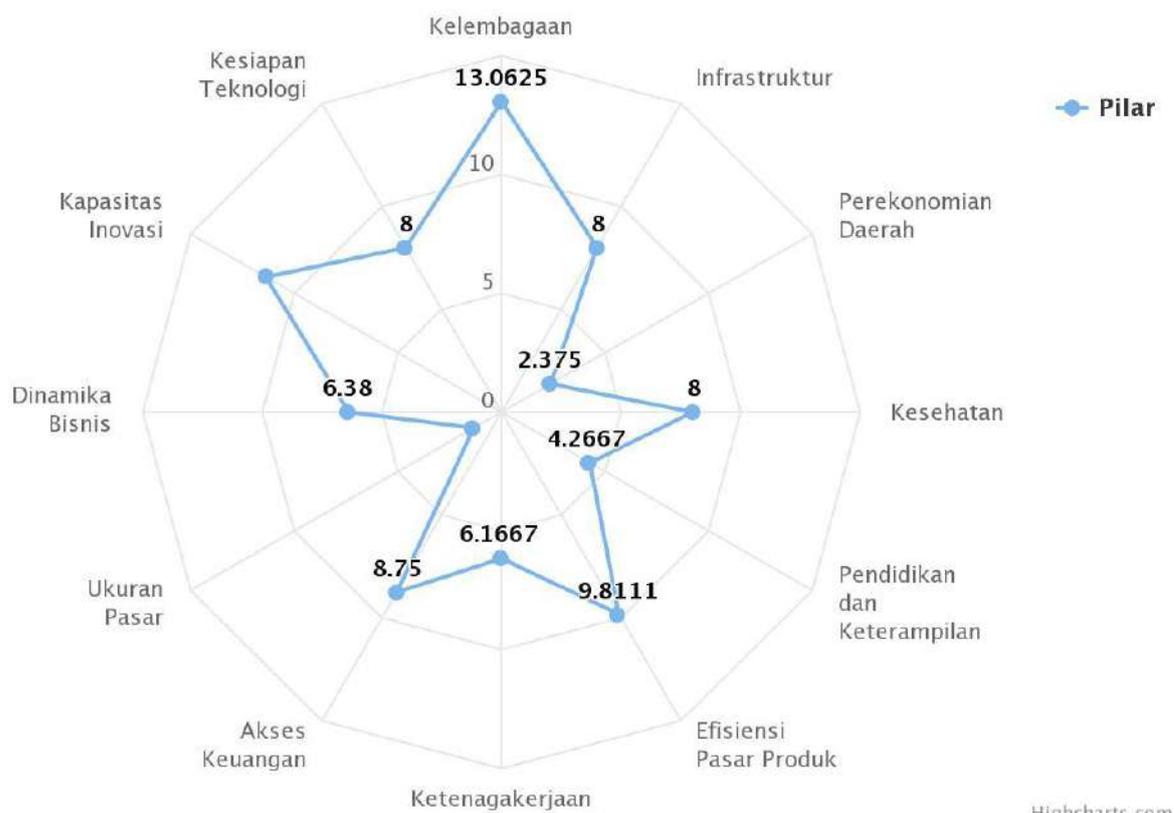
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
7,07400**

**KATEGORI :
TINGGI**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

KABUPATEN BANTUL



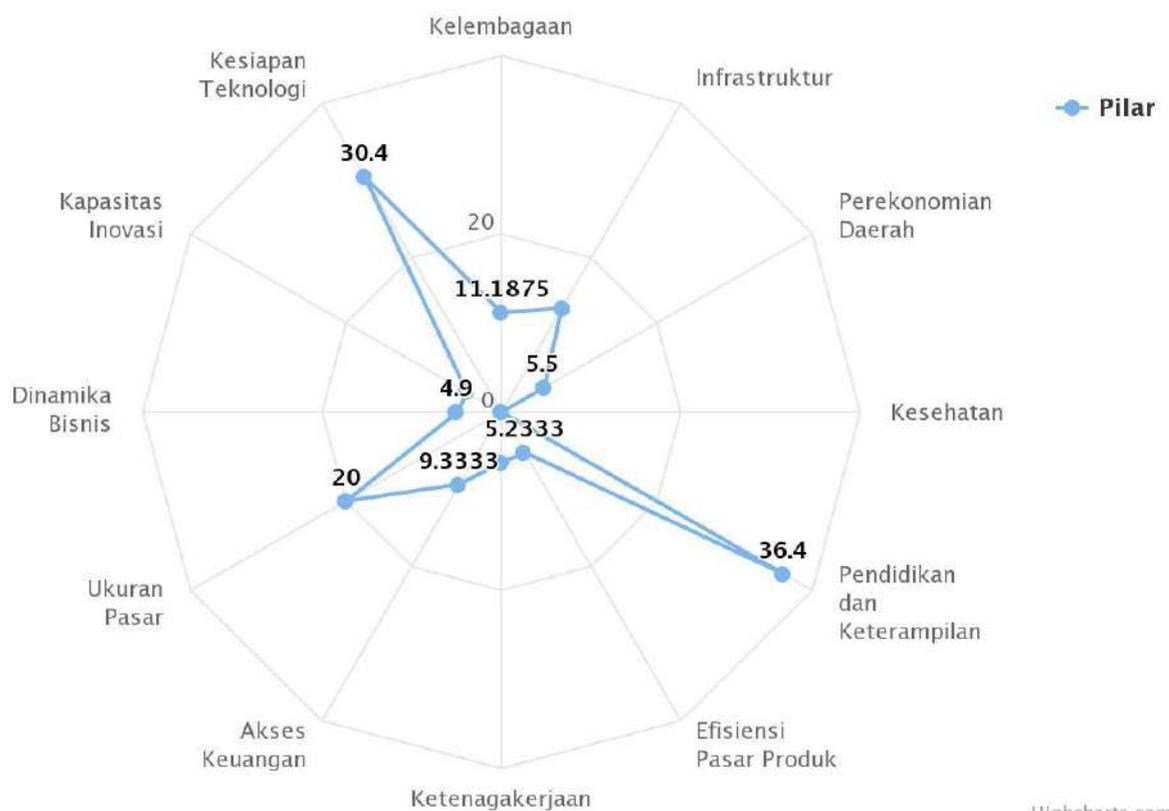
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
1,94110**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Pendidikan dan Keterampilan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KABUPATEN GUNUNG KIDUL



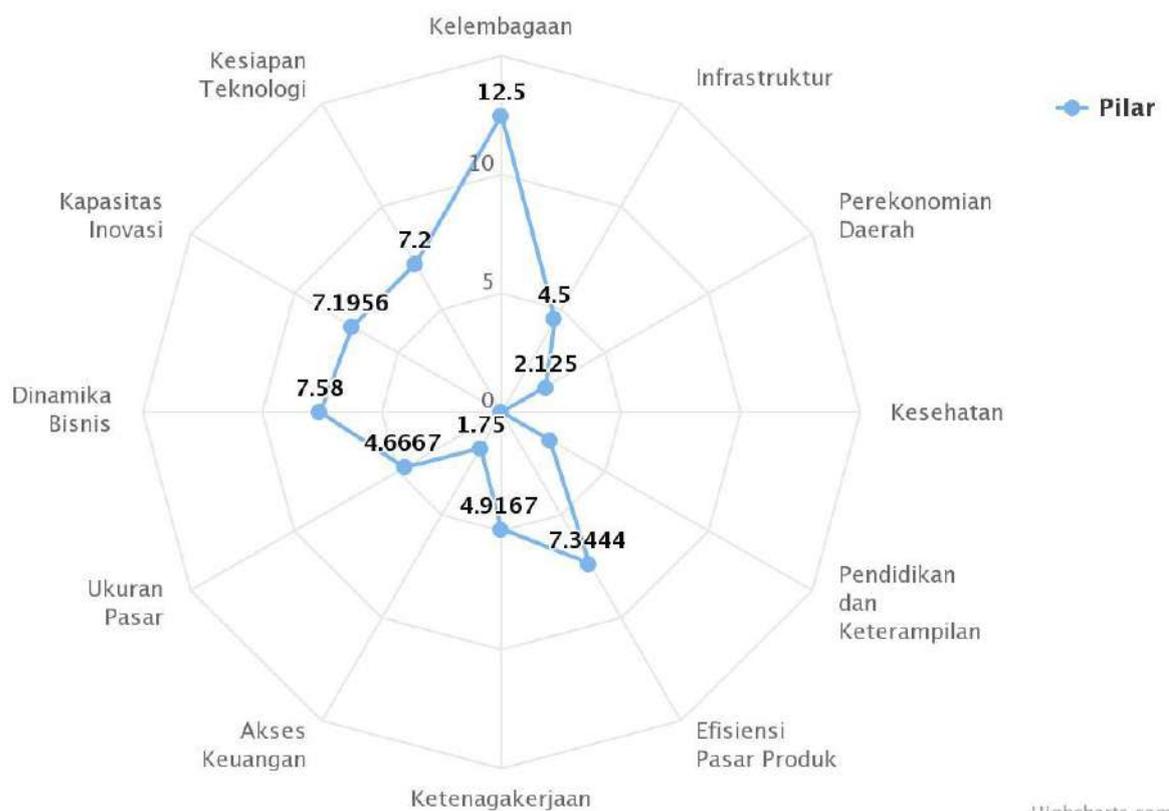
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,18810**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KABUPATEN SLEMAN



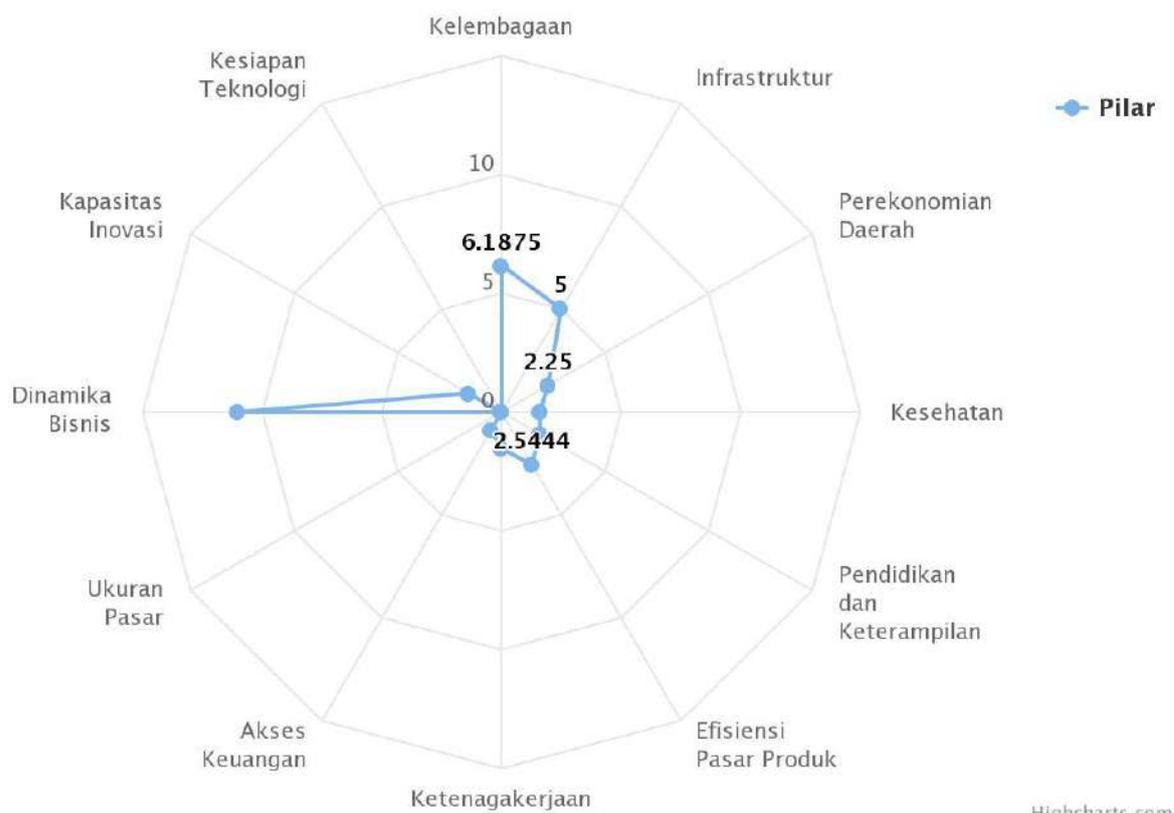
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
2,66200**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Dinamika Bisnis
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesiapan Teknologi

KABUPATEN TRENGGALEK



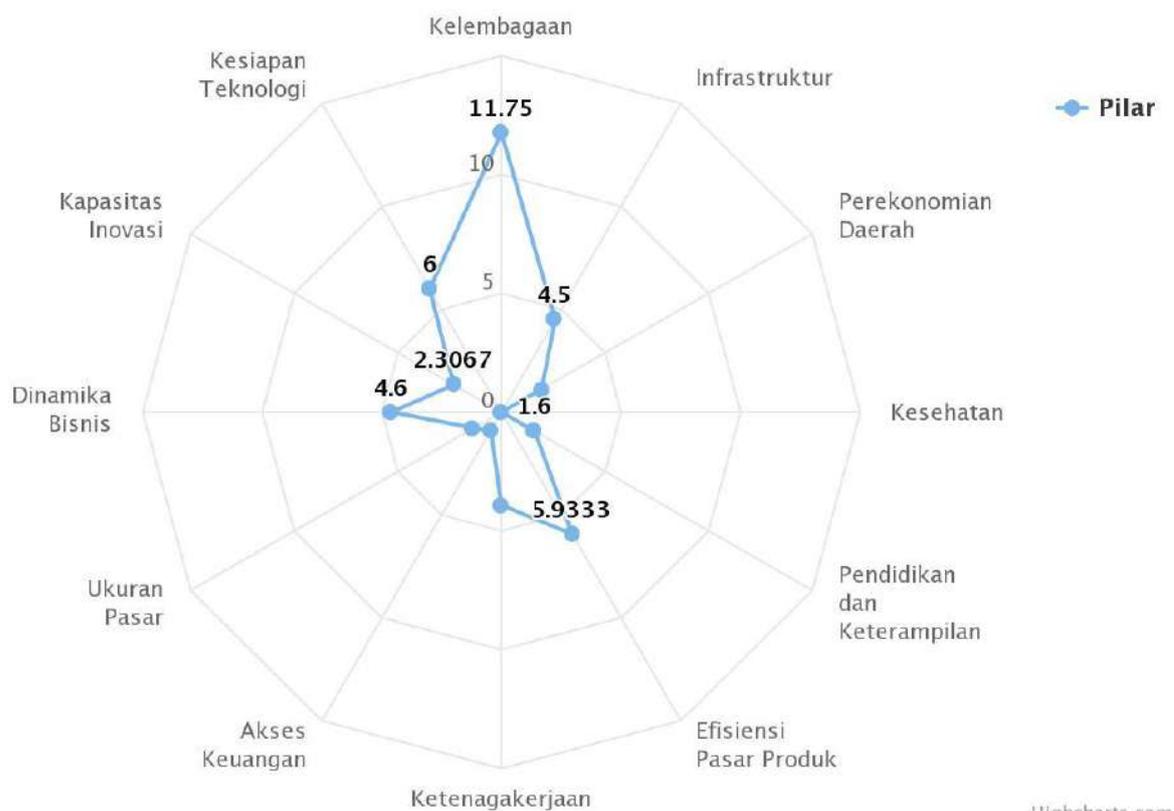
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
2,90780**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KABUPATEN BLITAR



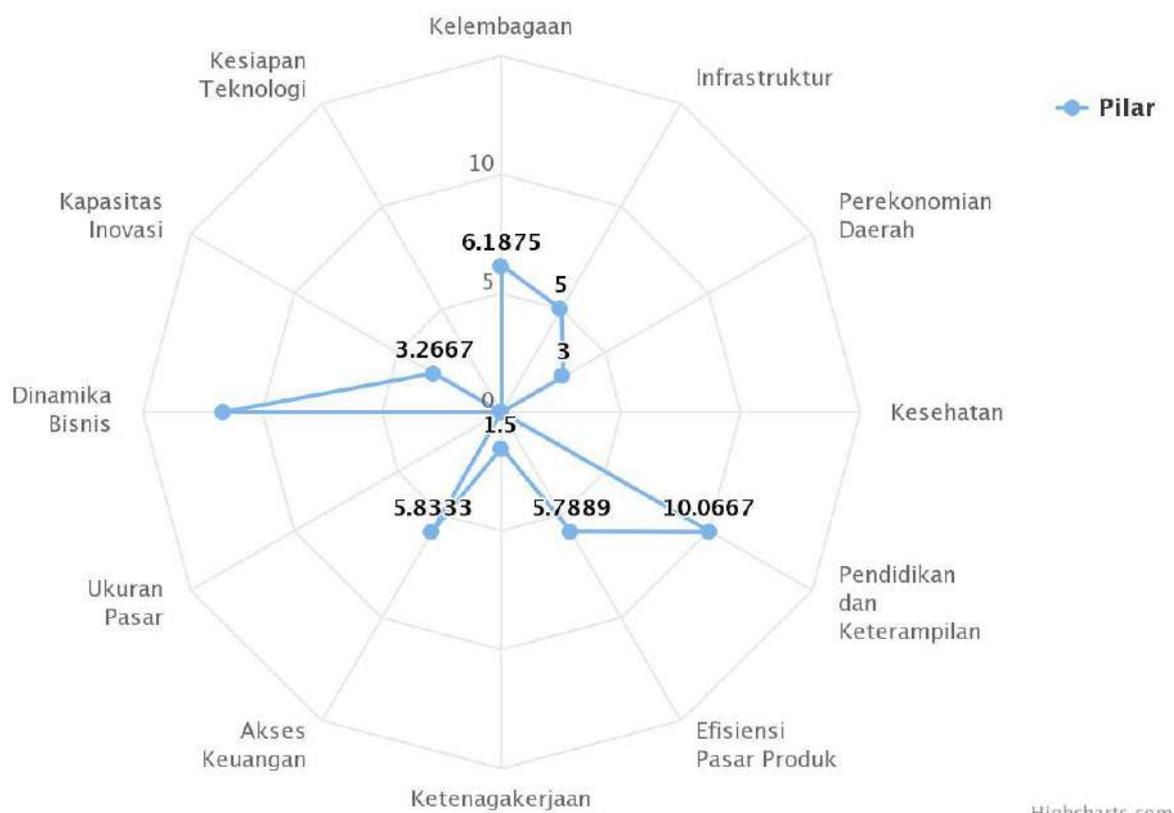
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,61940**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Dinamika Bisnis
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

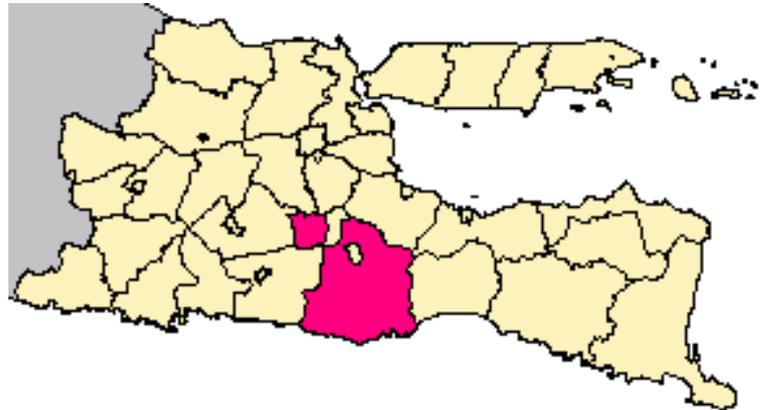
KABUPATEN MALANG



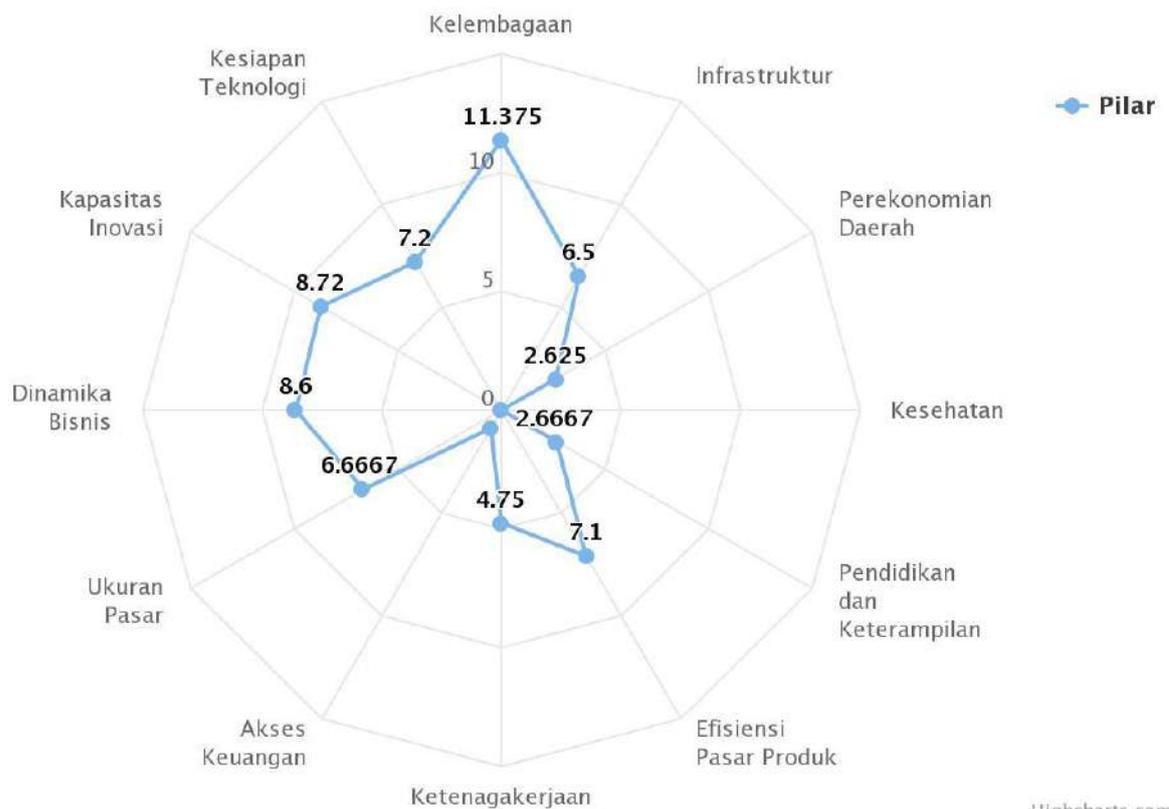
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,57130**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KABUPATEN PASURUAN



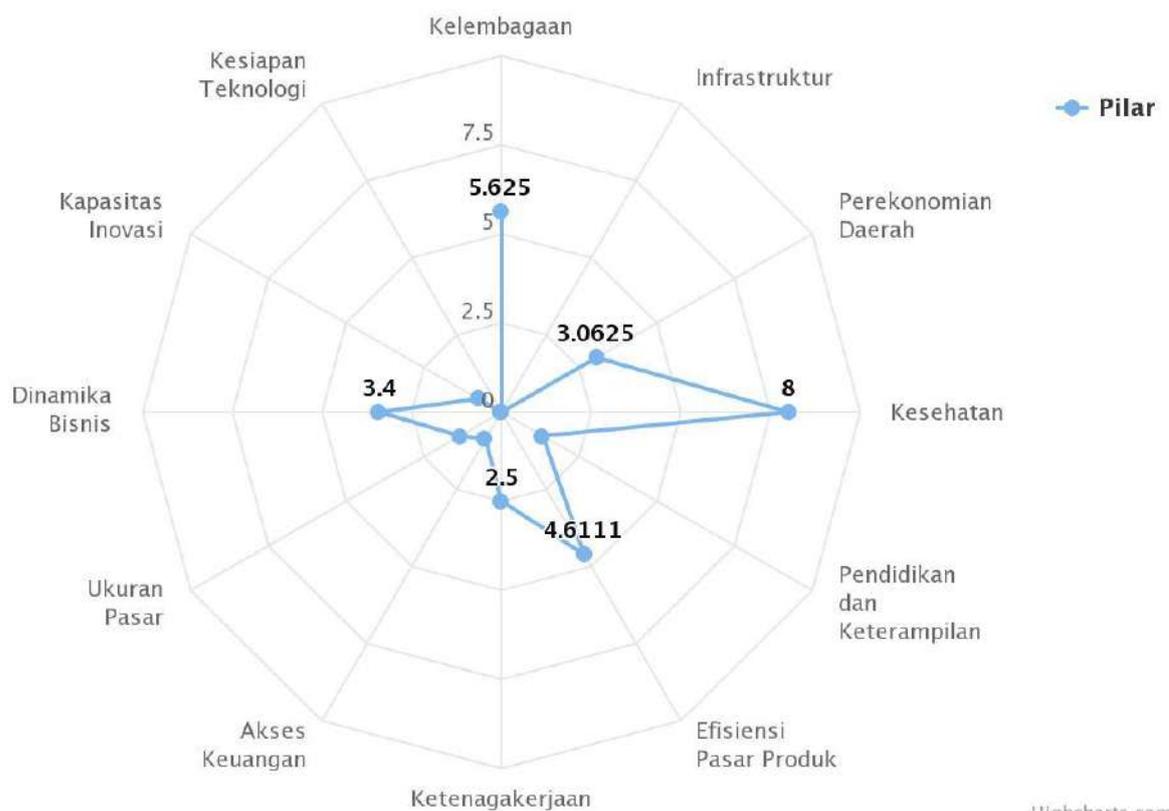
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3,11290**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Infrakstruktur

KABUPATEN JOMBANG



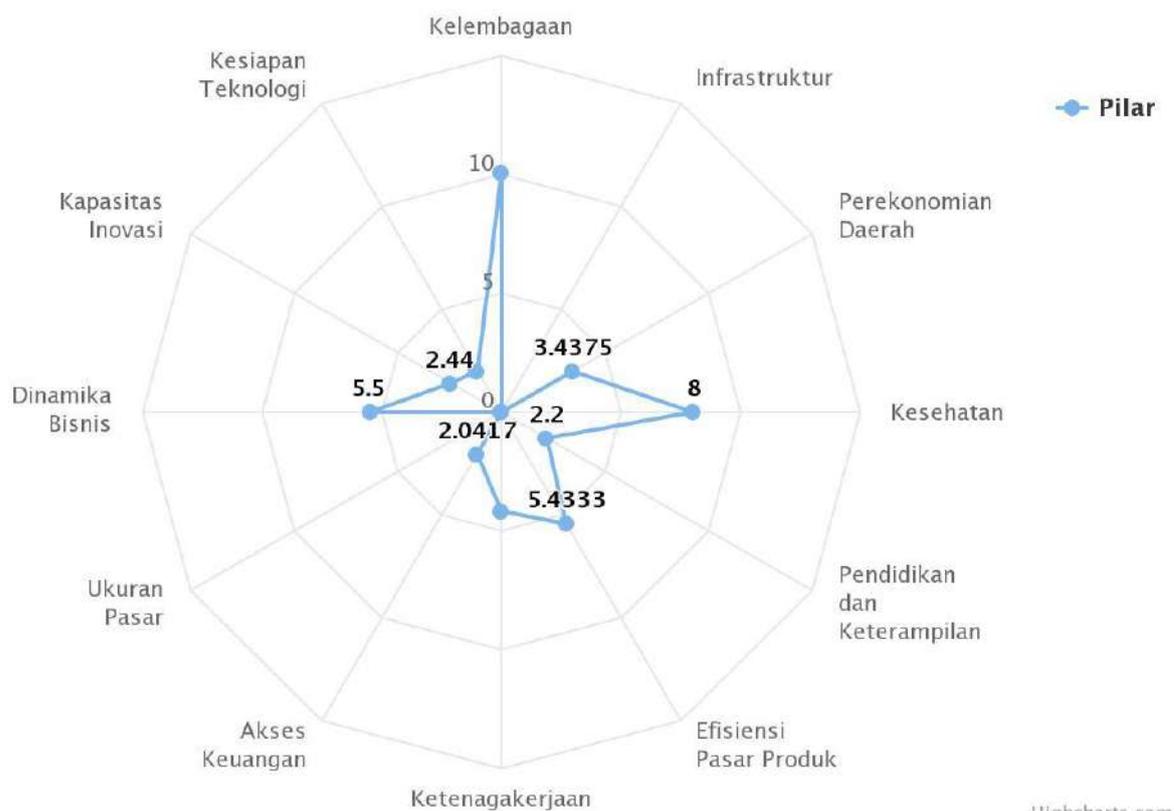
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,12540**

**KATEGORI :
TINGGI**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Infrakstruktur

KABUPATEN MADIUN



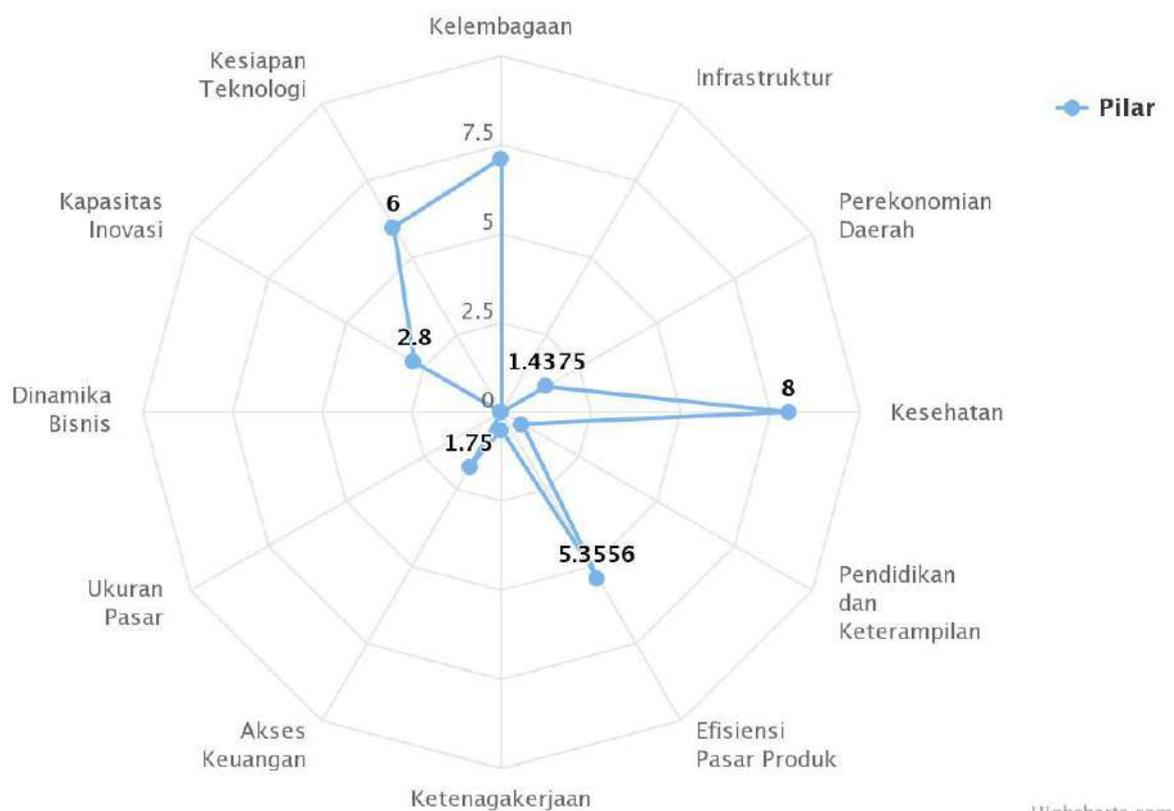
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3,27510**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

KABUPATEN MAGETAN



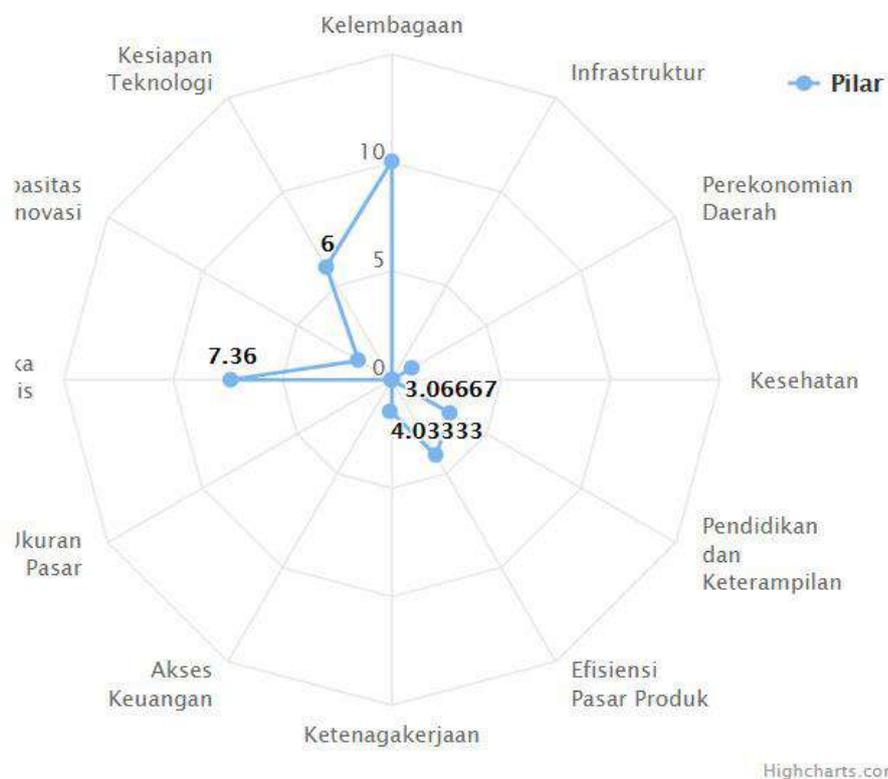
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
2,70900**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kelembagaan

KABUPATEN NGAWI



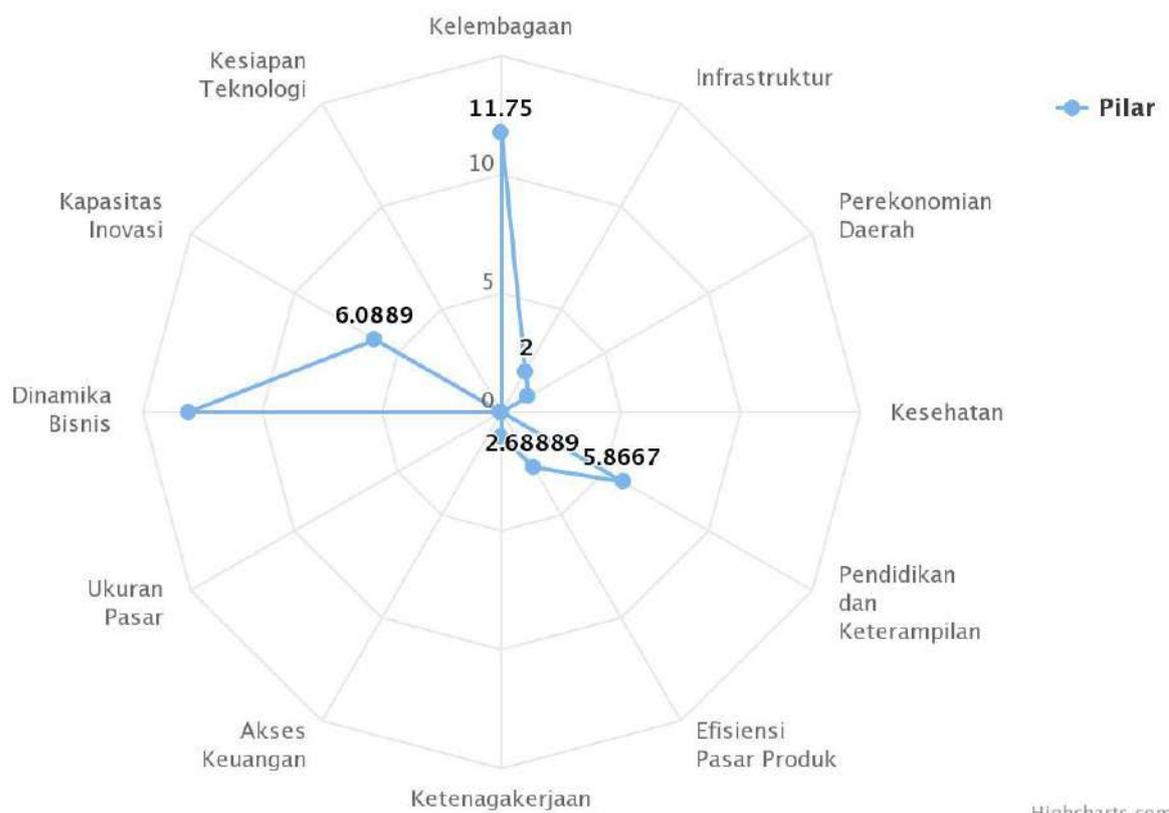
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3.70831**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Dinamika Bisnis
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KABUPATEN LAMONGAN



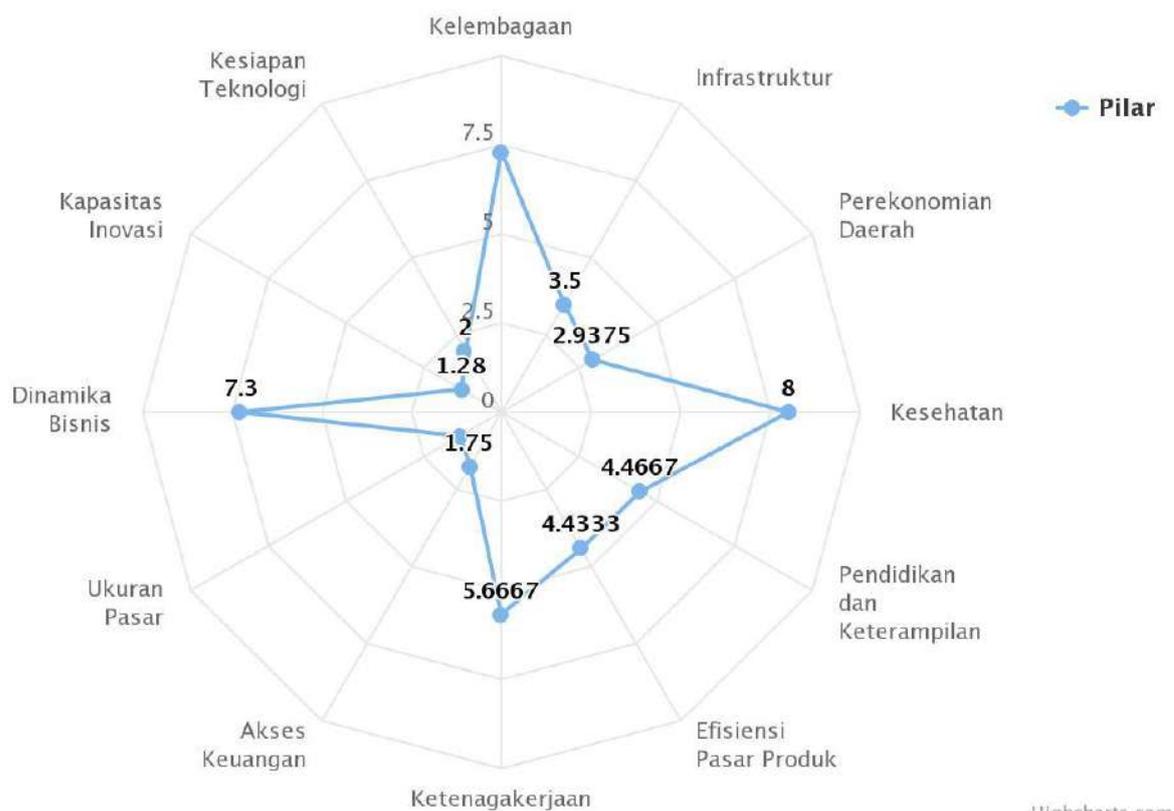
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,72170**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kapasitas Inovasi

KABUPATEN JEMBRANA



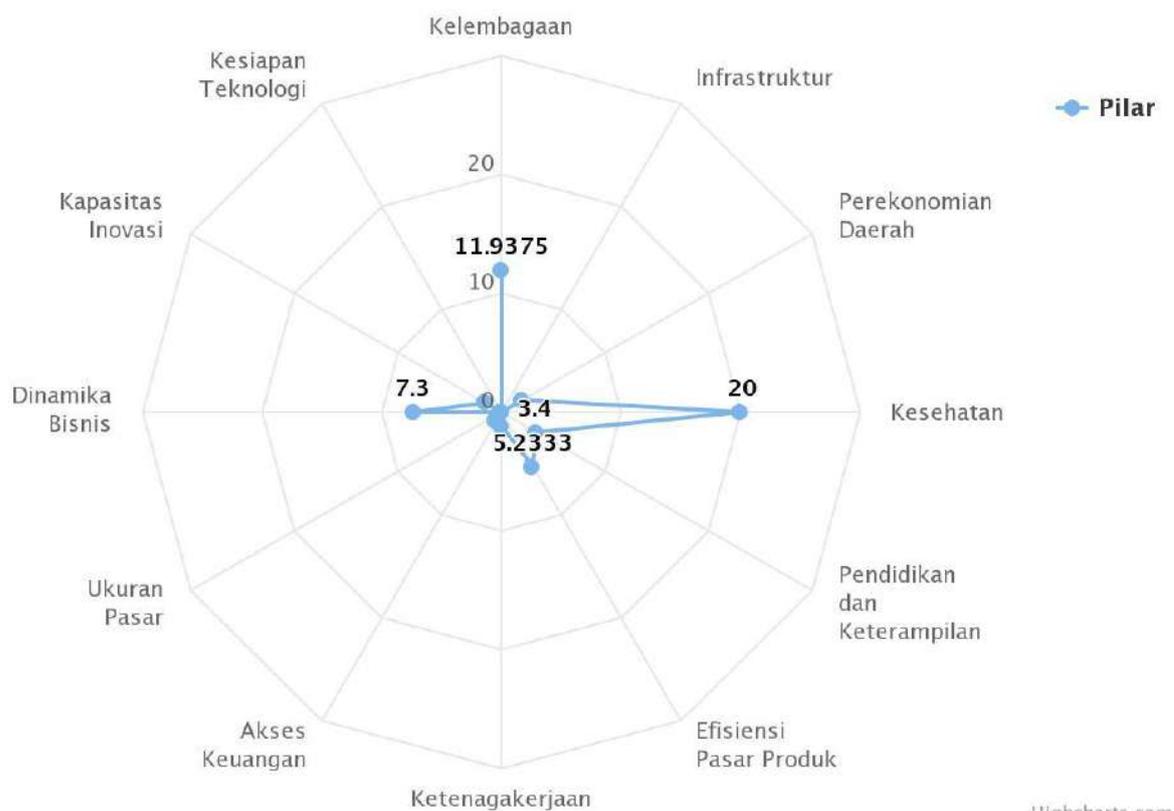
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
6,48171**

**KATEGORI :
TINGGI**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

KABUPATEN TABANAN



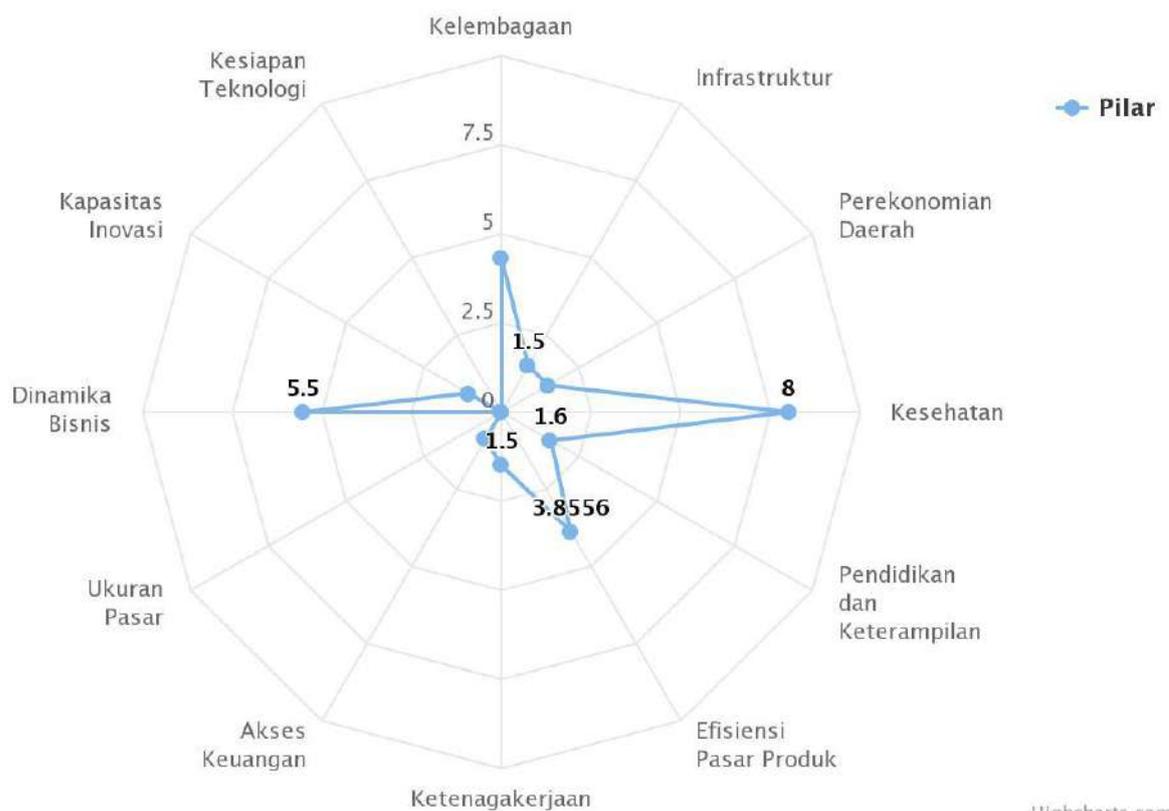
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3,14440**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesiapan Teknologi

KABUPATEN BADUNG



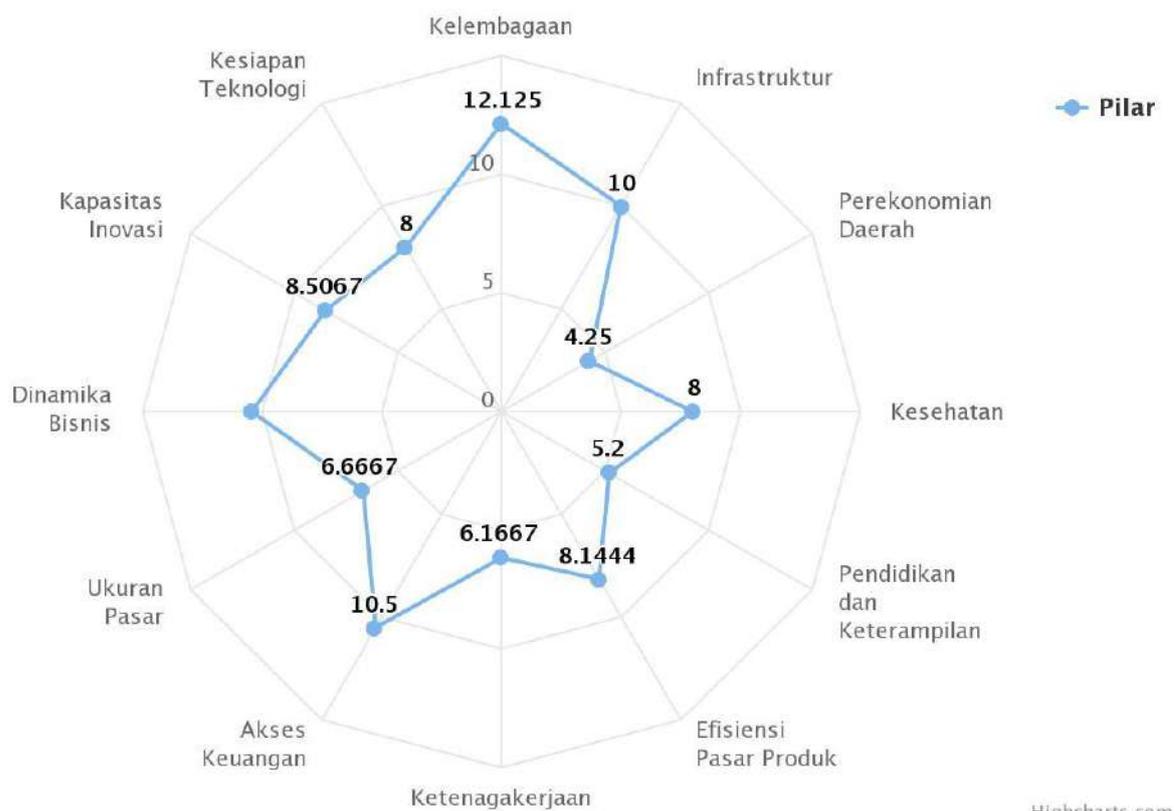
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
7,77820**

**KATEGORI :
TINGGI**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Perekonomian Daerah

KABUPATEN GIANYAR



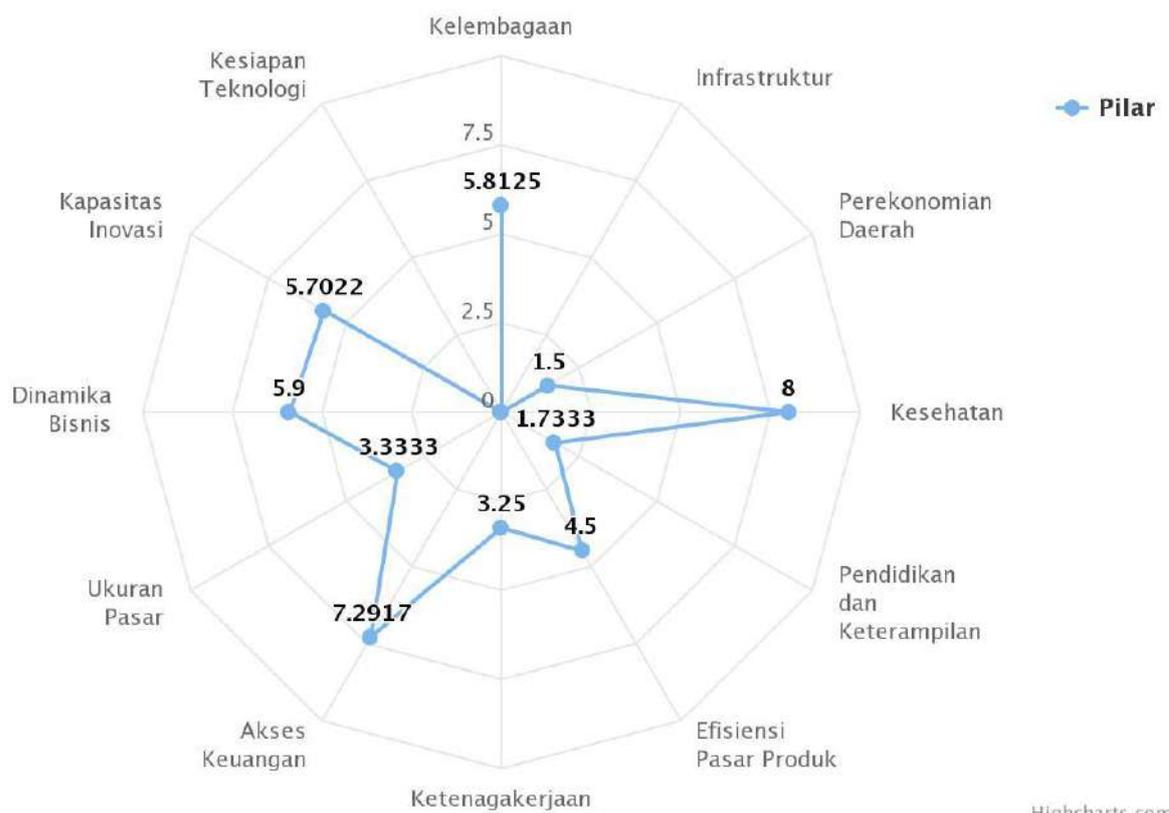
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,19790**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Infrastruktur

KABUPATEN KLUNGKUNG



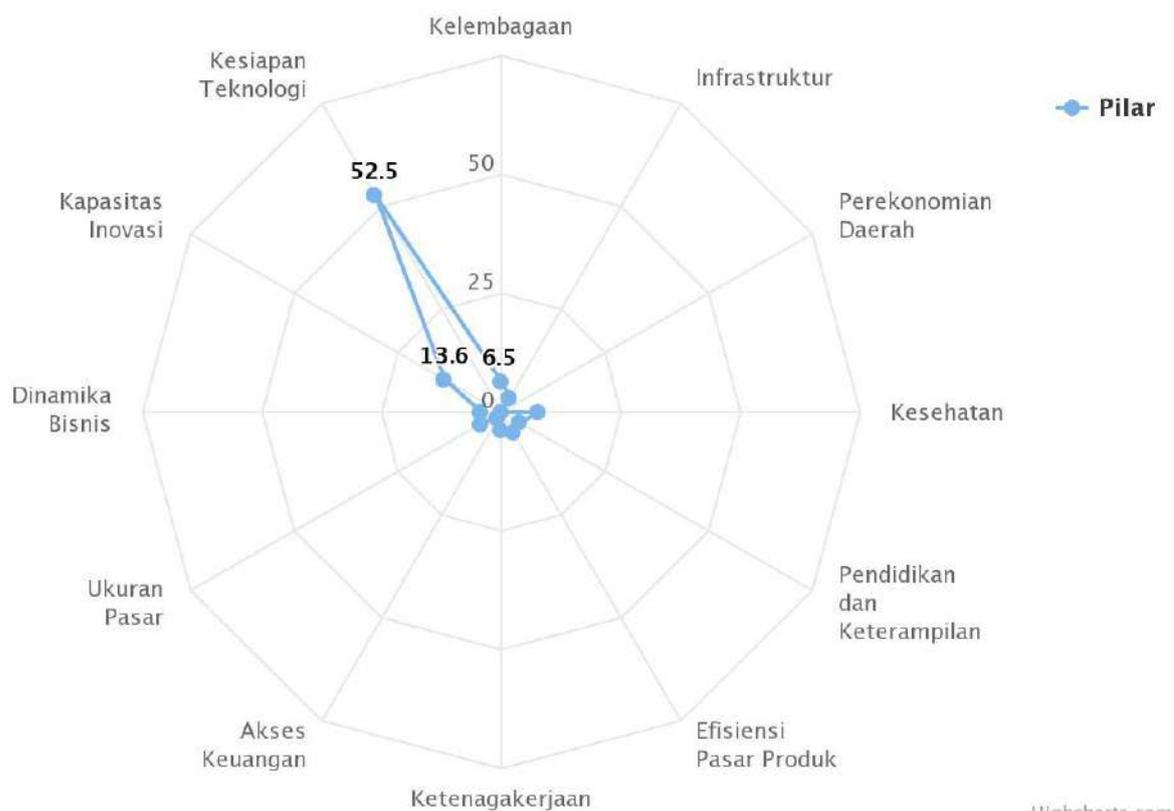
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
5,22740**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesiapan Teknologi
2. Kondisi paling rendah pada pilar Perekonomian Daerah

KABUPATEN BANGLI



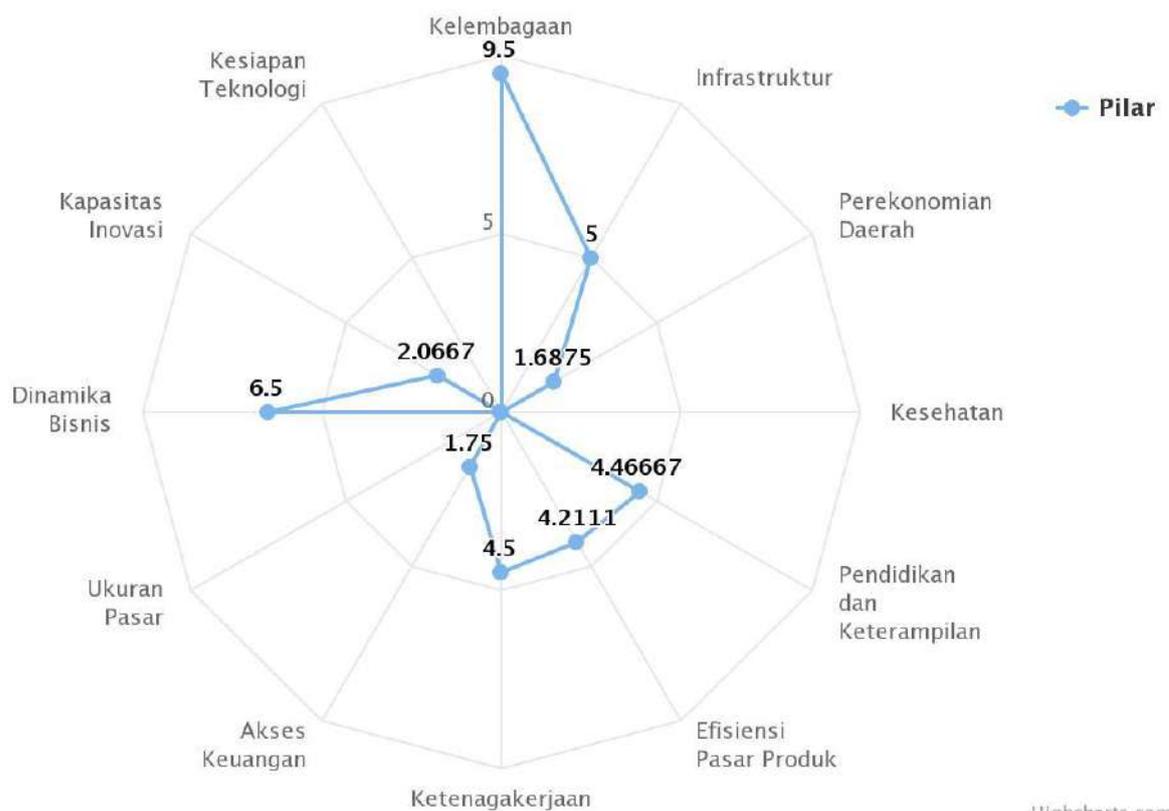
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3,27299**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesiapan Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KABUPATEN KARANG ASEM



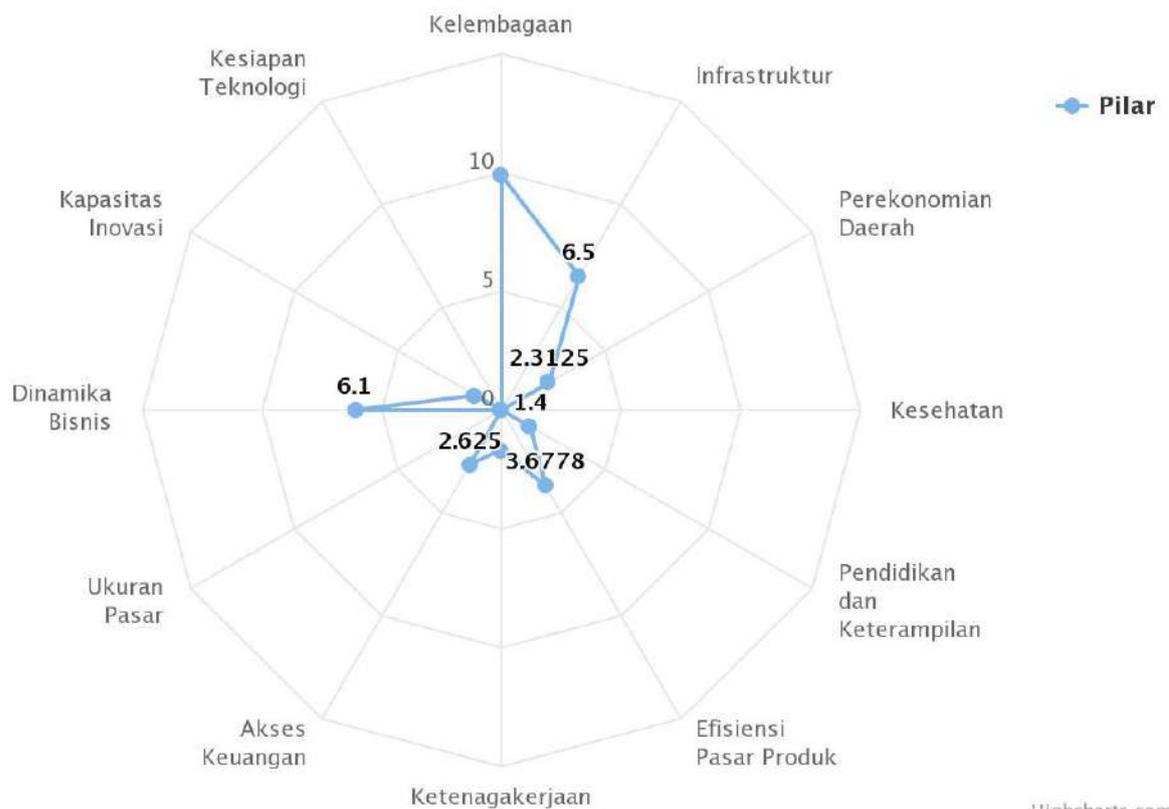
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
2,22600**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KABUPATEN BULELENG



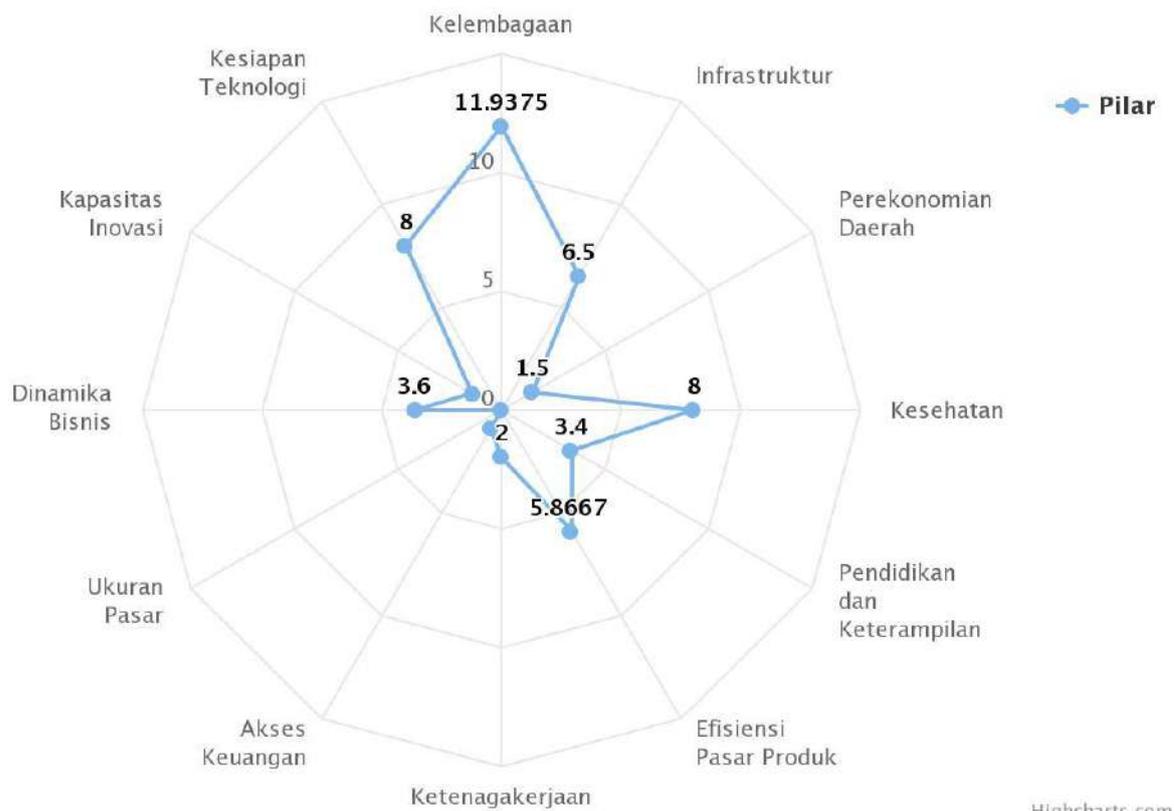
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,79950**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesiapan Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

KABUPATEN SUMBAWA

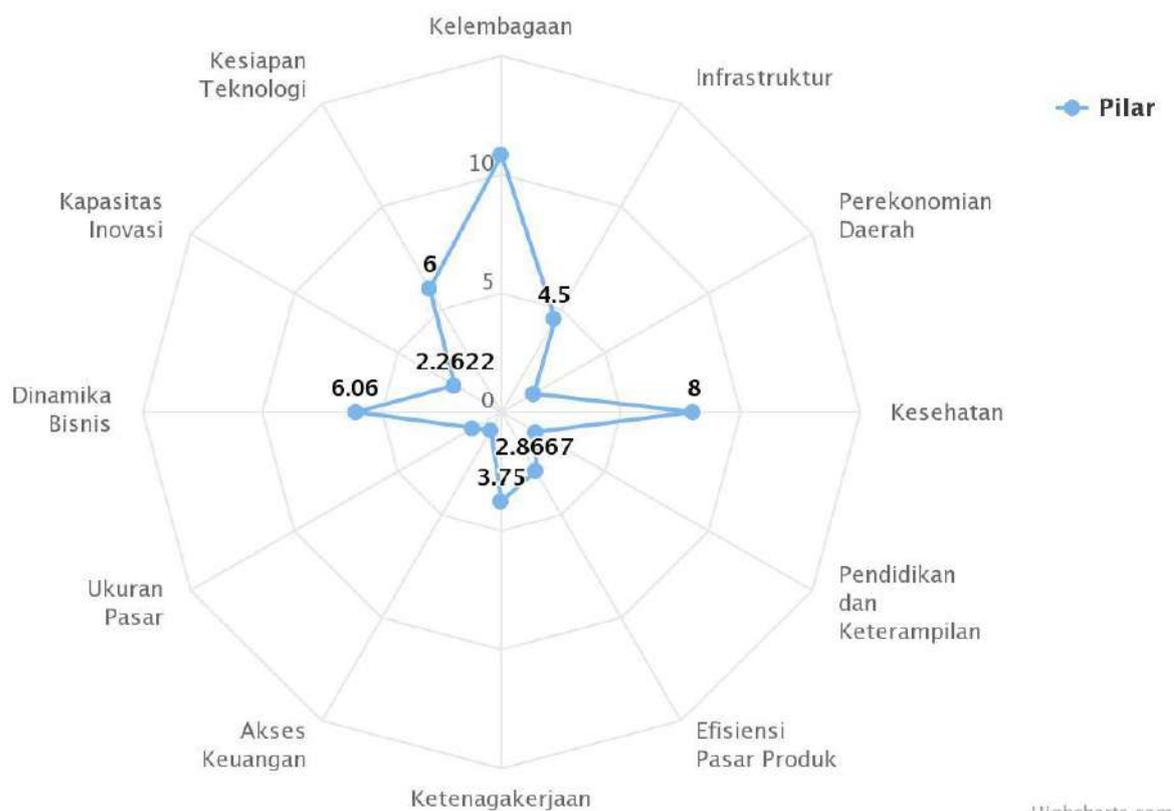


**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,41190**

**KATEGORI :
SEDANG**

Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesiapan Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Akses Keuangan

KABUPATEN ENDE



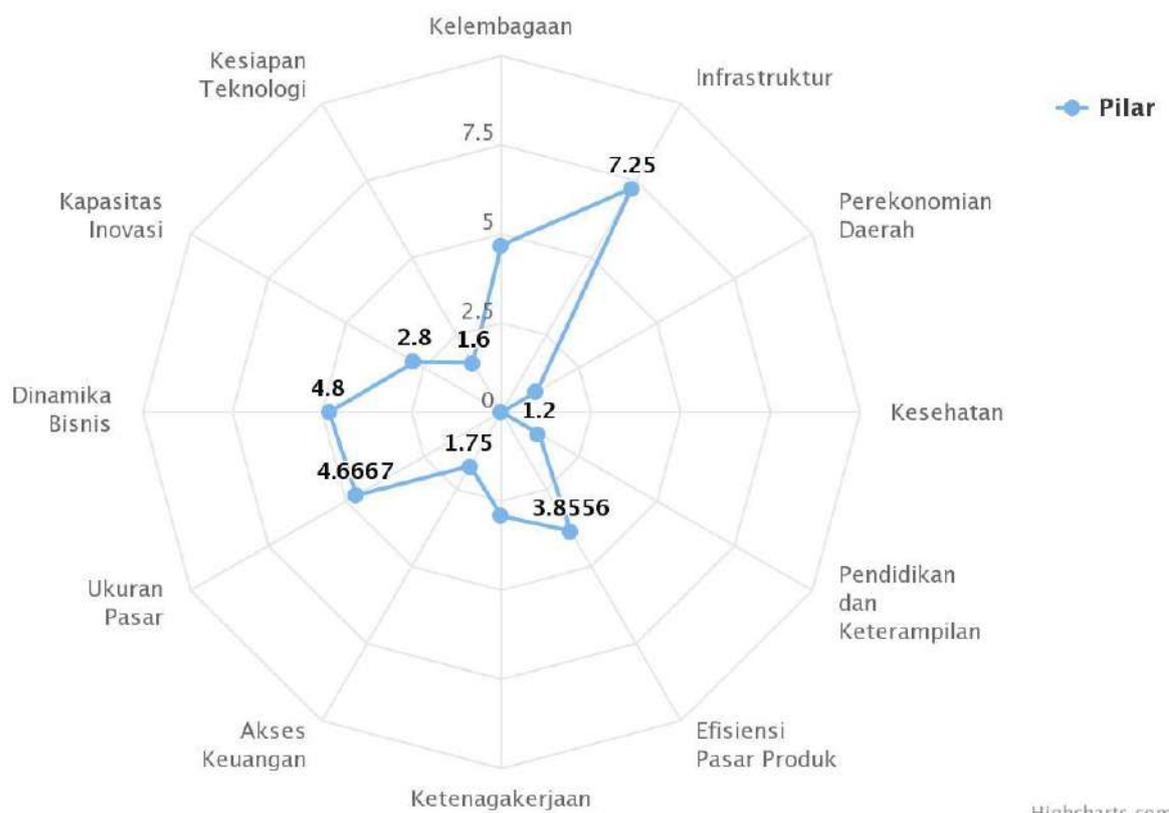
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
2,31920**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Infrastruktur
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

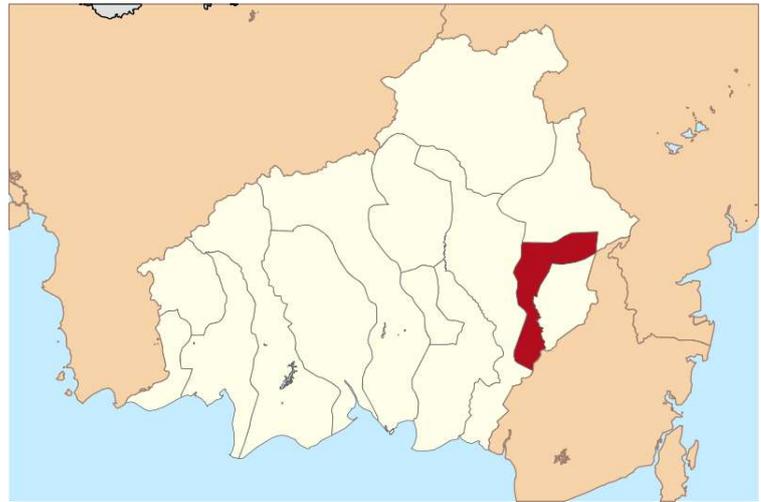
KABUPATEN BARITO SELATAN



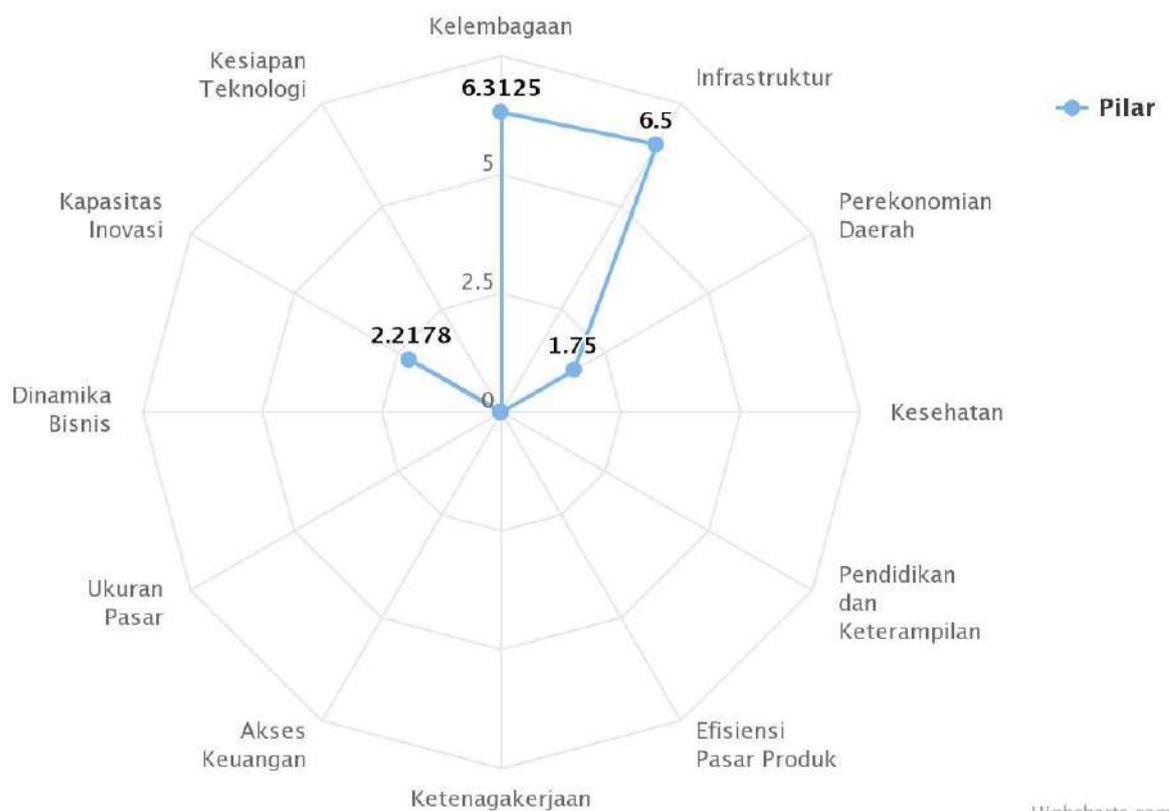
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
0,91290**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Infrastruktur
2. Kondisi paling rendah pada pilar Akses Keuangan

KABUPATEN LAMANDAU



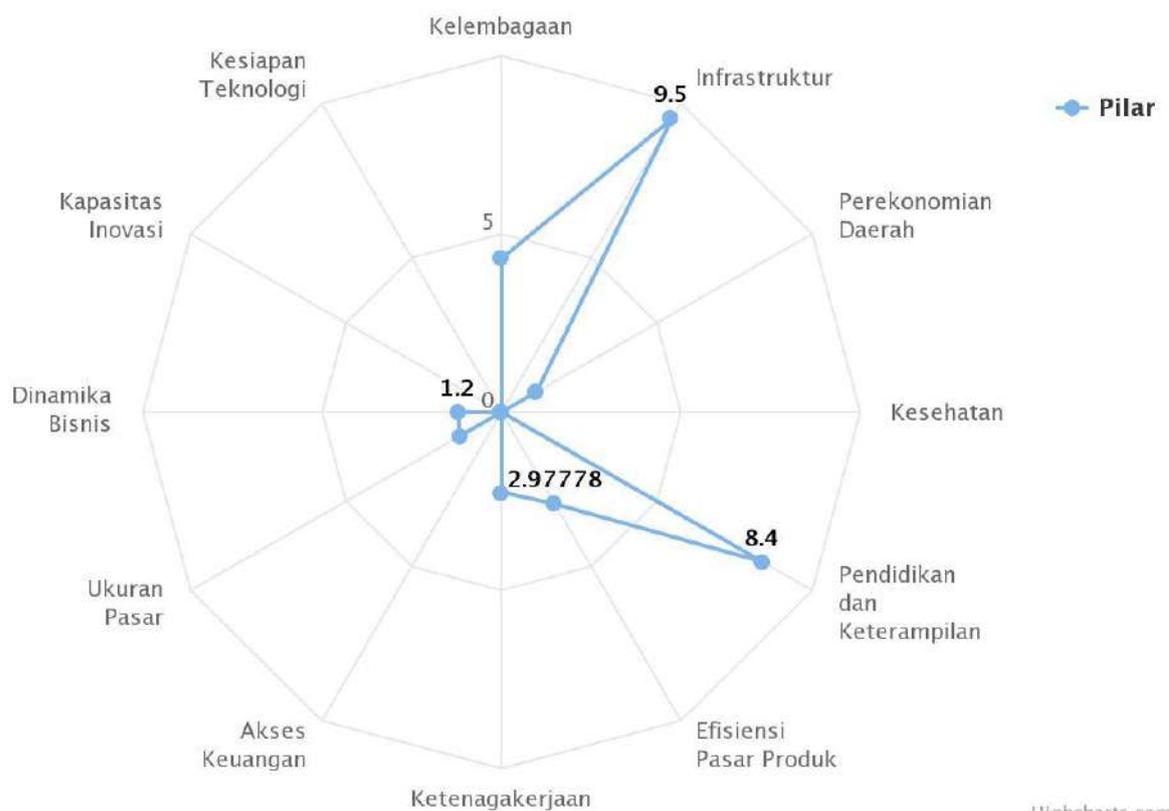
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
2,85493**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Infrastruktur
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kapasitas Inovasi

KABUPATEN PASER



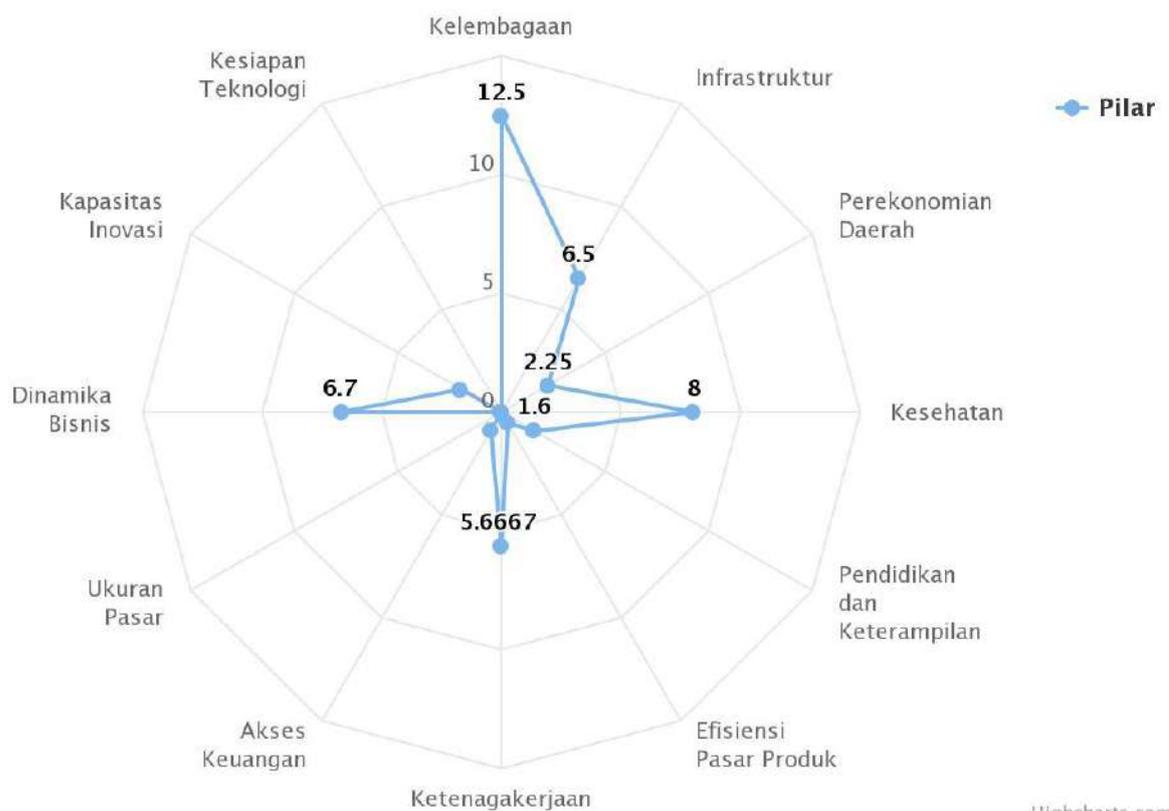
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3,81630**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesiapan Teknologi

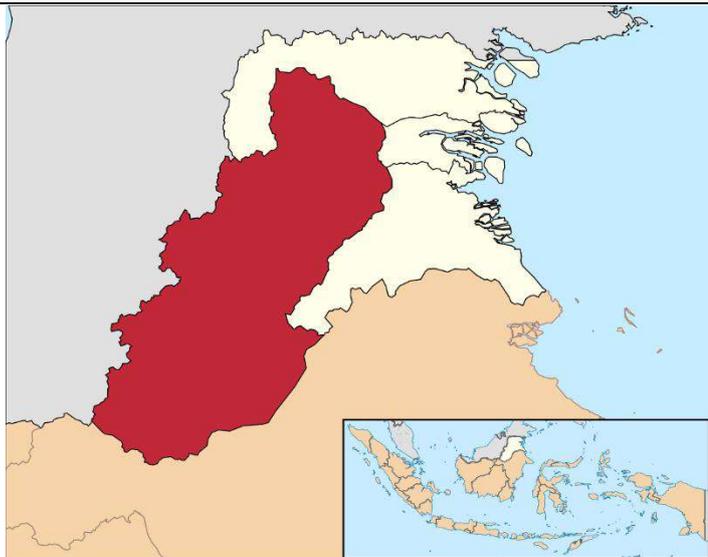
KABUPATEN MALINAU



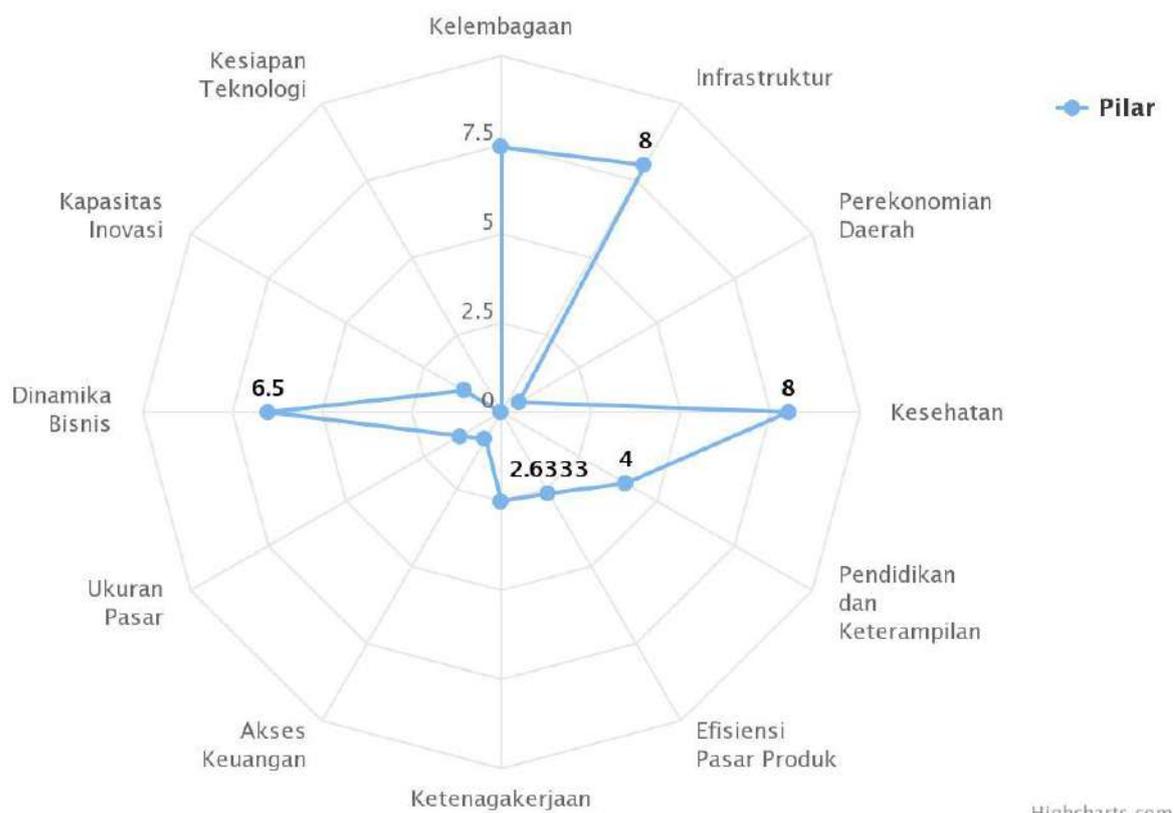
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,20950**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Infrastruktur dan Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesiapan Teknologi

KABUPATEN BULUNGAN



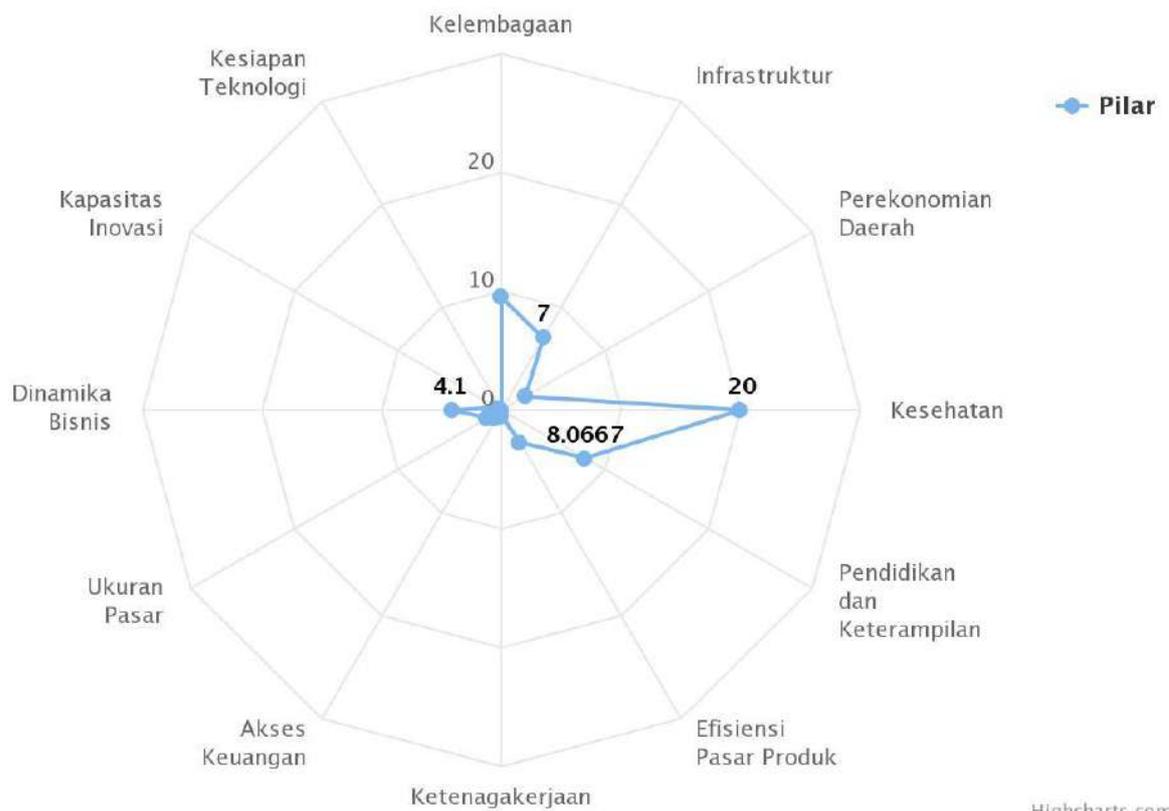
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
7,22440**

**KATEGORI :
TINGGI**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesiapan Teknologi

KABUPATEN TANA TIDUNG



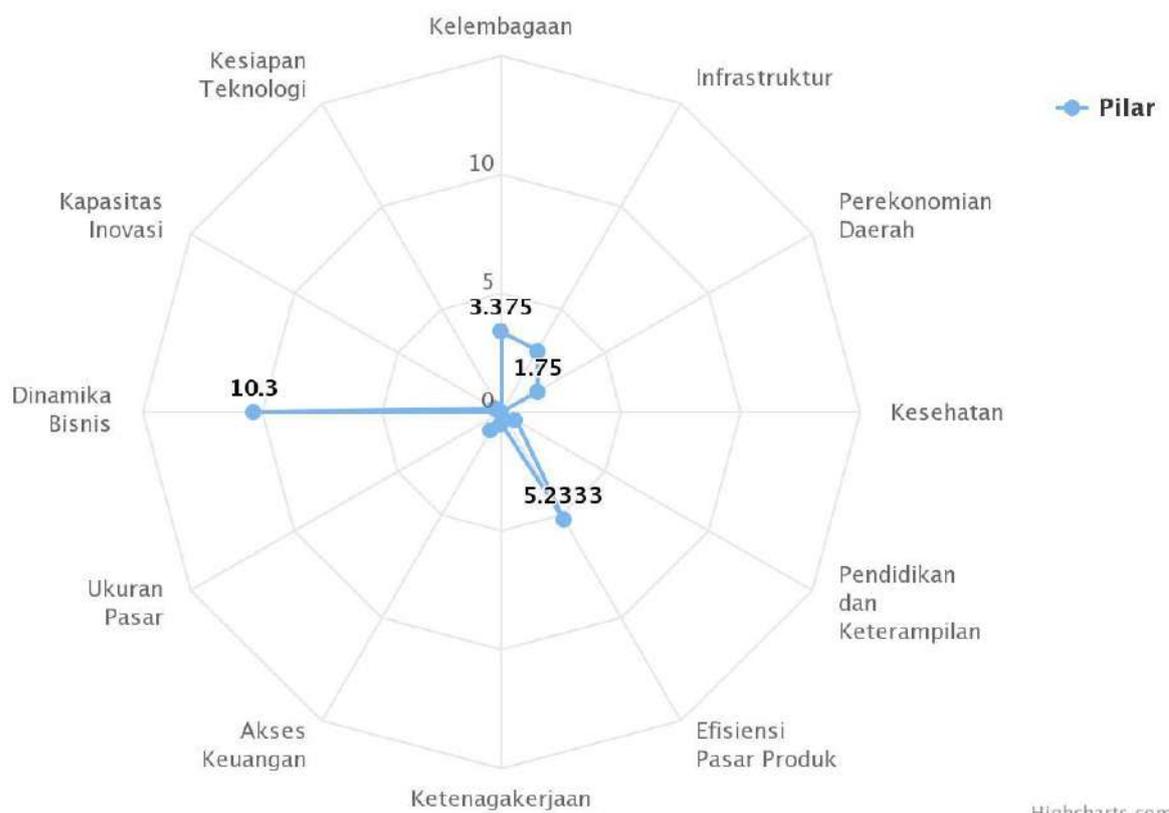
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
1,76390**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Dinamika Bisnis
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



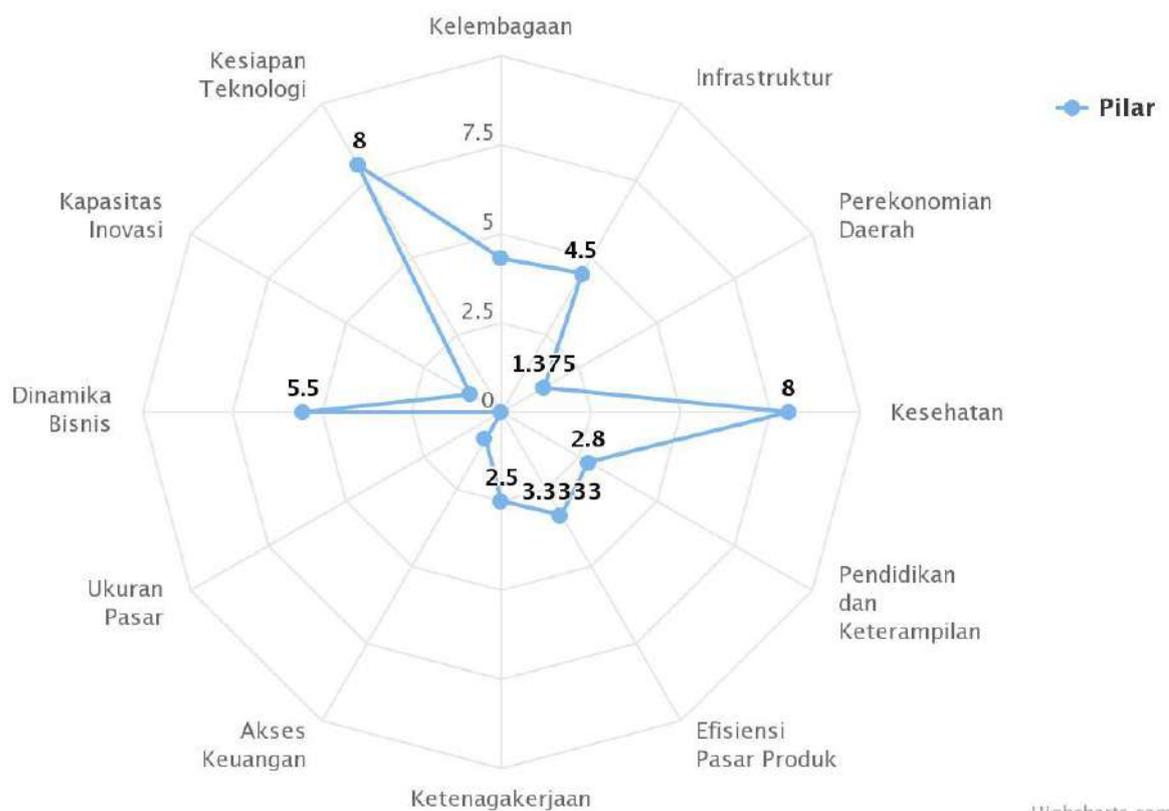
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,21280**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan dan Kesiapan Teknologi
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD



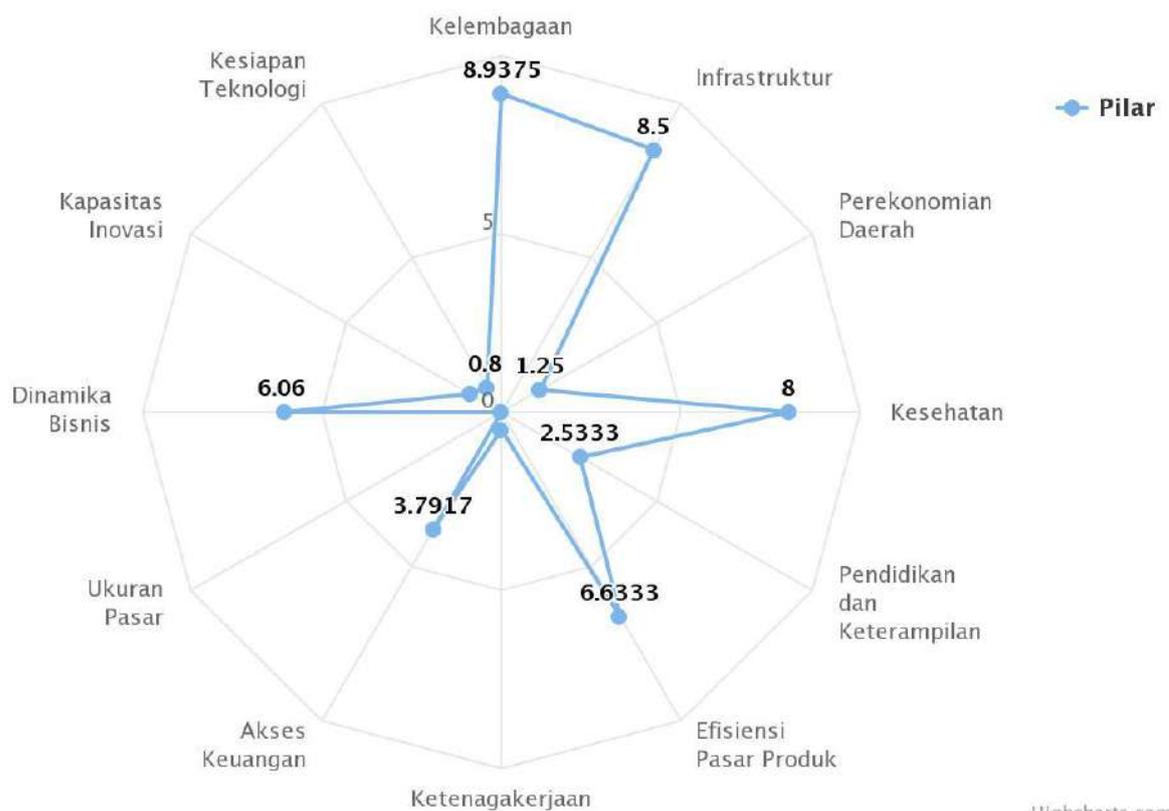
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,24380**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

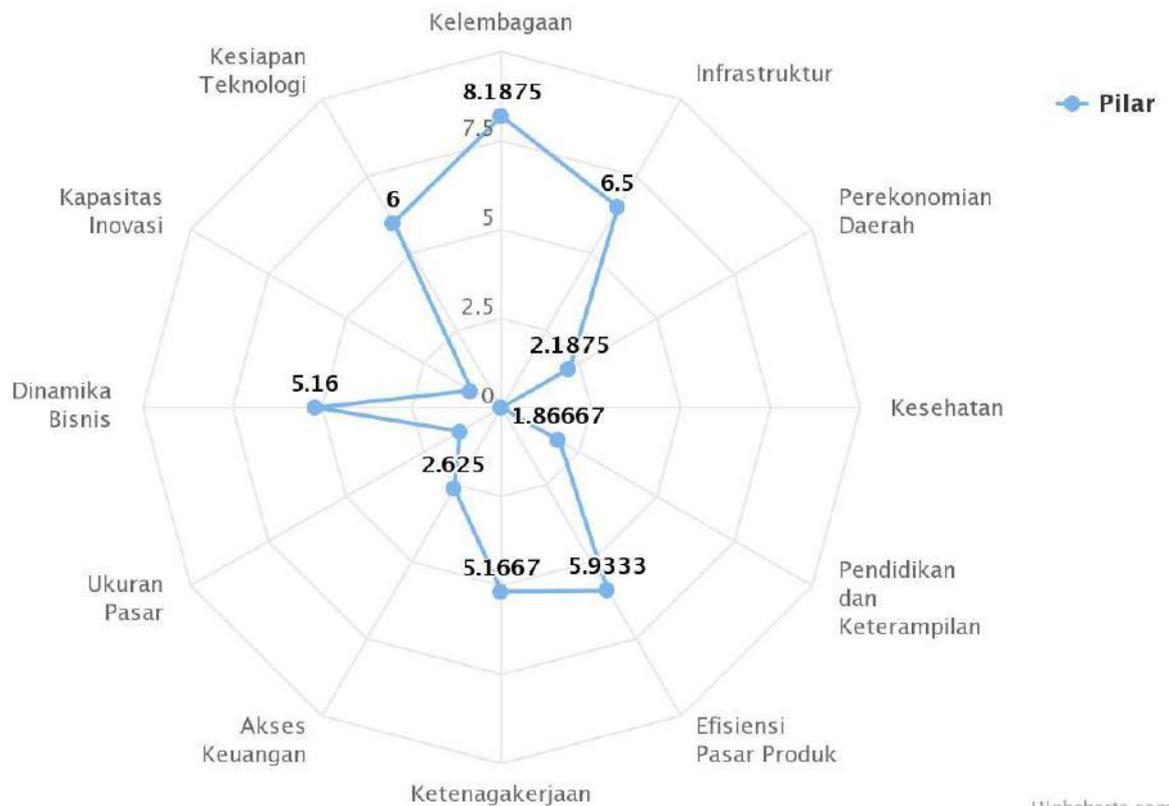


**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
2,98040**

**KATEGORI :
RENDAH**

Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO

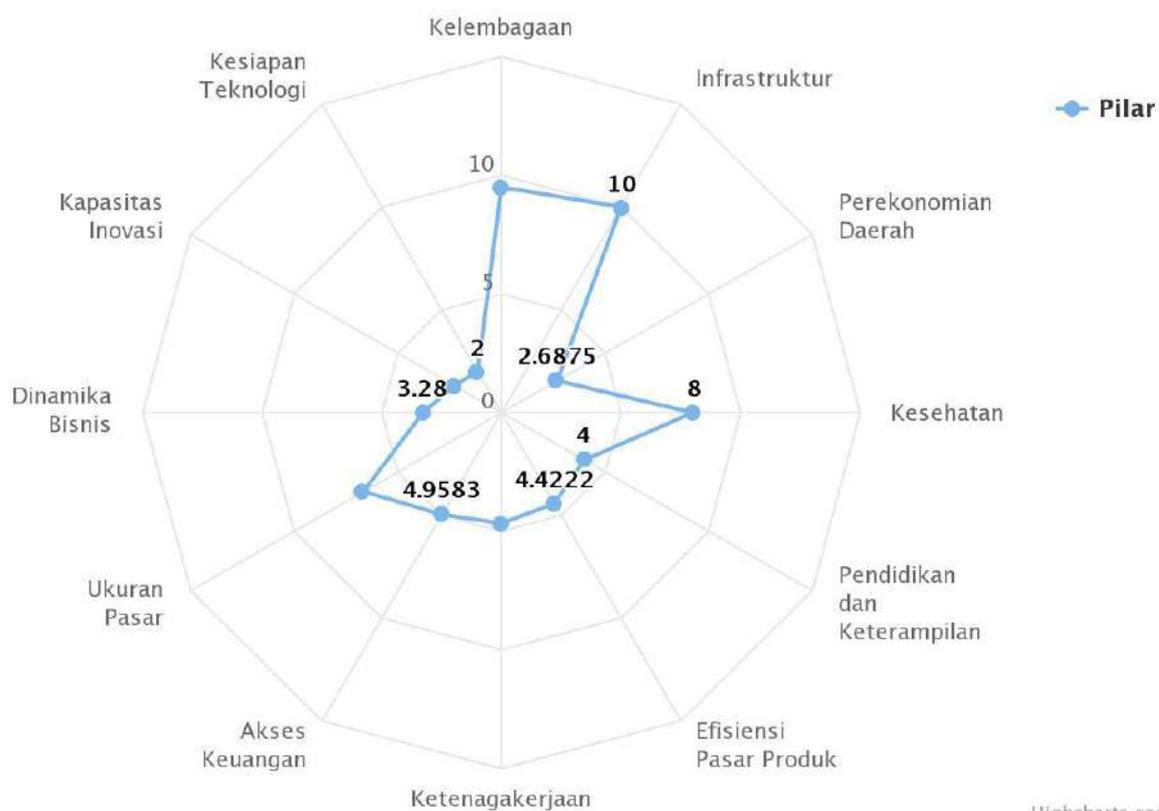


**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
5,17400**

**KATEGORI :
SEDANG**

Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan dan Infrastruktur
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesiapan Teknologi

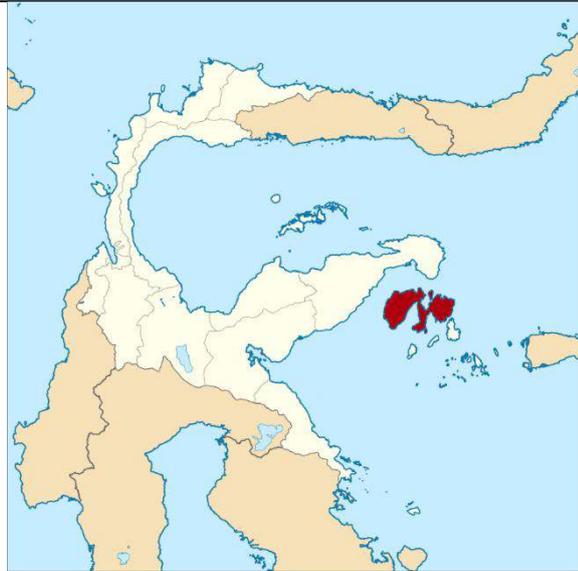
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



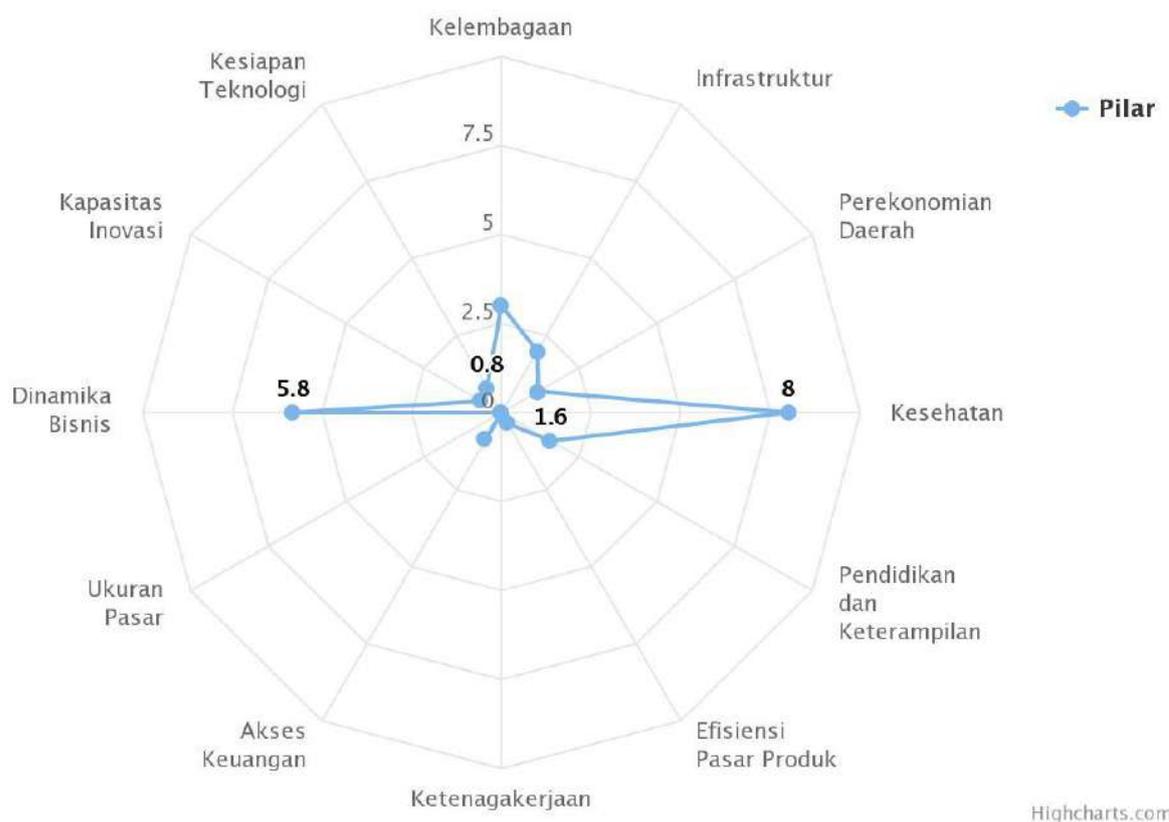
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
2,89420**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

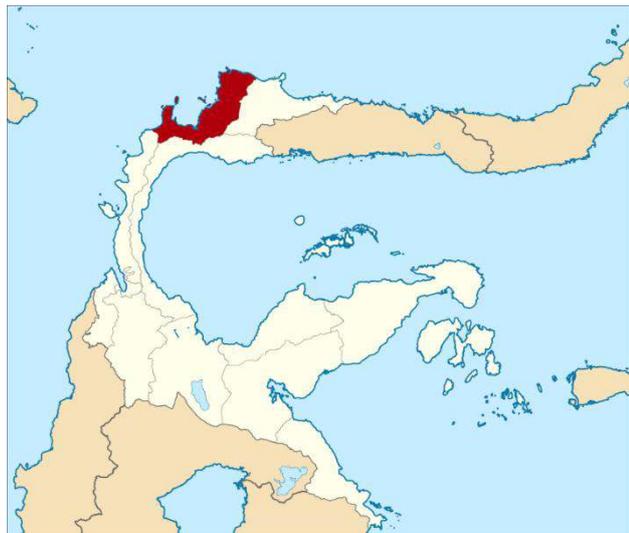
KABUPATEN TOLI TOLI



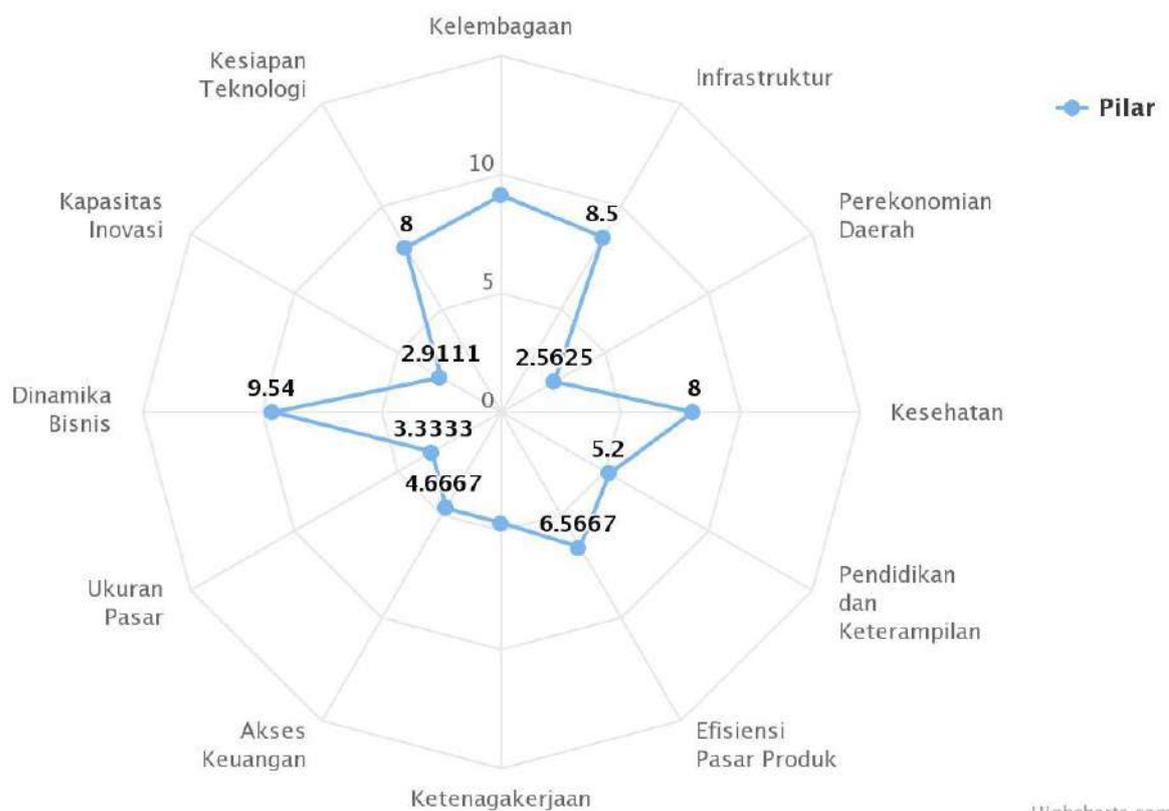
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
6,27160**

**KATEGORI :
TINGGI**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Perekonomian Daerah

KABUPATEN PARIGI MOUTONG



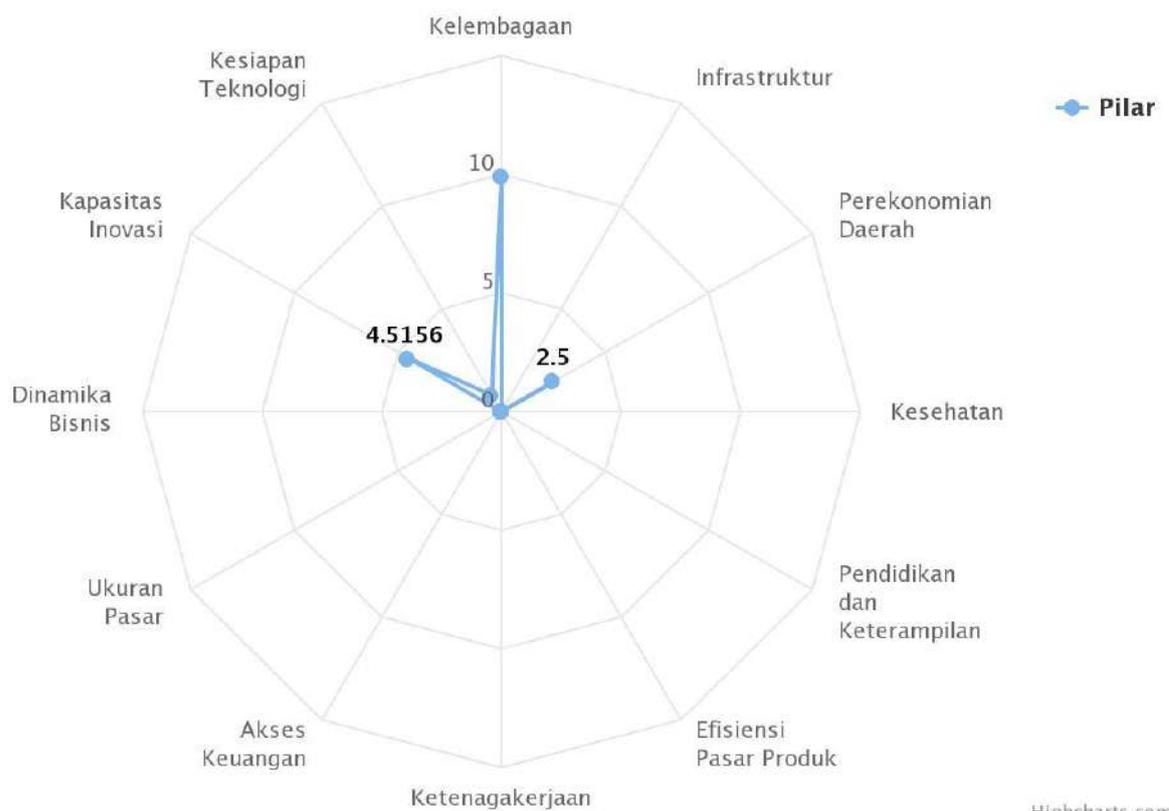
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
1,06170**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Efisiensi Pasar Produk

KABUPATEN TOJO UNA UNA



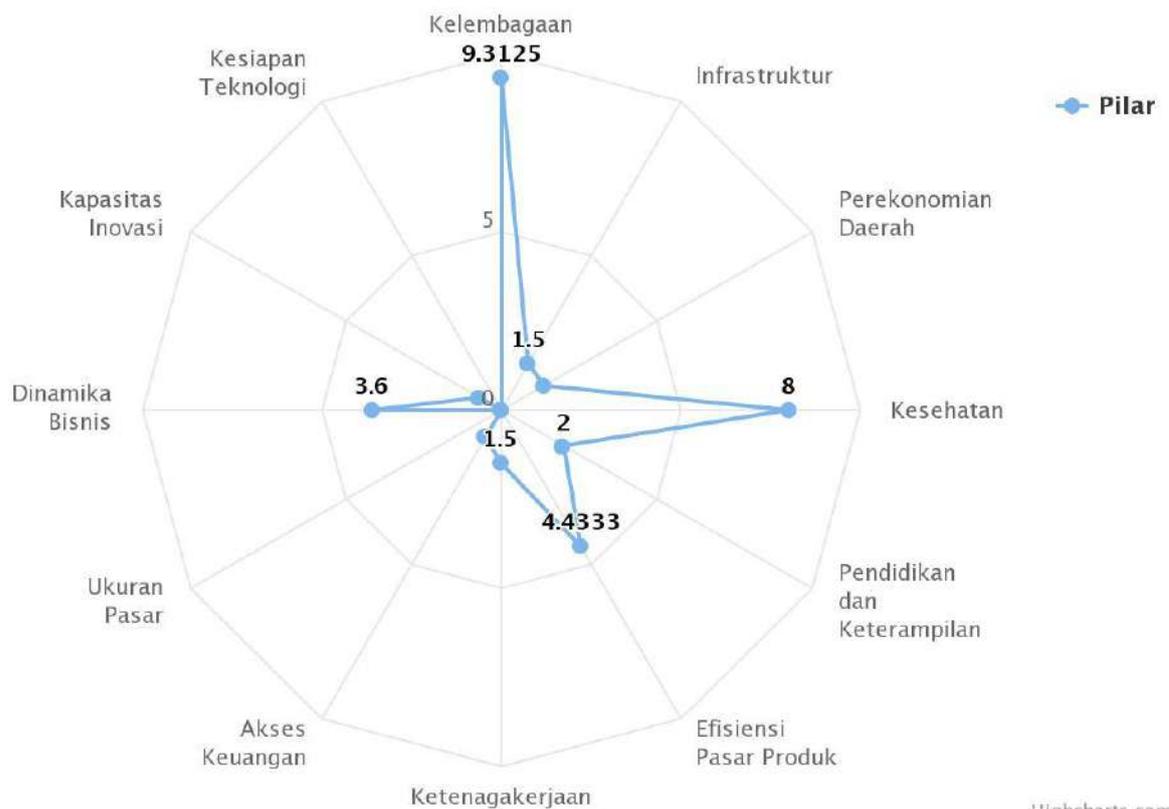
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3,30910**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesiapan Teknologi

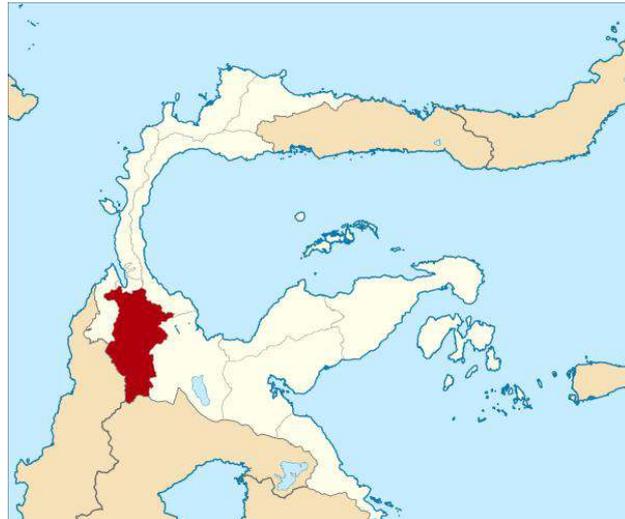
KABUPATEN SIGI



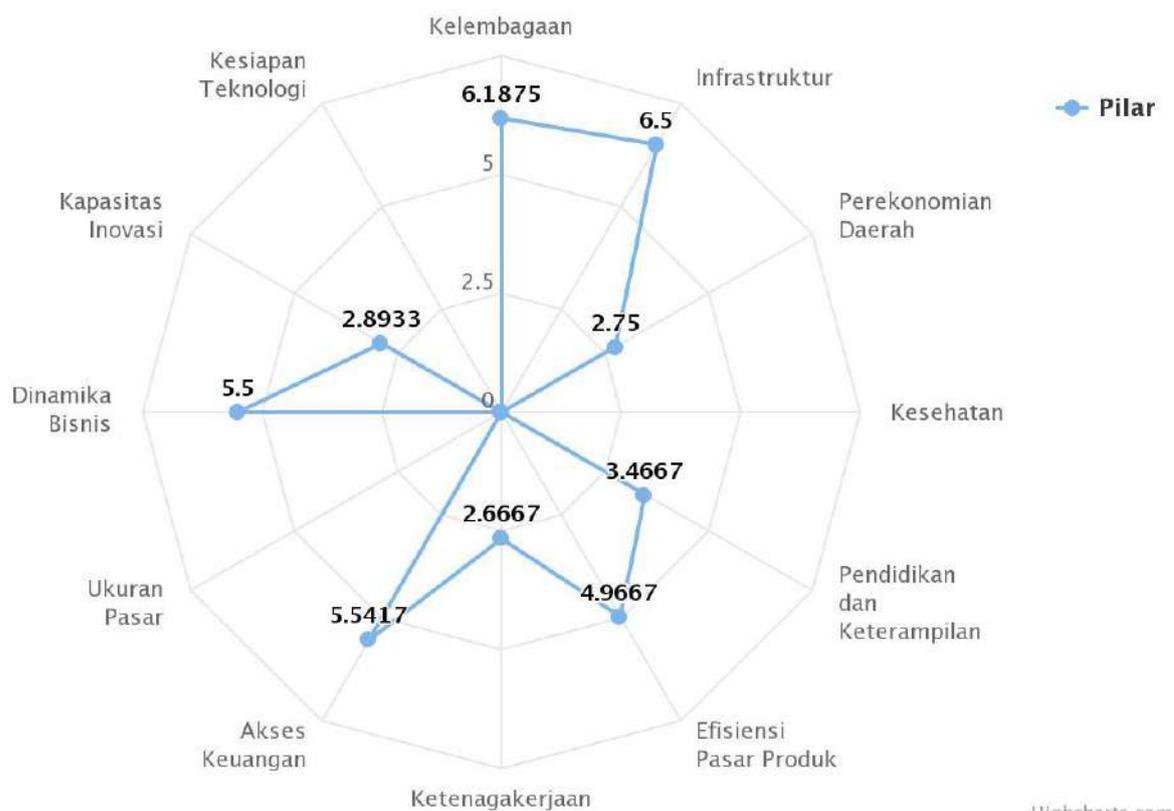
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
2,82340**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Infrastruktur dan Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

KABUPATEN SINJAI



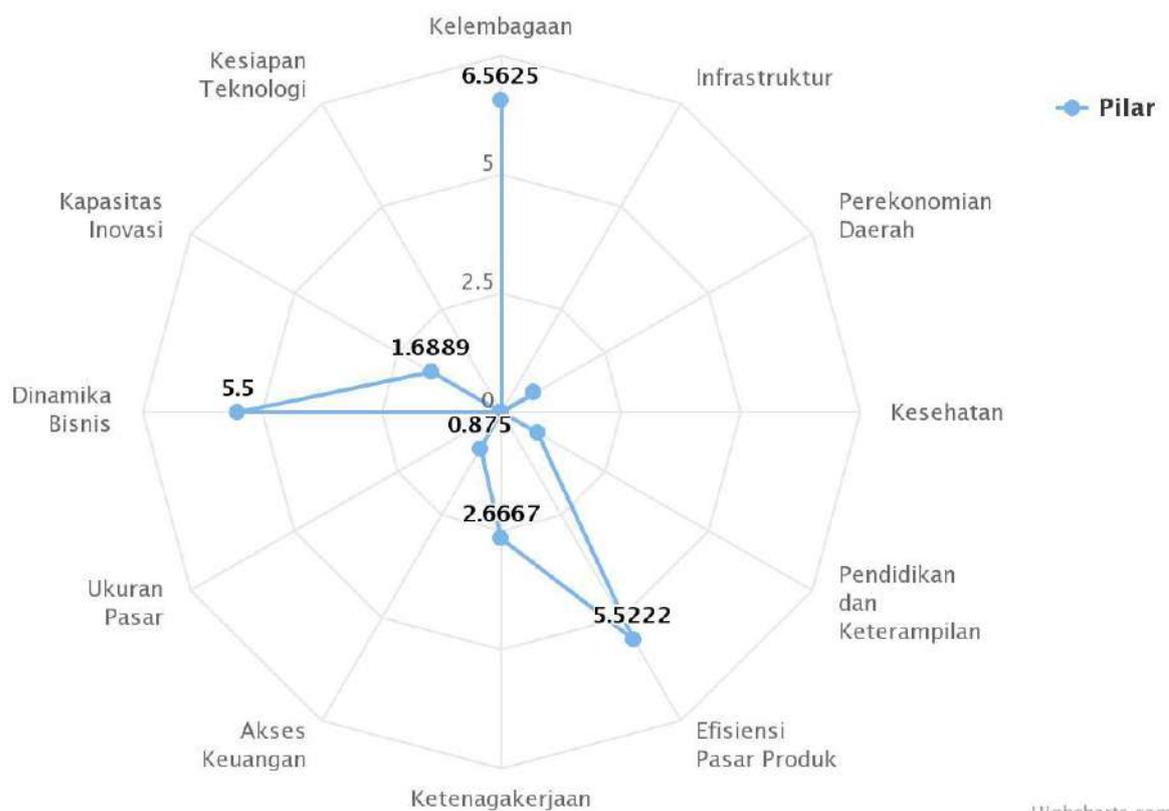
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
2,82340**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KABUPATEN MAROS



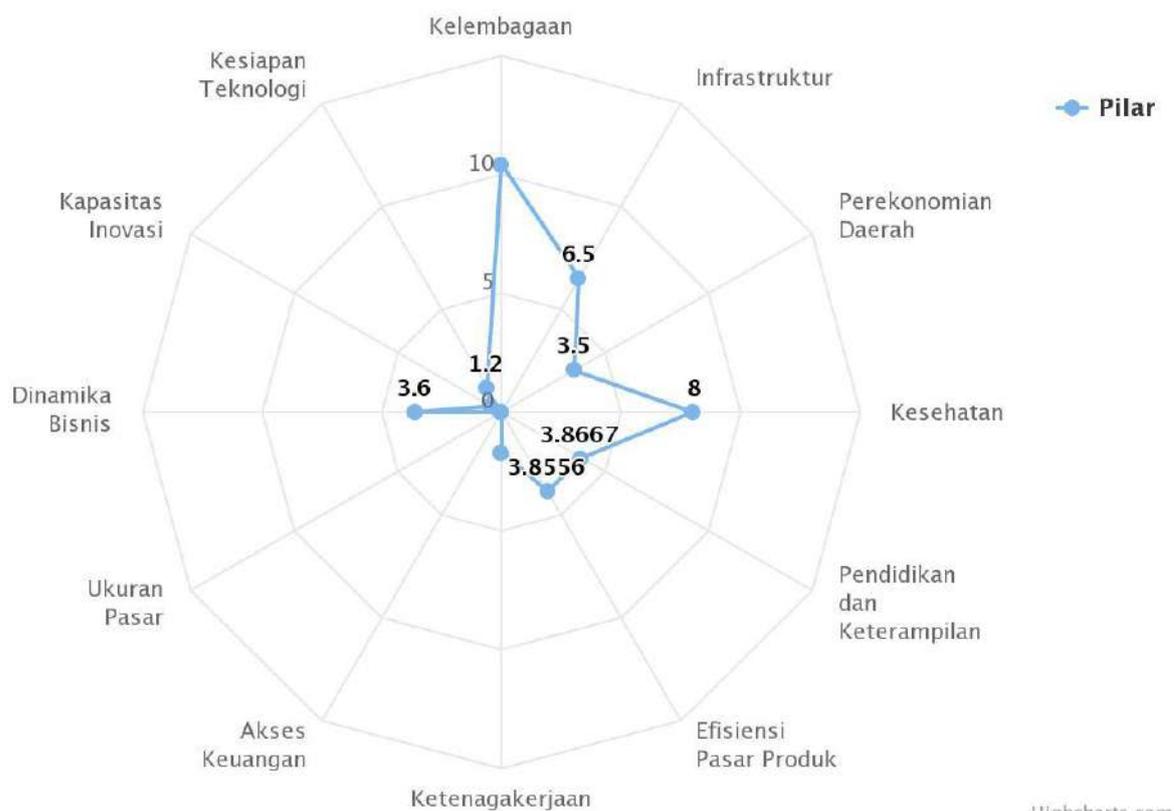
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,11210**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar

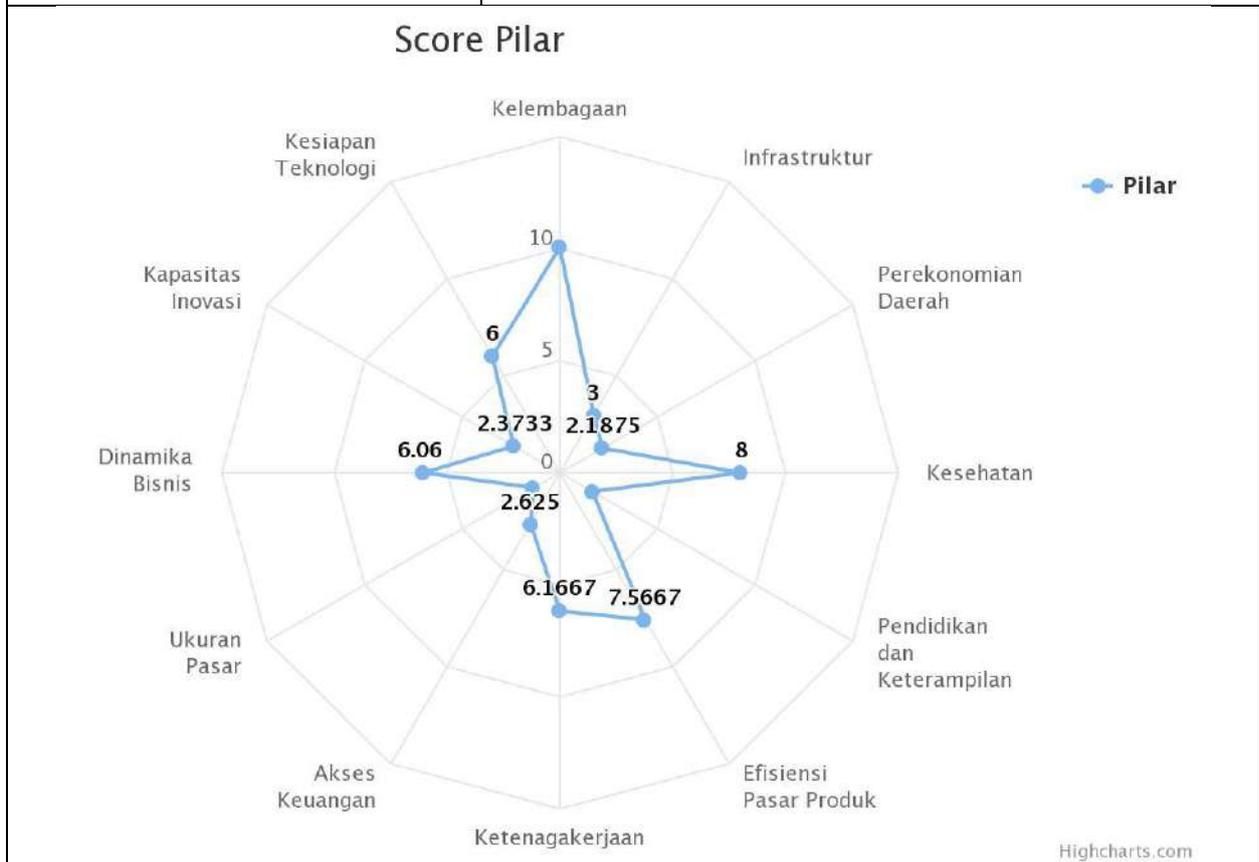


Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

	
<p>TAHUN : 2019</p>	
<p>SKOR/NILAI INDEKS : 4,78320</p>	
<p>KATEGORI : SEDANG</p>	

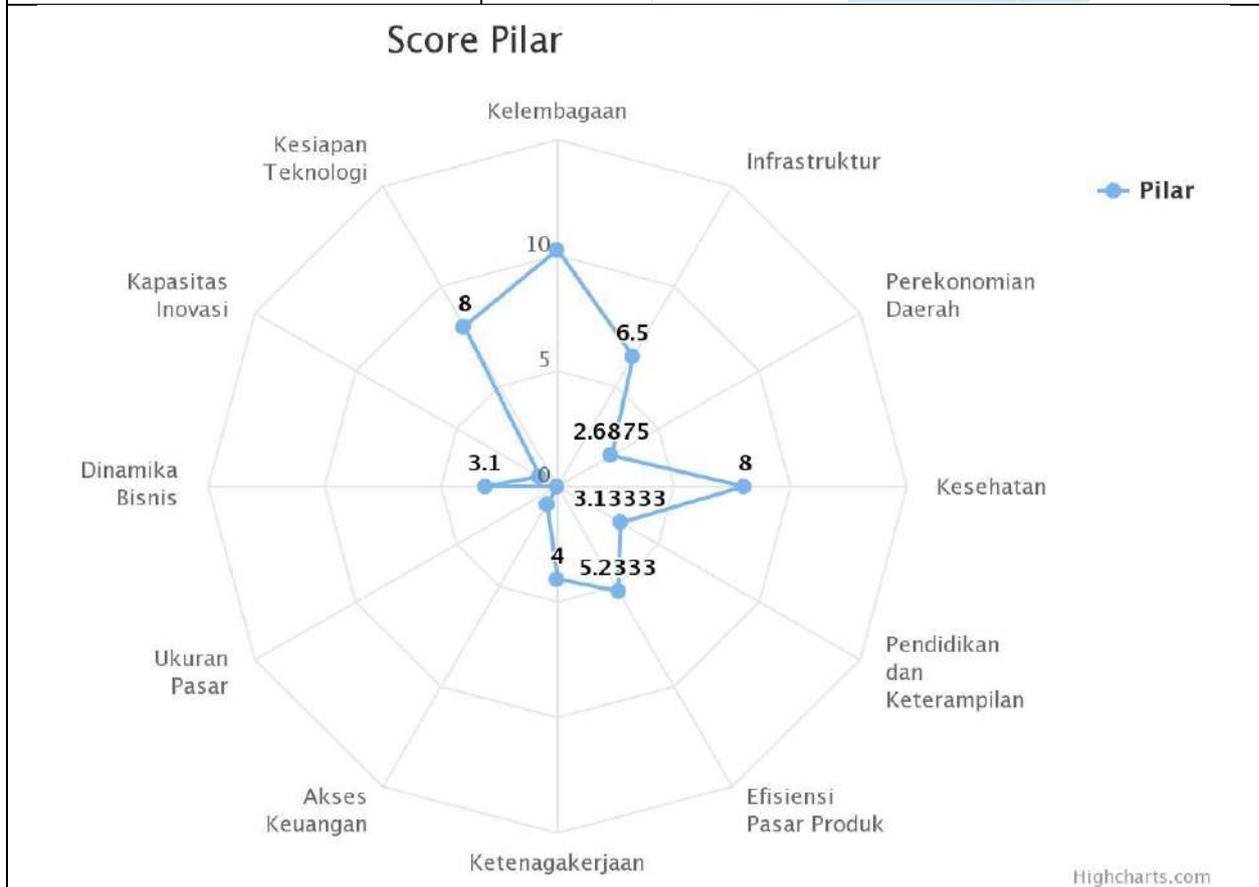


Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

KABUPATEN BARRU

	
<p>TAHUN : 2019</p>	
<p>SKOR/NILAI INDEKS : 4,70080</p>	
<p>KATEGORI : SEDANG</p>	



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

KABUPATEN WAJO



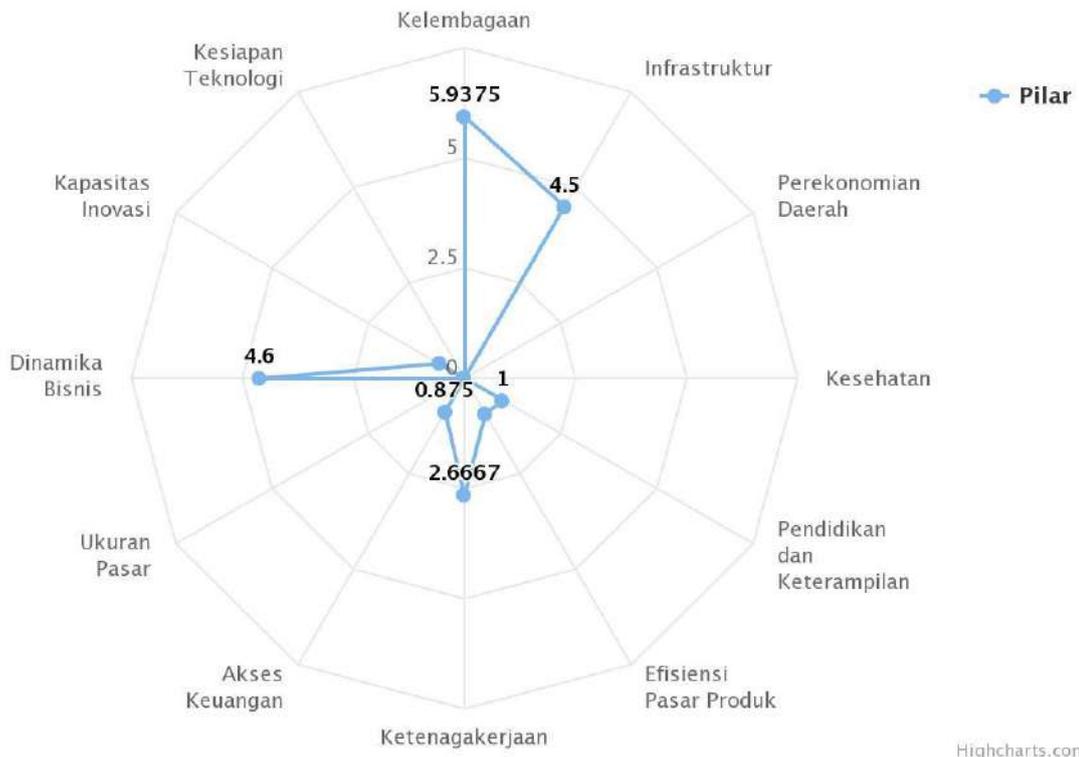
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
1,38410**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



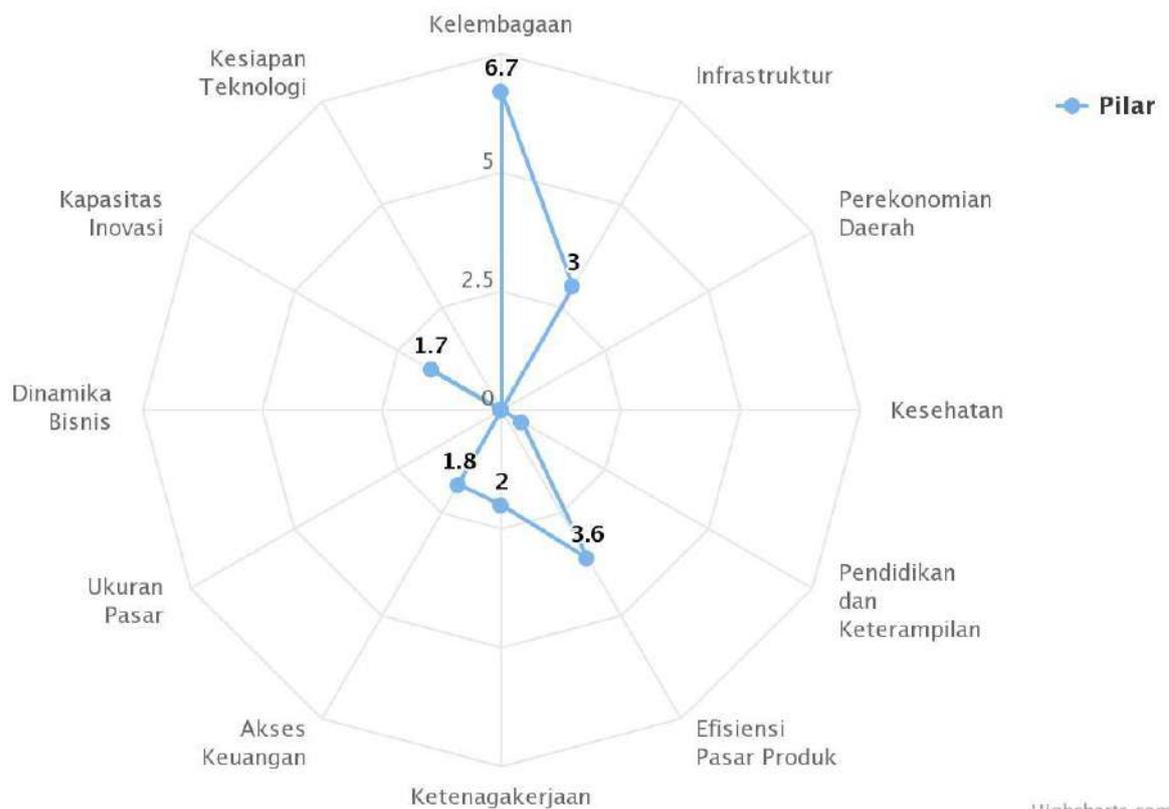
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
1,10410**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

KABUPATEN LUWU UTARA



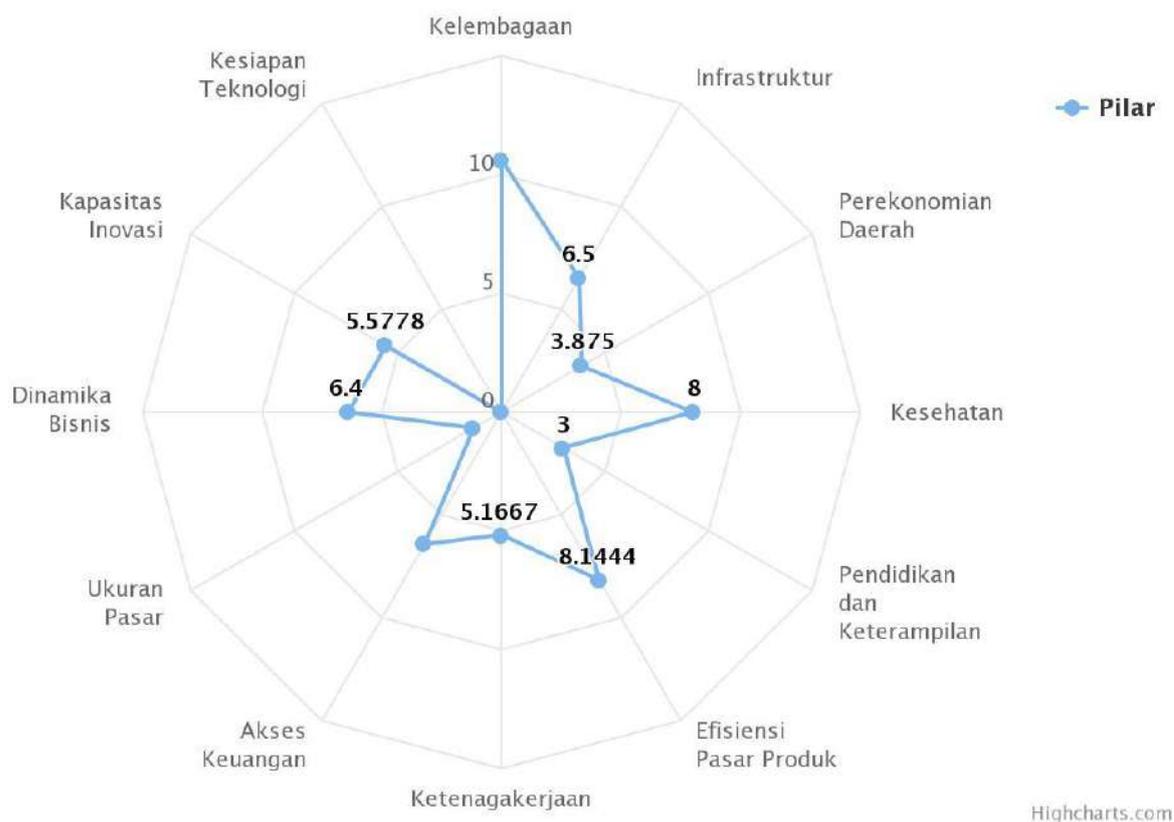
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
5,30120**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesiapan Teknologi

KABUPATEN KONAWE SELATAN



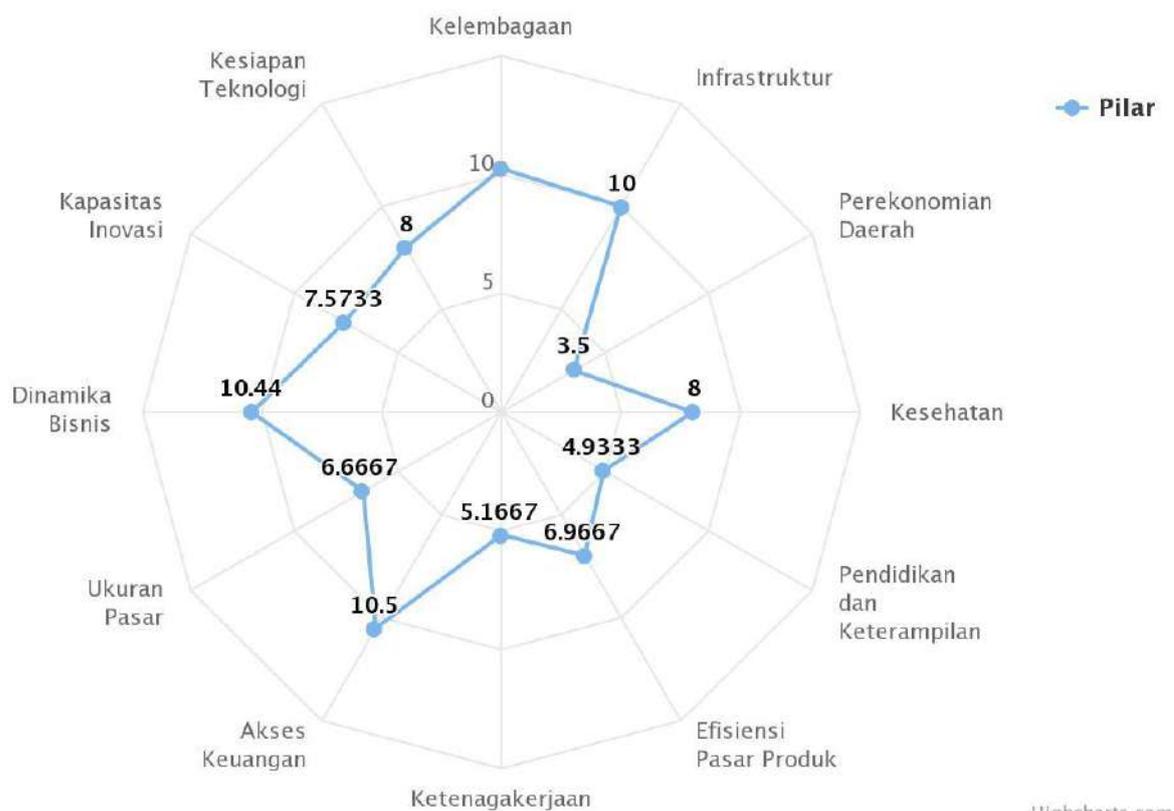
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
7,40690**

**KATEGORI :
TINGGI**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Dinamika Bisnis
2. Kondisi paling rendah pada pilar Perekonomian Daerah

KABUPATEN BOMBANA



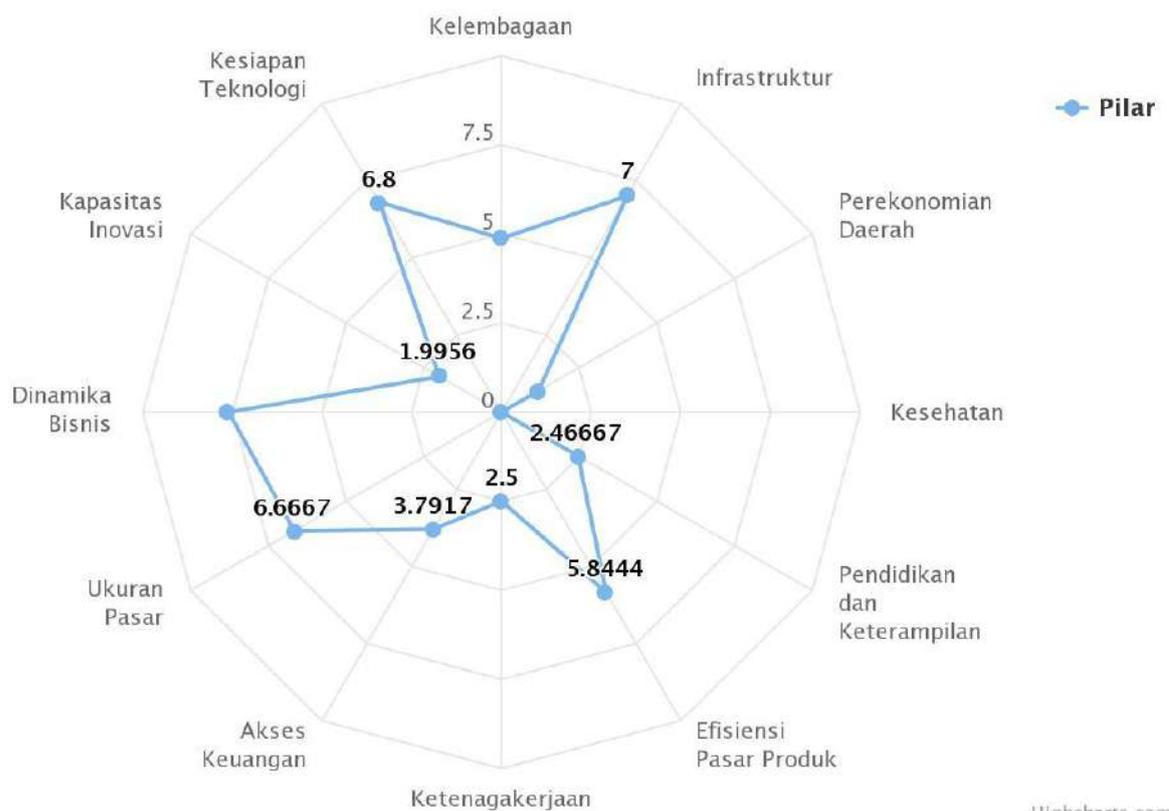
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3,45290**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesiapan Teknologi
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KABUPATEN GORONTALO UTARA



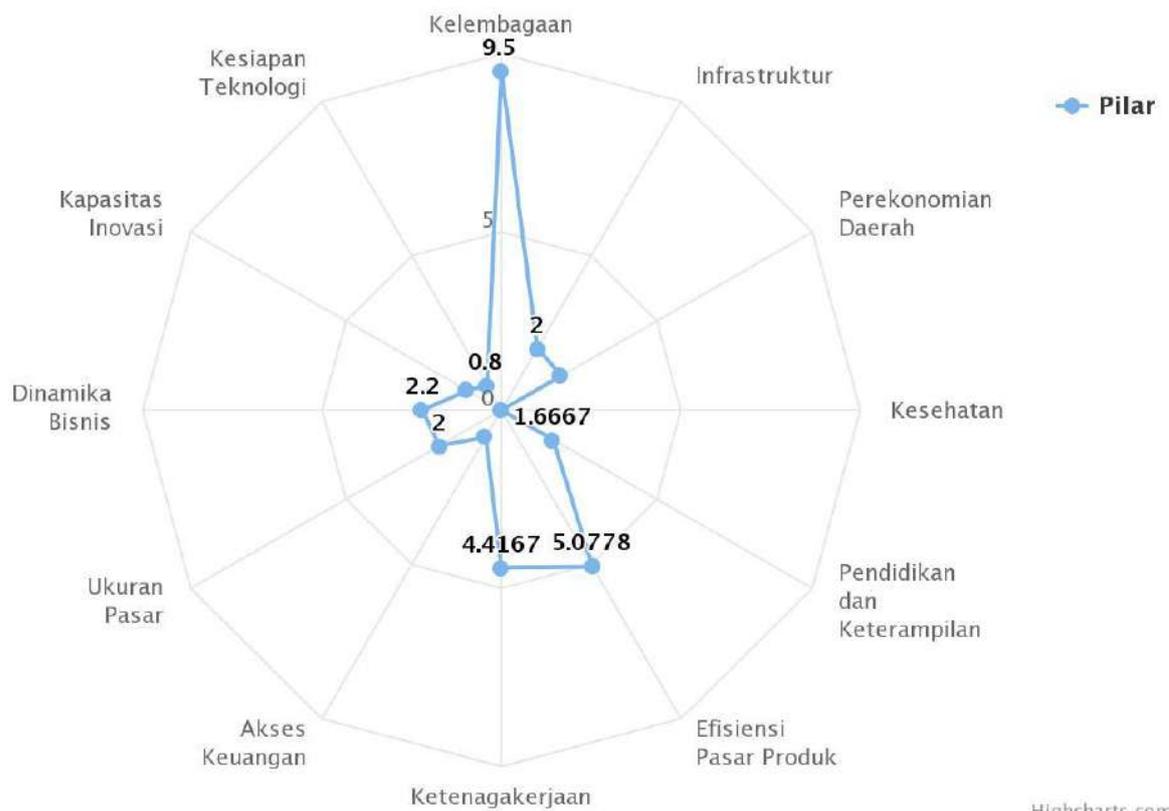
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
1,96550**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KABUPATEN MAMUJU TENGAH



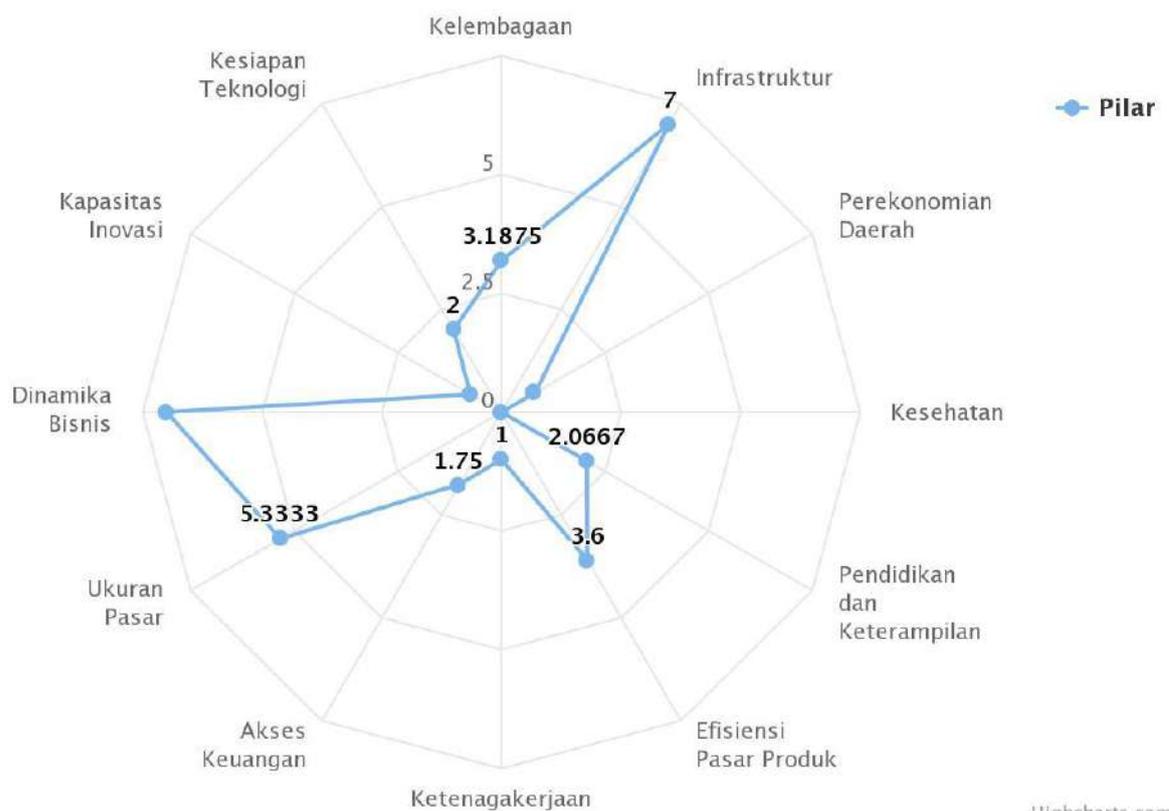
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
2,36010**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Dinamika Bisnis dan Infrastruktur
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

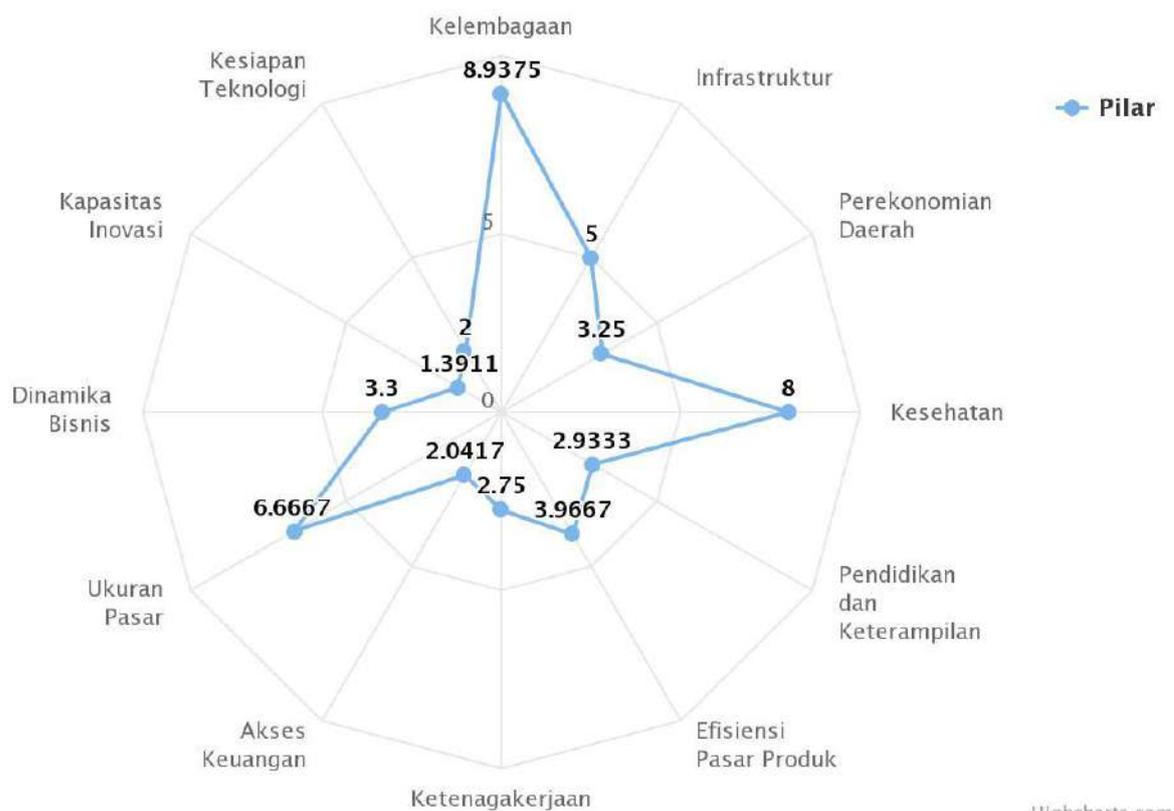


**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,37490**

**KATEGORI :
SEDANG**

Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kapasitas Inovasi

KABUPATEN FAKFAK



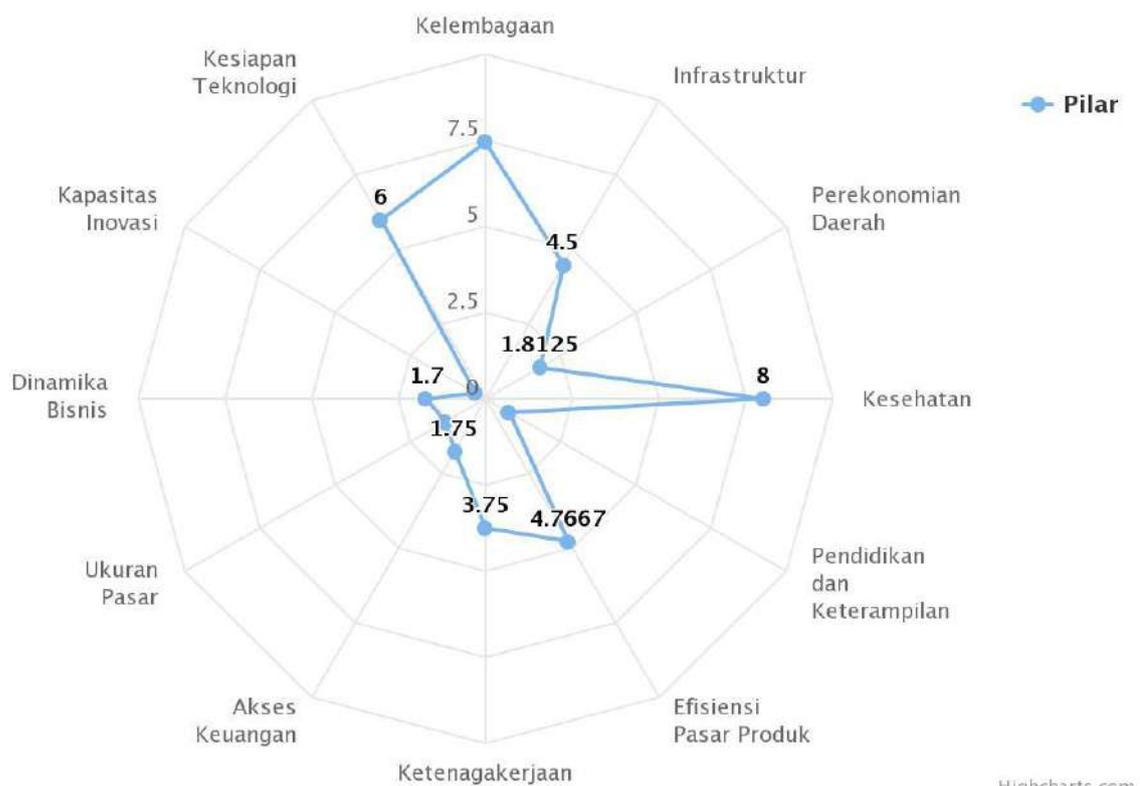
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3,69620**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



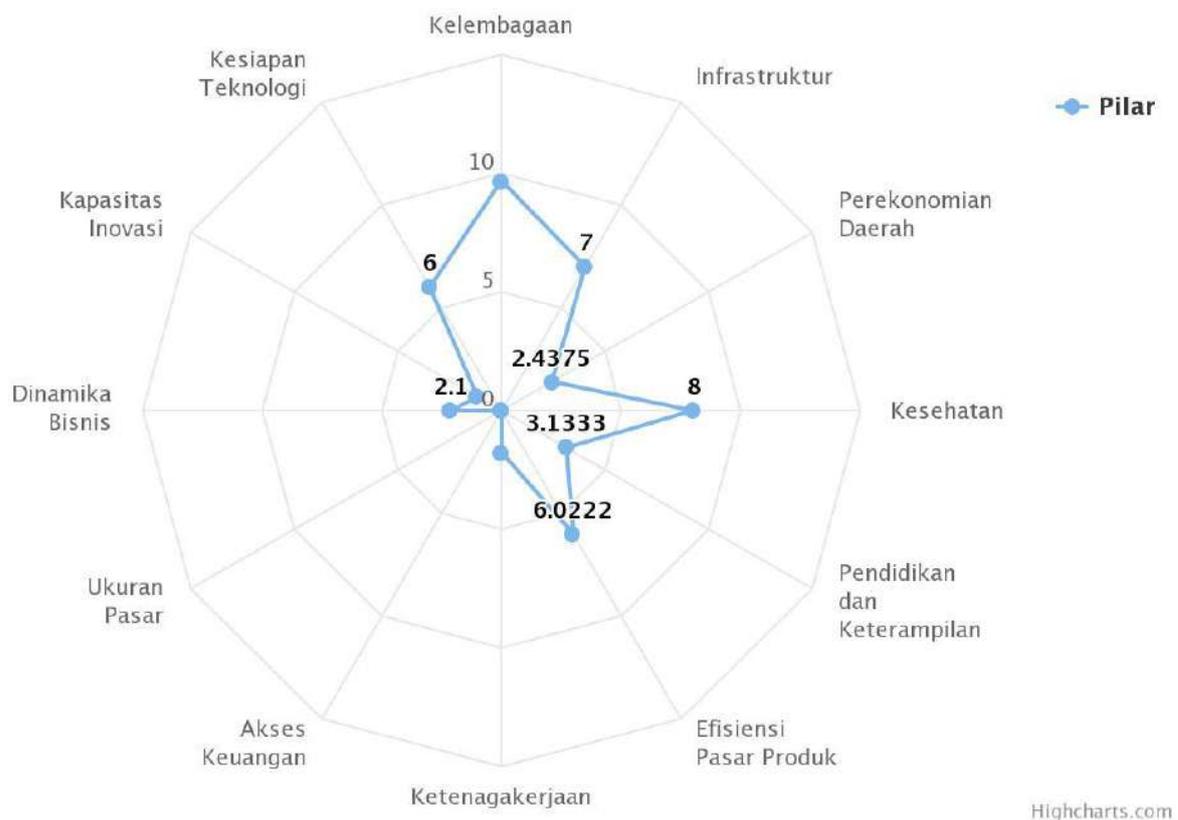
Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kapasitas Inovasi

KABUPATEN MERAUKE

	
TAHUN : 2019	
SKOR/NILAI INDEKS : 4,34280	
KATEGORI : SEDANG	

Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

Hasil penilaian masing-masing kota se-indonesia, berdasarkan data tanggal 1 Agustus 2019 dari website <https://indeks.inovasi.ristekdikti.go.id>. Berikut list kabupaten beserta nilai indeks yang telah mengisi kuesioner :

KODE_ID	Nama Daerah	Nilai Indeks
1171	Kota Banda Aceh	2,4456
1174	Kota Lhokseumawe	3,3162
1271	Kota Sibolga	2,6149
1303	Kota Solok	6,2145
1371	Kota Padang	3,0358
1373	Kota Sawahlunto	2,5649
1374	Kota Padang Panjang	3,4358
1375	Kota Bukit Tinggi	2,7736
1376	Kota Payakumbuh	3,4644
1377	Kota Pariaman	7,4474
1672	Kota Prabumulih	5,7719
1673	Kota Lubuklinggau	3,6045
1871	Kota Bandar Lampung	0,7821
3271	Kota Sukabumi	5,6779
3274	Kota Bekasi	1,5941
3275	Kota Depok	2,9787
3276	Kota Cimahi	7,9556
3277	Kota Tasikmalaya	4,6250
3278	Kota Banjar	1,3978
3371	Kota Magelang	6,1459
3371	Kota Surakarta	7,7054
3373	Kota Salatiga	6,4479
3374	Kota Semarang	7,3699
3375	Kota Pekalongan	6,3446
3376	Kota Tegal	6,7893
3573	Kota Malang	6,5734
3672	Kota Cilegon	1,9687
3673	Kota Serang	5,0645
5171	Kota Denpasar	2,8367
6171	Kota Pontianak	6,7714
6271	Kota Palangka Raya	2,2509
6571	Kota Tarakan	4,4485
7171	Kota Manado	0,5105
7174	Kota Mobagu	2,6278
7372	Kota Pare Pare	5,7657
7373	Kota Palopo	4,4717
8271	Kota Ternate	3,4429
9471	Kota Jayapura	4,3360

KOTA BANDA ACEH



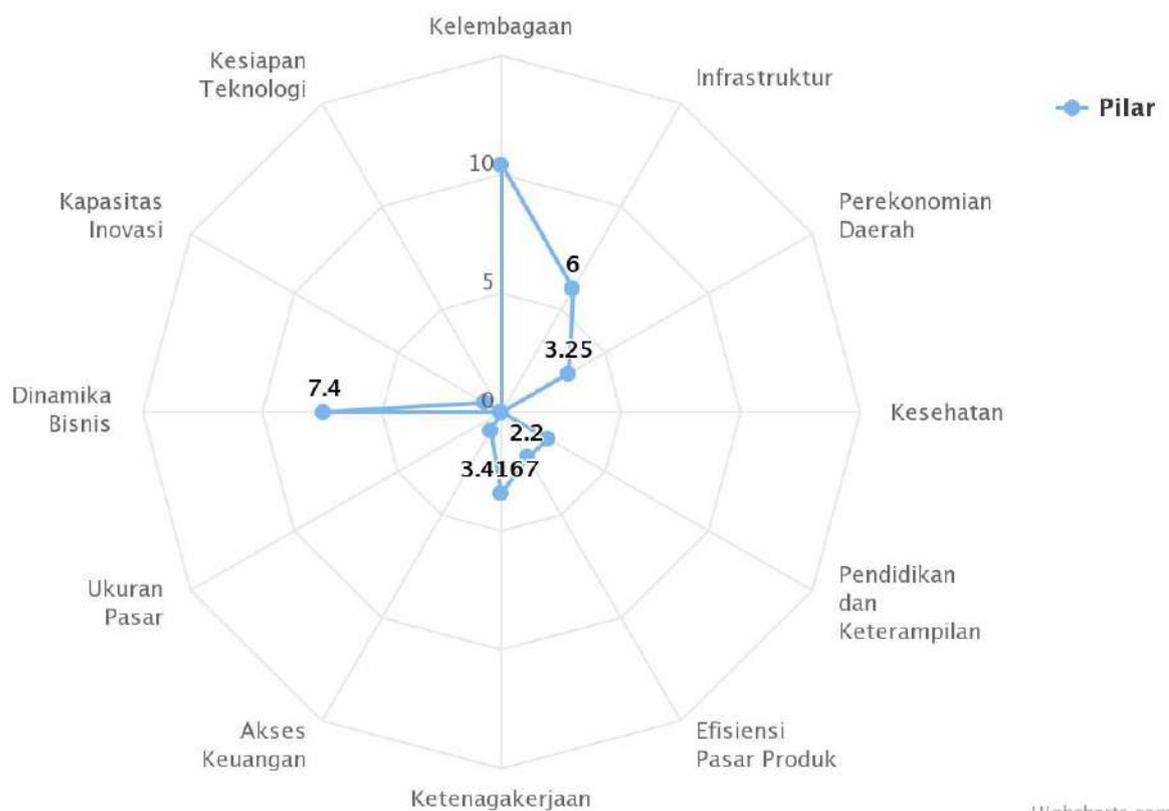
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
2,44560**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

KOTA LHOKSEUMAWE



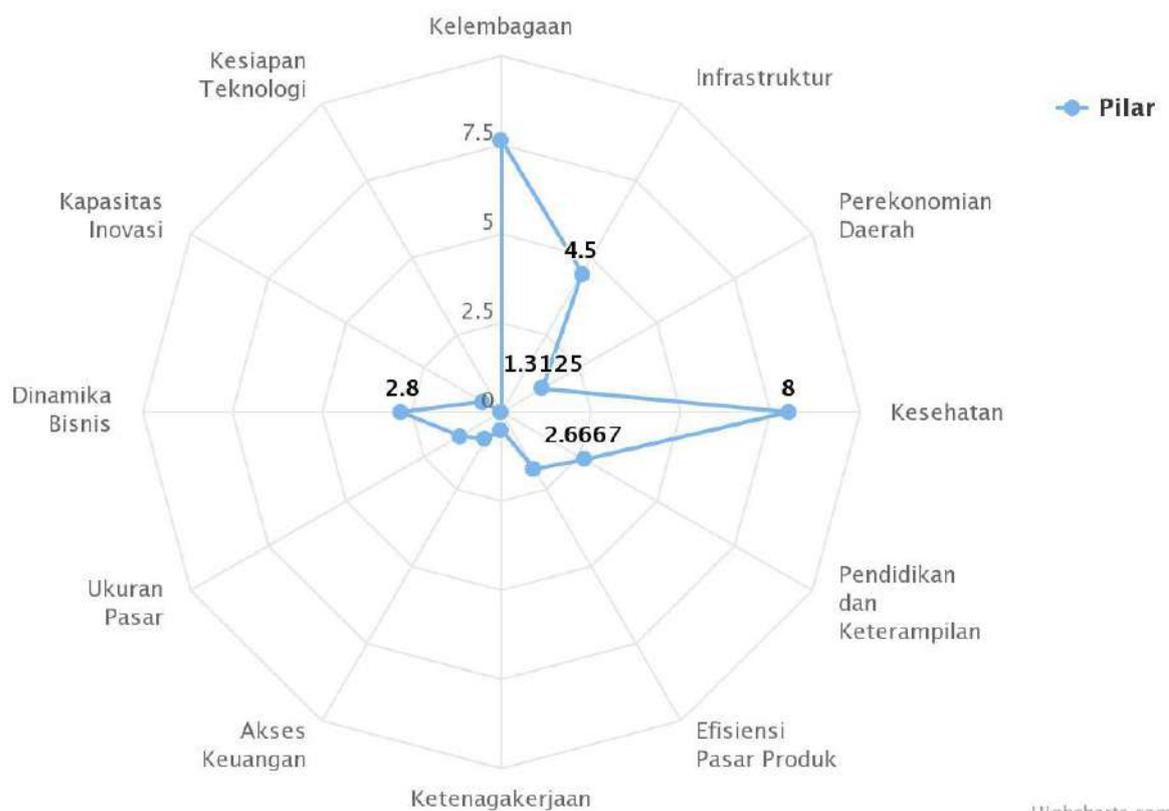
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3,31620**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Akses Kesiapan Teknologi

KOTA SIBOLGA



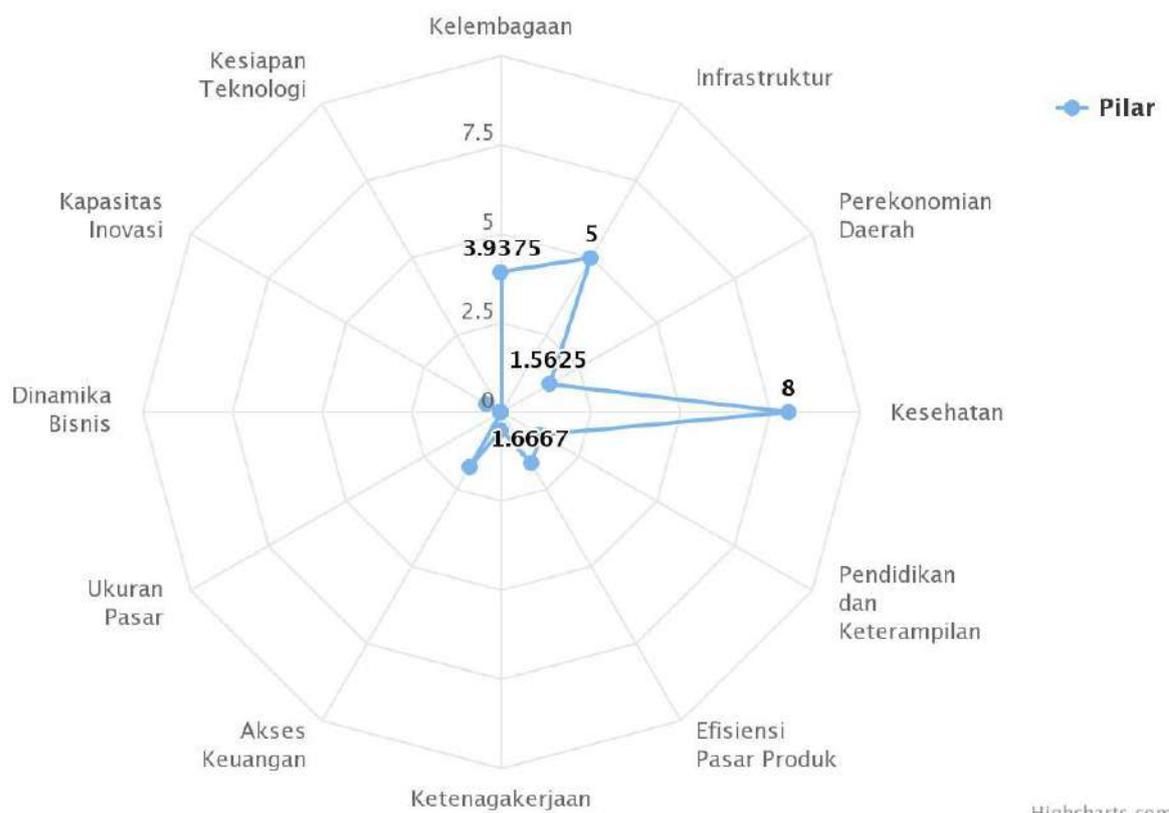
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
2,61490**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesiapan Teknologi

KOTA SOLOK



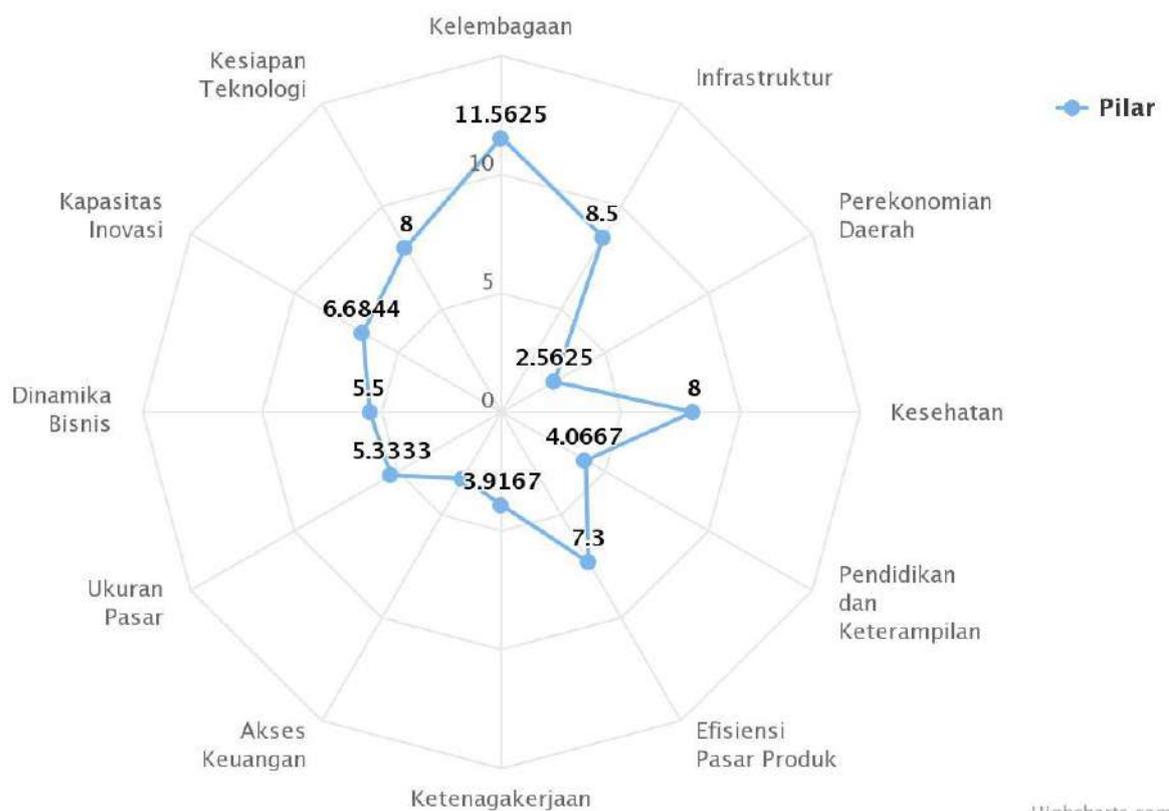
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
6,21450**

**KATEGORI :
TINGGI**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Perkonomian Daerah

KOTA PADANG



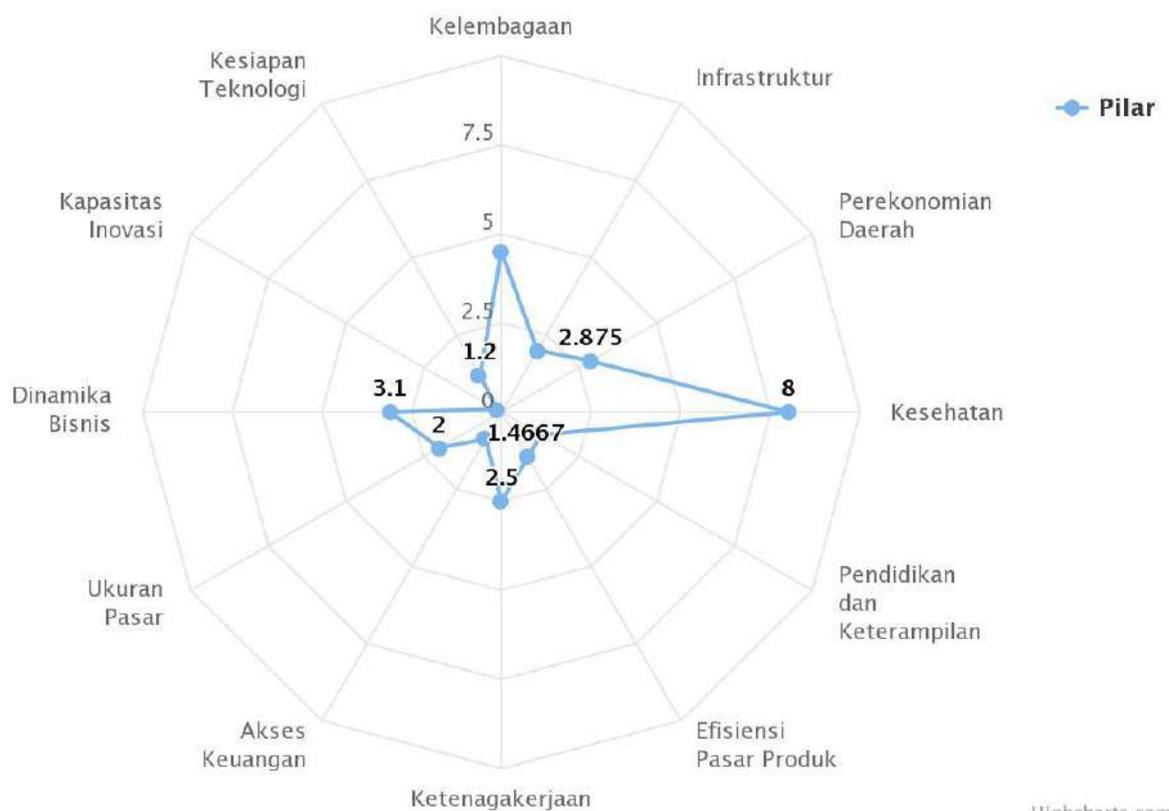
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3,03580**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kapasitas Inovasi

KOTA SAWAHLUNTO



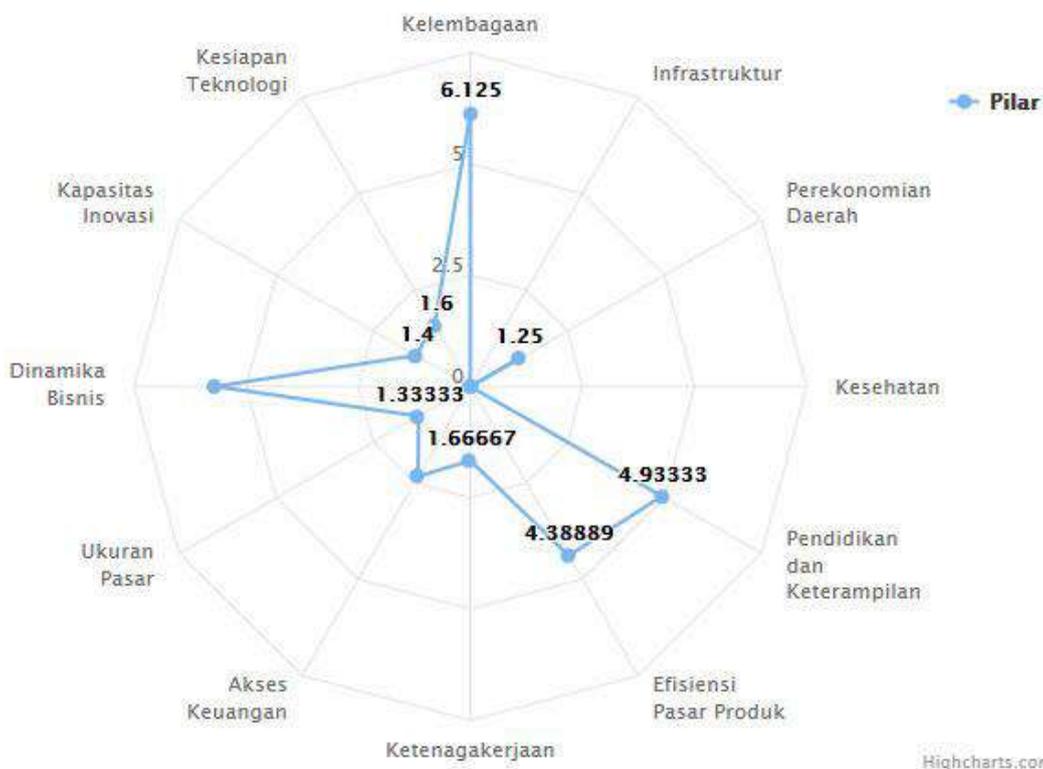
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
2,56486**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Dinamika Bisnis
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KOTA PADANG PANJANG



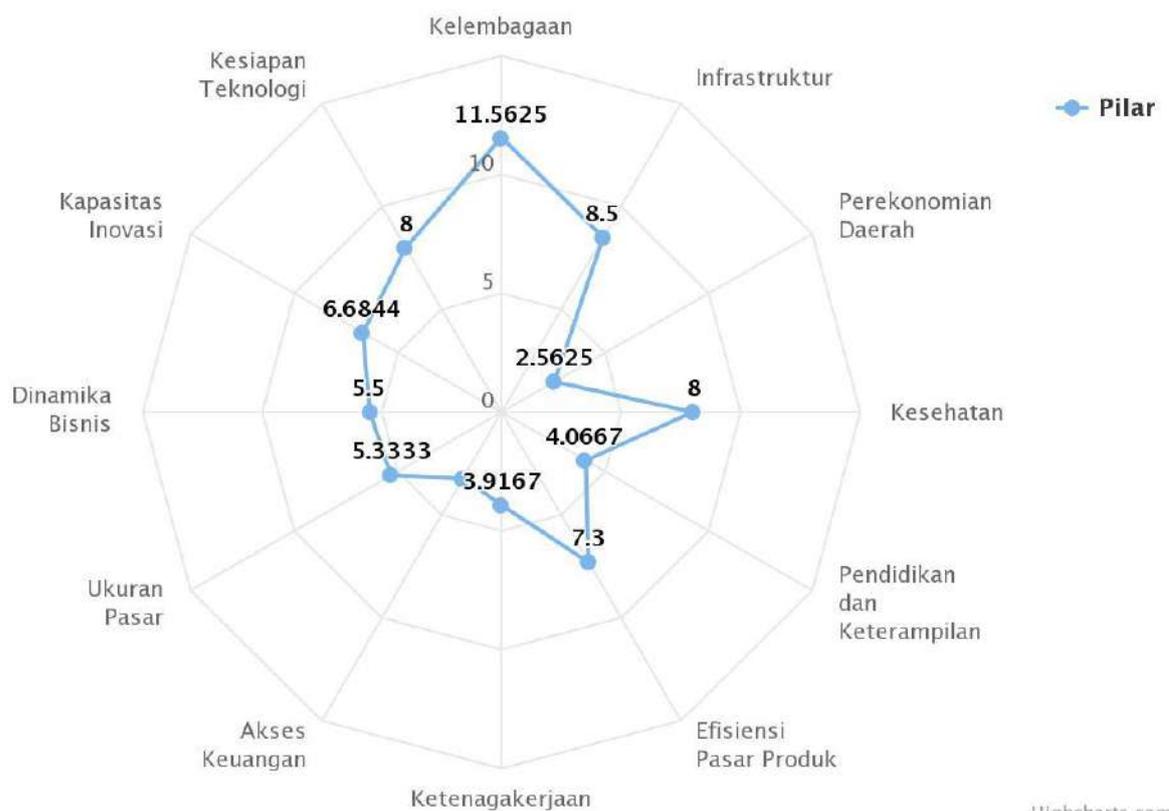
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3,43580**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Perkonomian Daerah

KOTA BUKITTINGGI



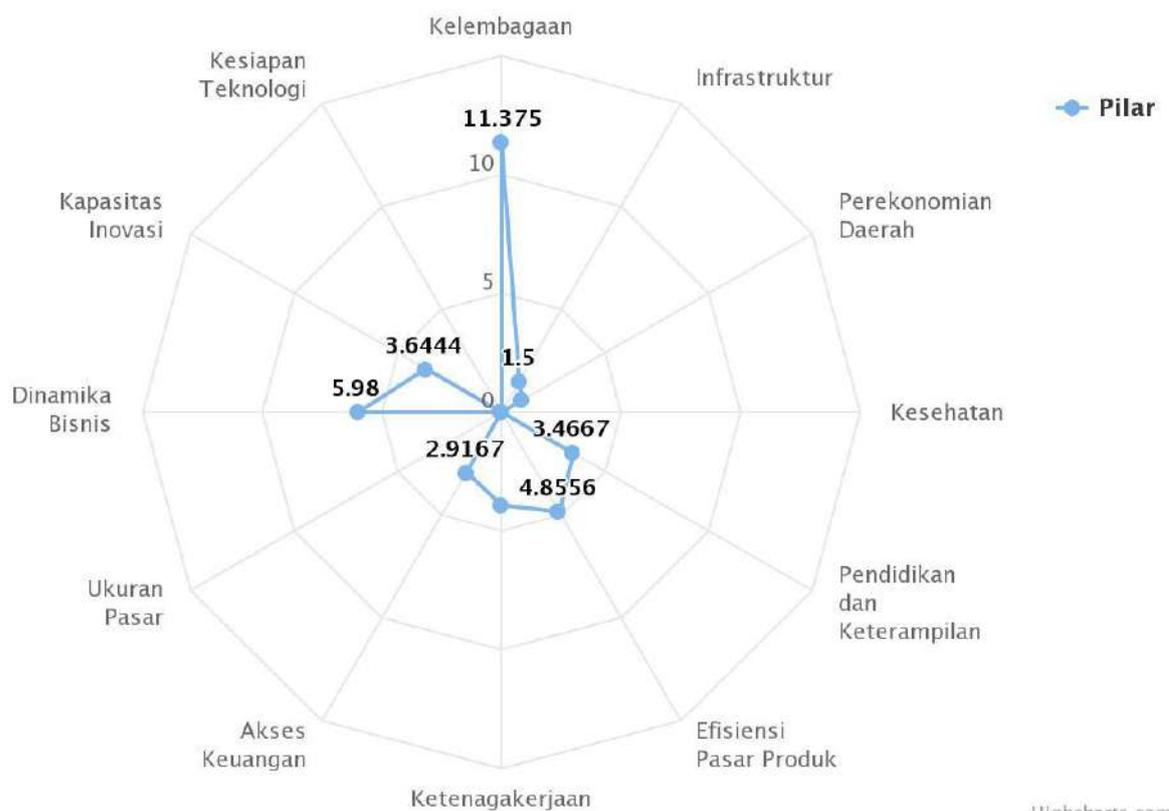
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
2,77360**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesiapan Teknologi

KOTA PAYAKUMBUH



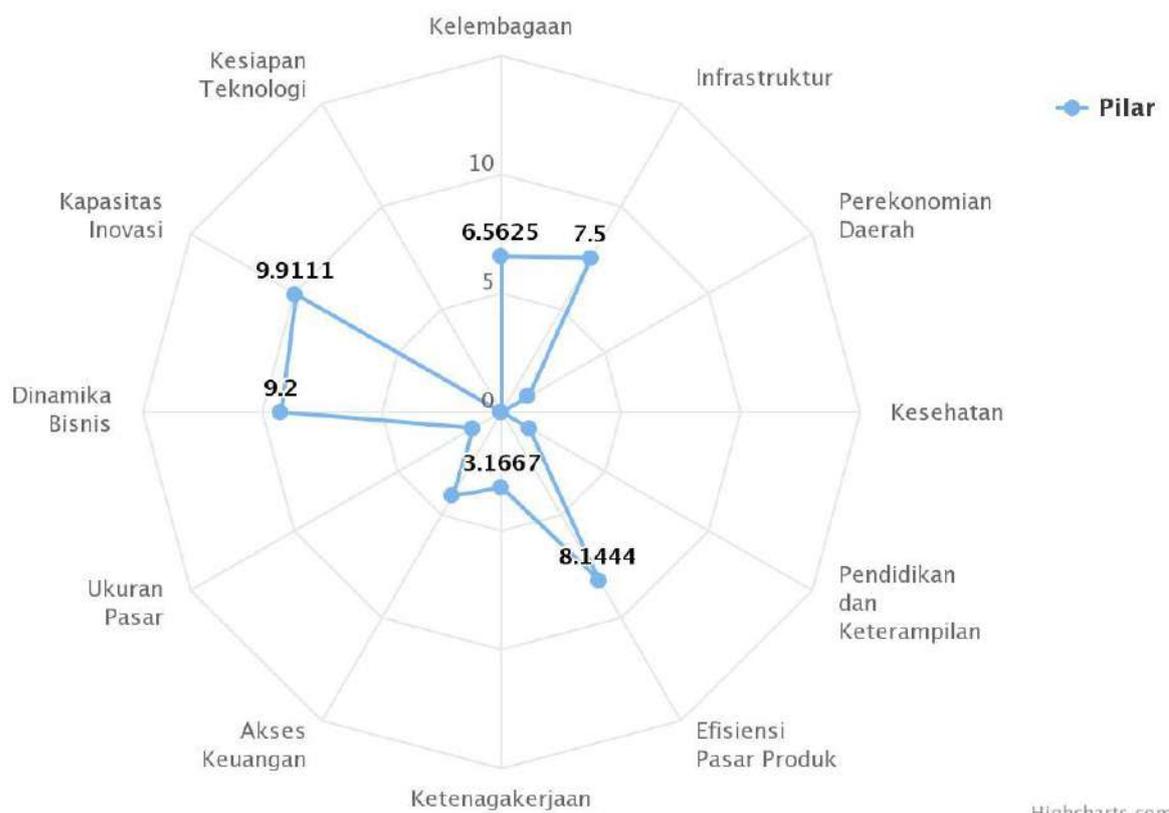
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3,46440**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kapasitas Inovasi
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesiapan Teknologi

KOTA PARIAMAN



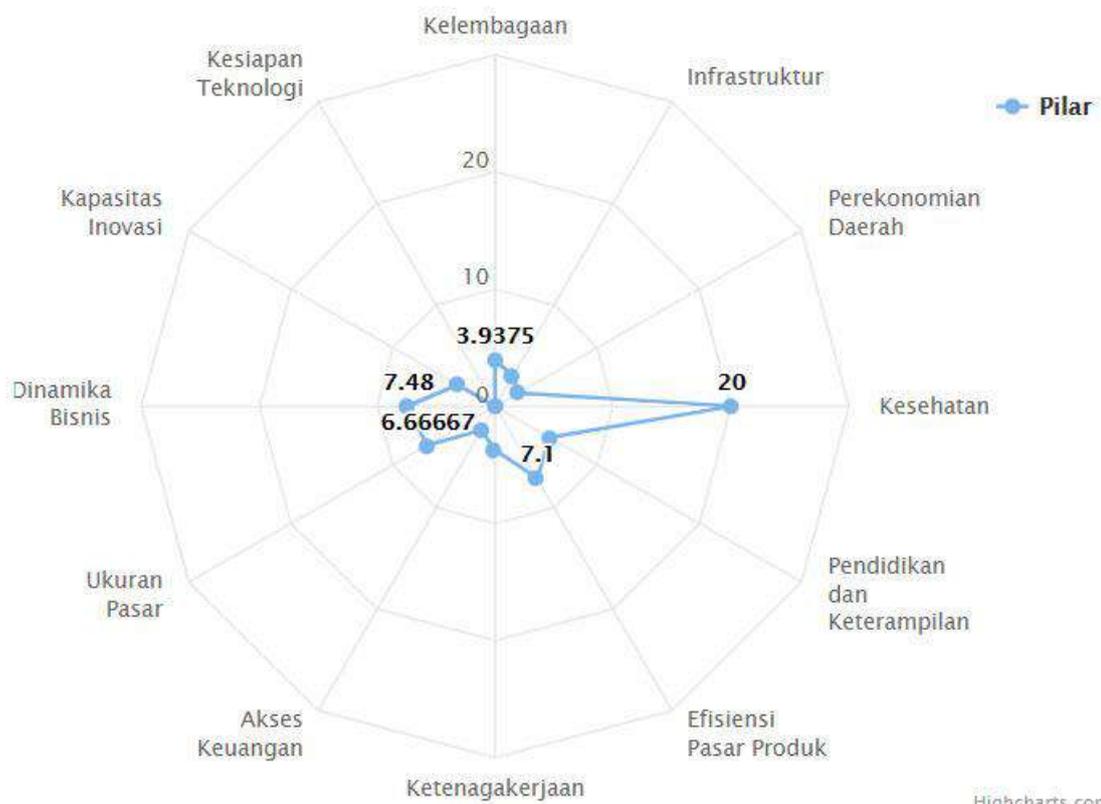
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
7,44743**

**KATEGORI :
TINGGI**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesiapan Teknologi

KOTA PRABUMULIH



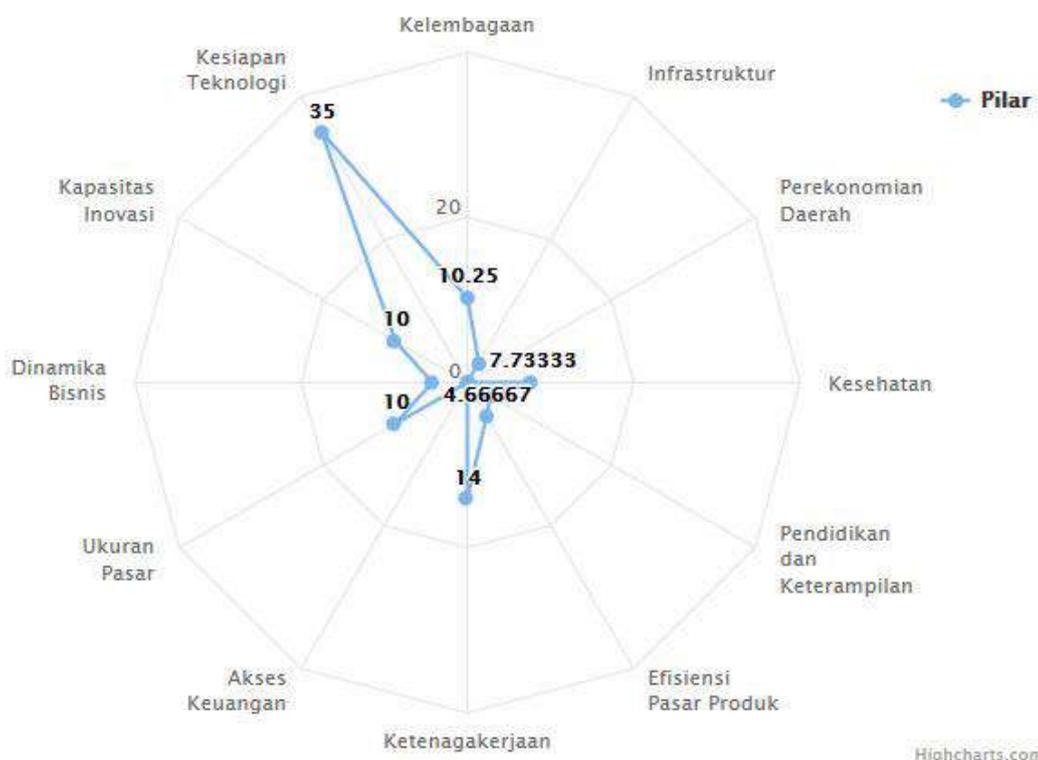
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
5,7719**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesiapan Teknologi
2. Kondisi paling rendah pada pilar Perekonomian Daerah

KOTA LUBUKLINGGAU



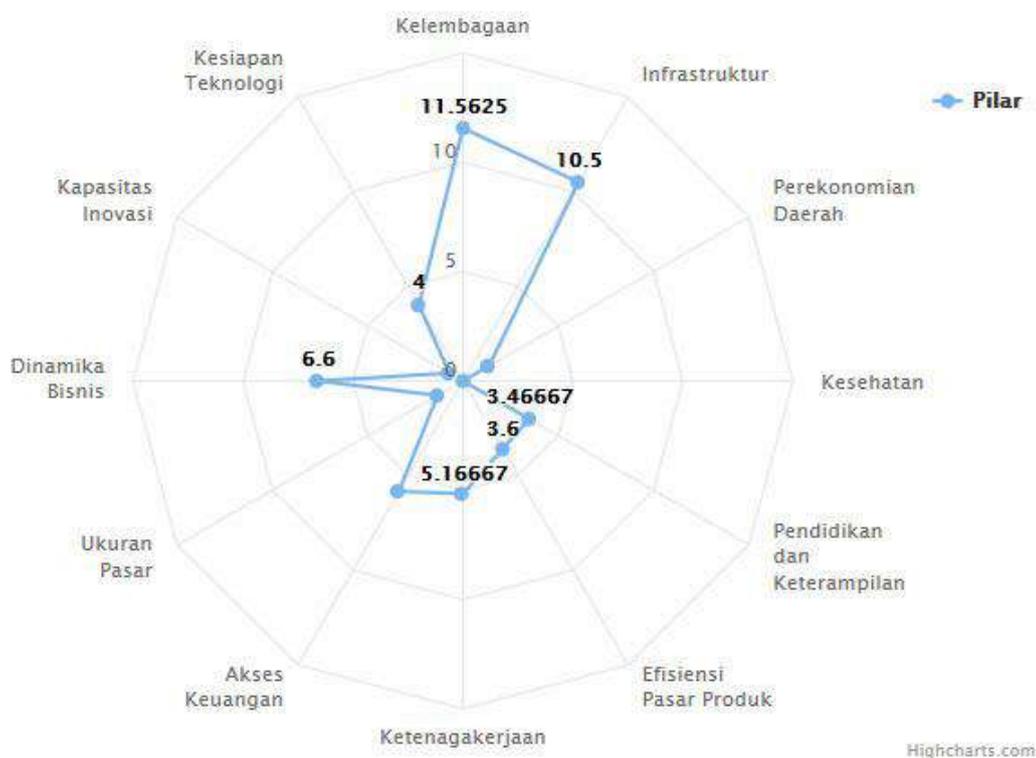
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3,6045**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan dan Kesiapan Inovasi

KOTA BANDAR LAMPUNG



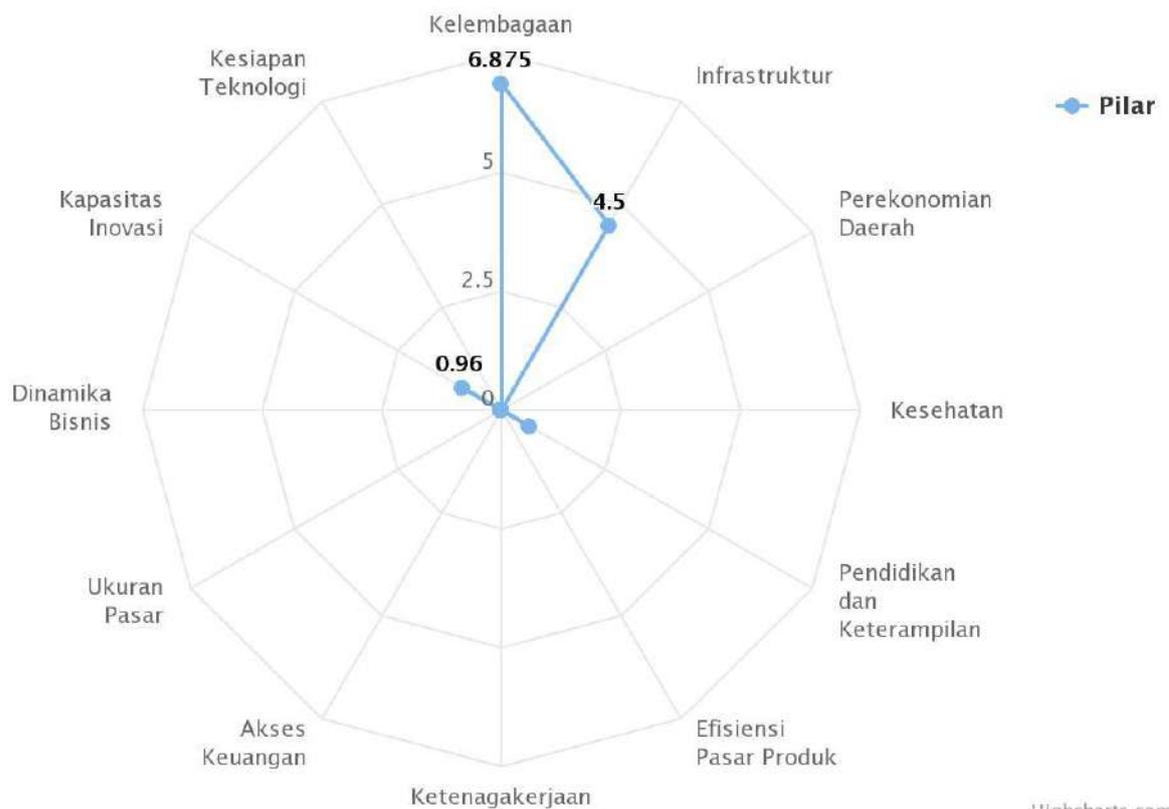
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
0,78210**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Akses keuangan

KOTA SUKABUMI



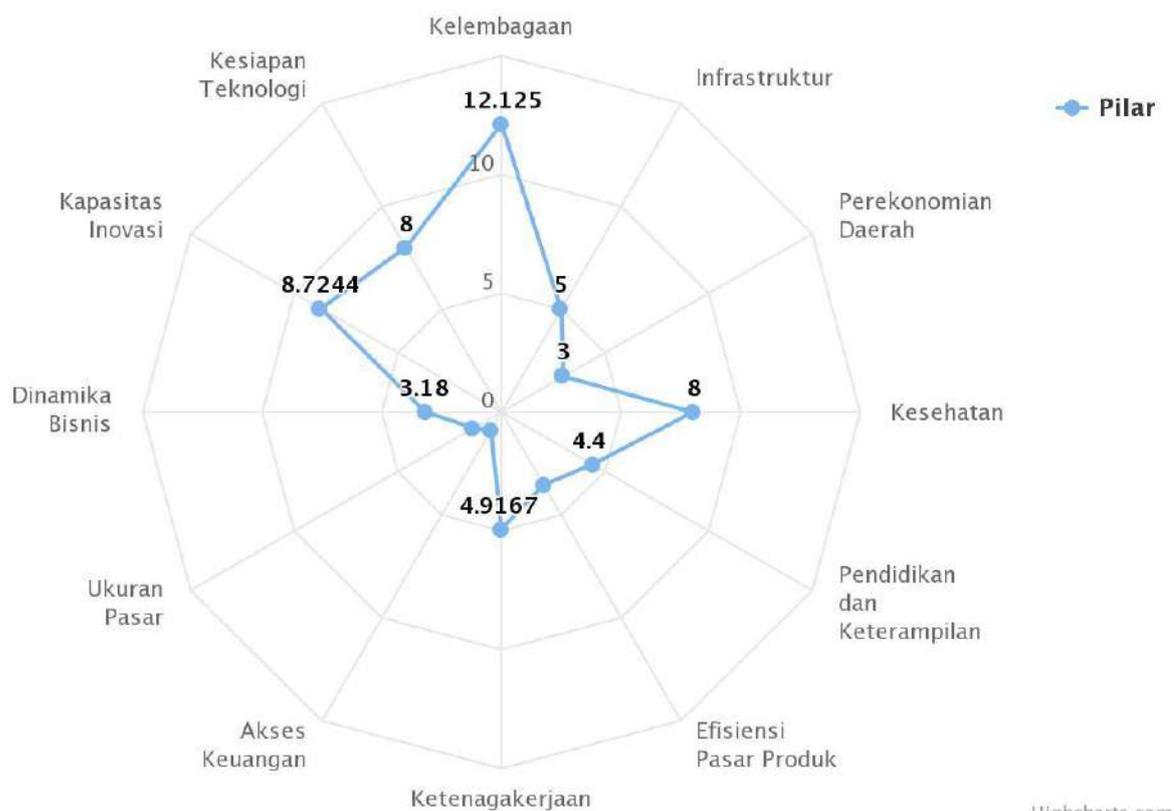
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
5,67790**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Akses keuangan

KOTA BEKASI



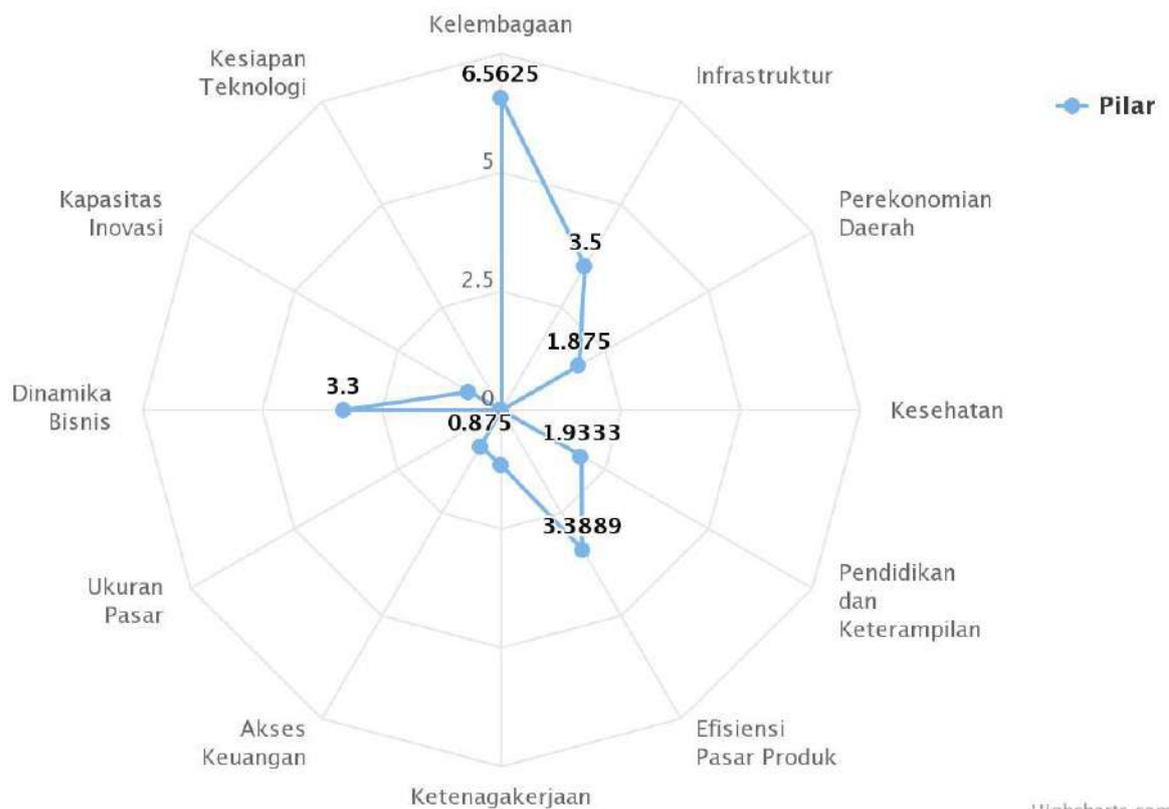
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
1,59410**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesiapan Teknologi

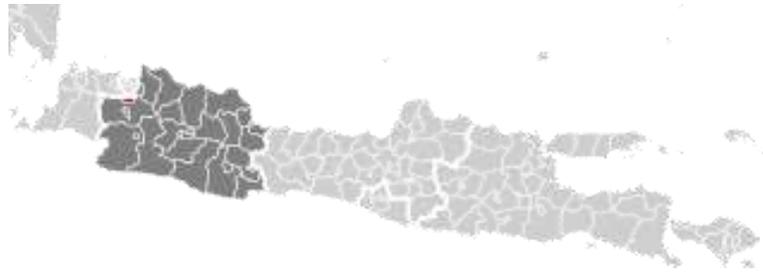
KOTA DEPOK



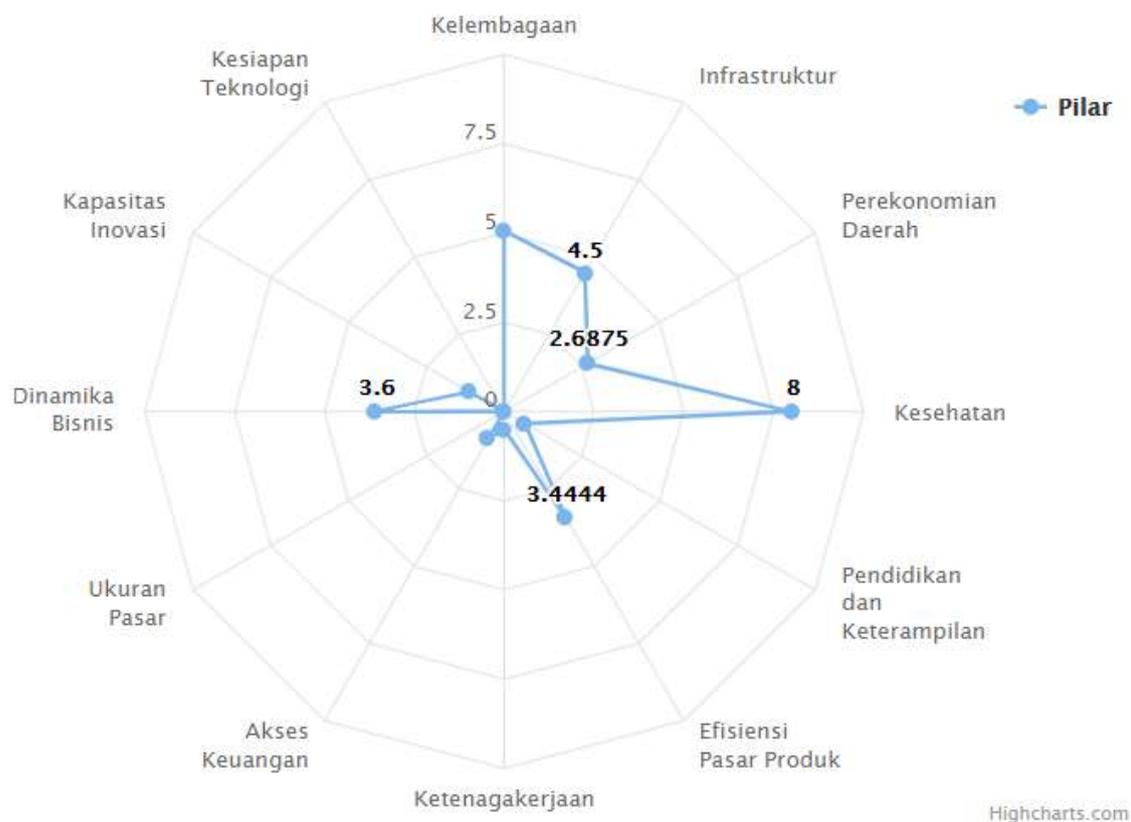
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
2,97870**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesiapan Teknologi

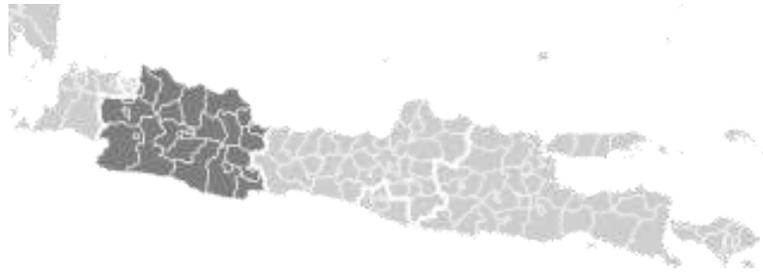
KOTA CIMAHI



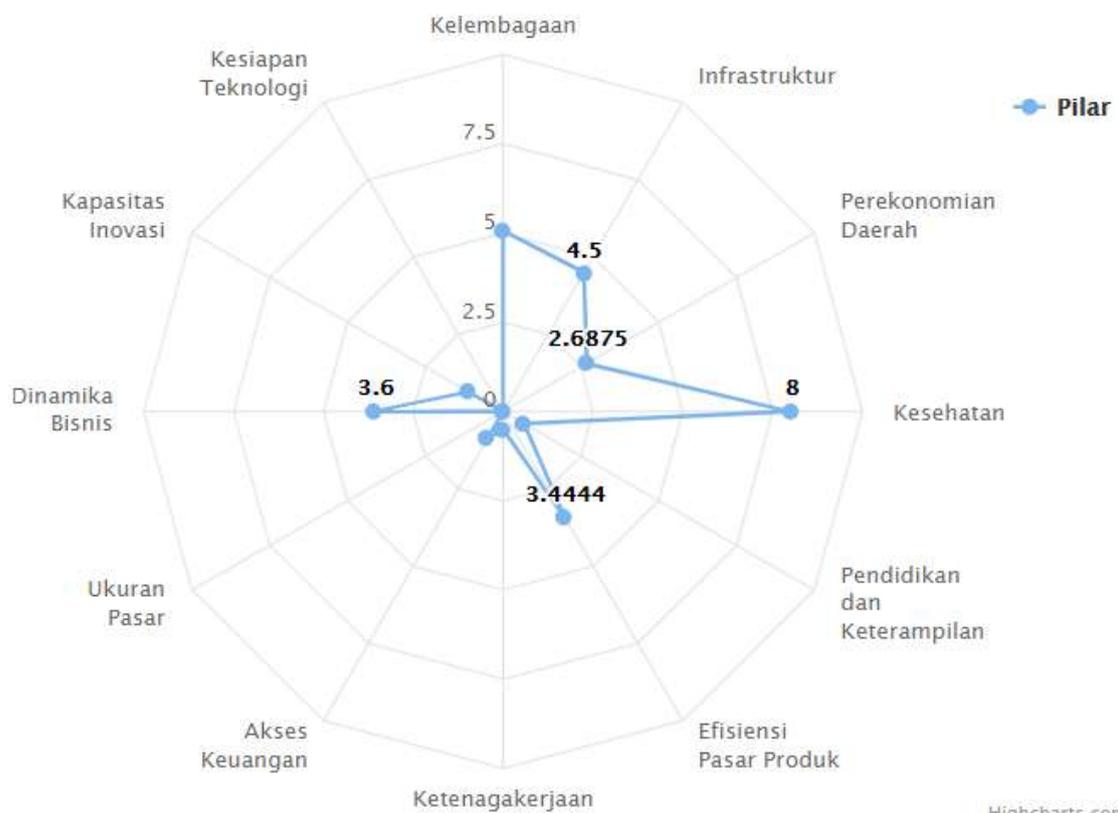
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
7,95560**

**KATEGORI :
TINGGI**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesiapan Teknologi

KOTA TASIKMALAYA



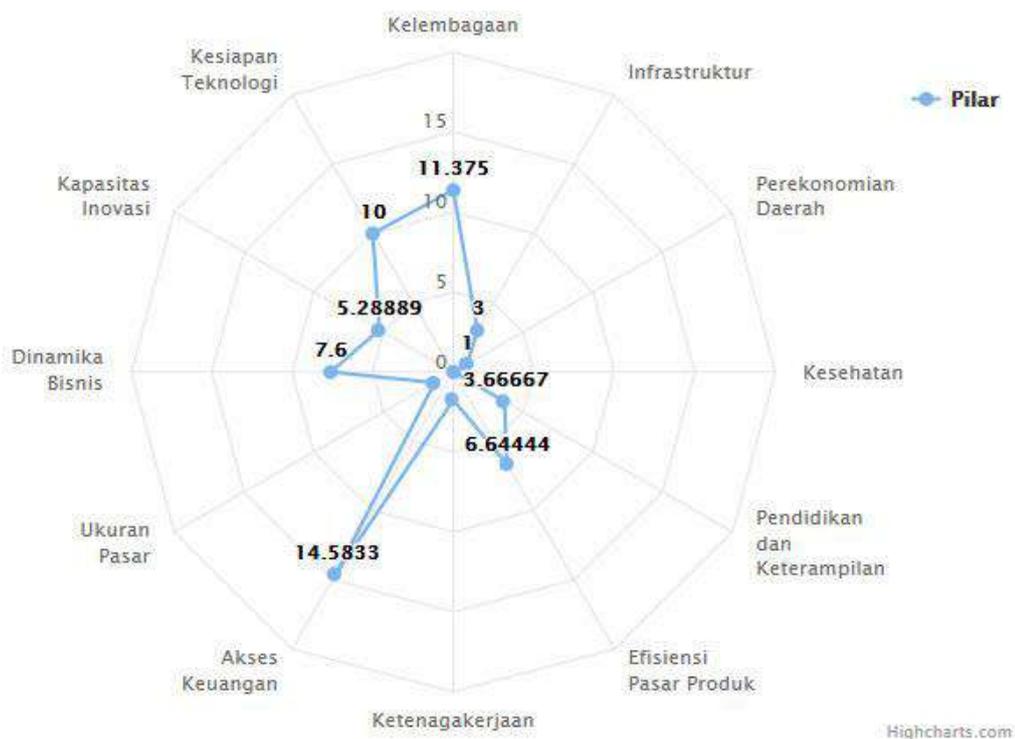
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,6250**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan dan Ukuran Pasar

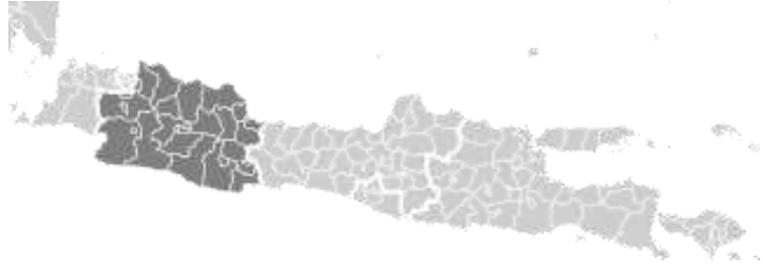
KOTA BANJAR



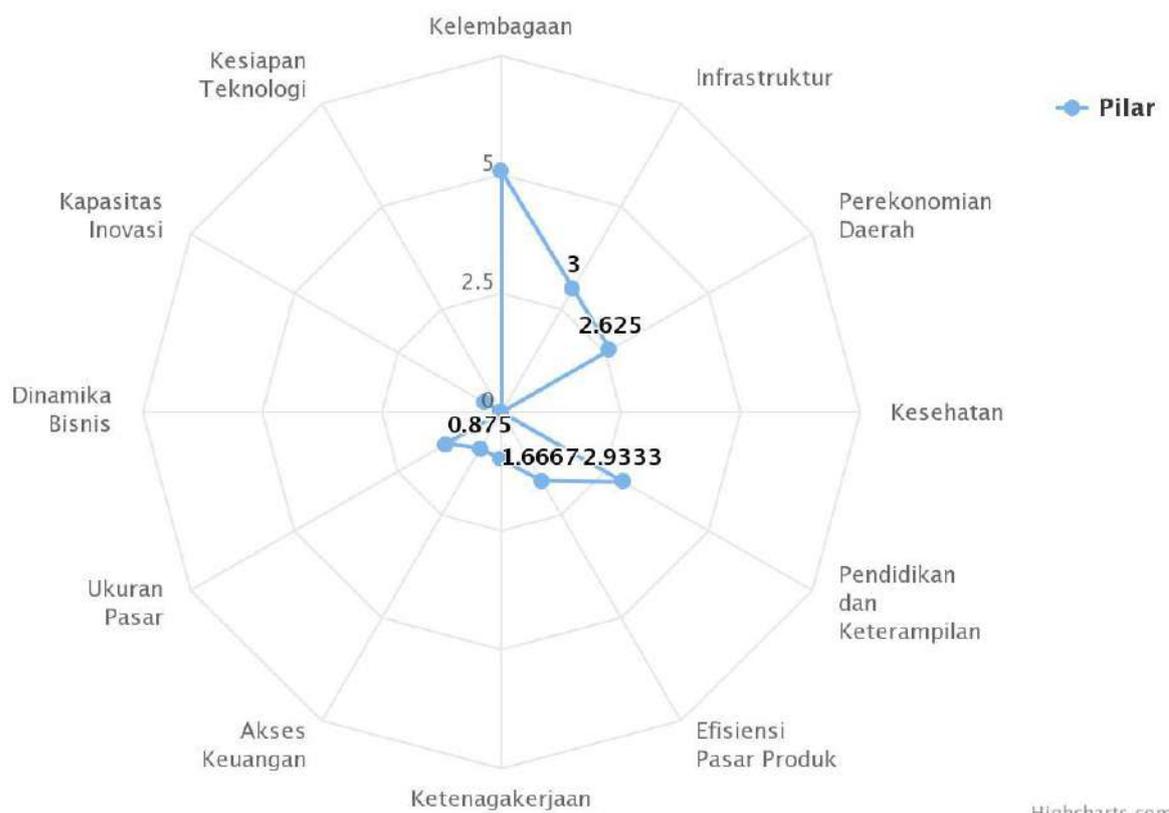
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
1,39780**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesiapan Teknologi

KOTA MAGELANG



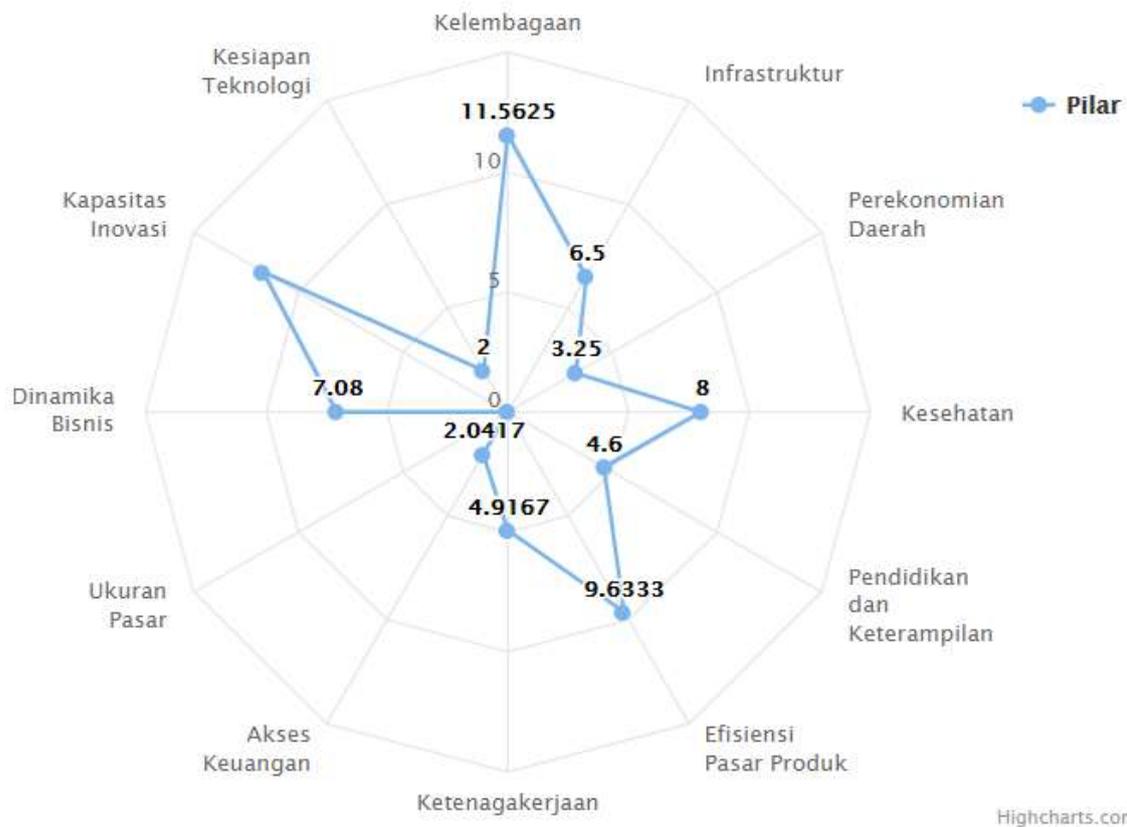
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
6,14590**

**KATEGORI :
TINGGI**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kapasitas Inovasi dan Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

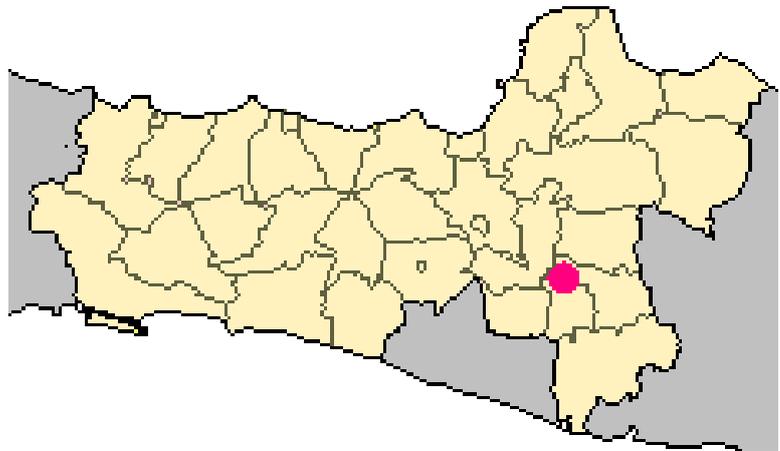
KOTA SURAKARTA



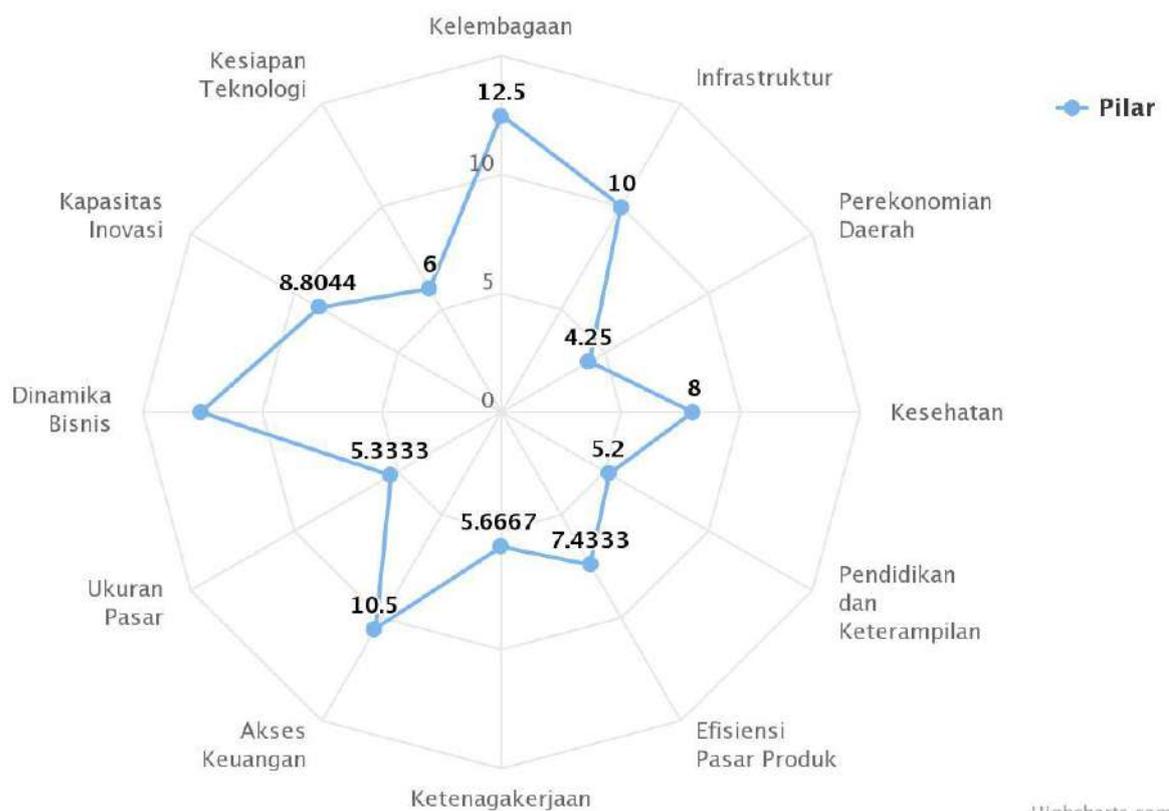
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
7,70540**

**KATEGORI :
TINGGI**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Dinamika Bisnis dan Kelembagaan.
2. Kondisi paling rendah pada pilar Perekonomian Daerah

KOTA SALATIGA

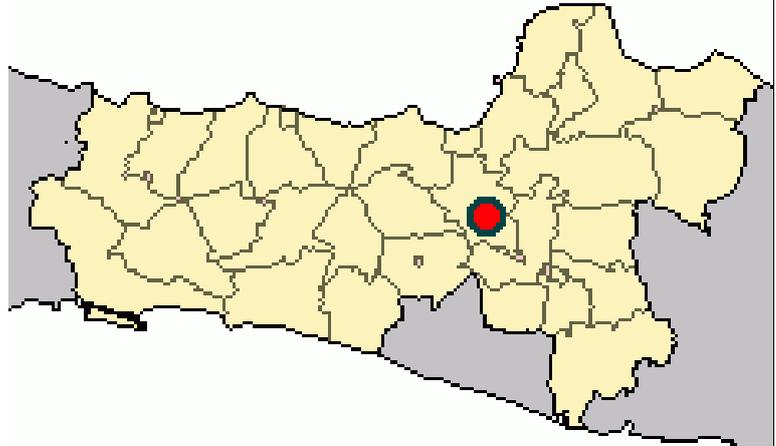


v

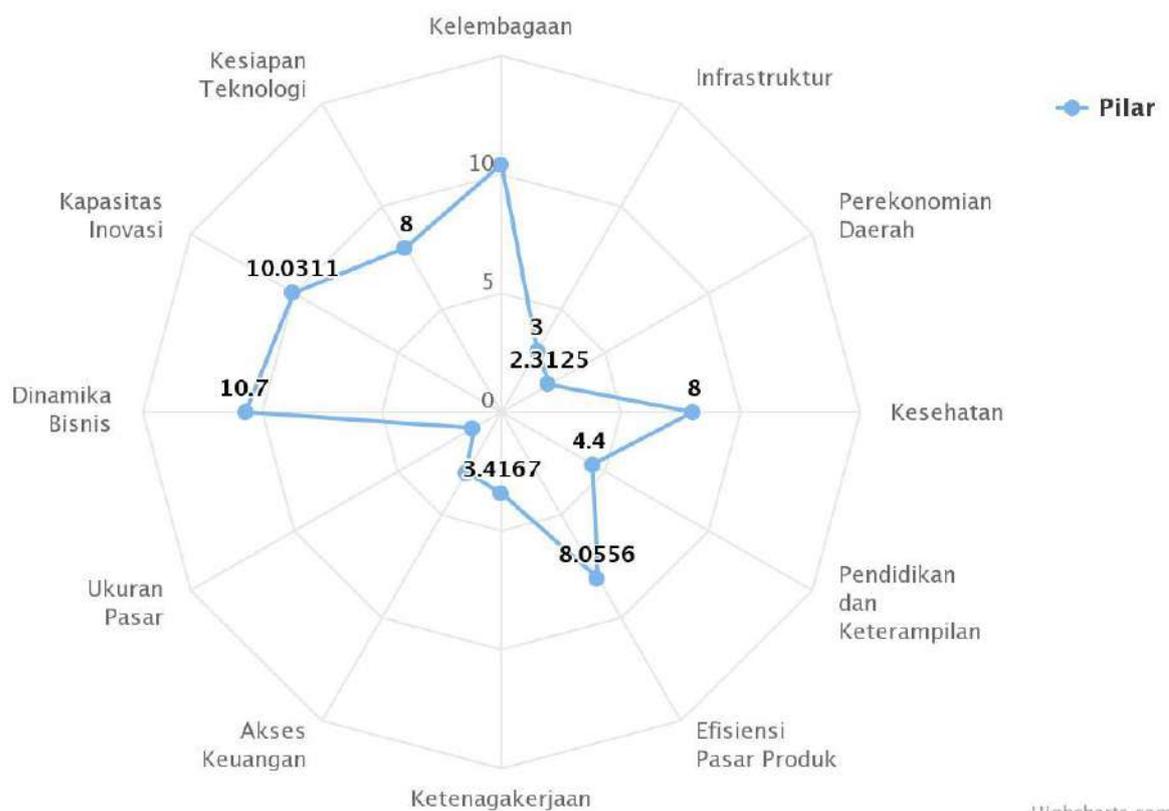
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
6,44790**

**KATEGORI :
TINGGI**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Dinamika Bisnis dan Kapasitas Inovasi
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

KOTA SEMARANG



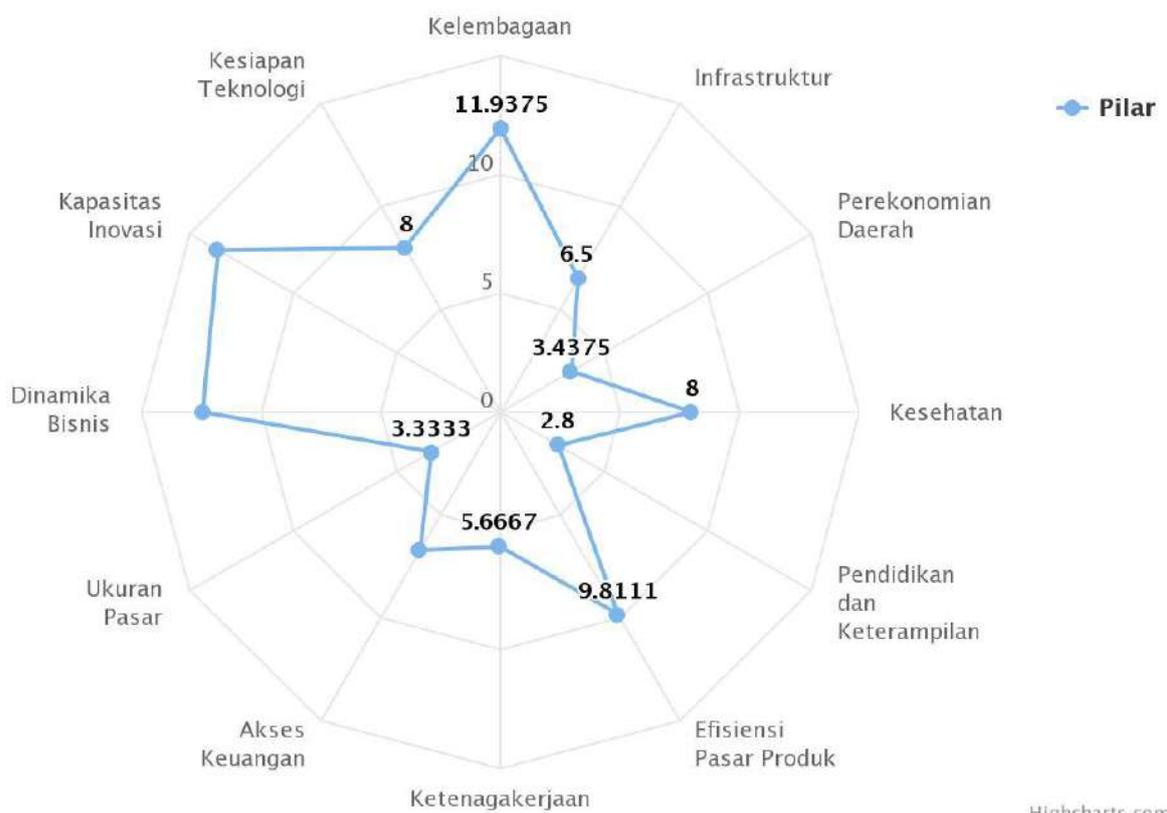
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
7,36990**

**KATEGORI :
TINGGI**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kapasitas Inovasi dan Dinamika Bisnis
2. Kondisi paling rendah pada pilar Pendidikan dan Keterampilan

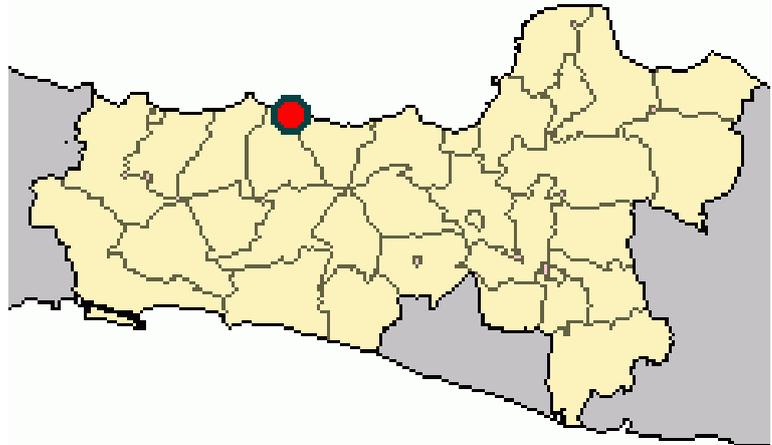
KOTA PEKALONGAN



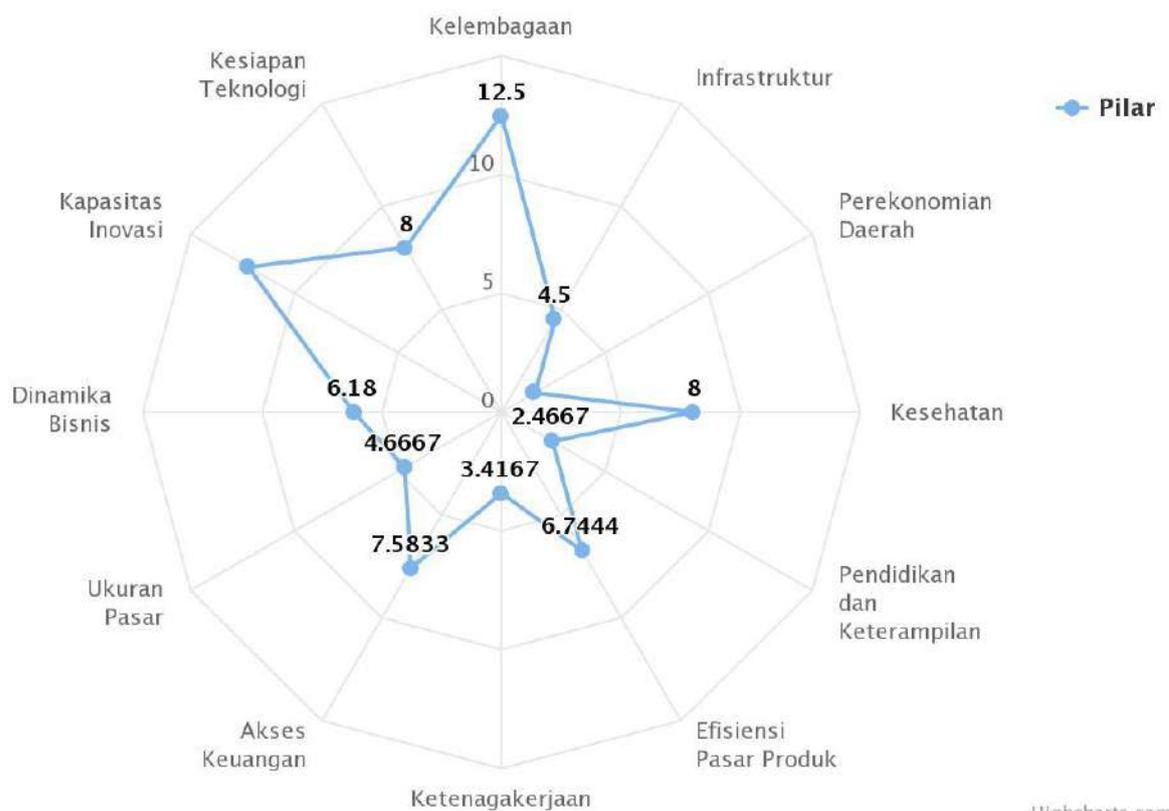
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
6,34460**

**KATEGORI :
TINGGI**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kapasitas Inovasi dan Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Perekonomian Daerah

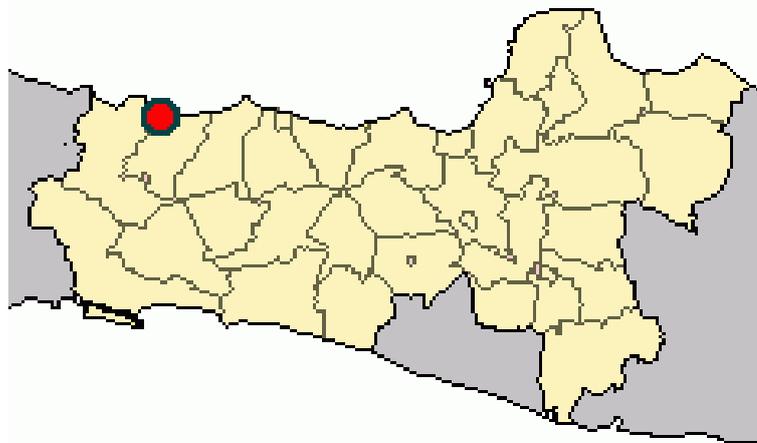
KOTA TEGAL



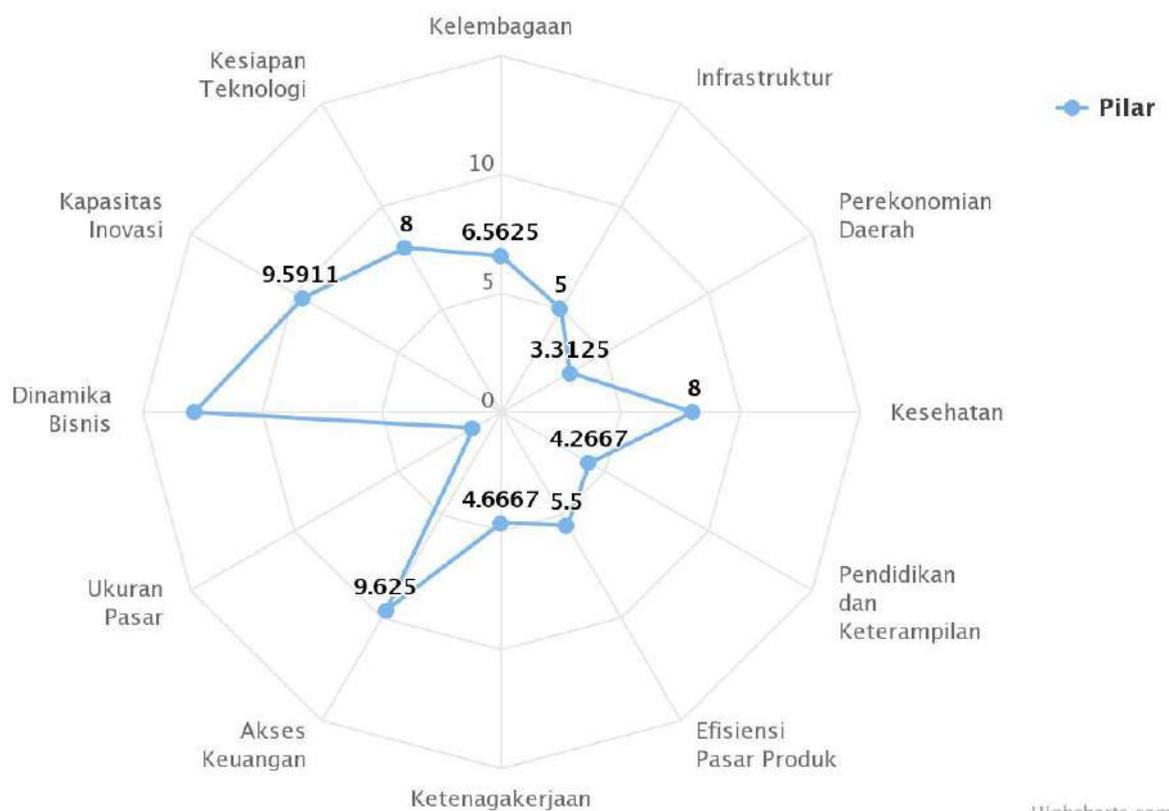
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
6,78930**

**KATEGORI :
TINGGI**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Dinamika Bisnis
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

KOTA MALANG



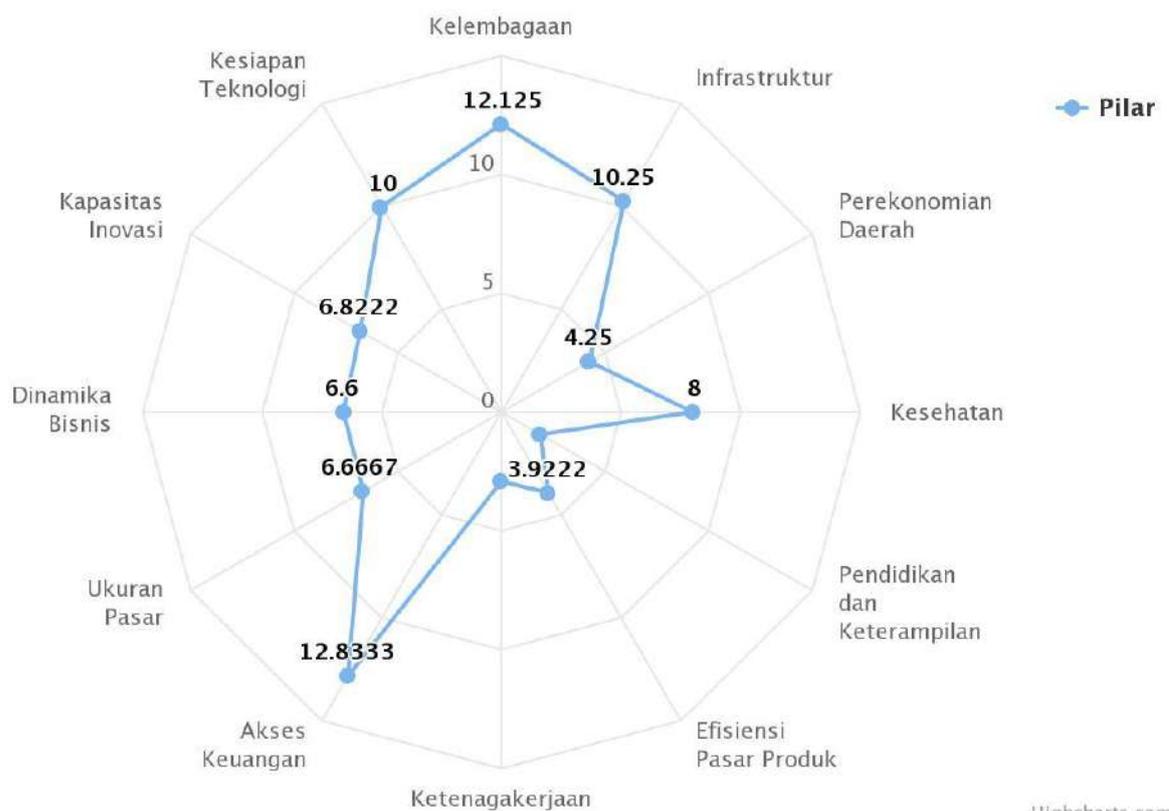
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
6,57340**

**KATEGORI :
TINGGI**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Akses Keuangan dan Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Pendidikan dan Ketrampilan

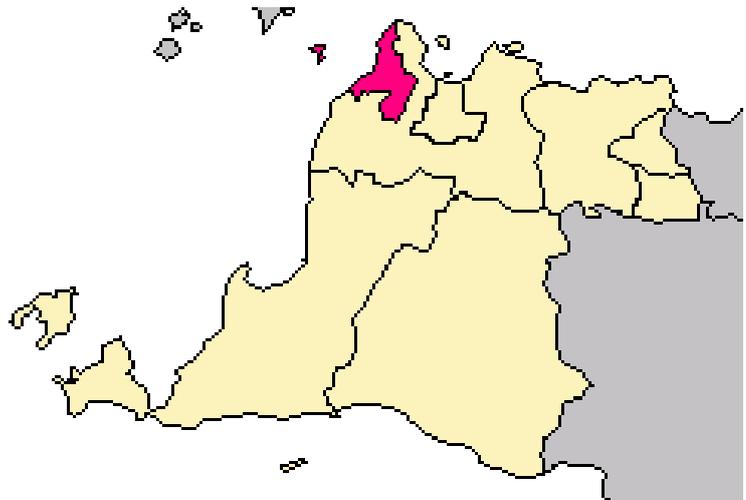
KOTA CILEGON



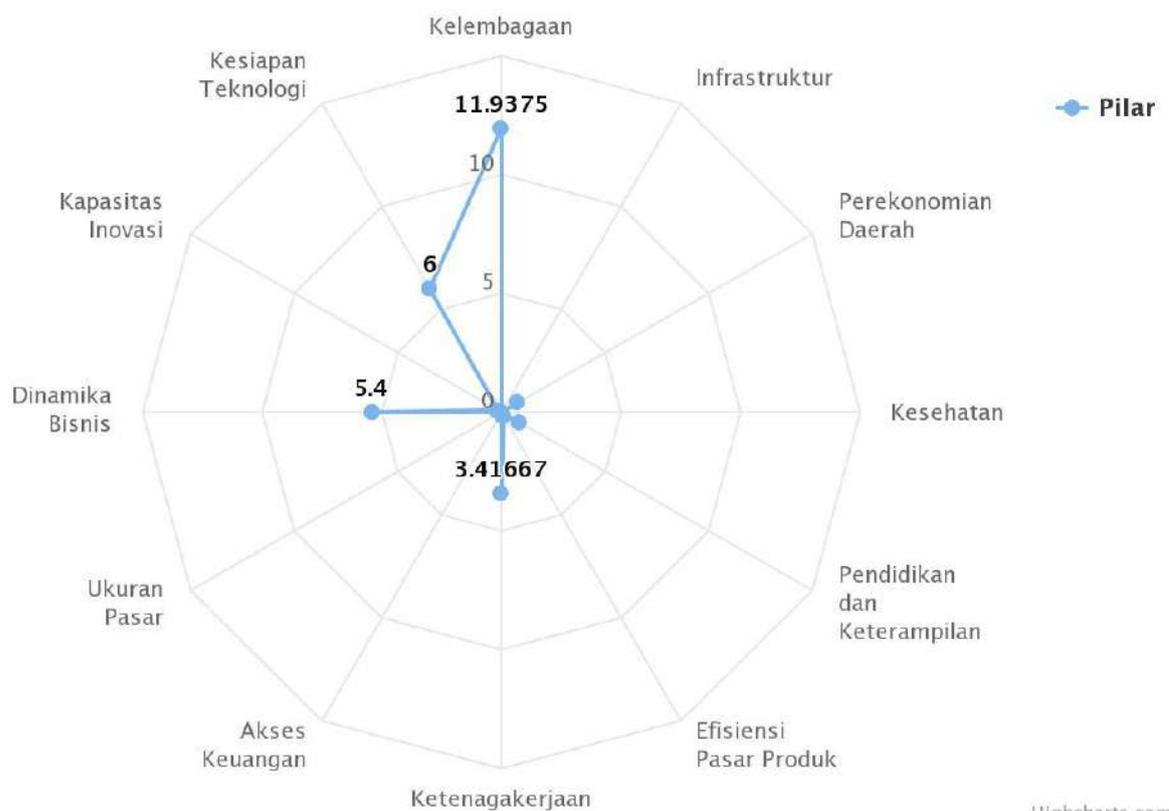
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
1,96870**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Efisiensi Pasar Produk

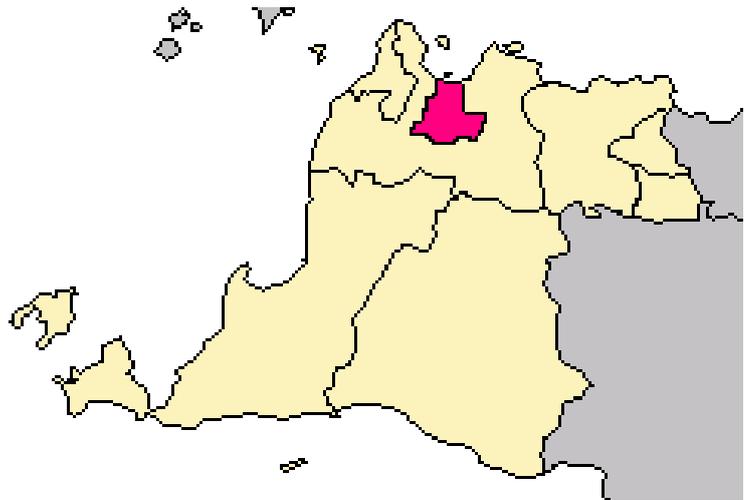
KOTA SERANG



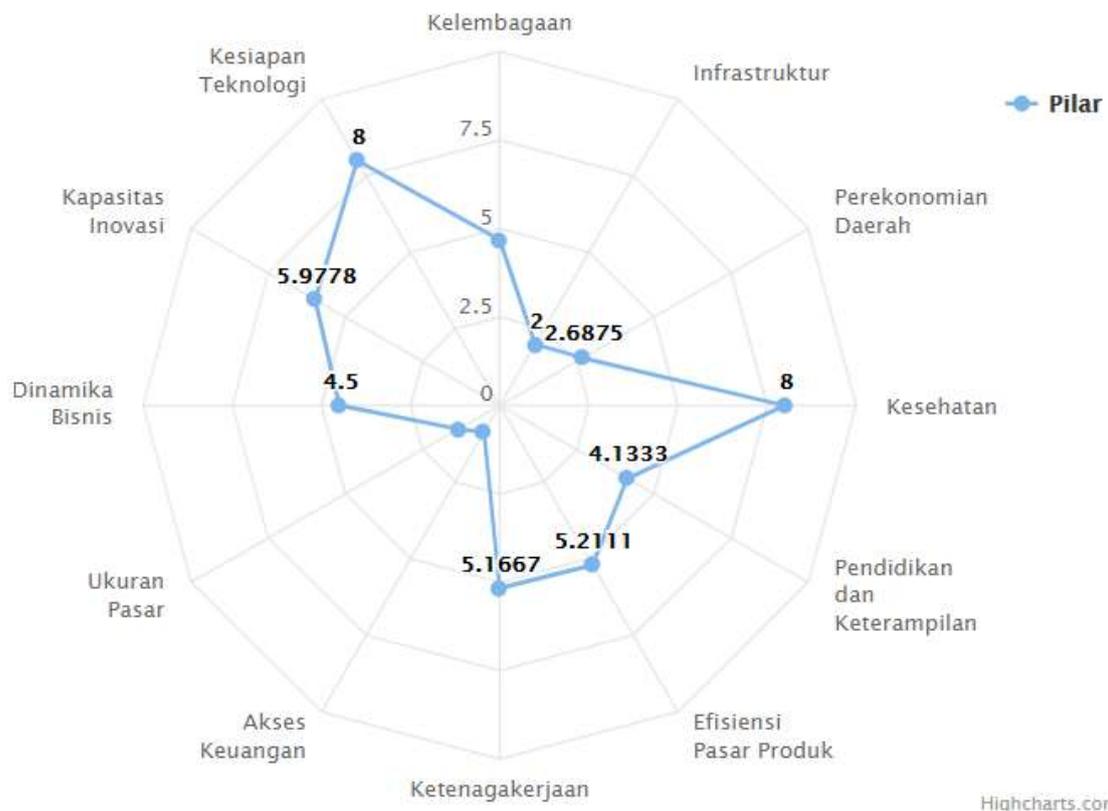
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
6,57340**

**KATEGORI :
TINGGI**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kesehatan dan Kesiapan Teknologi
2. Kondisi paling rendah pada pilar Akses keuangan

KOTA DENPASAR



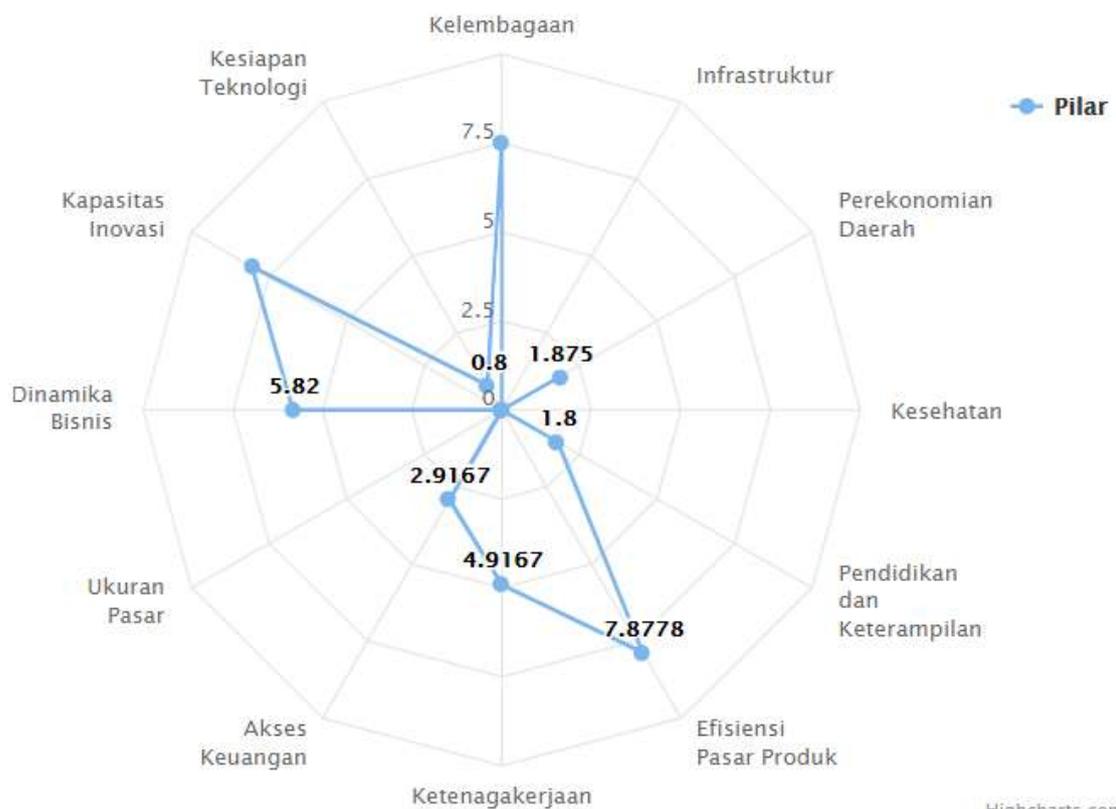
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
2,83670**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kapasitas Inovasi
2. Kondisi paling rendah pada pilar Infrastruktur

KOTA PONTIANAK



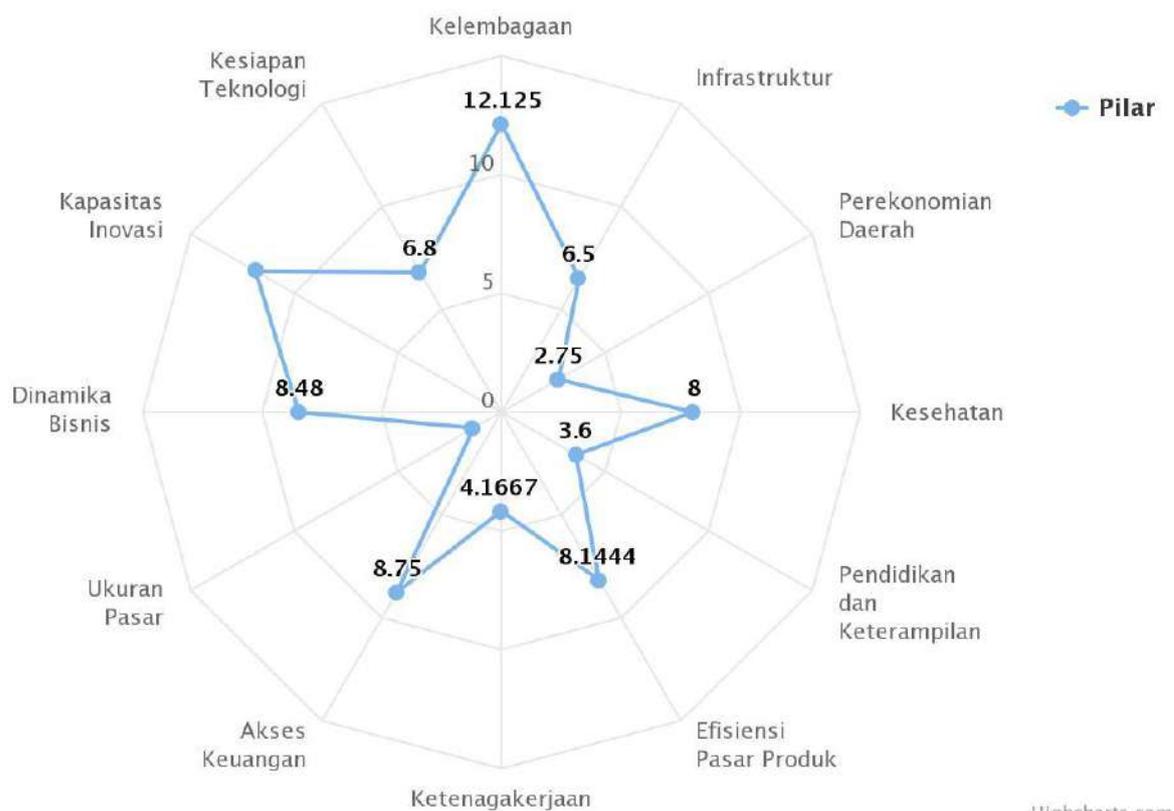
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
6,77140**

**KATEGORI :
TINGGI**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

KOTA PALANGKARAYA



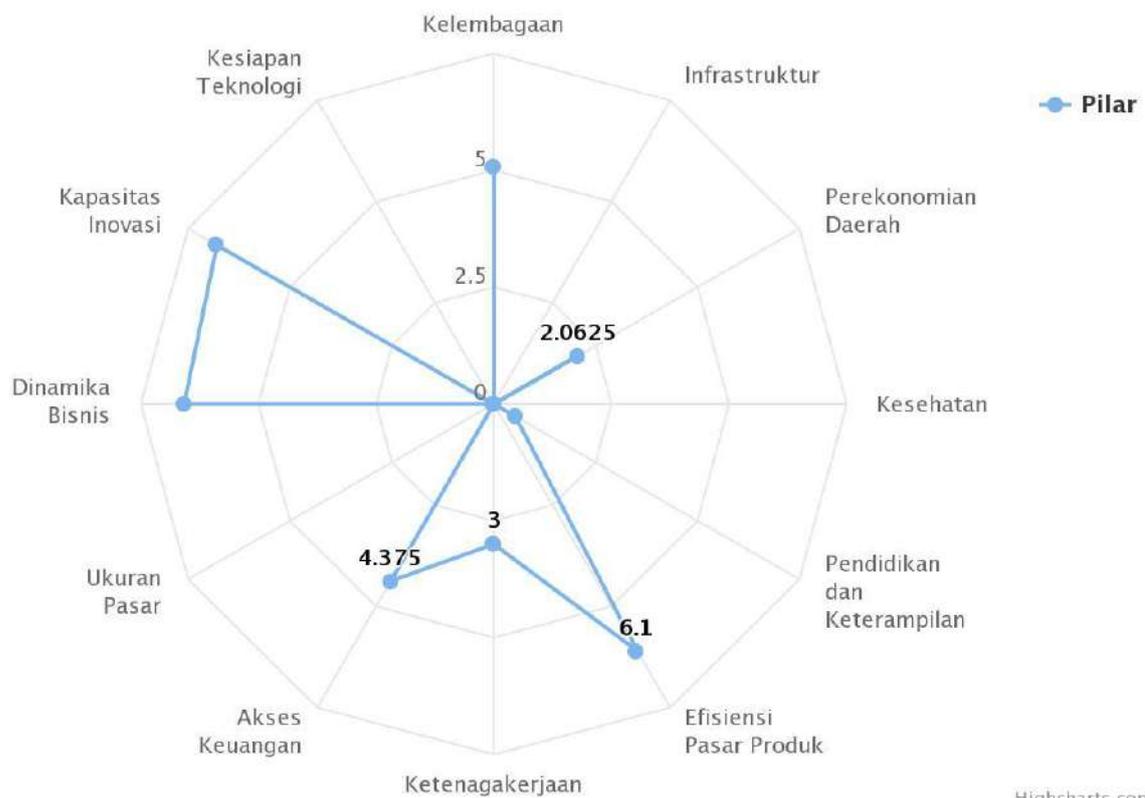
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
6,77140**

**KATEGORI :
TINGGI**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kapasitas Inovasi
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KOTA TARAKAN



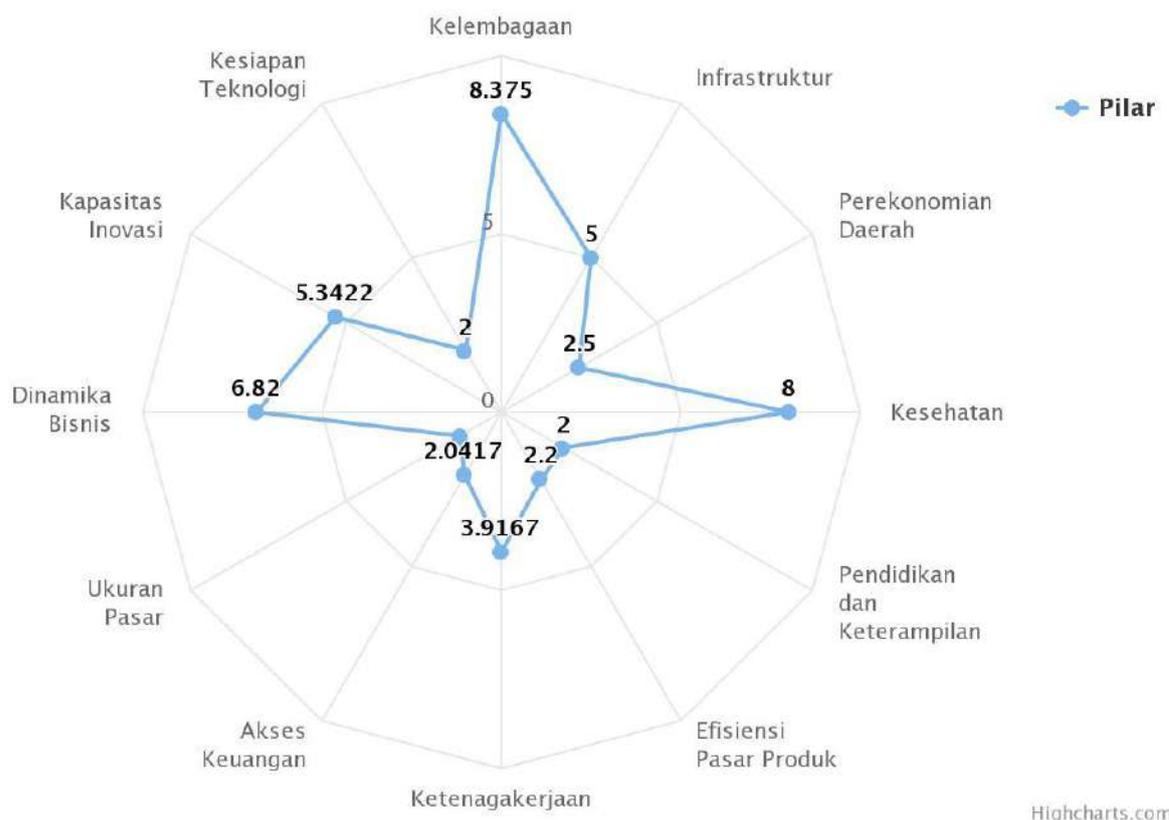
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,44850**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesiapan Teknologi dan Pendidikan dan Ketrampilan

KOTA MANADO



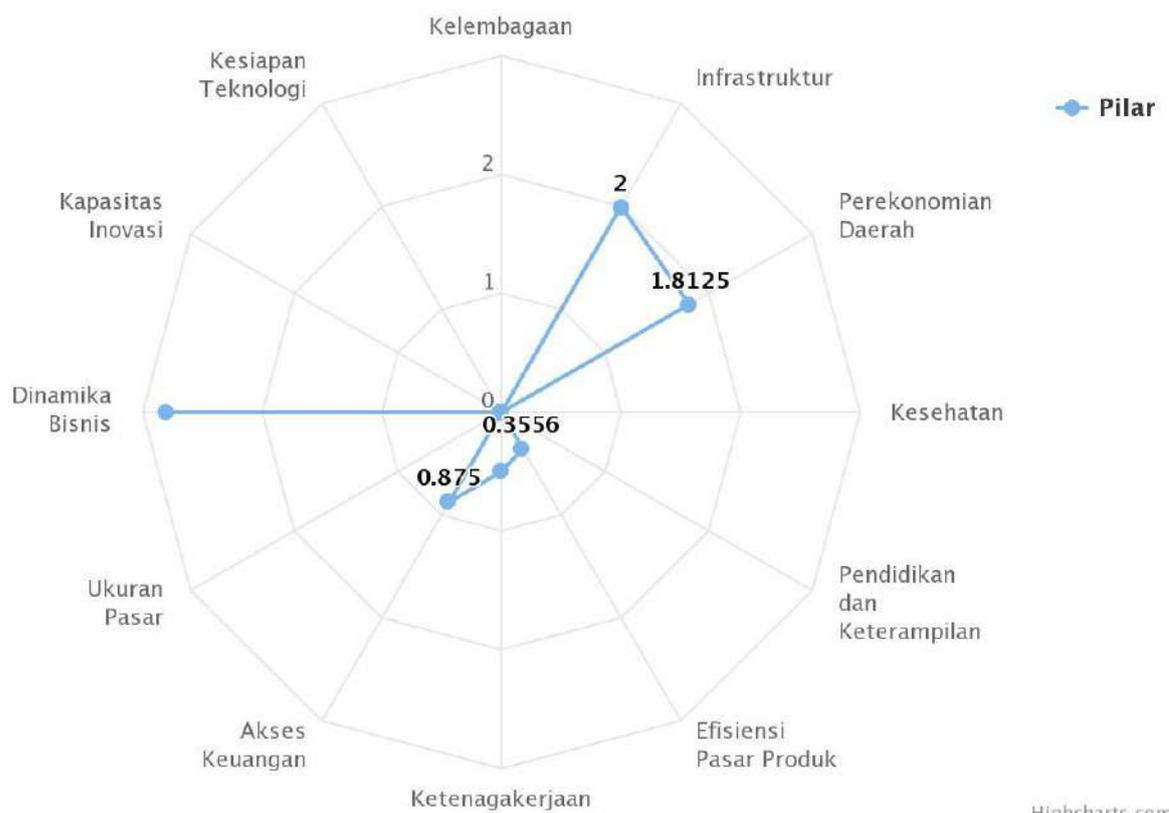
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
0,51050**

**KATEGORI :
RENDAH**



Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Infrastruktur
2. Kondisi paling rendah pada pilar Dinamika Bisnis

KOTA KOTAMOBAGU

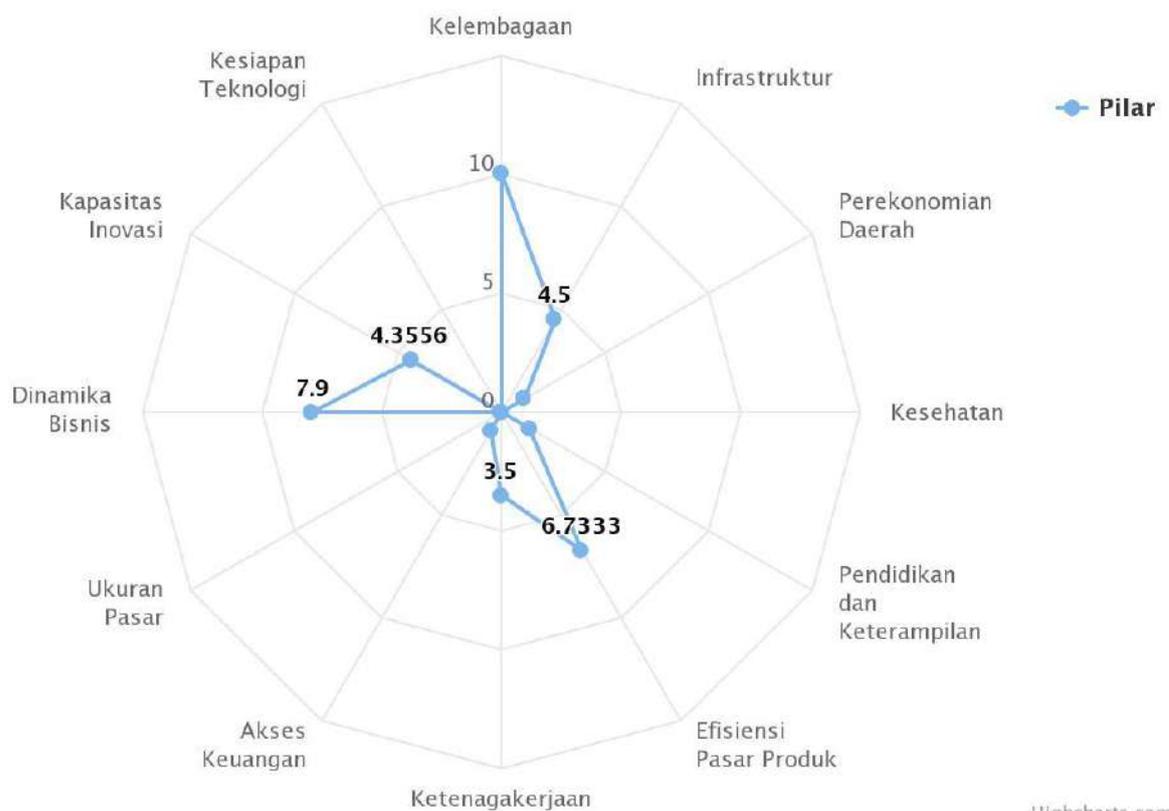


**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
2,62780**

**KATEGORI :
RENDAH**

Score Pilar



Highcharts.com

Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Akses Keuangan

KOTA PARE-PARE



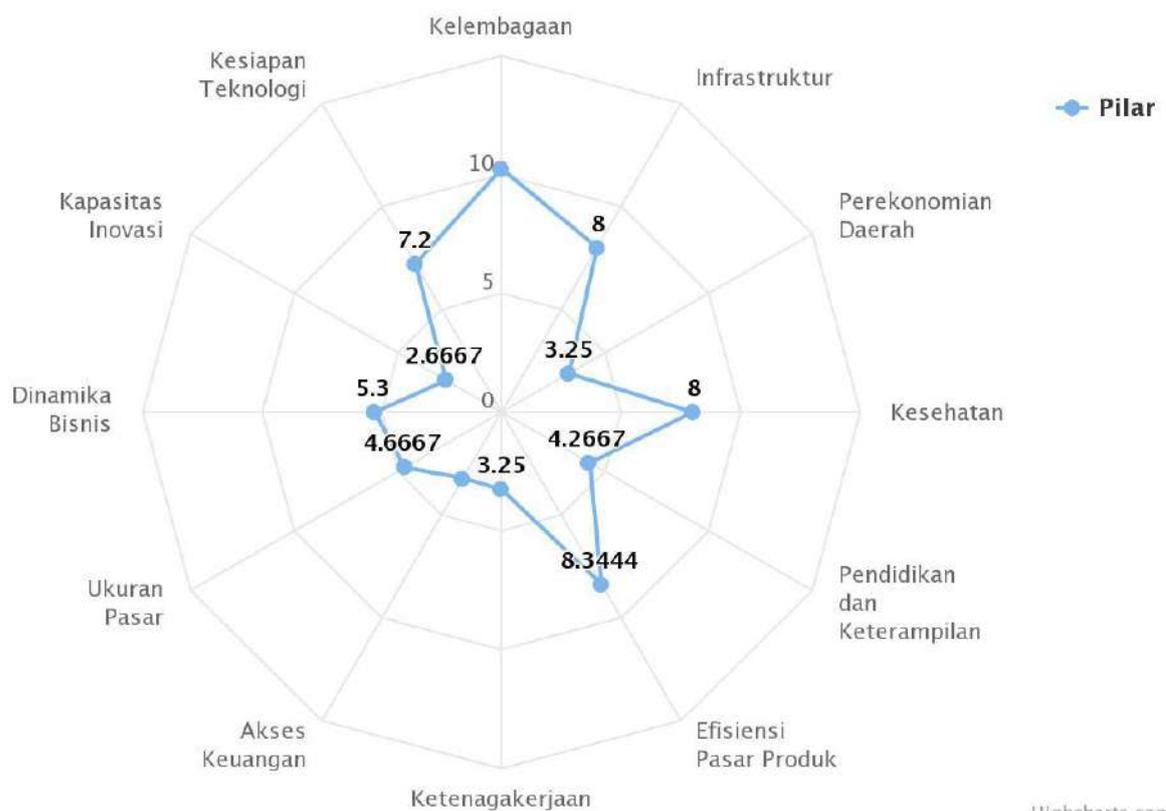
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
5,76570**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kapasitas Inovasi

KOTA PALOPO



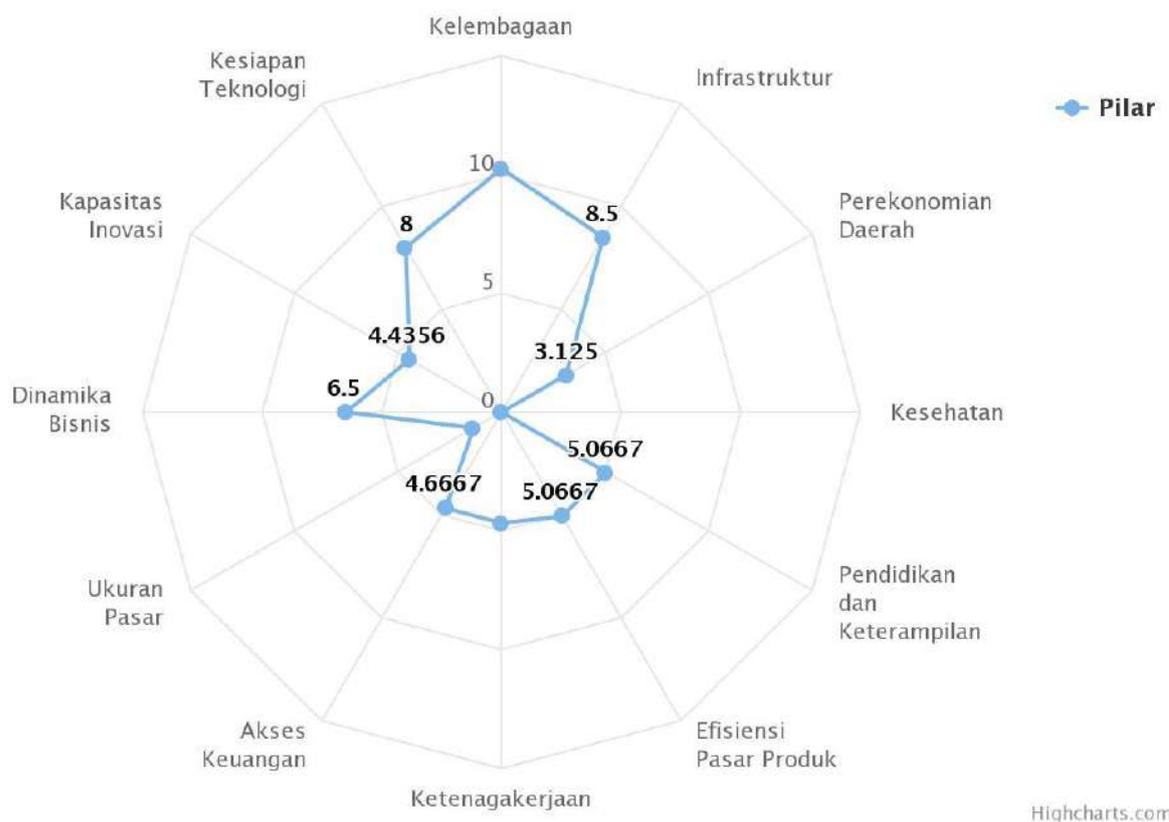
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,47170**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Kesehatan

KOTA TERNATE



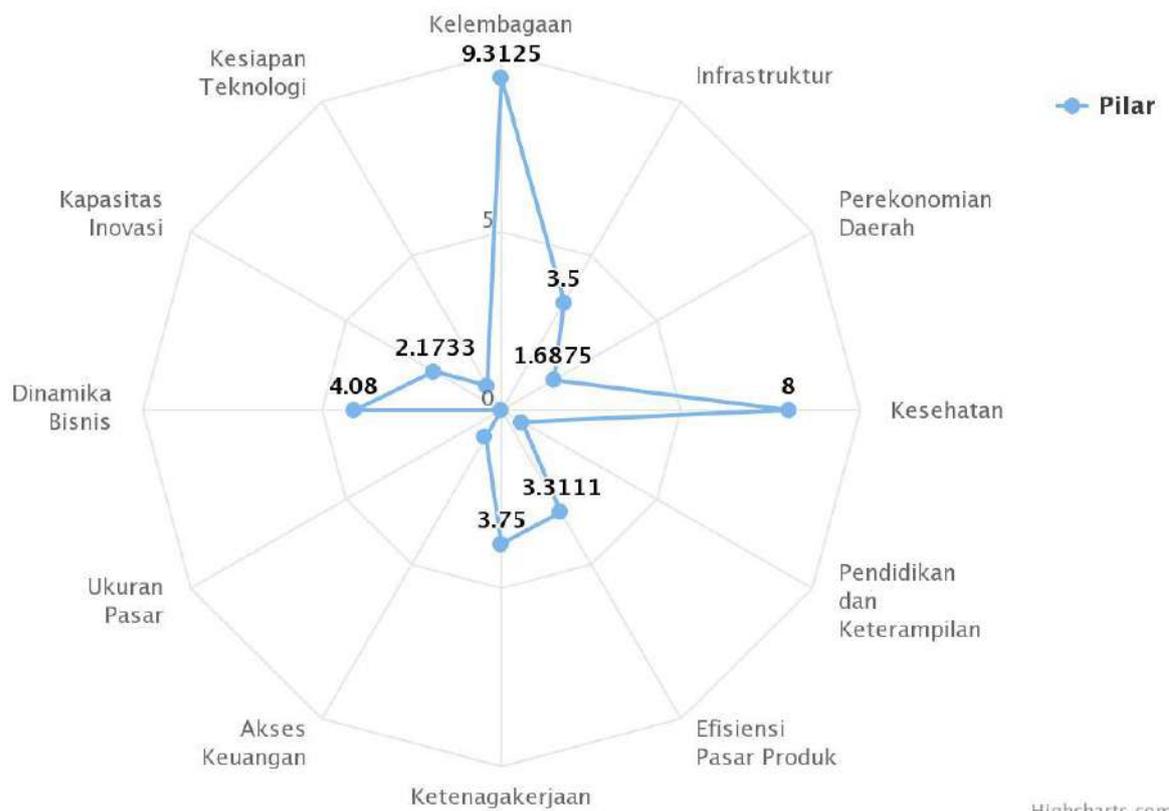
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
3,44290**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Kelembagaan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Efisiensi Pasar Produk

KOTA JAYAPURA



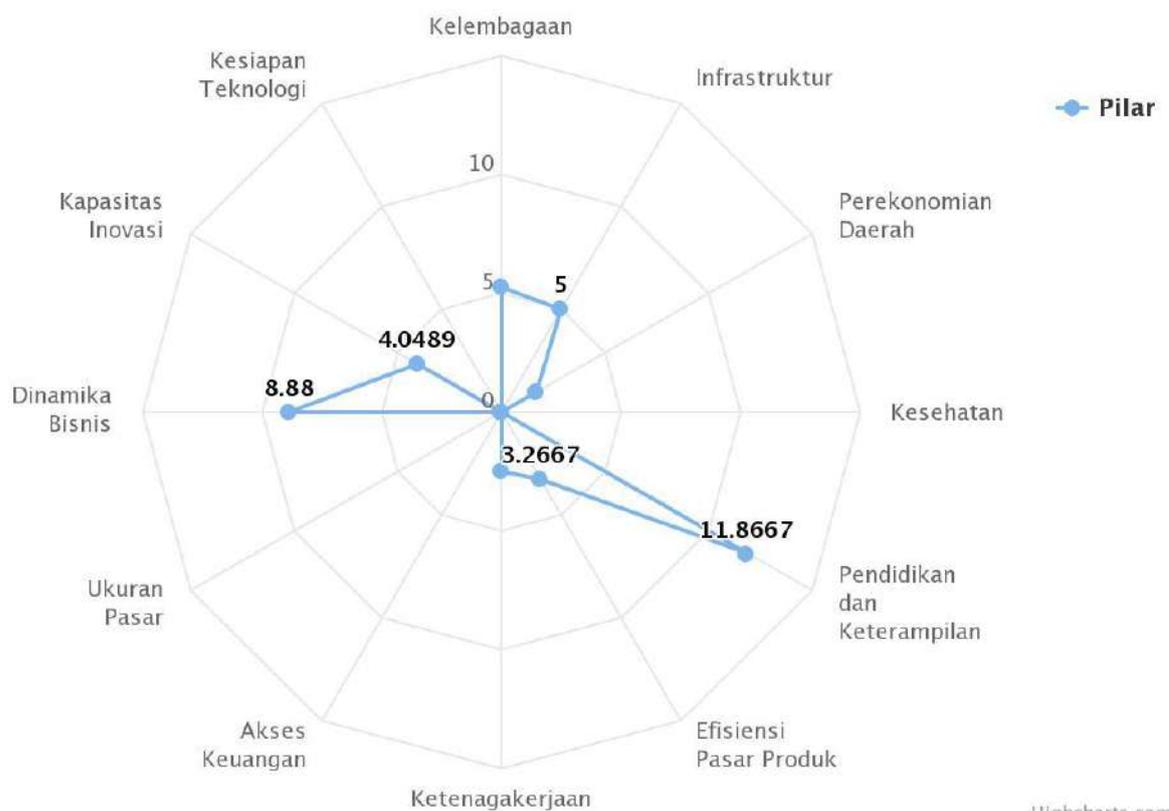
**TAHUN :
2019**

**SKOR/NILAI INDEKS :
4,33595**

**KATEGORI :
SEDANG**



Score Pilar



Keterangan :

1. Kondisi terbaik pada pilar Pendidikan dan Ketrampilan
2. Kondisi paling rendah pada pilar Ukuran Pasar

